

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA



RENCANA KONTINGENSI BENCANA

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

**TAHUN
2025 - 2028**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan perkenanNya dapat diselesaikan penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Utara.

Penanggulangan Bencana merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, media massa, akademisi maupun masyarakat, sehingga semua ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana untuk keselamatan diri, keluarga maupun lingkungan.

Pengalaman terjadinya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang semakin meningkat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di Sumatera Utara yang berdampak adanya korban jiwa, kerugian dan kerusakan serius pada aset dan penghidupan warga terdampak. Oleh karena itu, pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Utara telah membuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Menanggapi kondisi tersebut, dirasa perlu menyusun rencana Kontingensi sebagai pedoman dalam penanganan darurat bencana. Rencana Kontingensi dilengkapi skenario kejadian dan asumsi dampak, untuk mendeskripsikan kondisi yang akan dihadapi dari kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta dampaknya terhadap aspek kependudukan, sosial ekonomi, lingkungan dan sarana prasarana.

Perencanaan Kontingensi telah menjadi salah satu piranti dasar untuk membangun koordinasi dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan yang mengarah pada pengaturan fungsi dan pembagian tugas-tugas saat penanganan darurat bencana serta mobilisasi sumber daya pada saat operasi tanggap darurat.

Rencana Kontingensi ini diharapkan dapat dimanfaatkan, serta diaktivasi jika kondisi kedaruratan benar-benar terjadi, sehingga penanganan darurat bencana menjadi lebih sinergis antar stakeholder, serta dapat lebih efektif dan efisien. Bilamana bencana tidak terjadi, rencana Kontingensi diperbaharui secara berkala agar memberikan manfaat secara optimal.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyusun dokumen rencana Kontingensi ini, sebagai wujud

nyata terbangunnya kemitraan serta membangun komitmen dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Utara serta menjadi pedoman dalam perencanaan Kontingensi di tingkat Kabupaten Kota.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen rencana kontingensi bencana kebakaran hutan dan lahan provinsi Sumatera Utara 2025-2028 yang disusun bersama-sama Organisasi Perangkat Daerah (ODP), instansi vertikal, Kodam I/BB, Komandan Soewondo medan, Komandan Pangkalan Utama TNI AL I Belawan, Organisasi kebencanaan dalam melakukan organisasi penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan , sehingga dapat mengurangi korban dan kerugian.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi Sumatera Utara dalam menyusun dokumen rencana kontingensi merupakan rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan dimana provinsi Sumatera Utara memiliki kerentanan dan risiko tinggi yang mengancam.

Ruang lingkup cakupan luasan ancaman kebakaran hutan dan lahan dalam bencana kebakaran hutan dan lahan ini terdapat 21 kabupaten/kota dari 32 kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara.

Proses Penyusunan

Kegiatan penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan tentang pentingnya rencana kontingensi.
2. Pengumpulan data dan pembaharuan, pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas sekitar penanganan bencana dan lintas administratif.
3. Verifikasi data: analisis data sumberdaya yang ada di bandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
4. Pengumuman rancangan awal rencana kontingensi: penyusunan draf Rencana Kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen Rencana Kontingensi yang telah di sepakati.

Aktivasi Rencana Kontingensi

Aktivasi rencana kontingensi ini di lakukan beberapa saat setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan , dengan kriteria di wilayah Sumatera Utara dan secara nyata berdampak kepada manusia dan mengakibatkan kerugian yaitu ketika asap sudah mengganggu aspek hidup dan penghidupan masyarakat.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

NO.	DEFINISI :	
1	Aktivasi	Mengaktifkan dokumen (rencana kontingensi) sebagai Pedoman / acuan dalam penanganan darurat
2	Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3	Ancaman bencana	Suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana
4	Bahaya	Adalah suatu proses, fenomena atau aktivitas manusia yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak kesehatan lainnya, kerusakan properti, gangguan sosial dan ekonomi serta kerusakan lingkungan
5	Kerentanan	Kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan atau proses yang meningkatkan risiko individu, komunitas, aset atau sistem terhadap dampak bahaya (UNISDR, 2017)
6	Kesiapsiagaan	Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
7	Penanggulangan bencana	Upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi
8	Perencanaan kontingensi	Adalah suatu proses perencanaan situasi darurat bencana pada jenis bahaya tertentu dalam keadaan yang tidak menentu dengan skenario dan tujuan yang disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat dan ditetapkan secara formal.
9	Rencana kontingensi (Renkon)	Dokumen yang disusun melalui suatu proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya tertentu, dalam keadaan yang tidak

NO.	DEFINISI :	
		menentu, dengan skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan,
10	Skenario	Gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
11	Sumberdaya	Segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil, misalnya peralatan, sediaan, waktu, tenaga, uang dan metode.
12	Kaji Cepat	Penilaian yang dilakukan segera setelah ada informasi awal adanya ancaman atau kejadian darurat bencana untuk memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat
13	Risiko Bencana	Potensi kehilangan nyawa, cedera, atau kerusakan atau kerusakan aset yang dapat terjadi pada suatu sistem, masyarakat atau komunitas dalam periode waktu tertentu, ditentukan secara probabilistik sebagai fungsi dari bahaya, paparan, kerentanan dan kapasitas (UNISDR, 2017)
14	Prosedur tetap	Dokumen memuat rincian tugas/peran para pemangku kepentingan dalam penanganan situasi darurat bencana. bentuk dokumen ini meliputi; siapa, melakukan apa, kapan dan bagaimana cara melakukannya beserta alur aktivitasnya
15	Simulasi	Kegiatan latihan dimana pengetahuan maupun keterampilan peserta latihan ditingkatkan melalui latihan yang menggunakan berbagai macam peragaan – dengan situasi dan kondisi yang mendekati sebenarnya.
16	Peringatan dini	serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17	Komando	Kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.
18	Sistem Komando Penanganan	Satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan

NO.	DEFINISI :	
	Darurat Bencana	menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
19	Penanganan Darurat Bencana (Posko)	penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
20	Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana	Institusi yang berperan mengkoordinasikan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana meliputi pos pendamping nasional Penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah.
21	Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana	Institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.
22	Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana	Institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana dan pengungsian.
23	Rencana Operasi	Rencana yang dibuat atau disusun dalam rangka pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana, rencana operasi ini disusun oleh komando operasi tanggap darurat dengan mempertimbangkan rencana Kontingensi dan hasil kaji cepat.
25	Siaga Darurat	keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana dan sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
26	Tanggap Darurat	Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana

NO. DEFINISI :		
27	Kebakaran	adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
28	Kebakaran hutan dan lahan	adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.
29	Karhutla	Kebakaran Hutan dan Lahan
30	Transisi Darurat ke Pemulihan	Adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok masyarakat masih tetap berlangsung.
ISTILAH / DAFTAR SINGKATAN :		
1	BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
2	BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
3	BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	PDB	Penanganan Darurat Bencana
5	PMI	Palang Merah Indonesia
6	Polri	Kepolisian Republik Indonesia
7	SKPDB	Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
8	TNI	Tentara Nasional Indonesia
9	BPS	Badan Pusat Statistik
10	RAPI	Radio Antar Penduduk Indonesia
11	KODIM	Komando Distrik Militer
12	SAR	Search and Rescue (Pencarian dan Pertolongan)
13	SEKDA	Sekretaris Daerah
14	BAPPEDA	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
15	DINKES	Dinas Kesehatan
16	BPKP	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
17	DINSOS	Dinas Sosial
18	DISHUB	Dinas Perhubungan
19	RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
20	SATPOL PP	Satuan Polisi Pamong Praja
21	DAMRI	Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia
22	PDB	Penanganan Darurat Bencana
23	OPDB	Operasi Penanganan Darurat Daerah
24	DSP	Dana Siap Pakai
25	BANSOS	Bantuan Sosial
26	Dana BTT	Dana Belanja Tak Terduga
27	POSKO	Pos Komando
28	OPD	Organisasi Perangkat Daerah
29	Manggala Agni	PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Kebijakan Dan Strategi.....	3
1.3.1 Kebijakan.....	3
1.3.2 Strategi	4
1.4 Maksud Dan Tujuan	5
1.5 Ruang Lingkup.....	5
1.6 Pendekatan, Metode, Dan Tahapan Proses	5
1.7 Umpan Balik.....	6
1.8 Masa Berlaku Dan Pemutakhiran.....	6
1.9 Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi.....	6
 BAB II SITUASI.....	 7
2.1 Karakteristik Bahaya.....	7
2.1.1 Profil Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Utara	7
2.1.2 Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan	8
2.2 Skenario Kejadian.....	12
2.2.1 Skenario Kejadian Kebakaran Hutan Dan Lahan	12
2.3 Asumsi Dampak.....	13
 BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA	 16
3.1 Tugas Pokok.....	16
3.2 Sasaran	17
 BAB IV PELAKSANAAN	 18
4.1 Konsep Operasi Dan Sasaran Tindakan.....	18
4.2 Struktur Organisasi Komando	20
4.3 Fungsi Dan Kegiatan Pokok.....	22
4.4 Tugas-Tugas Bidang.....	23
4.5 Instruksi Koordinasi	35

BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK	37
5.1 Administrasi.....	37
5.2 Logistik.....	37
BAB VI PENGENDALIAN.....	39
6.1 Komando	39
6.1.1 Pos Komando.....	39
6.1.2 Pos Lapangan.....	39
6.1.3 Pos Pendukung.....	40
6.1.4 Pos Pendamping	41
6.2 Kendali.....	42
6.3 Koordinasi	42
6.4 Komunikasi	44
6.5 Informasi	45
BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT	46
7.1 Komitmen Parapihak Dalam Penanganan Kedaruratan.....	46
7.2 Penyiapan Kesiapsiagaan	46
Lampiran 1 Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat ...	48
Lampiran 2 Proyeksi Wilayah Dan Penduduk Terdampak	51
Lampiran 3 Susunan Pelaksana Tugas	53
Lampiran 4 Jaring Komunikasi	75
Lampiran 5 Estimasi Ketersediaan Dan Kebutuhan Sumberdaya	78
Lampiran 6 Album Peta	95
Lampiran 7 Mata Rantai Peringatan Dini.....	100
Lampiran 8 Rencana Evakuasi	103
Lampiran 9 Sop/Protap Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan	107
Lampiran 10 Lembar Komitmen.....	128
Lampiran 11 Lembar Berita Acara Penyusunan	132
Lampiran 12 Profil Lembaga / Organisasi.....	134

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Utara.....	8
Tabel 4.1	Konsep Operasi Penanganan Darurat Bencana Kebakaran hutan dan lahan Provinsi Sumatera Uatra.	18
Tabel 4.2	Rencana Tindakan (Sasaran Tindakan).....	19
Tabel 4.3	Tugas Bidang Penanganan Darurat Bencana Provinsi Sumatera Utara	24
Tabel 6.1	Pos Lapangan	39
Tabel 6.2	Lokasi Pos Pendukung	40
Tabel 6.3	Tugas Dan Fungsi Pos Pendukung.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Utara.....	10
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran hutan dan lahan	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Menurut KRB Provinsi Sumatera Utara 2022-2026, indeks risiko bencana Karhutla adalah tinggi. Sepanjang tahun 2022 terdapat kejadian Karhutla sebanyak 180 kali yang tersebar pada daerah terdampak di Kabupaten Dairi, Karo, Samosir, Humbahas, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, Sibolga, Tapteng, Tapsel, Mandailing Natal, Padang Lawas, Paluta, Labusel, Labuhan Batu, Toba, Simalungun, Asahan, Serdang Berdagai, Binjai, Deli Serdang, Langkat dan Labuhan Batu Utara.

Sejarah kebencanaan di Provinsi Sumatera Utara. Khususnya kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) memiliki frekuensi kejadian yang cukup tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir. Demi memastikan perlindungan warga dari bahaya (bencana) maka Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar. Permendagri tersebut menegaskan perencanaan Kontingensi sebagai kewajiban dalam standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan Permendagri 101/2018 diatur dan dijelaskan lebih rinci dalam Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020. Permendagri ini menetapkan nomenklatur perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Didalamnya tegas menyatakan perencanaan Kontingensi merupakan urusan wajib pemerintah kabupaten/kota dan diakomodir dalam perencanaan pembangunan dengan kode rekening pembiayaan khusus.

Pedoman perencanaan Kontingensi 5.0 merupakan pembaharuan pedoman yang ada dengan mempertimbangkan perkembangan situasi mutakhir, terutama :

- Peningkatan kompleksitas karakteristik bahaya dan penanganan kedaruratannya;

- Peningkatan risiko akibat pandemi dan atau endemi;
- Perkembangan pola pengendalian penanggulangan kedaruratan bencana.

Rencana Kontingensi (Renkon) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) merupakan proses identifikasi dan penyusunan rencana kedepan yang kemungkinan besar bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) akan terjadi, namun juga belum tentu terjadi. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta membangun komitmen bersama antar pemangku kepentingan ketika terjadi Siaga Darurat dan Tanggap Darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tingkat Provinsi Sumatera Utara.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Kebakaran hutan dan lahan berdasarkan pada landasan hukum yang berlaku di tingkat Nasional dan Provinsi. Adapun landasan operasional hukum yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Badan Penanggulangan Nasional Penanggulangan Bencana No. 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Rencana Kontingensi Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 46).

1.3 Kebijakan Dan Strategi

1.3.1 Kebijakan

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Menetapkan status darurat bencana dalam waktu paling lambat 1 x 12 jam dan dapat diperpanjang;

2. Membentuk komando penanganan darurat bencana;
3. Menyusun rencana operasi dan penanganan tanggap darurat bencana yang terkoordinir sesuai dengan cluster yang ada;
4. Pencarian dan Penyelamatan Korban;
5. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar;
6. Perlindungan keamanan serta kenyamanan pada kelompok rentan terdampak bencana (ibu hamil, anak kecil, orang tua dan disabilitas);
7. Memastikan fasilitas layanan kesehatan masih dapat berjalan;
8. Pemulihan dini sarana prasarana serta pelayanan publik;
9. Terselenggaranya penanganan darurat yang efektif efisien dan inklusif;
10. Memastikan pencegahan dan penanganan Kebakaran hutan dan lahan .

1.3.2 Strategi

Strategi penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan umum bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai efektivitas kebijakan. Strategi- strategi tersebut adalah;

1. Menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melaksanakan Kaji Cepat (*Speed Assesment*)
2. Pembentukan dan mengaktifkan pos komando penanganan darurat bencana Provinsi Sumatera Utara yang terintegrasi dengan lintas *sector* atau *cluster* tanggap darurat.
3. Memobilisasi unsur dinas terkait TNI, POLRI, masyarakat dan dunia usaha atau *cluster* tanggap darurat untuk mendukung terlaksananya operasi tanggap darurat bencana.
4. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak antara lain Menyediakan tempat penampungan sementara bagi korban bencana, dapur umum, air bersih, layanan kesehatan dan sanitasi yang inklusif dengan mengedepankan prinsip partisipatif serta kearifan lokal.
5. Melibatkan seluruh sector terkait (*cluster*) dalam penanggulangan darurat bencana, dengan tetap memperhatikan keragaman dan ramah terhadap kelompok rentan.
6. Melakukan penilaian kerusakan serta tafsiran kebutuhan untuk Tanggap Darurat Bencana dan pemulihan darurat bencana.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Dokumen rencana Kontingensi ini disusun sebagai landasan strategi, operasional, dan pedoman dalam penanganan darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Sumatera Utara dan sebagai dasar untuk pengeralahan sumberdaya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan disusunnya Dokumen rencana Kontingensi ialah agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki dokumen Rencana Kontingensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan Rencana Operasi.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana Kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya darurat Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Pendekatan, Metode, Dan Tahapan Proses

Rencana Kontingensi ini disepakati para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana tentang pentingnya rencana Kontingensi.
2. Pengumpulan data dan pembaruan: Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif.
3. Verifikasi data: Analisa data sumberdaya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
4. Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati dalam *Focus Group Discussion* (FGD) meliputi penilaian bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, merumuskan tugas pokok dan fungsi tiap *stakeholder*, menginventarisasi sumberdaya, peralatan dan logistik, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut.

5. Penandatanganan komitmen, hasil rumusan rencana Kontingensi: Penyebaran/ diseminasi dokumen rencana Kontingensi kepada pelaku penanggulangan bencana (multi stake holder).

1.7 Umpan Balik

Untuk memastikan rencana kontingensi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru maka diperlukan masukan-masukan terutama terkait data, sehingga perlu dilakukan dengan *Focus Group Discussion* (FGD).

1.8 Masa Berlaku Dan Pemutakhiran

Dokumen rencana Kontingensi Kebakaran hutan dan lahan Provinsi Sumatera Utara ini berlaku selama 3 (tiga) tahun. Agar rencana Kontingensi sesuai dengan situasi terbaru seperti misalnya: perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumberdaya maka dapat dilakukan kaji ulang atau *update* sesuai kebutuhan.

1.9 Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi

Rencana Kontingensi menjadi dasar dalam menyusun rencana operasi. Aktivasi rencana Kontingensi dilakukan setelah mendapatkan data dan analisis Kaji Cepat dari Tim Reaksi Cepat (TRC), selanjutnya rencana Kontingensi diaktivasi setelah ada penetapan status darurat bencana kebakaran hutan dan lahan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan telah ditetapkan serta diaktifasinya Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana oleh Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara. Rencana Kontingensi diaktivasi ditetapkan melalui rapat penyusunan rencana operasi yang dipimpin oleh Komandan Tanggap Darurat Bencana.

BAB II SITUASI

2.1 Karakteristik Bahaya

2.1.1 Profil Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Utara

Faktor utama penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah akibat ulah manusia, baik yang sengaja melakukan pembakaran ataupun akibat kelalaian dalam menggunakan api. Hal ini didukung oleh kondisi-kondisi tertentu yang membuat rawan terjadinya kebakaran, seperti El Nino yang didukung oleh kondisi lingkungan yang terdegradasi dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penyebab kebakaran oleh manusia dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh api yang berasal dari pembakaran yang disengaja tetapi tidak dikendalikan pada saat kegiatan, misalnya dalam pembukaan penyiapan lahan pertanian oleh masyarakat ini terjadi pada beberapa wilayah dengan alasan membersihkan lahan dengan cara membakar itu lebih mudah dan praktis
2. Kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari aktivitas manusia selama pemanfaatan sumber daya alam, misalnya pembakaran semak belukar yang menghalangi akses mereka dalam pemanfaatan sumber daya alam serta pembuatan api untuk memasak oleh para penebang liar, pencari ikan di dalam hutan. Karena kelalaian manusia dengan meninggalkan puntung rokok sembarangan atau bekas pembakaran sampah yang dibiarkan begitu saja. Untuk di wilayah gunung beberapa faktor kebakaran juga dipicu oleh kelalaian pendaki gunung/wisatawan lain yang meninggalkan bekas api unggun atau puntung rokok

Kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan tertinggi terjadi pada musim kemarau dimana curah hujan sangat rendah dan intensitas panas matahari tinggi. Kondisi ini pada umumnya terjadi antara bulan Juni hingga Oktober dan kadang pula terjadi pada bulan Mei sampai November. Kerawanan kebakaran semakin tinggi jika ditemukan adanya gejala El Nino.

Dampak kebakaran hutan dan lahan berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat, sebagai berikut:

1. Rusaknya siklus hidrologi (menurunkan kemampuan intersepsi air hujan ke dalam tanah, mengurangi transpirasi vegetasi, menurunkan kelembaban tanah, dan meningkatkan jumlah air yang mengalir di permukaan (surface run off);
2. Hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada hutan (berladang, beternak, berburu/menangkap ikan);
3. Penurunan produksi kayu, terganggunya kegiatan transportasi, dan meningkatnya pengeluaran akibat biaya untuk pemadaman.

2.1.2 Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut/-II/2009 tentang Pengendalian Hutan). Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Utara, potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut.

Tabel 2.1 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Utara

NO.	KABUPATEN/KOTA	Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	TAPANULI TENGAH	148.700	37.299	3.744	189.742	SEDANG
2	TAPANULI UTARA	291.502	22.493	6.709	320.704	RENDAH
3	TAPANULI SELATAN	383.274	75.662	23.227	482.163	SEDANG
4	NIAS	122.346	41.123	0	163.469	SEDANG
5	LANGKAT	87.088	229.848	21.459	338.395	SEDANG
6	KARO	149.925	16.719	863	167.507	RENDAH
7	DELI SERDANG	62.998	63.608	2.844	129.451	SEDANG
8	SIMALUNGUN	208.009	155.094	12.337	375.440	SEDANG
9	ASAHAN	68.003	205.272	49.078	322.354	TINGGI
10	LABUHANBATU	17.517	62.852	109.240	189.610	TINGGI
11	DAIRI	169.819	7.794	396	178.009	RENDAH
12	TOBA SAMOSIR	188.932	17.446	3.964	210.342	RENDAH

NO.	KABUPATEN/KOTA	Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
13	MANDAILING NATAL	298.568	137.040	45.770	481.378	SEDANG
14	NIAS SELATAN	117.244	38.815	3.178	159.237	TINGGI
15	PAKPAK BHARAT	100.144	2.643	63	102.850	RENDAH
16	HUMBANG HASUNDUTAN	175.992	21.205	7.535	204.732	SEDANG
17	SAMOSIR	114.462	58.604	11.776	184.841	SEDANG
18	SERDANG BEDAGAI	20.980	108.307	4.973	134.261	SEDANG
19	BATU BARA	13.437	40.652	3.702	57.791	SEDANG
20	PADANG LAWAS UTARA	130.471	147.722	86.893	365.086	TINGGI
21	PADANG LAWAS	104.930	169.897	71.934	346.761	TINGGI
22	LABUHANBATU SELATAN	9.281	104.425	225.326	339.032	TINGGI
23	LABUHANBATU UTARA	76.489	156.300	77.646	310.435	TINGGI
24	NIAS UTARA	64.886	43.439	1.731	110.056	SEDANG
25	NIAS BARAT	33.510	7.427	351	41.289	SEDANG
B	Kota					
1	KOTA MEDAN	466	1.345	0	1.811	SEDANG
2	KOTA PEMATANGSIANTAR	1.367	0	0	1.367	RENDAH
3	KOTA SIBOLGA	1.434	143	0	1.577	SEDANG
4	KOTA TANJUNG BALAI	2.750	1.245	0	3.995	SEDANG
5	KOTA BINJAI	482	1.315	0	1.797	SEDANG
6	KOTA TEBING TINGGI	60	137	0	197	SEDANG
7	KOTA PADANG SIDEMPUAN	9.055	106	0	9.161	RENDAH
8	KOTA GUNUNGSITOLI	21.294	464	0	21.758	RENDAH
PROVINSI SUMATERA UTARA		3.195.413	1.976.442	774.741	5.946.595	TINGGI

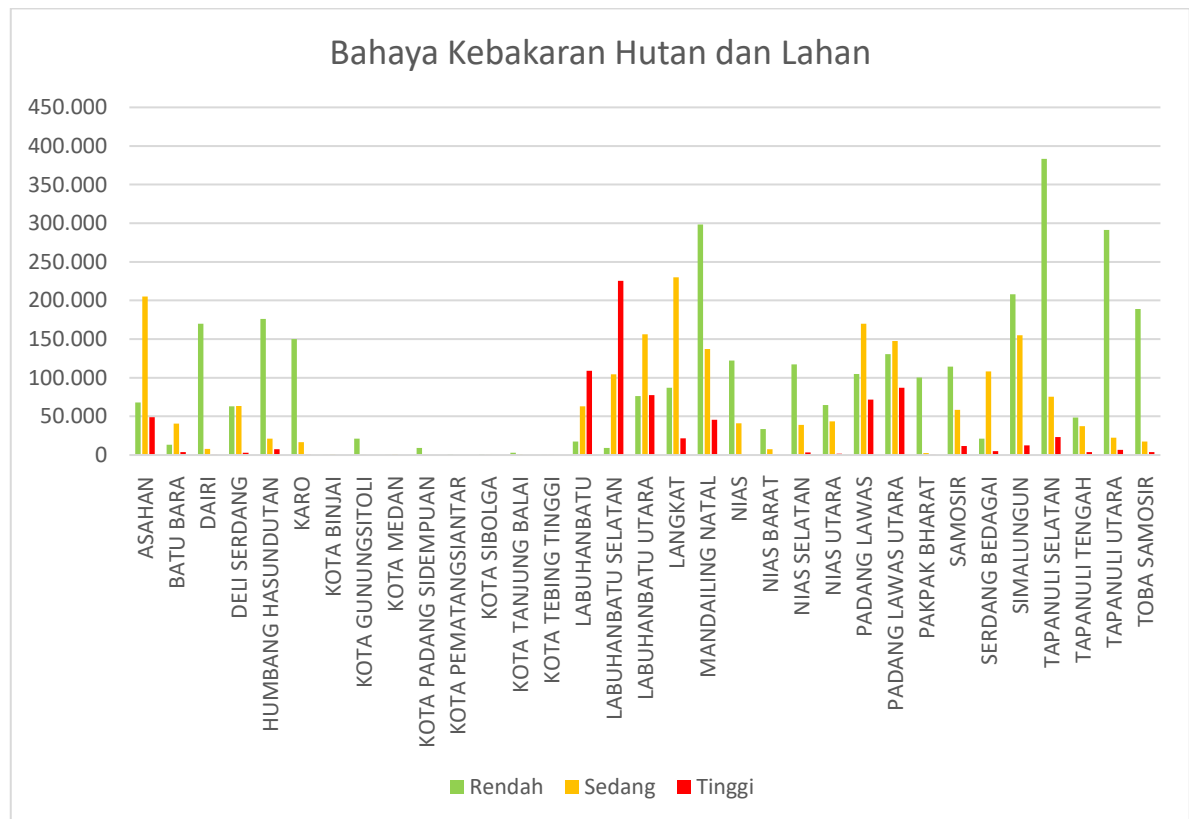
Sumber : KRB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 – 2026

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Utara ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Sumatera Utara ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan.

Potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan adalah 5.946.595 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu

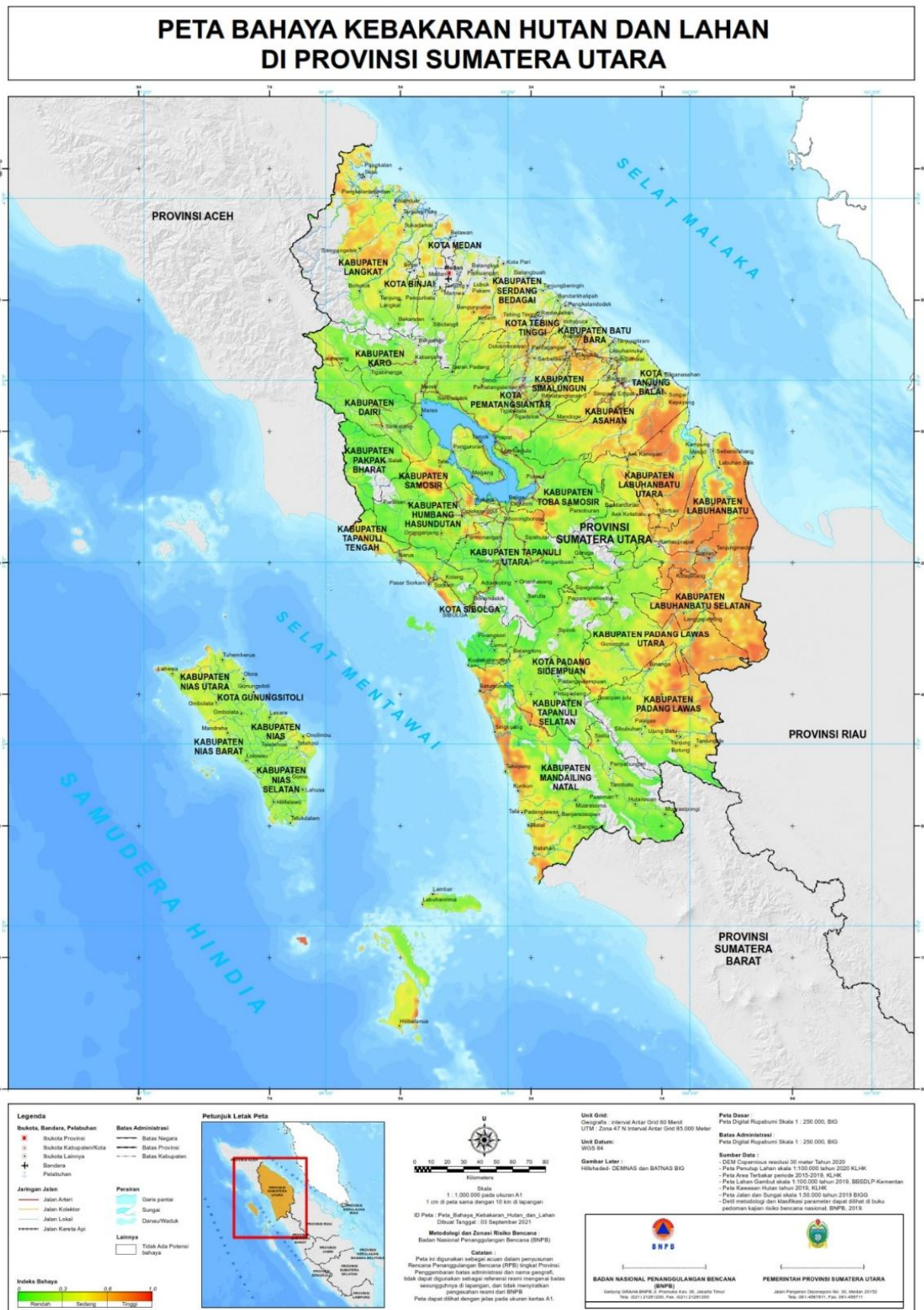
luas bahaya dengan kelas rendah adalah 3.195.413 Ha, kelas sedang seluas 1.976.442 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas tinggi adalah seluas 774.741 Ha.

Gambar 2.1 Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Utara



Pada grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Utara untuk kabupaten/kota terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Grafik di atas juga menunjukkan bahwa Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki luas tertinggi untuk bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas rendah seluas 383.274 Ha. Sedangkan Kabupaten Langkat memiliki luas tertinggi pada kelas sedang seluas 229.848 Ha. Sementara itu untuk kelas tinggi, daerah yang memiliki luas bahaya kebakaran hutan dan lahan tertinggi adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni seluas 225.326 Ha.

Peta 2.1 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Sumatera Utara



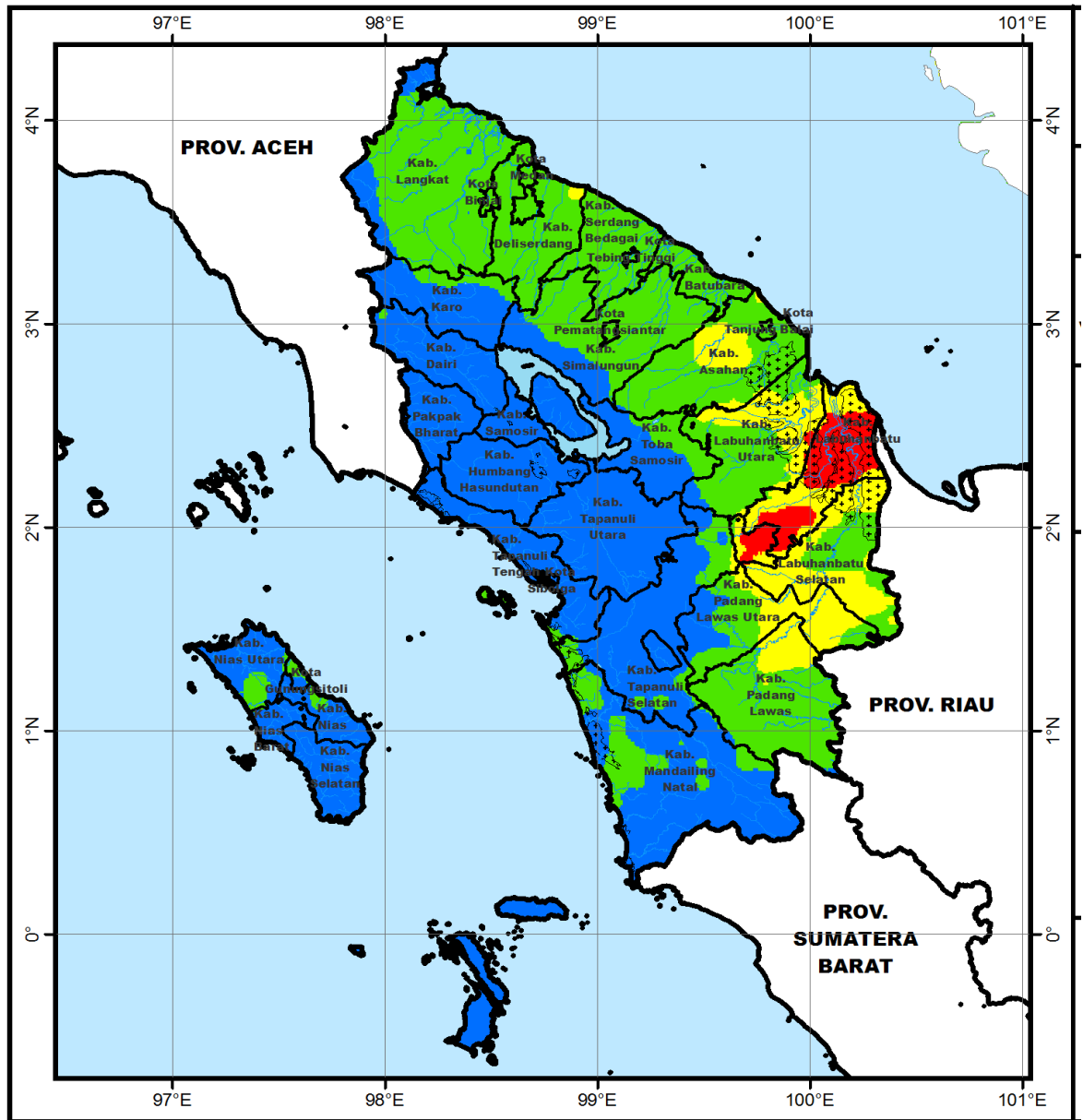
2.2 Skenario Kejadian

Pada bab ini memuat tentang bahaya primer dan bahaya sekunder, dimana skenario ini dikembangkan dengan menggunakan perkiraan skenario yang didasarkan dari data dan analisis BMKG Wilayah-I Medan.

Adapun skenario ini dibentuk untuk menentukan langkah yang efektif dan efisien penanganan kedaruratan bencana, dimana gambaran skenario kejadian dan asumsi dampak bencana kebakaran hutan dan lahan yang kemungkinan terjadi di bagian selatan Provinsi Sumatera Utara. Untuk lebih jelas terkait skenario yang dibentuk dapat dilihat pada penjelasan berikut.

2.2.1 Skenario Kejadian Kebakaran Hutan Dan Lahan

ASUMSI SKENARIO KEJADIAN	
ASUMSI WAKTU KEJADIAN	Pada Sabtu (10/12/2023) pukul 01.40 WIB
LOKASI, DURASI, INTENSITAS, ANCAMAN LANJUTAN, dll	Lokasi di Perbatasan Kabupaten Labuhan Batu dan Labuhanbatu Selatan Tim dari Provinsi akan turun melakukan pemadaman apabila Firespot berlangsung di daerah yang sama minimal 1 minggu dan/atau Gubernur selaku Dansatgas memerintahkan untuk melaksanakan pemadaman. <i>(Dilihat pada peta dibawah)</i>
CAKUPAN WILAYAH TERDAMPAK	Luas Lahan yang terbakar $\pm$ 1.000 Ha Luas lahan yang terdampak $\pm$ 7.000 Ha Memberikan dampak pada daerah/kawasan sekitar kejadian : Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara Padang Lawas Utara, Padang Lawas dan perbatasan dengan Provinsi Riau.
BAHAYA PRIMER	Api dan Asap
BAHAYA SEKUNDER	- Penurunan kualitas kesehatan - Mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi - Penurunan jarak pandang sehingga mengganggu transportasi darat, laut, dan udara - Penurunan kunjungan pariwisata - Terganggunya kualitas lingkungan hidup



2.3 Asumsi Dampak

ASUMSI DAMPAK KEJADIAN	
1. ASPEK KEPENDUDUKAN	Asumsi jumlah penduduk 390.954 jiwa (2023) – 1% terpapar dampak atau 3.900 jiwa terdampak. Terdiri dari (<i>Persentase terhadap jiwa terpapar</i>) : Korban jiwa : 0% Sakit Ringan : 53% Sakit Sedang : 34% Sakit Berat : 13%

	<i>Catatan:</i> 1. Asumsi dapat mengacu pada kejadian bencana yang pernah terjadi. 2. Mempertimbangkan waktu kejadian (pagi/siang/malam), dll.
2. ASPEK FISIK	Kerusakan lahan ± 1.000 hektar
3. ASPEK EKONOMI	- Kegiatan ekonomi terganggu - Kehilangan dari Sektor Peternakan. (Jumlah dan Jenis ternak yang terdampak akibat bencana) - Kehilangan dari Sektor Pertanian/ Perkebunan • Penurunan kualitas dan kuantitas hasil perkebunan • Terganggunya pasokan pupuk, bibit dll • Terganggunya distribusi hasil pertanian • Terganggunya harga komoditi pertanian/perkebunan • Terganggunya penghasilan/Pendapatan Petani - Sektor perindustrian. Penurunan pendapatan pada industri besar, menengah, kecil (home industry) - Sektor Pariwisata. • Penurunan pendapatan pada sektor perhotelan, restaurant, tempat hiburan - Sektor transportasi umum. • Meningkatnya risiko kecelakaan. • Penurunan pendapatan perusahaan jasa transportasi dan ekspedisi. • Pasokan barang terhambat mengakibatkan fluktuasi/kenaikan harga.
4. ASPEK LINGKUNGAN	- Air: Infrastruktur sumber/kanal air rusak akibat terbakar. Kualitas air bersih terganggu akibat jerebu. - Tanah/Lahan: Terjadinya subsiden dan penurunan tinggi muka air tanah di lahan gambut.

	- Udara: Menurunnya kualitas udara karena peningkatan gas, partikel, debu dan asap.
5. ASPEK PELAYANAN PEMERINTAHAN	a. Pelayanan pemerintahan terganggu akibat ASN/THL dengan kondisi tertentu (Ibu hamil dan pengidap penyakit kronis lainnya) diliburkan selama 2 minggu pertama. b. Sekolah diliburkan selama 2 minggu karena kualitas udara tidak sehat hingga berbahaya

Sumber : Analisis Skenario BMKG Wilayah I Medan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

3.1 Tugas Pokok

Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran hutan dan lahan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Operasi Penanganan Darurat Bencana selama 30 hari dengan tujuan menjalankan tugas kemanusiaan dan memulihkan segera dampak yang ditimbulkan. Waktu tersebut dapat lebih singkat atau diperpanjang sesuai dengan kondisi yang ada, dengan memprioritaskan efektivitas dan keterpaduan kebijakan dan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, dan mobilisasi sumberdaya serta upaya pencegahan dan penanganan Kebakaran hutan dan lahan dengan asas dan prinsip penanggulangan bencana.

Adapun Tugas Pokok Dan Fungsi Pokok Organisasi Komando Penanggulangan Darurat Bencana sebagaimana Hasil dari Focus Group Discussion (FGD) I yaitu dijabarkan dalam **Lampiran 3** Susunan Pelaksana Tugas.

Satuan komando penanggulangan darurat bencana Kebakaran hutan dan lahan provinsi Sumatera Utara tentunya untuk merencanakan dan melaksanakan operasi darurat kebakaran hutan dan lahan tingkat provinsi Sumatera Utara.

Struktur komando penanganan darurat bencana (SKPDB) menjalankan fungsi tugas operasi penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan . Sejak penetapan status darurat selama 14 hari untuk (a) penyelamatan jiwa; (b) penyelamatan aset warga/pemerintah; dan (c) pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi/pengintai di wilayah terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan efektivitas dan kesepaduan kebijakan dan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas dan memenuhi sumberdaya.

Pos komando penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan mempunyai tugas, sebagai berikut.

1. Menyusun rencana operasi penanganan darurat bencana

2. Melakukan mobilisasi bantuan darurat bencana dari instansi/lembaga terkait ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.
3. Menyiapkan bantuan sumberdaya (manusia, peralatan dan logistik) sesuai dengan hasil kaji cepat (speed assesment).
4. Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat kepada pos lapangan sesuai kebutuhan.
5. Melakukan permintaan dukungan kepada pos pendukung dan pos pendamping terkait bantuan penanganan darurat .
6. Melakukan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana.
8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BPBD provinsi dengan tembusan kepada perangkat daerah/lembaga terkait tingkat provinsi.

3.2 Sasaran

Sasaran Komando Penanggulangan Darurat Bencana merupakan satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana. Adapun sasaran tersebut yaitu sebagai berikut :

- Adanya rapat koordinasi dan mobilisasi bantuan darurat bencana dari instansi/lembaga terkait ditingkat provinsi.
- Adanya rapat koordinasi dan dokumen untuk menyajikan permintaan bantuan sumberdaya kepada pos pendukung pos pendamping.
- Wilayah kabupaten/kota yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan mendapatkan distribusi bantuan penanganan darurat bencana serta koordinasi melalui pos komando penanganan darurat bencana (posko-PDB).
- Pertemuan monitoring evaluasi pelaksanaan PDB kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV PELAKSANAAN

4.1 Konsep Operasi Dan Sasaran Tindakan

Skenario kejadian dan dampak kebakaran hutan dan lahan telah menimbulkan korban jiwa, kerugian dan kerusakan dan gangguan sosial. Berdasarkan skenario dampak ini, maka konsep operasi penanganan darurat bencana menjadikan provinsi sebagai komando penanganan darurat bencana dengan fungsi operasi, setelah pos komando PDB terbentuk serta mulai dibuka pos lapangan yang berfungsi memberikan pelayanan kedaruratan pada korban. Selanjutnya dibentuk pos pendukung dan pendamping.

Satuan komando penanganan darurat bencana (SKPDB) kebakaran hutan dan lahan provinsi Sumatera Utara melaksanakan operasi lapangan, operasi pendukung dan operasi pendampingan secara serentak dan terintegrasi dan berada di bawah pos komando penanganan darurat bencana (Posko PDB) yang di pimpin oleh seorang komandan.

Setelah pos komando penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan provinsi Sumatera Utara terbentuk berkoordinasi dengan pos komando penanganan darurat bencana kabupaten/kota yang terlebih dahulu terbentuk.

Operasi penanganan darurat dilaksanakan pada angka 2 (fase) sebagai berikut;

Tabel 4.1 Konsep Operasi Penanganan Darurat Bencana Kebakaran hutan dan lahan Provinsi Sumatera Utara.

Fase tanggap darurat	Fase transisi menuju pemulihan
• Kaji cepat bencana kebakaran hutan dan lahan . • Penetapan situasi tanggap darurat • Pembentukan struktur organisasi komando penanganan darurat bencana. • Membuat perencanaan tanggap darurat mulai dari analisis situasi, sumberdaya, dokumentasi, dan demobilisasi. • Mobilisasi sumberdaya personil dan logistik untuk penanganan darurat.	• Memastikan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan. • Memastikan dan memberikan dukungan kebutuhan pada penyintas • Penilaian pelaksanaan darurat bencana sebagai basis penetapan status darurat dan pengakhiran operasi darurat. • Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan transisi darurat menuju pemulihan secara berkala.

Fase tanggap darurat	Fase transisi menuju pemulihan
• Membentuk pos lapangan, pos pendukung, dan pos pendamping. • Aktivasi SKPDB untuk 14 hari setelah di tetapkan tanggap darurat. • Memastikan dukungan operasi SAR, evaluasi korban dan harta benda. • Memastikan upaya perlindungan kepada wilayah rentan (wanita, anak, lansia, penyandang disabilitas dan penyandang homorbid (penyakit bawaan). • • Memastikan operasi pemenuhan kebutuhan dasar pada korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.	• Demobilisasi sumberdaya baik seluruh personil, peralatan maupun logistik jika operasi berakhir.

Tabel 4.2 Rencana Tindakan (Sasaran Tindakan)

Tahap	Tindakan
a. Tanggap Darurat	• Melakukan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan • Mobilisasi dan penugasan personil sesuai dengan tupoksi dan kewenangan dalam penanganan darurat bencana. • Memberikan instruksi dan arahan terhadap personil untuk penugasan penanganan darurat bencana. • Melakukan kegiatan SAR untuk penyelamatan korban terdampak kebakaran hutan dan lahan . • Mengaktivasi rencana kontingensi kebakaran hutan dan lahan menjadi rencana operasi (RENOP) • Aktivasi sistem komunikasi kondisi darurat yang terkondinisasi dalam satu komando dengan melibatkan pihak pihak terkait. • Mendirikan pusat pengendalian operasi penanganan darurat bencana (pusdalop) dan pos lapangan. • Mendirikan pos pengungsian sebagai tempat perlindungan sementara korban terdampak bencana. • Melakukan evaluasi setiap 8 jam untuk perubahan dan efektivitas penanganan darurat yang sedang dilakukan • Melakukan koordinasi dan supervisi penanganan darurat bencana.
b. Transisi Darurat	• Membersihkan puing puing bangunan yang rusak dan memindahkannya ke tempat lain.

Tahap	Tindakan
	• Memperbaiki jalan dan jembatan darurat. • Memperbaiki rumah (yang rusak non-konstruksi) dan fasilitas umum dan fasilitas sosial. • Memastikan aktivitas sosial, ekonomi masyarakat sudah lancar walaupun belum kepada kondisi sebelum terjadi Kebakaran hutan dan lahan • Memastikan fasilitas kesehatan dan pendidikan sudah dapat terlaksana. • Memastikan aktivitas pelayanan publik/pemerintah sudah berjalan.

4.2 Struktur Organisasi Komando

Struktur organisasi komando penanggulangan darurat bencana Kebakaran hutan dan lahan wilayah Provinsi Sumatera Utara. Struktur organisasi adalah suatu susunan atau hubungan antara komponen bagian-bagian dan posisi dalam sebuah organisasi, komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan. Sehingga jika terdapat suatu komponen baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan tentunya akan berpengaruh juga kepada organisasi tersebut.

Dalam melaksanakan operasi tanggap darurat merujuk kepada peraturan kepala BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB), yang meliputi (1) komando, kenadali, koordinasi, komunikasi dan informasi.(2) perencanaan, (3) operasi, (4) logistik, (5) administrasi dan keuangan.

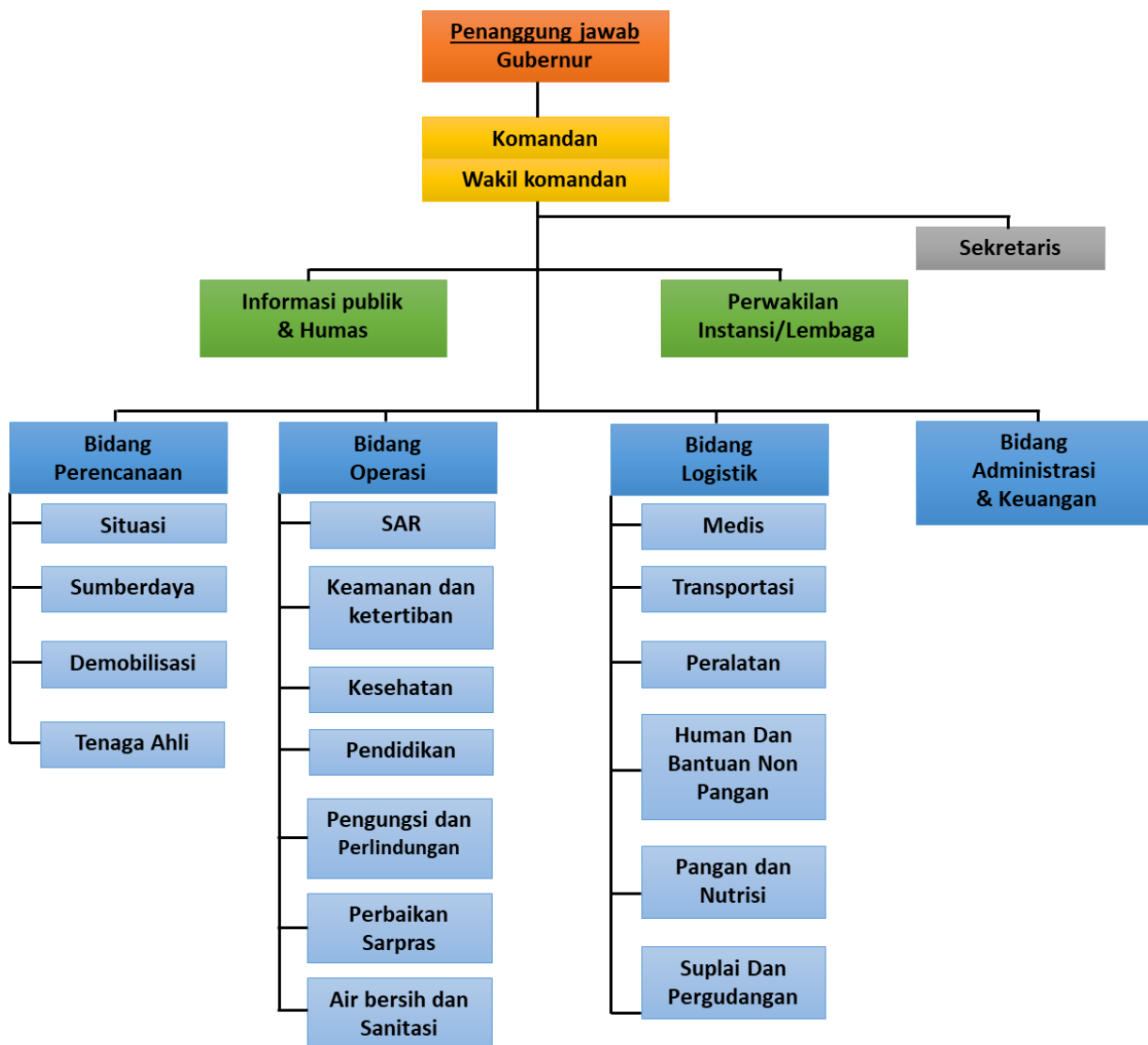
Struktur komando penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan provinsi Sumatera Utara, pada bagan di bawah;

1. Pos Pendamping PDB Provinsi dan Pos Pendamping PDB wilayah dipimpin seorang koordinator dibantu oleh:
 - a. Wakil koordinator
 - b. Sekretariat
 - c. Bagian data, informasi dan humas
 - d. Perwakilan instansi/lembaga terkait
 - e. Bidang operasi

2. Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan struktur organisasi standar yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan uraian tugas unit organisasi Pos Pendamping PDB Provinsi dan Pos Pendamping PDB wilayah diatur dengan petunjuk pelaksana.

Berikut adalah gambar Struktur Organisasi Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana Provinsi dan Wilayah :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran hutan dan lahan



4.3 Fungsi Dan Kegiatan Pokok

Fungsi dan kegiatan pokok SKPDB penanganan kebakaran hutan dan lahan tingkat provinsi Sumatera Utara sebagai komando dalam mengerahkan sumberdaya (personil, peralatan, dan logistik), mencari dan menolong korban serta memberikan kebutuhan dasar, antara lain makan/minum, air bersih, sandang, sanitasi, pelayanan pendidikan dan kesehatan. Selain fungsi komando, SKPDB juga berfungsi sebagai koordinator untuk mengintegrasikan semua aktivitas untuk menyatukan langkah dalam penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan . Berdasarkan Perka BNPB No. 03 Tahun 2016 pasal 20 bahwa :

1. Pos Pendamping PDB Provinsi Sumatera Utara Bencana Kebakaran hutan dan lahan mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumberdaya melalui koordinasi dengan Posko PDB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara
 - b. Melakukan mobilisasi bantuan darurat bencana dari instansi/lembaga terkait di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang tidak terdampak bencana Kebakaran hutan dan lahan
 - c. Mengajukan permintaan bantuan sumberdaya kepada Pos Pendamping Nasional atau BNPB jika diperlukan
 - d. Menyiapkan bantuan sumberdaya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan
 - e. Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana Kebakaran hutan dan lahan kepada Posko PDB sesuai kebutuhan
 - f. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
 - g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BPBD Provinsi dengan tembusan kepada perangkat daerah/lembaga terkait tingkat Provinsi
2. Pos Pendamping PDB Provinsi, Pos Pendamping dan Pos Pendamping Nasional PDB mempunyai fungsi:
 - a. Pengkajian cepat kebutuhan sumberdaya
 - b. Pengelolaan bantuan sumberdaya
 - c. Pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

4.4 Tugas-Tugas Bidang

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membentuk SKPDB bencana kebakaran hutan dan lahan sebagai sebuah sistem dengan fungsi dan tugas efektif. Berikut tugas tugas bidang kerja;

1. Komandan PDB

- Mengaktifkan pos komando penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan .
- Memberikan perintah pelaksanaan penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan
- Memfasilitasi dan menetapkan perencanaan PDB, pengelolaan dan pelaksanaan operasi.
- Melaksanakan koordinasi, mengintegrasikan dan menyelaraskan upaya upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait dalam SKPDB.
- Mengkoordinir dan mengendalikan para pihak (pentahelix) yang terbuat dalam PDB kebakaran hutan dan lahan diluar SKPDB yang tidak tercantum dalam skenario Renkon.
- Menyampaikan informasi dan situasi perkembangan penyelenggaraan PDB kebakaran hutan dan lahan kepada gubernur dan masyarakat secara berkala.

2. Sekretariat

- Melaksanakan surat menyurat, pengarsipan
- Melaksanakan tata kelola keuangan

3. Wakil Komandan

- Memberikan pertimbangan dan saran kepada komandan tanggap darurat dalam merencanakan, mengorganisasikan ,melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana
- Bertanggung jawab kepada komandan tanggap darurat.
- Membantu komandan dalam mengelola tugas kesekretariatan dan informasi publik.
- Mewakili komandan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan apabila komandan tanggap darurat berhalangan.

Pada tahap/fase saat terjadi bencana/tanggap darurat, pada hari “H” jam “J” WIB, Komando penanganan darurat bencana Provinsi Sumatera Utara menjalankan tugas-tugas yang mencakup:

Tabel 4.3 Tugas Bidang Penanganan Darurat Bencana Provinsi Sumatera Utara

No.	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
1	Kesehatan	- Pelayanan Kesehatan - Pengendalian Penyakit - Penyehatan Lingkungan - Penyiapan air bersih dan sanitasi yang kualitas - Pelayanan kesehatan gizi - Pengelolaan obat bencana - Penyiapan kesehatan reproduksi dalam situasi bencana - Penanganan kesehatan jiwa - Penatalaksanaan korban mati - Pengelolaan informasi dibidang kesehatan	Koordinator : - Kepala Dinas Kesehatan PROVSU Anggota : - Kakesdam I/BB - Dokkes POLDA Sumut - Rumkit Lanud - RS AL - RS Lokal/setempat - PMI Sumut - Organisasi Profesi Kesehatan
2	Pencarian dan Penyelamatan	- Mengerahkan, mengoordinir serta mengendalikan sarana dan personil dalam pelaksanaan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana secara cepat, efisien dan efektif - Pengelolaan informasi dibidang pencarian dan penyelamatan	Koordinator : - Badan Nasional Pencarian Pertolongan Anggota : - TNI/POLRI - BPBD Provinsi Sumut - SATPOL PP Provsu - Dinas Sosial Provsu - Provsu/UPT.KPH - PMI Sumut - Relawan - ORMAS
3	Logistik	- Pengadaan barang: sandang, per makanan, peralatan - Bea cukai (untuk barang yang dibawa dari luar negeri/ di impor: - Penyimpanan/pegudangan distribusi logistik - Keamanan logistik - Pengelolaan informasi dibidang logistik.	Koordinator : Dinas Sosial Provsu Anggota : - TNI/POLRI - BPBD Provsu - Perum Bulog - Dishub Provsu - Dinas Ketapang Provsu - SATPOL PP Provsu - Dinkes Provsu
4	Pengungsian dan Perlindungan	- Penyiapan Dapur umum - Pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, tempat pengungsian, keamanan	Koordinator : BPBD Provsu Anggota :

No.	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
		- Manajemen pengungsian dan penyiapan hunian sementara - Perlindungan kelompok rentan - Pengelolaan informasi di bidang pengungsian dan perlindungan - Perlindungan pengungsi berbasis gender	- TNI/POLRI - Dinas Sosial Provsu - Kesbangpol Provsu - SATPOL PP Provsu - Dinas Kominfo Provsu - Dinas PKP Provsu - Dinas PUPR Provsu - Dinas PMD Dukcapil Provsu - Dinas P3AKB Provsu - Dinkes Provsu - Kakesdam I/BB - Dokkes POLDA Sumut - Rumkit Lanud - RS AL - PMI Sumut - Organisasi Profesi Kesehatan - PDAM - PLN
5	Pendidikan	- Pelayanan belajar mengajar formal dan informal - Penyiapan sekolah darurat - Bimbingan dan penyuluhan bagi pengungsi dan anak dewasa - Kerohanian - Pengelolaan informasi di bidang pendidikan	Koordinator : Dinas Pendidikan Provsu Anggota : - TNI/POLRI - BPBD Provsu - Dinas Sosial Provsu - Dinas PKP Provsu - Dinas PUPR Provsu - Relawan
6	Sarana dan Prasarana	- Pembersihan puing-puing/debris clearance - Penyediaan alat transportasi, telekomunikasi dan energi - Penyediaan air dan sanitasi - Penyediaan hunian tetap (huntap) - Pengelolaan informasi di bidang sarana dan prasarana - Penguatan kapasitas pemerintah pusat/daerah untuk koordinasi - Revitalisasi fungsi pemerintah desa/camat/kabupaten/provinsi - Pemulihan layanan publik, sarana pendukung pemerintah - Penguatan kapasitas perencanaan dan pendanaan - Pengelolaan informasi dibidang pemulihan dini	Koordinator : Dinas PUPR Provsu Anggota : - TNI/POLRI - Dinas PKP Provsu - BPBD Provsu - SATPOL PP Provsu - Diskominfo Provsu - PLN - PDAM - PTPN II, III dan IV - Provider Komunikasi

No.	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
7	Bag. Perencanaan	Bidang Situasi • Melakukan kajian situasi penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan • Melakukan koordinasi dengan komando dalam penyusunan rencana operasi secara berkala. • Memastikan update informasi secara berkala berkaitan dengan cuaca, sebagai bahan pertimbangan operasi penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan • Membuat laporan harian perkembangan kejadian bencana dan dampaknya. • Menyediakan data dan informasi bencana sebagai bahan publikasi. • Menyediakan peta yang berkaitan dengan penanganan darurat. Bidang Sumberdaya • Memetakan kebutuhan sumberdaya untuk operasional PDB • Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyiapan sumberdaya dan pengerahan sumberdaya • Memastikan sumberdaya yang tersedia dapat di gunakan dan tersebar untuk memudahkan PDB • Mengkoordinasikan penempatan sumberdaya manusia dari luar daerah sampai dengan kebutuhan pos komando darurat. Demobilisasi • Merencanakan demobilisasi sumberdaya PDB • Menyiapkan prosedur teknis dan administratif demobilisasi sumberdaya • Demobilisasi sumberdaya penanganan darurat bencana Tenaga Ahli • Memberikan masukan dan arahan kepada pemangku kepentingan kunci di dalam tindakan komando PDB	Koordinator : Bappelitbang Provsu Anggota : - TNI/POLRI - BPBD Provsu - Dinas Sosial Provsu - BKAD Provsu

No.	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
		• Memetakan dan melakukan konsolidasi tenaga ahli untuk menjadi bagian dari PDB • Pertemuan secara berkala untuk mendiskusikan perkembangan situasi penanganan darurat bencana Unit Suplai Dan Pergudangan • Menyusun dan memetakan alur suplai barang untuk mempermudah suplai dan distribusi logistik • Memastikan alur suplai pangan tidak mengalami hambatan untuk mendukung PDB • Membangun/memperkuat prosedur suplai pangan dan barang untuk mendukung PDB yang terdampak kebakaran hutan dan lahan • Menyiapkan dan merancang kebutuhan makanan untuk korban bencana, membuat suatu manajemen penyimpanan, penyaluran makanan dll. • Memberikan dukungan melalui ketersediaan penyimpanan dan pergudangan serta memastikan mekanisme barang masuk dan keluar Administrasi Dan Keuangan • Memastikan rencana kerja anggaran keuangan • Melakukan persiapan data dan dokumen PDB • Melakukan penataan dan evaluasi dan pelaporan dibidang keuangan • Menyiapkan draf perpanjangan/pengakhiran batas darurat • Mempersiapkan administrasi logistik meliputi; penerimaan, pengeluaran dan laporan pertanggungjawaban • Mempersiapkan permohonan pencairan belanja tak terduga (BTT), dana siap pakai (DSP) dan bantuan lain dari para pihak	
8	Bidang Komunikasi dan Informasi	- Merekap semua data dan informasi dari setiap bidang serta pos lapangan.	Koordinator : Dinas Kominfo Provsu

No.	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
		- Menyampaikan perkembangan terkait proses penanganan darurat bencana. - Melaksanakan pemberian tanggapan terhadap isu yang beredar pada proses penanganan bencana. - Memastikan semua informasi antar bidang berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. - Menyebarkan informasi terkait situasi terkini tentang bencana kebakaran hutan dan lahan ke media massa dan masyarakat luas. - Memastikan masyarakat dan wartawan dapat mengakses informasi mutakhir penanganan darurat yang dibutuhkan. - Melakukan pemantauan informasi baik dari media masa lokal maupun internasional. - Mengakomodasi informasi dari dan untuk pihak internasional.	Anggota : - TNI/POLRI - BPBD Provsu - Dinas Sosial Provsu - BMKG Wil-I Sumut - TVRI - RRI - Mass Media - RAPI Sumut - ORARI Sumut - PT. Telkom - PWI
9	Bidang Operasi	Unit SAR Dan Evakuasi • Mendukung proses evaluasi untuk penyelamatan penduduk. • Membuka dan pengamanan jalan jalan evaluasi • Assesment atas korban terdampak serta situasi dan keadaan korban darurat • Melakukan koordinasi sumberdaya untuk pelaksanaan pencarian dan pertolongan bagi korban • Memberikan dukungan dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan bagi korban • Menyelenggarakan pertolongan pertama (triacese) • Memastikan penyatuan keluarga Unit Keamanan Dan Ketertiban • Melakukan pemetaan sumberdaya keamanan dan ketertiban bisa digunakan dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban pada PDB. • Melakukan koordinasi dan konsolidasi sumberdaya keamanan dan ketertiban di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan	

No.	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
		• Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masa tanggap darurat • Laporan kepada komandan PDB tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dalam kerangka PDB Unit Medis • Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan • Memberikan dukungan sesuai dengan SPGDT (sistem penanggulangan gawat darurat tertentu yang telah di sepakati • Melakukan koordinasi dan konsolidasi sumberdaya kesehatan • Memastikan dan mendukung adanya kaji cepat kesehatan untuk memastikan wilayah aman berbasis kesehatan • Memastikan upaya pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular • Memastikan adanya pelayanan rujukan rumah sakit umum • Mendukung pelayanan pemulihan kesehatan fisik, mental dan psikososial • Memastikan pemenuhan standard minimal bantuan kesehatan • Melakukan pemetaan sumberdaya kesehatan yang bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan • Mobilisasi EMT (Emergency Medical Tim) PHRRT (Public Health Rapid Reponse Team), pengumuman rencana operasi penanganan krisis kesehatan, memobilisasi sarana-prasarana kesehatan dan pembekalan kesehatan yang memadai, memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai dengan standardnya, memperhatikan kepentingan kelompok sekitar • Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan kesehatan	

No.	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
		• Koordinasi penanganan darurat bencana untuk cluster kesehatan • Laporan kepada komandan PDB tentang penyelenggaraan kesehatan dalam kerangka PDB • Pada masa transisi darurat ke pemulihan memastikan layanan kesehatan sudah berfungsi mudah memenuhi kesehatan masyarakat Unit Pendidikan • Melakukan pemetaan sumberdaya pendidikan yang bisa digunakan untuk memberi dukungan pada PDB dalam pelaksanaan pendidikan • Melakukan koordinasi sumberdaya pendidikan kepada wilayah terdampak • Memastikan dan mendukung penyelenggaraan fasilitas pendampingan kelompok rentan • Memastikan penyelenggaraan keagamaan • Memastikan ketersediaan ruang ramah anak • Memastikan penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat • Memastikan penyediaan perlengkapan sekolah dan sarana bermain • Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan masa tanggap darurat • Laporan kepada komandan PDB tentang penyelenggaraan pendidikan kerangka PDB • Pada masa transisi darurat ke pemulihan memastikan layanan pendidikan sudah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Unit Perlindungan dan Pengungsian • Koordinasi pemerintah, pemerintah daerah serta fasilitas peran masyarakat, media, akademisi, dan dunia usaha dalam mobilisasi sumberdaya untuk pemenuhan hak	

No.	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
		dan perlindungan masa masyarakat terdampak bencana secara menyeluruh dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan • Mobilisasi sumberdaya kepada wilayah terdampak bencana dalam pengelolaan pengungsian, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, dan penyiapan hunian sementara, perlindungan ke wilayah rentan, pengelolaan informasi di bidang pengungsian dan perlindungan • Memastikan ketersediaan bantuan pangan dan sandang • Penyediaan dapur umum untuk pemenuhan makan bagi pengungsi • Aktivasi tempat-tempat pengungsian • Memastikan pendataan terhadap pengungsi dan ke wilayah rentan yang dilakukam secara berkala • Memastikan dan memberikan dukungan ketersediaan air secara memadai dan sanitasi yang cukup • Memastikan dan mendukung pengelolaan pengungsian secara bermartabat Unit Sarana dan Prasarana • Melakukan pemetaan sumberdaya perbaikan sarpras yang diperbaiki masa transisi darurat • Melakukan koordinasi dan konsolidasi sumberdaya perbaikan sarpras kepada wilayah yang tidak terdampak. • Melakukan perubahan sarpras, pembersihan puing-puing/debris clearance, penyediaan alat transportasi, telekomunikasi, dan energi, penyediaan hunian tetap, penyediaan air dan sanitasi • Melakukan upaya perubahan serta pembangunan sementara sarana kesehatan. • Memberikan dukungan dalam upaya perbaikan serta pembangunan sementara sarana pendidikan	

No.	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
		• Menyiapkan tempat tinggal sementara untuk pengungsi • Memastikan upaya perbaikan objek vital • Memastikan pemulihan dan penyaluran atas jalan • Mendukung pembangunan jembatan sementara dan perbaikan jembatan rusak. • Memastikan ketersediaan penampungan air bersih dan MCK untuk kebutuhan sementara • Memastikan tersedianya aliran bersih sementara. • Mendukung pendirian sarana ibadah sementara. • Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perbaikan sarpras tanggap darurat • Laporan kepada komandan PDB tentang penyelenggaraan perubahan sarpras • Pada masa transisi darurat ke pemulihan memastikan layanan pemulihan dini sarana-prasarana sudah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Unit Air Bersih dan Sanitasi • Melakukan pemetaan sumberdaya bisa digunakan untuk penyediaan layanan air dan sanitasi pada masa tanggap darurat. • Melakukan koordiansi dan konsolidasi sumberdaya air dan sanitasi pada wilayah yang tidak terdampak untuk digunakan pada wilayah terdampak • Melakukan penyediaan layanan air bersih dan sanitasi lingkungan, operasi penanganan krisis air bersih kepada masyarakat terdampak sesuai standard dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan. • Memastikan pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair	

No.	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
		dan limbah padat, pengendalian sektor serta pembuangan tinja. • Laporan pada komandan PDB tentang penyelenggaraan layanan air bersih dalam kerangka PDB. -	
10	Bidang Logistik	Unit Medis • Memastikan dan memberikan dukungan dalam penanganan darurat pada sektor kesehatan, khususnya pada tenaga kesehatan dan obat-obatan • Memastikan dan memberikan dukungan pada perencanaan dan distribusi tenaga kesehatan, obat-obatan dan mekanisme rujukan. Unit Transportasi • Memastikan dan memberikan dukungan dalam perencanaan kebutuhan transportasi PDB • Memastikan dalam mobilisasi sumberdaya transportasi baik pemerintah maupun non pemerintah • Memastikan dan memberikan dukungan ketersediaan sarana transportasi darurat dari/ke lokasi kejadian bencana untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat bencana • Membuka akses jalan yang tertutup oleh piung puing/debris dan mengatur lalu lintas untuk kemudahan operasional penanganan darurat bencana Unit Peralatan • Memastikan memberikan dukungan pada ketersediaan alat berat untuk penanganan darurat bencana • Memastikan dan memberikan dukungan hunian sementara, dapur umum dan pos operasi tanggap darurat Unit Bantuan Dan Hunian Bantuan/Non Pangan	

No.	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
		•Memastikan dan memberikan dukungan bantuan non-pangan •Memastikan dan memberikan dukungan penyediaan hunian sementara yang layak Unit Pangan Dan Nutrisi •Memastikan ketersediaan air dan kesiapan dukungan pangan bagi penyintas •Melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait untuk memastikan ketersediaan pangan yang di perlukan untuk penyintas •Memastikan keamanan pangan dan pemenuhan nutrisi bagi kelompok rentan •Merencanakan keberlangsungan rantai pasok pangan bagi warga terdampak maupun operasional selama tanggap darurat •Mendata kebutuhan pangan bagi penyintas •Memberikan bantuan pangan melalui mekanisme yang telah di tentukan •Memastikan dan memberikan kebutuhan pangan bagi kelompok rentan secara layak dan memadai.	
11	Perwakilan Instansi/Lembaga	- Mengundang FORKOPIMDA dalam rangka penanganan bencana - Memfasilitasi/mediasi terkait penanganan konflik sosial akibat Kebakaran hutan dan lahan dengan negara tetangga - Melakukan pendistribusian bahan-bahan bantuan di lapangan - Memfasilitasi pertemuan dengan pihak DPRD dalam rangka kebijakan penanganan akibat Kebakaran hutan dan lahan Provsu - Membantu komandan PDB dalam merencanakan kebutuhan dan memvalidasi sumberdaya untuk penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan .	Koordinator : Kanwil Kemenkumhan Sumut Anggota: - TNI/POLRI - Kesbangpol Provsu

4.5 Instruksi Koordinasi

Kajian cepat akibat bencana kebakaran hutan dan lahan Sumatera Utara tim reaksi cepat (TRC) yang bertugas mulai dari informasi awal kejadian kebakaran hutan dan lahan setelah mendapatkan informasi awal dari BMKG, mas media atau masyarakat, maka sekretaris daerah, ex officio kepada BPBD provinsi Sumatera Utara menginstruksikan TRC untuk melakukan kaji cepat atas dampak bencana, kebutuhan penanganan darurat, penilaian kerusakan serta langsung melaksanakan aktivitas SAR dan pembentukan SKPL (Sistem Komando Penanganan Lapangan)

Kaji cepat darurat bencana kebakaran hutan dan lahan menggunakan pertanyaan terkait bencana yang terjadi, terdiri dari;

- Apa : Jenis Bencana**
- Bilamana : Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, Jam, Waktu setempat**
- Dimana : Tempat/lokasi/daerah bencana**
- Berapa : Jumlah korban, kerusakan sarana prasarana**
- Bagaimana : Upaya yang tetap dilakukan**

Kaji cepat kebutuhan terkait dengan keperluan SAR dan pemenuhan kebutuhan dasar (makan, minum, sanitasi, sandang, air bersih, kesehatan dan pendidikan) bagi korban/penyintas.

Dari hasil kaji cepat ini di rekomendasikan sebagai pertimbangan bagi gubernur Sumatera Utara untuk menerapkan status darurat bencana tingkat provinsi.

1. Penetapan Status / Tingkat Bencana

Gubernur Sumatera Utara menetapkan status darurat bencana provinsi Sumatera Utara dengan mempertimbangkan;

- a. Laporan atau rekomendasi dari TRC atau hasil Kaji Cepat akibat bencana kebakaran hutan dan lahan .
- b. Pertimbangan dan masukan bapak/wali kota di provinsi Sumatera Utara serta para pihak dalam forum rapat dengan instansi/lembaga/organisasi
- c. Penerbitan surat keputusan Gubernur tentang status darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Sumatera Utara

- Surat keputusan Gubernur sekaligus sebagai keputusan mengaktivasi rencana Kontingensi Kebakaran hutan dan lahan.
 - d. Penerbitan surat keputusan Gubernur tentang komando penanganan darurat bencana.
2. Penyusunan Rencana Operasi (Renop)

Renkon kebakaran hutan dan lahan setelah di *review* di sesuaikan dengan hadiri terkini berfungsi atau diaktivasi menjadi rencana operasi (Renop)
 4. Penyelenggaraan operasi penanganan darurat bencana Kebakaran hutan dan lahan sumatera utara, melalui;
 - Pengerahan sumberdaya untuk penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di provinsi Sumatera Utara
 - Aktivasi pos lapangan
 - Aktivasi jaringan komunikasi
 5. Pengorganisasian satuan komando tanggap darurat bencana akibat kebakaran hutan dan lahan .

BAB V

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

5.1 Administrasi

Mobilisasi sumberdaya pendampingan dan pendukung PDB dilakukan dengan ketentuan berikut:

1. Pengiriman sumberdaya oleh instansi/lembaga dan organisasi harus dilakukan oleh personil instansi lembaga atau organisasi melalui mekanisme yang di tentukan.
2. Memastikan sumberdaya yang di kirimkan oleh instansi/lembaga atau organisasi sesuai dengan kebutuhan PDB. Jika sumberdaya yang dikirimkan tidak memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan, maka SKPDB provinsi Sumatera Utara memiliki kewenangan untuk mengembalikan sumberdaya ke instansi/lembaga atau organisasi.

Biaya operasional pos komando darurat bencana daerah provinsi Sumatera Utara bersumber dari:

1. APBD provinsi Sumatera Utara
2. APBN
3. Bantuan lain yang tidak mengikat

5.2 Logistik

Pengerahan sumberdaya di tingkat provinsi Sumatera Utara di lakukan dengan pola sebagai berikut:

1. Dalam hal bencana tingkat provinsi, BPBD kabupaten/kota yang terdampak wajib mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan lokasi bencana.
2. Apabila provinsi Sumatera Utara tidak memiliki sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah provinsi Sumatera Utara dapat meminta bantuan kepada instansi terdekat, atau kepada pemerintah pusat.
3. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan ini di tanggung oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara.
4. Pelaksanaan pengerahan sumberdaya dari asal sampai lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali kepala BPBD provinsi Sumatera Utara

5. Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik, maka BNPB dapat melalui pola pembangunan
6. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biaya pengerahan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat

BAB VI PENGENDALIAN

6.1 Komando

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Utara dipimpin Gubernur dan/atau Komandan yang ditunjuk oleh Gubernur.

6.1.1 Pos Komando

Pos komando penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan provinsi Sumatera Utara berfungsi sebagai pusat komando, koordinasi dan pengendalian fungsi darurat bencana yang berkedudukan di kantor BPBD provinsi Sumatera Utara, Jl. Binjai Km.10,3 No.8 Deli Serdang.

6.1.2 Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat bencana kepada SKPDB Kabupaten, berkedudukan dan lebur dalam Komando SKPDB di masing-masing Pos Komando Kabupaten. Adapun Pos Lapangan sebagaimana dimaksud dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 6.1 Pos Lapangan

NO.	Lokasi Pos Lapangan	Koordinat
1	BPBD Medan	3°33'56"N 98°43'25"E
2	BPBD Tapanuli Utara	2°01'13"N 98°58'41"E
3	BPBD Tapanuli selatan	1°24'26"N 99°16'49"E
4	BPBD Dairi	2°45'15"N 98°17'41"E
5	BPBD Asahan	2°58'09"N 99°37'04"E
6	BPBD Batubara	3°17'06"N 99°30'22"E
7	BPBD Deli Serdang	3°32'44"N 98°52'08"E
8	BPBD Humbang Hasundutan	2°15'01"N 98°47'20"E
9	BPBD Karo	3°07'11"N 98°30'26"E
10	BPBD Labuhan Batu	2°04'15"N 99°51'18"E
11	BPBD Labuhan Batu Selatan	1°53'26"N 100°05'34"E
12	BPBD Labuhanbatu Utara	2°31'07"N 99°38'55"E
13	BPBD Langkat	3°44'12"N 98°26'39"E
14	BPBD Mandailing Natal	0°48'53"N 99°34'09"E

NO.	Lokasi Pos Lapangan	Koordinat
15	BPBD Nias	1°07'13"N 97°43'35"E
16	BPBD Nias Barat	0°59'54"N 97°29'47"E
17	BPBD Nias Selatan	0°35'03"N 97°46'38"E
18	BPBD Nias Utara	1°23'27.14"U 97°21'21.34"T
19	BPBD Padang Lawas	1° 3'24.15"U 99°46'32.02"T
20	BPBD Padang Lawas Utara	1°29'40.31"U 99°37'10.00"T
21	BPBD Pakpak Bharat	2°32'24"N 98°19'17"E
22	BPBD Samosir	2°33'36"N 98°43'13"E
23	BPBD Serdang Bedagai	3°30'10"N 99°07'04"E
24	BPBD Simalungun	3°34'25"N 98°42'56"E
25	BPBD Tapanuli Tengah	1°42'40"N 98°51'02"E
26	BPBD Toba	2°19'11"N 99°03'09"E
27	BPBD Binjai	3°35'24"N 98°30'17"E
28	BPBD Gunungsitoli	1°18'57"N 97°36'10"E
29	BPBD Padang Sidempuan	1°20'16"N 99°18'29"E
30	BPBD Pematang Siantar	2°57'05"N 99°03'47"E
31	BPBD Sibolga	1°44'24"N 98°46'32"E
32	BPBD Tanjung Balai	2°57'48"N 99°48'01"E
33	BPBD Tebing Tinggi	3°20'47"N 99°09'32"E

6.1.3 Pos Pendukung

Pos Pendukung Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pos Pendukung, berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri. Pos Pendukung berkedudukan seperti pada tabel berikut.

Tabel 6.2 Lokasi Pos Pendukung

Pos Pendukung	Lokasi	Koodinat
Pos Pendukung 1	Bandara Internasional Kualanamu	3°37'58.84"U 98°52'32.93"T
Pos Pendukung 2	Pangkalan Udara Soewondo	3°33'48.21"U 98°40'43.57"T
Pos Pendukung 3	Bandara Aek Godang	1°23'55.65"U 99°25'46.64"T
Pos Pendukung 4	Bandara Silangit	2°15'44.98"U 98°59'15.35"T
Pos Pendukung 5	Bandara Ferdinand Lumban Tobing	1°33'17.23"U 98°53'47.51"T
Pos Pendukung 6	Bandara Binaka	1° 9'53.82"U 97°42'16.97"T
Pos Pendukung 7	Bandara Sibisa	2°36'0.21"U 98°57'50.92"T
Pos Pendukung 8	Bandara Lasondre	0° 1'10.39"S 98°18'4.82"T

Tabel 6.3 Tugas Dan Fungsi Pos Pendukung

Tugas	Fungsi
Bantuan Nasional	
• Melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumberdaya. • Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan penanganan darurat bencana yang di kirim • Melakukan pengelolaan sementara bantuan PDB. • Mengarahkan bantuan PDB yang di terima ke posko PDB. • Melakukan distribusi bantuan darurat bencana ke pos lapangan PDB • Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan • Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada komandan posko	Pengelolaan penerimaan bantuan Penanganan sementara bantuan darurat bencana sebelum distribusi Pengelolaan distribusi bantuan PDB Pencatatan, evaluasi, dan pelayanan kegiatan
Bantuan Internasional	
• Melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumberdaya • Melakukan pencatatan dan pelayanan terhadap bantuan penanganan darurat bencana yang di terima dan kembalikan • Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana • Melakukan pengelolaan perizinan • Melakukan pengelolaan bantuan • Menyerahkan bantuan PDB ke pos pendamping nasional • Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana ke posko PDB atas pos lapangan PDB atas petunjuk pos pendamping nasional PDB • Melakukan fasilitasi pengembalian bantuan untuk bantuan penanganan darurat bencana yang berasal dari komunitas internasional. • Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada koordinator pos pendamping nasional	

6.1.4 Pos Pendamping

Pos Pendamping Nasional, selanjutnya disebut Pospenas atau Pos BNPB berfungsi untuk mempermudah akses dan efektivitas terhadap sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat, berkedudukan **di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jl. Pramuka No.38 11, RT.11/RW.5, Utan Kayu**

Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
adapun Tugas Dan Fungsi Pos Pendamping Nasional ialah :

- Melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumberdaya berkoordinasi dengan komandan posko PDB dan/atau pos pendamping nasional
- Melakukan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana dari kementerian/lembaga terkait dan provinsi yang wilayahnya tidak terdampak bencana.
- Mengelola bantuan yang di terima dari komunitas internasional
- Menyiapkan bantuan sumberdaya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan
- Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana kepada posko PDB atau posko pendamping nasional
- Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BNPB dengan tembusan kepada kementerian/lembaga(KL)

6.2 Kendali

Komando penanganan darurat bencana langsung mendukung serta mengendalikan bidang-bidang dibawah nya. Komandan penanganan darurat bencana ke bidang-bidang dan dari koordinator bidang ke unit-unit dibawah nya.

6.3 Koordinasi

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB bersifat wajib di pimpin oleh komandan dan dilaksanakan di pos komando penanganan darurat sebanyak 1(satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi.

A. Pengkajian Cepat Akibat Bencana Kebakaran hutan dan lahan

BPBD Provinsi Sumatera Utara melakukan pengkajian cepat untuk menilai akibat langsung dari bencana Kebakaran hutan dan lahan . Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi terdampak bencana. Data sekunder dihimpun dari pelaporan, media

massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan. Lingkup kaji cepat meliputi:

- Apa : Jenis Bencana
- Bilamana : Hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
- Dimana : Tempat/lokasi/daerah bencana
- Berapa : Jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana
- Penyebab : Penyebab terjadinya bencana
- Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan

Analisa akibat langsung dari kejadian Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Utara dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dipergunakan sebagai pertimbangan Penetapan Status Bencana.

B. Penetapan Status/Tingkat Bencana

Gubernur Sumatera Utara menetapkan Status Darurat Bencana Provinsi Utara dengan mempertimbangkan:

1. Laporan BPBD Provinsi Sumatera Utara atas hasil pengkajian cepat akibat Kebakaran hutan dan lahan
2. Pertimbangan dan masukan dari Bupati/Walikota di daerah terdampak, serta para pihak dalam forum rapat dengan instansi/lembaga/organisasi.
3. Penerbitan Surat Keputusan Gubernur tentang Status Darurat Bencana Provinsi Sumatera Utara
 - a) Surat Keputusan Gubernur sekaligus sebagai keputusan mengaktifasi rencana kontingensi operasi penanganan kedaruratan, melalui pemutakhiran atau penyesuaian situasi dan dampak kejadian yang ada, menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana.
 - b) Dalam Surat Keputusan Gubernur sekaligus keputusan mengaktifasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana Provinsi Sumatera Utara dan personal-personil yang diberi mandat sebagai pengampu tugas pendukung penanganan kedaruratan bencana Kebakaran hutan dan lahan Provinsi Sumatera Utara.
 - c) Dalam Surat Keputusan Gubernur sekaligus memastikan dan menegaskan pemerintah kabupaten/kota merupakan pengampu

utama penanganan kedaruratan melalui Satuan Komando dan Pos Komando yang dibentuk oleh masing-masing Bupati/Walikota.

C. Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana berdasarkan Rencana Kontingensi yang disesuaikan dengan intensitas dampak langsung bencana.

D. Penyelenggaraan Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana Kebakaran hutan dan lahan

6.4 Komunikasi

Komunikasi dalam PDB, penyampaian informasi, dari satu pihak ke pihak lain dilakukan secara langsung/tidak langsung. Proses pembicara memberikan informasi sistematis dan memindahkan pengertian kepada orang lain.

Adapun sarana dan prasarana Komunikasi ini merupakan salah satu fasilitas penting komando darurat bencana untuk mengatur jalur informasi, mendukung arus komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos lapangan, para pihak yang terkait. Komandan PDB bertanggung jawab atas kejelasan atas komunikasi untuk mendukung efektivitas operasi darurat Kebakaran hutan dan lahan dalam menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibantu oleh Bagian Data Informasi melalui media dan alat komunikasi.

A. Pos Komando

1. Telepon : **(061) 8468469**
2. Telepon Genggam/HP/Whatsapp
3. Radio

a) Frekuensi Radio HF/SSB

Frekuensi Radio HF yang dialokasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah **11.473.5 Mhz.** Penggunaan frekuensi ini diperuntukkan bagi BNPB dan BPBD.

b) Frekuensi Radio VHF

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah **171.300 Mhz.**, dengan frekuensi repeater **170.300 Mhz.** untuk RX dan **165.300 Mhz.**

untuk TX dengan **Tone TX 123** Penggunaan frekuensi diperuntukkan bagi BNPB dan BPBD

c) Frekuensi Cadangan : **26.960 - 27.410 Mhz. (RAPI)**

d) Frekuensi Cadangan : **146,900 - 146,30 Mhz. (ORARI)**

4. Email: **bpbd@sumutprov.go.id**

5. Faksimile: **(061) 8468015**

6. Website : **bpbd.sumutprov.go.id.**

6.5 Informasi

Informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari laporan dari aparat desa dan kecamatan dan juga laporan dari berbagai media sosial secara *real-time*. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Operasi dan yang terlibat di dalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana. Pengelolaan informasi tidak hanya mencakup pengolahan data saja, tetapi juga sistem dan aplikasi yang digunakan. Adapun informasi dari sistem peringatan dini yang sudah dikembangkan yaitu :

Informasi	Situs
Fire Danger Rating System (SPARTAN)	https://spartan.bmkg.go.id/
SiPongi* Karhutla Monitoring Sistem	https://sipongi.menlhk.go.id/
Lancang Kuning Nusantara	https://app.lancangkuning.net/

BAB VII

RENCANA TINDAK LANJUT

7.1 Komitmen Para pihak dalam Penanganan Kedaruratan

Komitmen para pihak sangat dibutuhkan agar semua rencana yang telah disusun ini dapat dikoordinasikan saat sebelum maupun diimplementasikan nantinya di dalam pelaksanaan apabila memang benar-benar terjadi. Para Pihak telah bersepakat dan berkomitmen untuk sama-sama berkontribusi terhadap rencana kontingensi ini sebagaimana yang telah ditanda tangani Bersama dalam lampiran komitmen. Berikut adalah komitmen para pihak dalam penanganan kedaruratan.

- Proses penyusunan rencana Kontingensi dilakukan secara partisipatif dan disusun bersama oleh seluruh pemangku kepentingan (pentahelix) di provinsi Sumatera Utara yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan .
- Aktivasi rencana Kontingensi kebakaran hutan dan lahan menjadi rencana operasi pada saat terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan akan dilakukan oleh gubernur Sumatera Utara, selaku penanggung jawab pengendalian operasi.
- Pemutakhiran data dan informasi guna penyesuaian isi dokumen rencana Kontingensi dilakukan minimal 2 (dua) tahun sekali setelah melakukan pemantauan dan evaluasi sumberdaya
- Apabila hingga batas waktu yang di rencanakan tidak terjadi wacana, maka rencana Kontingensi ini akan berakhir setelah 3 (tiga) Tahun.
- Koordinasi untuk pengumuman, pemantauan dan pemutakhiran rencana Kontingensi ini dilakukan oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara dibawah koordinasi BPBD provinsi Sumatera Utara
- Aktivasi rencana Kontingensi kebakaran hutan dan lahan provinsi Sumatera Utara bersifat dinamis dan operasional. oleh karena, dokumen ini harus di simulasikan dengan dasar skenario dari dokumen rencana Kontingensi bencana kebakaran hutan dan lahan yang ada

7.2 Penyiapan Kesiapsiagaan

Sebagai tindaklanjut dari rencana kontingensi BPBD Provinsi Sumatera Utara Bersama instansi terkait akan melaksanakan kegiatan Latihan

kesiapsiagaan guna menguji Renkon yang telah dibuat Bersama. Latihan kesiapsiagaan akan dilaksanakan setiap 1 (satu) semester tiap tahun.

Setelah disusun dan dikaji ulang, rencana kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut.

1. Simulasi Rapat Koordinasi

Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontingensi tingkat daerah. Ketentuan simulasi yakni:

- a. Dipimpin oleh Gubernur Sumatera Utara/Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
- b. Diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumberdaya
- c. Merumuskan hasil Rencana Kontingensi final disepakati bersama

2. Kegiatan *Table Top Exercise* (TTX)

Kegiatan ini merupakan latihan di dalam ruangan, untuk menguji kemampuan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada rencana kontingensi.

3. Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko

Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana kontingensi sesuai bidang masing-masing. Uji/geladi posko ini bertujuan memastikan setiap peserta mengetahui/memahami peran masing-masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi

4. Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang

Merupakan latihan di lapangan bertujuan untuk menguji/evaluasi perencanaan bidang operasi. Geladi lapang melibatkan sumberdaya yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

LAMPIRAN 1
KONVERSI RENCANA
KONTINGENSI MENJADI
RENCANA OPERASI:
PENYUSUNAN RENCANA
OPERASI PENANGANAN
DARURAT

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA

Lembar No. ____ dari ____ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) : _____

Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : _____

RENCANA OPERASI :

Nomor : _____

PENUNJUKAN :

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : _____ (skala peta)
3. Tahun : _____ (tahun pengeluaran peta)
4. Daerah Waktu : _____ WIB / WITA / WIT
5. Landasan Hukum : _____ (landasan hukum pembuatan Rencana Operasi)
6. Dokumen : Rencana Kontingensi

DAERAH WAKTU : _____ WIB

SANDI OPERASI :

SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi

a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (tuliskan informasi dari Informasi Bencana)

- 1) Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.

2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.

b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

Lihat Bab III

3. Pelaksanaan

a. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Lihat BAB IV SUB BAB 4.1

b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3

c. Instruksi dan Koordinasi.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.5

d. Administrasi dan Logistik

Lihat BAB V

e. Pengendalian

Lihat BAB VI

f. Penutup

Tanggal _____(penetapan)

Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran :

- A. Surat Penetapan Status Darurat Gubernur
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi
- E. Rencana Dukungan Anggaran.

LAMPIRAN 2

PROYEKSI WILAYAH DAN PENDUDUK TERDAMPAK

PROYEKSI WILAYAH DAN PENDUDUK TERDAMPAK

Lampiran ini menyajikan proyeksi/estimasi wilayah dan penduduk terdampak bencana sesuai skenario kejadian. Lampiran ini merupakan penjabaran dari BAB II Sub-Bab 2.2.2. Asumsi Dampak. Berdasarkan asumsi dampak kejadian terjadi di daerah perbatasan Kabupaten Labuhan Batu dan Labuhanbatu Selatan dengan luas lahan yang terbakar ± 1.000 Ha dan luas lahan yang terdampak ± 7.000 Ha. Kejadian tersebut memberikan dampak pada daerah/kawasan sekitar kejadian yaitu Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara Padang Lawas Utara, Padang Lawas dan perbatasan dengan Provinsi Riau. Diasumsikan dengan terjadi kejadian tersebut diperkirakan sebesar 1% atau 3.900 jiwa terpapar dari jumlah penduduk 390.954 jiwa yang terdampak. Adapun persentase jiwa terhadap jiwa terpapar yaitu sebagai berikut :

- Korban jiwa : 0%
- Sakit Ringan : 53%
- Sakit Sedang : 34%
- Sakit Berat : 13%

Adapun dasar perumusan proyeksi penduduk terdampak yaitu berdasarkan kejadian bencana yang pernah terjadi dan mempertimbangkan faktor waktu kejadian (pagi/siang/malam), dll.

No.	Wilayah/Lokasi	Jumlah Jiwa Terdampak	Jumlah Jiwa Terpapar (1%)	Korban jiwa (0%)	Sakit Ringan (53%)	Sakit Sedang (34%)	Sakit Berat (13%)
1	Kabupaten Labuhan Batu	390.954	3.900	0	2.072	1.329	508
2	Kabupaten Labuhan Batu Selatan						
3	Kabupaten Padang Lawas						
4	Kabupaten Padang Lawas Utara						
5	Provinsi Riau (Beberapa wilayah di Prov.Riau)						

LAMPIRAN 3

SUSUNAN PELAKSANA

TUGAS

1. Susunan Pelaksana

No.	Tugas / Posisi	Institusi (Lembaga)
BIDANG PENGENDALI, KOORDINASI DAN KOMUNIKASI		
1	Unit PENGENDALIAN DAN KOORDINASI	
	Pemimpin (lead)	: BPBD (Sekda selaku kepala BPPD ex officio)
	Pendukung	: FORKOPIMDA
2	Unit HUMAS	
	Pemimpin (lead)	: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik
	Pendukung	: TNI/POLRI, Satpol PP, BPS
3	Unit KEAMANAN	
	Pemimpin (lead)	: POLRI
	Pendukung	: TNI, Satpol PP, Tokoh Masyarakat (Pemangku Wilayah)
4	Unit PERWAKILAN INSTITUSI (Lembaga)	
	Pemimpin (lead)	: Kepala Bagian Humas dan Protokoler
	Pendukung	: Semua Institusi (sesuai kebutuhan), TNI/POLRI, Satpol PP, BPBD, Dinas PUPR
BIDANG PERENCANAAN lead TNI		
1	Unit ANALISIS	
	Pemimpin (lead)	: BASARNAS
	Pendukung	: TNI, BPBD, BAPPEDA, LITBANG, DINAS PUPR
2	Unit TENAGA AHLI	
	Pemimpin (lead)	: BMKG
	Pendukung	: DINAS PENDIDIKAN, BPS, PERGURUAN TINGGI
BIDANG OPERASI Lead BASARNAS		
1	Unit SARANA DAN PRASARANA VITAL	
	Pemimpin(lead)	: DINAS PUPR
	Pendukung	: PLN, PDAM, DINAS PERKIM, TELKOM
2	Unit PENANGANAN PENGUNGSI	
	Pemimpin (lead)	: DINAS SOSIAL
	Pendukung	: BPBD, RELAWAN, DINAS PERKIM, DINAS PU, DINKES, DUKCAPIL, KEMENAG, BKKBN
3	Unit KESEHATAN	
	Pemimpin (lead)	: DINAS KESEHATAN
	Pendukung	: PMI, TNI, POLRI, Rumah Sakit Umum / Swasta
4	Unit PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI	
	Pemimpin (lead)	: BASARNAS
	Pendukung	: TNI, POLRI, SATPOLPP, LINMAS, PMI
5	Unit TRANSPORTASI	
	Pemimpin (lead)	: DINAS PERHUBUNGAN
	Pendukung	: SYAHBANDAR, TNI, POLRI, PELNI, PELINDO
6	Unit PENANGANAN WISATAWAN ASING	
	Pemimpin (lead)	: DINAS PARIWISATA

No.	Tugas / Posisi	Institusi (Lembaga)
	Pendukung	: IMIGRASI, DINKES
BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN Lead BPBD		
1	Unit PERGUDANGAN lead DINSOS	
	Pemimpin (lead)	: DINAS SOSIAL
	Pendukung	: BPBD, BULOG
2	Unit DAPUR UMUM	
	Pemimpin (lead)	: DINAS SOSIAL
	Pendukung	: DINSOS, RELAWAN, MASYARAKAT
3	Unit PERALATAN	
	Pemimpin (lead)	: DINAS PUPR
	Pendukung	: TNI, POLRI, DINAS LHK, PERUSAHAAN SWASTA
4	Unit LAYANAN LOGISTIK	
	Pemimpin (lead)	: BPBD
	Pendukung	: BPKAD
5	Unit KOMUNIKASI	
	Pemimpin (lead)	: DINAS KOMINFO
	Pendukung	: TELKOM, ORARI, RAPI, RRI
BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN Lead BPBD		
1	Unit BENDAHARA	
	Pemimpin (lead)	: BPBD
	Pendukung	: BPKAD
2	Unit PELAPORAN	
	Pemimpin (lead)	: BPBD
	Pendukung	: BPKAD
3	Unit ADMINISTRASI	
	Pemimpin (lead)	: BPBD
	Pendukung	: BPKAD

2. Susunan Tupoksi

Kelompok	Organisasi	SIAGA DARURAT	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
OPD	Bappelitbang	1. Mengkordinir OPD dalam membuat suatu kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan untuk menangani mitigasi bencana 2. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan 3. Koordinasi antar OPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana 4. Updating data kependudukan, fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, serta infrastruktur 5. Perencanaan kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana 6. Akselerasi program dan kegiatan OPD 7. Membuat inovasi daerah	1. Membantu BPBD dalam Penyusunan Rencana Operasi tanggap darurat 2. Mengkoordinir dalam menentukan kawasan rawan bencana	1. Membantu BPBD dalam Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2. Review perencanaan pembangunan 3. Pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 4. Bappelitbang bersama tim TAPD melakukan koordinasi dengan bersinergi dalam menentukan tipe bencana seperti mendesak atau tidak sehingga pengguna anggaran lebih tepat,
	BPBD	1. Penyusunan KRB dan RPB 2. Fasilitasi pembentukan Forum PRB	1. Koordinasi penanganan kedaruratan bencana 2. Pemantauan informasi kebencanaan	1. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi 2. Pemulihan sosial dan ekonomi 3. Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi

Kelompok	Organisasi	SIAGA DARURAT	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
		3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 4. Penyusunan Rencana Kontingensi 5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPB 6. Melakukan penelitian / riset kebencanaan 7. Melakukan analisis risiko bencana pada pembangunan yang berisiko tinggi 8. Pembangunan Sistem informasi penanggulangan bencana 9. Penyusunan dan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Kawasan Rawan Bencana 10. Pengembangan Desa Tangguh Bencana 11. Pembuatan jalur evakuasi, pemasangan rambu evakuasi, dan barak pengungsian 12. Pendidikan dan pelatihan PB bagi aparatur negara, masyarakat, dunia usaha.	3. Penyebarluasan peringatan dini 4. Penyiapan peralatan dan logistic 5. Penyiapan jalur evakuasi dan tempat pengungsian 6. Penugasan Satuan Tugas Reaksi Cepat 7. Analisis kemampuan sumber daya alam maupun buatan 8. Analisis lingkup bencana, jumlah korban, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan 9. Penetapan status darurat bencana 10. Mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando tanggap darurat 11. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 12. Evakuasi, dan penempatan pada lokasi aman Koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar penyintas 13. Penilaian kebutuhan pasca bencana	4. Peningkatan sosial dan ekonomi Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur tentang pengelolaan risiko bencana. 5. Melaksanakan Jitupasna

Kelompok	Organisasi	SIAGA DARURAT	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
		13. Penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana 14. Pengorganisasian Tim Reaksi Cepat 15. Pengorganisasian Relawan Pencegahan Bencana 16. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana 17. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat 18. Penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana 19. Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana 20. Pengorganisasian dan penyebarluasan informasi potensi terjadinya bencana 21. Pengembangan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) PB 22. Uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;	14. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar	

Kelompok	Organisasi	SIAGA DARURAT	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
		23. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini 24. Melakukan penyiapan logistik dan peralatan kedaruratan 25. Penyusunan mekanisme dan SOP peringatan dini 26. Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan pelaksanaan sistem peringatan dini 27. Pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi peringatan bencana		
	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Menyusun peta rawan bencana dan peta potensi bencana kawasan pesisir 2. Menyusun renstra mitigasi kawasan pesisir 3. Menyusun zonasi kawasan pesisir 4. Menyusun rencana aksi pengelolaan kawasan pesisir 5. Rehabilitasi kawasan pesisir/ penanaman tanaman pantai		1. pemulihan infrastruktur, sosial, dan ekonomi. 2. pembangunan kembali sarana dan prasarana

Kelompok	Organisasi	SIAGA DARURAT	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
		6. Pembangunan pusat informasi kebencanaan wilayah pesisir 7. Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir 8. Penyebaran informasi potensi bahaya/bencana		
	Dinas Sosial	1. pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana dengan berkoordinasi dengan kabupaten/kota 2. peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan risiko bencana 3. peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana 4. merencanakan kebutuhan logistik dengan buffer stock	1. memberikan bantuan logistik/membangun dapur umum; 2. memfasilitasi Safe House 3. Penyediaan Air Bersih 4. membagi Kit Wad untuk bayi/anak/dewasa	1. mendata keluarga/korban yang masih tinggal di pengungsian 2. menyiapkan logistik bagi yang masih tinggal 3. memberikan terapi Ocupasi agar korban dapat hidup mandiri pasca bencana.
	Dinas Kominfo		1. Mengirim tenaga peliput untuk mendokumentasi kejadian yang sebenarnya 2. Memberitakan dan menceritakan informasi yang didapat melalui televisi dan media sosial, media cetak	

Kelompok	Organisasi	SIAGA DARURAT	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
			3. Melakukan dokumentasi berita bencana karhutla	
	Dinas Perkim	1. Pendataan bangunan 2. Persiapan kegiatan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah; 3. Persiapan pembuatan sumur bor untuk keperluan air bersih	1. Fasilitasi Pendataan kerusakan bangunan;	1. Rehabilitasi rumah
	Dinas PUPR	1. Perencanaan Dan Pembangunan Instalasi Air Bersih (Persediaan Dan Distribusi) 2. Perencanaan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Yang Aman	1. Mobilisasi alat berat untuk penanganan darurat Karhutla 2. Penyiapan tempat pengungsian 3. Pelaksanaan penyediaan aksesibilitas jalan menuju lokasi bencana Karhutla 4. Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah bencana Karhutla 5. Penyediaan tempat pengungsian 6. Membangun dan mengembalikan fungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan	1. Rehabilitasi jalan jembatan dan sumber daya air 2. Membuat tabulasi penanganan terhadap bangunan yang terdampak Karhutla 3. Perbaikan lingkungan daerah bencana 4. Perbaikan sarana dan prasarana umum 5. Pembangunan hunian sementara 6. Perhitungan anggaran biaya rehab/rekonstruksi jalan dan jembatan 7. Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat, prasarana transportasi

Kelompok	Organisasi	SIAGA DARURAT	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
			kebutuhan fisik dasar lainnya 7. Pembangunan hunian sementara	8. Perbaiki hunian 9. Pembangunan hunian tetap 10. Pembangunan sarana pelayanan publik 11. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana 12. relokasi rumah masyarakat terdampak bencana 13. rehabilitasi rumah warga terdampak bencana
	Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultural	1. Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana 2. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana 3. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan 4. Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stakeholder yang bertanggungjawab atas penurunan ketersediaan	1. Pemenuhan kebutuhan pangan 2. Pemenuhan kebutuhan pangan	1. pemulihan sosial, ekonomi. 2. peningkatan ekonomi

Kelompok	Organisasi	SIAGA DARURAT	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
		pangan untuk mencegah kerawanan pangan 5. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan 6. Menyiapkan lumbung pangan		
	Dinas Pendidikan	1. Mengumpulkan Kepala sekolah dan cabang dinas sekabupaten/kota 2. Koordinasi dengan cabang dinas	1. Meliburkan aktivitas sekolah atau 2. Melaksanakan sekolah daring	1. Mendata gedung yang rusak (bangunan sekolah-sekolah)
	Dinas Kesehatan	1. Koordinasi ke dinas kesehatan kabupaten/kota; 2. Membuat RHA (Rapid Health Assesment) yang terdiri dari : - Ketersediaan tenaga medis; - Ketersediaan fasilitas kesehatan; - Jalur evakuasi medis/jalur rujukan. 3. Persiapan penyaluran logistik dibidang medis; 4. Persiapan mobilisasi ambulance 5. Persiapan SDM Medis	1. Membuka posko kesehatan; 2. Mobilisasi petugas medis 3. Penyaluran logistik kesehatan (alkes dan obat-obatan) 4. Aktivasi cluster kesehatan	1. Pelayanan dan Pendampingan Psikososial 2. Sanitasi Lingkungan (Air bersih, jamban, dll) 3. Perbaikan pusat layanan kesehatan 4. Pembangunan pusat layanan kesehatan 5. Peningkatan sarana dan prasaran kesehatan

Kelompok	Organisasi	SIAGA DARURAT	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
		6. Persiapan aktivasi cluster kesehatan (Sub. klaster pelayanan kesehatan; Sub. klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan; Sub. Klaster pelayanan gizi, sub klaster kesehatan jiwa, sub klaster kesehatan reproduksi dan sub klaster Disaster Victim Identification (DVI))		
	Bakesbangpo I	1. Memberikan himbauan kepada Kabupaten/Kota dalam hal potensi bencana di daerah	1. Penanganan pencegahan konflik pada saat pemberian logistik di daerah yang mengalami bencana	
	SATPOL PP	1. Penyiapan personil 2. Penyiapan peralatan 3. Pengamanan logistik	1. Penyelenggaraan trantibum dan tranmas 2. Distribusi air bersih 3. Pendataan korban jiwa 4. Pengiriman logistik 5. Mengoptimalkan pengamanan aset -aset pemerintah 6. Pengamanan aset pemerintah	Pengamanan aset pemerintah dan masyarakat

Kelompok	Organisasi	SIAGA DARURAT	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
			7. Penegakan PERDA dan PERKADA 8. Mendirikan Shelter/Huntara	
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Membentuk SATGAS KPH 2. Melakukan groundcheck hotspot 3. Penyusunan Perencanaan LH, yang Didalamnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 4. Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 5. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga 6. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL) 7. Pengkajian dampak air dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan	1. Pemadaman api jika terjadi kebakaran 2. Berkoordinasi dengan Polres dan Kodim setempat jika api belum dapat dipadamkan	1. Mendata lahan yang terpapar Karhutla

Kelompok	Organisasi	SIAGA DARURAT	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
		8. Pengendalian Tata ruang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 9. Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan preventif. 10. Pengendalian Pencemaran udara. 11. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk ketangguhan iklim. 12. Implementasi kebijakan yang adaptif dan mitigatif dalam pengelolaan hutan dan lahan 13. Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 14. Rehabilitasi di kawasan / lahan kritis. 15. Konservasi keanekaragaman hayati, hutan, dan lahan gambut.		

Kelompok	Organisasi	SIAGA DARURAT	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
		16. Pengembangan dan pengelolaan rehabilitasi konservasi danau, sungai dan Sumber daya air lainnya. 17. Pengolahan lahan dan penguasaan aplikasi teknologi ramah lingkungan. 18. Pemulihan fungsi ekosistem gambut sebagai penyangga kehidupan. 19. Penyuluhan, monitoring dan pelaporan aksi mitigasi dan adaptasi GRK		
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Menginventarisasi objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana 2. Menerapkan pariwisata tangguh bencana 3. Menyusun rencana evakuasi di objek wisata 4. Memasang denah dan rambu evakuasi		1. Perbaikan infrastruktur pariwisata 2. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 3. Perbaikan layanan destinasi wisata
	Dinas Perhubungan	1. Penyiapan kendaraan / angkutan untuk evakuasi, distribusi logistik	1. Pengerahan kendaraan / angkutan untuk evakuasi, distribusi logistik	1. Pemulihan pelayanan transportasi umum 2. Perbaikan pelayanan transportasi umum

Kelompok	Organisasi	SIAGA DARURAT	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
		2. Perbaiki rambu jalan dan rambu tempat tertentu 3. Menyediakan sarana kendaraan	2. Pembuatan rambu jalan dan rambu tempat tertentu 3. Melakukan Rekayasa Lalu Lintas 4. Koordinasi dengan dishub kab/ko di lokasi bencana untuk mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan: pelaksanaan rekayasa lalulintas, peralatan rambu dan perlengkapan lainnya; 5. Penambahan personil sesuai kebutuhan	3. Memberikan pengaturan trayek sementara 4. Penambahan bus pendukung
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Penyusunan pedoman rencana keberlanjutan usaha (business continuity plan) pada industri dan UKM		1. Pemulihan fungsi fasilitas ekonomi 2. Bantuan permodalan dan pendampingan terhadap UKM terdampak bencana 3. Bantuan Sarana Usaha
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,	1. Melakukan penguatan terhadap kelembagaan desa dalam menghadapi bencana 2. Peningkatan kapasitas Aparatur Desa dan Masyarakat	1. Pendataan korban yang terkena bencana untuk mendapatkan bantuan dari dinas-dinas terkait (implementasi pendataan penduduk)	1. Pemulihan layanan pemerintahan desa

Kelompok	Organisasi	SIAGA DARURAT	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
	Kependudukan dan Catatan Sipil			
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	1. Pengelolaan risiko bencana berbasis keluarga/keluarga tangguh bencana. 2. Kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana.	1. Perlindungan bagi kelompok rentan pada saat evakuasi. 2. Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak dalam situasi bencana. 3. Pemenuhan kebutuhan bagi kelompok rentan di tempat pengungsian. 4. Perlindungan bagi kelompok rentan dari kekerasan fisik, kekerasan berbasis gender. 5. Perlindungan bagi kelompok rentan.	1. Pemulihan sosial, ekonomi. 2. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
TNI/POLRI	KODAM I/BB, LANTAMAL I, LANUD SOEWONDO	1. Membuat Pemetaan dan Sosialisasi kerawanan/risiko bencana Karhutla. 2. Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana Karhutla 3. Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah. 4. Penyiapan personil dan peralatan.	1. Pengiriman armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan. 2. Pengamanan daerah bencana Karhutla; 3. Pengamanan aset, penghidupan korban bencana 4. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 5. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat	1. Membantu Pemulihan keamanan dan ketertiban 2. Dukungan pemulihan infrastruktur penting, contoh : jembatan bailey 3. Pembersihan puing-puing reruntuhan Karhutla.

Kelompok	Organisasi	SIAGA DARURAT	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
		5. Peningkatan kapasitas personil. 6. Keterlibatan dalam penyusunan rencana kontingensi.	6. Pembuatan jalur evakuasi bencana Karhutla.	
	POLDA SUMUT	1. Membuat Rencana Pengamanan Kontingensi (AMAN NUSA DUA) 2. Peningkatan kapasitas personil. 3. Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan TNI	1. Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan. 2. Penegakan hukum. 3. Pengamanan aset penghidupan korban bencana. 4. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat. 5. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat. 6. Pemulihan keamanan dan ketertiban. 7. Dukungan pemulihan infrastruktur penting.	1. Pemulihan keamanan, ketertiban dan psikologis masyarakat
Organisasi/ Lembaga Vertikal	BMKG Wilayah I Sumatera Utara	1. Dukungan Prakiraan cuaca harian kajian Karhutla; 2. Peringatan Dini Cuaca yang bersifat anomali;	1. Peringatan Dini Karhutla. 2. Desiminasi info Karhutla dan cuaca ekstrim 3. Pengukuran skala getaran tanah (intensitas) 4. Memberikan informasi waktu peluruhan Karhutla susulan (after shock)	1. Membantu rekomendasi wilayah berbahaya Karhutla

Kelompok	Organisasi	SIAGA DARURAT	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
	PVMBG	1. Membuat Early Warning System.	1. Ikut Membantu evakuasi korban.	
	BNPP	1. Stand by 24 jam petugas rescuer On Calling 2. Melakukan pengecekan alat utama serviceable dan endurance 75% s.d 100% 3. Menyiapkan peralatan SAR dan Posko SAR 4. Mengaktifkan fungsi intelijen, investigasi dan mengumpulkan semua informasi yang menjadi data pendukung; 5. Meningkatkan koordinasi tentang updating data Karhutla dari instansi pemerintah setempat	1. Membentuk organisasi SAR 2. Mendirikan tenda posko SAR 3. Menyusun perencanaan operasi SAR terkait apabila dalam karhutla dicurigai terdapat korban jiwa 4. Membuat jaring komunikasi SAR 5. Membriefing (menugaskan) Rescuer dan SRU (Search Rescue Unit) 6. Melaksanakan operasi SAR (Mencari, menolong, menyelamatkan dan evakuasi) 7. Melaksanakan degriefing (Pengakhiran tugas) dan evaluasi.	1. Mengevaluasi SK Tanggap Darurat 2. Penghentian operasi SAR 3. Pemantauan update kondusu Karhutla secara berkala 4. Dokumentasi dan laporan untuk bahan evaluasi
	BWS SUMATERA II	1. Pengamatan Tinggi Muka Air di Sungai dan Curah Hujan Melalui Pos Duga Air dan Stasiun Curah Hujan yang Ada Tersebar dalam Pengelolaan BWS Sumatera II. 2. Penyediaan Stok Bahan Banjiran yang Tersimpan di Workshop BWS Sumatera II.	1. Identifikasi Lapangan Terhadap penyebab, dampak dan kebutuhan yang diperlukan akibat bencana. 2. Bantuan dukungan bahan banjir dan peralatan alat berat sesuai kebutuhan hasil identifikasi lapangan. 3. Melaksanakan kegiatan tanggap darurat sesuai hasil	1. Melaksanakan rehabilitasi sarana/prasarana SDA yang rusak akibat bencana sesuai dengan hasil kajian tim teknis BWS Sumatera II dan Pusat serta ketersediaan dana. 2. Melaksanakan rekonstruksi/pembangunan kembali sarana/prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana

Kelompok	Organisasi	SIAGA DARURAT	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
			kajian tim teknis BWS Sumatera II dan Pusat.	sesuai hasil kajian tim teknis tim BWS Sumatera II dan Pusat serta ketersediaan dana.
	Manggala Agni/LHK	1. Monitoring hotspot 2. Melakukan ground check 3. Melakukan size up untuk wilayah yang terpapar	1. Pemadaman hutan dan lahan yang terbakar	Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui dampak
	PERUM BULOG	1. Suply Chain stok pangan pokok (beras) dan pangan pokok lain (non beras) 2. Penyiagaan buffer stock	Menyediakan beras dipintu gudang Perum Bulog yang ada diwilayah bencana	Penyaluran beras pasca bencana (sampai pintu gudang)
	RAPI		1. Menggalang komunikasi dalam bentuk jaringan komunikasi untuk mendata potensi-potensi bencana 2. Membantu jaringan komunikasi radio	
Lembaga Masyarakat	WALHI SUMUT	1. Pendidikan melalui beberapa pelatihan berbasis mitigasi perubahan iklim bagi kelompok dampingan dan mahasiswa di universitas sumatera utara. 2. Pemberdayaan masyarakat berbasis mitigasi dan adaptasi perbahan iklim (ekonomi kerakyatan). 3. Penghimpun dan mengidentifikasi kerusakan	1. Membantu proses darurat bencana melalui fasilitasi relawan tangguh bencana	

Kelompok	Organisasi	SIAGA DARURAT	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
		lingkungan dan kejahatan lingkungan. 4. Menyediakan relawan tangguh bencana (sifatnya membantu).		
	FPRB SUMUT	1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Penanggulangan Provinsi Sumatera Utara.		
	PRAMUKA KWARDA SUMUT	1. Pelatihan dan peningkatan kapasitas Relawan.	1. Penyediaan Dapur Umum.	
	MDMC	1. Pendampingan dalam pembentukan SPAB. 2. Pelatihan Relawan.		
Dunia Usaha	PT PLN	1. Menyiapkan Tim PDKB (Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan) beserta peralatan di setiap PLN UP3.	2. Perbaikan jaringan listrik. 3. Penyediaan energi listrik cadangan.	
	Bank Mandiri	1. Melakukan perencanaan dan monitoring pelaksanaan program krisis manajemen dan emergency respon. 2. Mengelola pelaporan aktivitas krisis manajemen dan emergency respon dan menyampaikan kepada ketua manajemen krisis;	1. Berkoordinasi dengan pihak stakeholder internal (cabang, area, region dan kantor pusat) dalam penanggulangan krisis; 2. Melaksanakan koordinasi penanggulangan dan pengendalian yang terkait	1. Menjaga keamanan aset Bank Mandiri; 2. Tindak lanjut pasca kritis dengan berkoordinasi dengan stakeholder internal (cabang, area, region dan kantor pusat) dan eksternal (basarnas, KNKT, Polisi, Pemadam kebakaran dan pihak terkait lainnya);

Kelompok	Organisasi	SIAGA DARURAT	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
		3. Berkoordinasi dengan pihak stakeholder internal (cabang, area, region dan kantor pusat) terkait persiapan menghadapi bencana. 4. Berkoordinasi dengan pihak stakeholder eksternal (basarnas, KNKT, Polisi, Pemadam kebakaran dan pihak terkait lainnya) persiapan menghadapi bencana; 5. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas program awareness/training/testing/exercise	dengan keselamatan pegawai saat terjadi bencana. 3. Memberikan masukan kepada CMT (crisis managemet team) atas laporan hasil analisa, penilaian serta cakupan insiden yang terjadi di lokasi terdampak.	
Perguruan Tinggi	USU	1. Penyediaan Tenaga Ahli. 2. Penelitian dan Pengembangan untuk 14 Jenis Bencana. 3. Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. KKN Tematik.	1. Mahasiswa Pecinta Alam untuk penyelamatan korban.	1. Pengabdian Kepada Masyarakat.
	UISU			
	POLMED			
	USM			

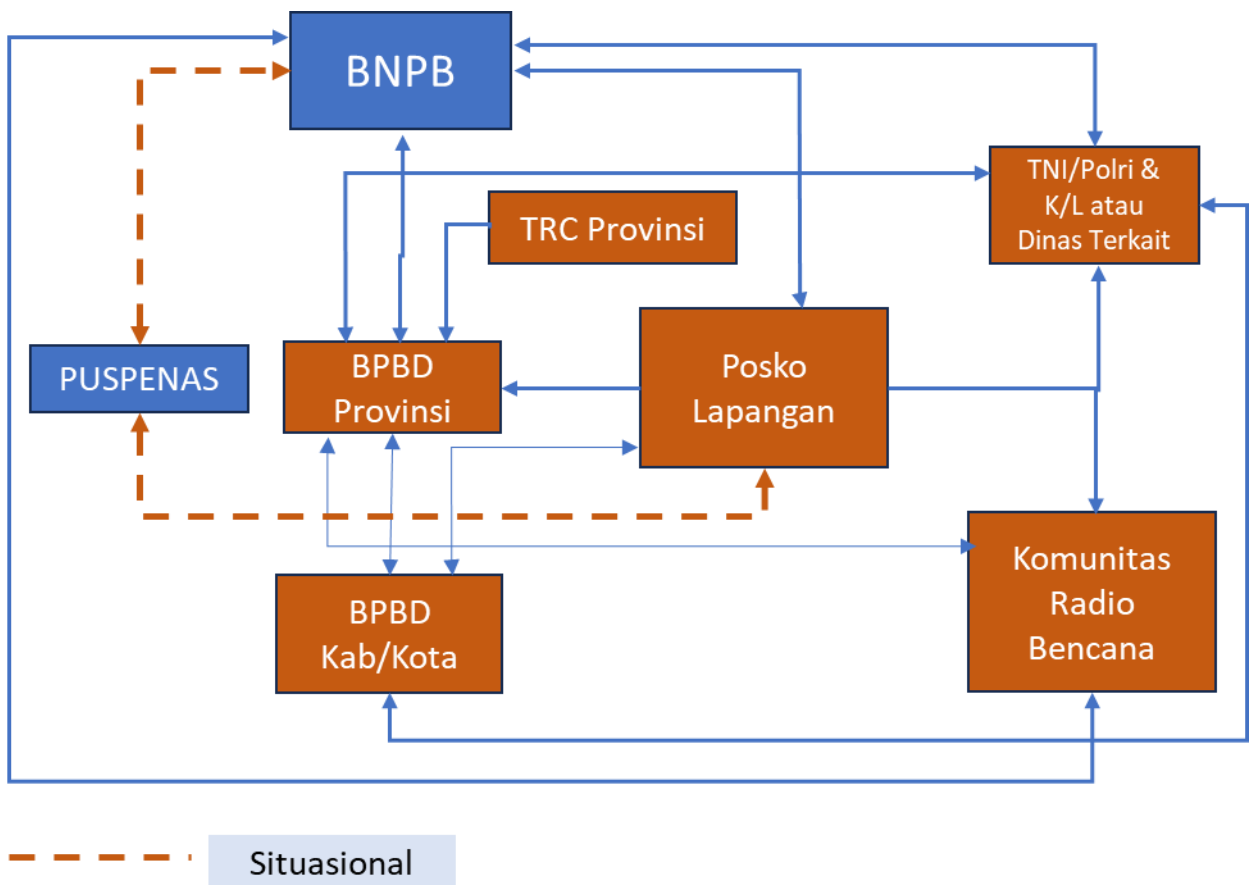
Sumber : Penjaringan melalui FGD, 2023

LAMPIRAN 4

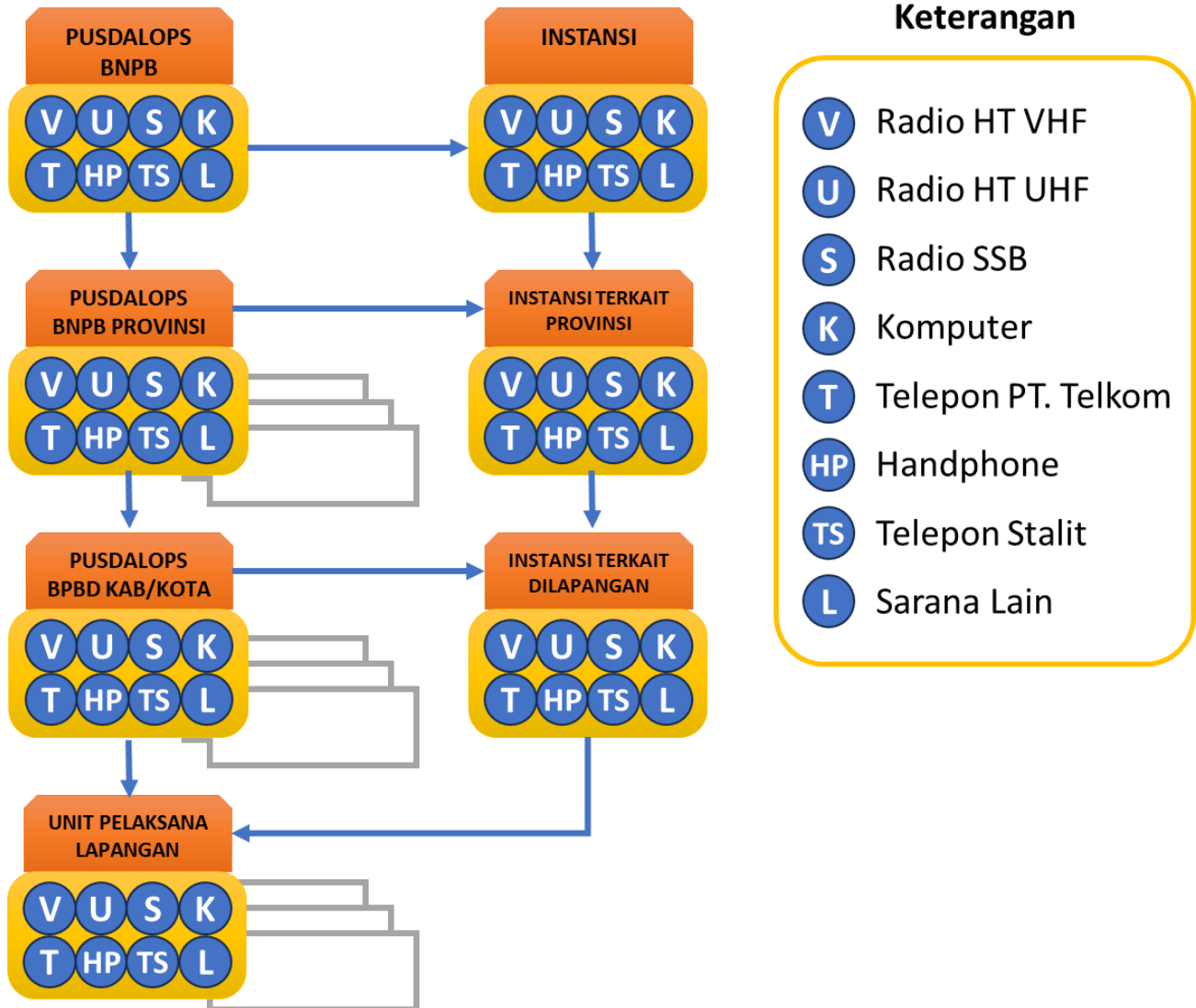
JARING KOMUNIKASI

Jaring Komunikasi Pada Saat Tanggap Darurat :

- Hampir seluruh komponen dapat berkomunikasi pada saat tanggap darurat.
- Untuk PUSPENAS (Pusat Pendamping Nasional) hanya berkomunikasi dengan BNPB dan posko lapangan
- Untuk Tim Reaksi Cepat provinsi hanya dapat berkomunikasi lapangan dengan BPBD provinsi dan Posko
- Koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Polisi dan Kementerian, Lembaga atau Dinas terkait disesuaikan setiap tingkat provinsi/kabupaten.



Konfigurasi Jaring Komunikasi dapat dilihat pada gambar berikut:



LAMPIRAN 5

ESTIMASI KETERSEDIAAN

DAN KEBUTUHAN

SUMBERDAYA

Tabel 1. Ketersediaan Sumberdaya Manusia (Skenario Kebakaran hutan dan lahan)

No	Instansi	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	Status
1	BMKG Wil-I Medan	Administrasi dan Sekretariat	10 Personil				Tercukupi
	POLDA SUMUT		5 Personil	POLDA SUMUT	08126557712		
2	BMKG Wil-I Medan	Publikasi dan Informasi	8 Personil			Publikasi dan Informasi Yang terdiri dari : 1. Prakiraan Cuaca Harian 2. Prakiraan Musim 3. Potensi Bencana Hidrometeoro logi setiap bulan 4. Informasi iklim dasar harian 5. Laporan pengamatan Hotspot 6. Informasi iklim bulanan 7. Sistem peringatan hutan dan lahan (spartan) 8. Peringatan	Tercukupi

No	Instansi	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	Status
						dini cuaca tiap 3 jam 9. Informasi tentang hari tanpa hujan 10. Press Realease tentang iklim musim kemarau	
	POLDA SUMUT		42 Personil	POLDA SUMUT	0852 4454 7477		
	Dinas Komunikasi dan Informasi Provsu		8 Personil			Tim Peliput	
3	BMKG Wil-I Medan	Perencanaan dan Pendataan			0818 799 301	Perencanaan dan pendataan yang terdiri dari : 1. Data observasi metereologi 2. Data satelit penginderaan jarak jauh (satelit dan radar)	Tercukupi
	POLDA SUMUT		50 Personil	POLDA SUMUT			
4	Kodam I/BB (Skenario : ± 1000 personil pengungsi)	Operasi Tanggap Darurat	8 SST + 1 SSK	1. Makorem Sibolga 2. Kodim Padang		SST = Satuan Setingkat Pleton (±240 Personil)	Tercukupi

No	Instansi	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	Status
				Sidimpuan 3. Batalyon 123 Rajawali		SSK = Satuan Setingkat Kompi (±100 Personil)	
	Lanud Soewondo		443 Personil 243 Personil 186 Personil	1. Lanud 2. Kosek 3. Pasgad			
	TNI AL (Lantamal I Belawan)		250 Personil = - 50 Personil - 100 Personil - 100 Personil	- Lanal Tanjung Balai Asahan (Type C) - Yon Marhanlan I Belawan - Yonif 8 Marinir			
	POLDA SUMUT		662 Personil	POLDA SUMUT	0813 3732 1995	DIT SAMAPTA	
			200 Personil	POLDA SUMUT	0812 6806 0001	DITPOLAIRUD	
			97 Personil	POLDA SUMUT	0853 7020 1472	BIDDOKES	
			1.803 Personil	POLDA SUMUT	0852 1523 1993	SATBRIMOB	
	BNPP Medan/BASARNAS		115 Personil : - 25 Personil - 13 Personil - 5 Personil - 24 Personil - 48 Personil	- Tanjung Balai - Belawan - Madina - Sibolga - KANSAR Medan			
	BPBD Provsu		± 160 Personil	BPBD Provsu		Yang terdiri dari 8 Klaster = 1. Logistik 2. Kesehatan 3. Operasi SAR	

No	Instansi	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	Status
						4. Pendidikan 5. Pemulihan Dini 6. SARPRAS 7. Pengurangan Risiko Bencana 8. Pudalops	
	Perum BULOG		20 Personil 10 Personil 50 Personil	Padang Sidimpuan Sibolga Prov Kanwil			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		20 Personil	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu		10 personil	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu			
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumberdaya Mineral Provsu		20 Personil	Cabdis Padang Sidimpuan, Dairi, Siantar, Labuhanbatu		Total Pegawai 204 Personil	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil		5 Personil				

No	Instansi	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	Status
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu		5 Personil				
	Dinas Sosial Provsu		220 Personil	Dinas Sosial Provsu		20 Personil untuk Rescuer dan Dapur Umum 200 Personil TAGANA	
	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu		10 Personil				
	PTPN II		250 Personil			Tim Tanggap Darurat Karhutla	
	PTPN IV		400 Personil			Tim Tanggap Darurat Karhutla	
	Satuan Polisi Pamong Praja Provsu		200 Personil			Total seluruh Personil 325 Orang Dengan catatan : yang dapat diarahkan dalam penanganan bencana sebanyak 200 Personil	

No	Instansi	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	Status
5	Dinas Pendidikan Provsu		150 Personil				
	RAPI Sumut	Komunikasi	2.300 Personil			Dari seluruh kab/ko di Provinsi Sumatera Utara	Tercukupi
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provsu	Jitupasna	5 Personil	Bappelitbang Provsu			Tercukupi
	Perum Tirtanadi	Teknisi	8 Personil	Cabang Tapsel			Tercukupi
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu		5 Personil				

Tabel 2. Ketersediaan Peralatan

No	Instansi	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan	Status
A. Kendaraan Roda 4								TERCUKUPI
1	POLDA SUMUT	Kendaraan Dinas	9 Unit					
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu	Mobil Double Cabin	1 Unit	Baik				
3	BNPP Medan/BASARNAS	Mobil Double Cabin	6 Unit	Baik	Sibolga/Madina		Sibolga 4 Unit Madina 2 Unit	
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu	Double Cabin	1 Unit	Baik				
		Minibus	2 Unit	Baik				
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumberdaya Mineral Provsu	Double Cabin	1 Unit	Baik	Medan			
		Minibus	1 Unit	Baik	Medan			
6	BPBD Provinsi Sumut	Mobil Rescue Komando	1 Unit	Baik				
		Mobil Truk Serbaguna	2 Unit	Baik				
		Mobil Logpal	1 Unit	Baik				
		Mobil Evalog	1 Unit	Baik				
		Mobil Komunikasi	1 Unit	Baik				
7	Dinas Sosial Provsu	Duble Cabin	2 Unit	Baik				
		Minibus	1 Unit	Baik				
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu	Minibus	1 Unit	Baik	Medan			
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu	Minibus	3 Unit	Baik	Medan			
10	Dinas Kesehatan Provsu	Double Cabin	2 Unit	Baik				
		Sepeda Motor	2 Unit	Baik				

No	Instansi	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan	Status
		(Lapangan)						
11	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu	Mobil	3 Unit	Baik				
		Kendaraan Roda 2	14 Unit	Baik				
12	Satuan Polisi Pamong Praja Provsu	Truk Dalmas	6 Unit	Baik				
		Mobil Komando	1 Unit	Baik				
		Mobil Patroli	5 Unit	Baik				
13	Dinas Pendidikan Provsu	Minibus	5 Unit	Baik				
		Pick Up	2 Unit	Baik				
14	PTPN IV	Double Cabin	40 Unit	Baik				
		Mobil Hydrant	25 Unit	Baik				
15	PTPN II	Double Cabin	25 Unit	Baik				
		Hydrant Mobile/Mobil Tangki	40 Unit	Baik				
		Mobil DAMKAR	1 Unit	Baik				
B. Alat Berat								Tercukupi
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu	Excavator Standart	3 Unit	Baik	Medan			
		Dump Truck	1 Unit	Baik				
2	BNPP Medan/BASARNAS	Truk Compartement	2 Unit	Baik	Medan			
		Truk Ampibi	1 Unit	Baik	Medan			
3	KODAM I/BB	Excavator	1 Unit	Baik	ZIDAM I/BB			
		Dozer	1 Unit	Baik	ZIDAM I/BB			
		Excavator	5 Unit	Baik	YONZIPUR 1/DD			
		Dozer	2 Unit	Baik	YONZIPUR 1/DD			
		Grader	2 Unit	Baik	YONZIPUR 1/DD			
		Dump Truck	14 Unit	Baik	YONZIPUR			

No	Instansi	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan	Status
					1/DD			
4	POLDA SUMUT	Dump Truck	1 Unit	Baik	POLDA SUMUT			
C. Kendaraan Penyedia Air								Tercukupi
1	PERUM TIRTANADI	Mobil Tangki Air 5000 Ltr	2 Unit	Baik	Medan			
2	BPBD PROVSU	Mobil Tangki Air 5000 Ltr	2 Unit	Baik	Medan			
		Mobil Toilet	1 Unit	Baik				
		Mobil Water Treatment	1 Unit	Baik				
3	POLDA SUMUT	Kendaraan Khusus Water Treatment	1 Unit	Baik	POLDA SUMUT			
D. Kendaraan Dapur Umum								Tercukupi
1	POLDA SUMUT	Kendaraan Khusus Dapur Lapangan	1 Unit	Baik	SATBRIMOB			
		Kendaraan Khusus Dapur Lapangan	1 Unit	Baik	DITSAMAPTA			
2	BNPP Medan/BASARNAS	Dapur Umum	1 Unit	Baik			Untuk TIM SAR	
3	BPBD Provsu	Truk Dapur Umum	1 Unit					
E. Kendaraan Pelayanan Kesehatan								Tercukupi
1	KODAM I/BB	Ambulance	2 Unit	Baik	Denkeslap Kesdam I/BB			
		Ambulance	1 Unit	Baik	Denkesyah 01.04.01 P.S			
		Ambulance	1 Unit	Baik	01.04.02 SBG			
2	BASARNAS	Medis Personal	1 Set	Baik				
3	BANK MANDIRI	Ambulance	1 Unit	Baik	Medan			
4	BPBD Provsu	Mobil Ambulance	1 Unit	Baik				
5	Dinas Kesehatan Provsu	Ambulance Jenazah	1 Unit	Baik				
		Ambulance Basic	4 Unit	Baik				
6	PTPN II	Ambulance	1 Unit	Baik				

No	Instansi	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan	Status
7	PTPN IV	Ambulance	1 Unit	Baik				
F. Peralatan Penyelamatan								Tercukupi
1	POLDA SUMUT	Perahu Karet LCR	2 Unit	Baik				
		Kayak	2 Unit	Baik				
		Life Jacket	29 Unit	Baik				
		Alat Deteksi Korban Vibrascope	2 Set	Baik				
		Alat eteksi Korban Vibraphone	2 Set	Baik				
		Gergaji Mesin Chain Saw	3 Unit	Baik				
		Ring Buoy	3 Buah	Baik				
		Senter Polarion	1 Unit	Baik				
		Rigid Inflatable Boat	1 Unit	Baik				
		Pelampung	18 Unit	Baik				
		Pelampung Otomatis	40 Unit	Baik				
		Lifebuoy	4 Unit	Baik				
		Peralatan Selam	8 Set	Baik				
		DVI	1 Unit	Baik				
		Pelampung Perorangan	86 Buah	Baik				
		Carbiner	36 Buah	Baik				
		Tali Karmantel Besar	1 Utas	Baik				
		Tali Karmantel Kecil	8 Utas	Baik				
		Figour X	25 Buah	Baik				
		Ransus SAR	1 Unit	Baik				
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu	Perahu Karet	1 Unit	Baik				
3	BNPP Medan/BASARNAS	Kapal 40 m	1 Unit	Baik	Sibolga			
		Heli	2 Unit	Baik	Atang Sandjaja			

No	Instansi	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan	Status
		Palsar Air	1 Set	Baik	Sibolga/Madina			
		Palsar Darat/Mountering	1 Set	Baik				
		Alat Ekstrikasi	1 Set	Baik	Sibolga			
		RIB	1 Unit	Baik	Sibolga			
		Perahu Karet	4 Unit	Baik	Sibolga/Madina		SIBOLGA 3 UNIT MADINA 1 UNIT	
		Alkom	1 Set	Baik	Sibolga			
		Kantong Jenazah	100 Lembar	Baik				
4	Dinas Kesehatan Provsu	Perahu Karet	2 Unit	Baik				
		Kantong Jenazah	50	Baik				
5	BPBD Provsu	Perahu Polythelyne	2	Baik				
		Perahu Karet (Slinger)	2	Baik				
		Perahu Lipat	3	Baik				
		Perahu Karet Merk Ocean	1	Baik				
		Perahu Karet isi 6 Merk Zebec	2	Baik				
		Rompi Pelampung	30	Baik				
		Helmet Water Rescue	10	Baik				
		Pompa Kaki Perahu	1	Baik				
		Dayung	30	Baik				
		Tangki Perahu	9	Baik				
		Pompa Tangan Perahu	1	Baik				
		Selang Tangki Perahu	2	Baik				
		Tali Putih Perahu	1	Baik				
		Trailer	1	Baik				
		Pendayung Perahu Karet	20	Baik				
		Pelampung	25	Baik				

No	Instansi	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan	Status
		Tandu Scope	1	Baik				
		Tandu Lipat	1	Baik				
		Tandu Basket	6	Baik				
		Tandu Spinal	7	Baik				
		Tandu Vertical Rescue Repling Orange	1	Baik				
		Tandu Vertical Rescue Repling Kuning	1	Baik				
		Mesin Perahu 40 PK (Mercury)	1	Baik				
		Mesin Perahu 25 PK (Parsun)	1	Baik				
		Mesin Perahu 9.8 PK (Tohatsu)	2	Baik				
		Mesin Perahu 18 PK (Tohatsu)	1	Baik				
		Tali Karmantel Putih (APBD 2021)	3	Baik				
		Tali Karmantel Kuning (BNPB)	1	Baik				
		Vertical Rescue Back Tali Temali & Carbiner	1	Baik				
		Life Jacket	40	Baik				
		Water Pump	2	Baik				
		Helm Safety	16	Baik				
		Mesin Pompa Air (Honda)	3	Baik				
		Pelampung Air	6	Baik				
		Tali Tambang Hijau	1	Baik				
		Chinsaw (APBD 2021)	5	Baik				
		Mesin Pemotong Batu	1	Baik				

No	Instansi	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan	Status
		(Fire Rescue)						
		Selang Air Kain	4	Baik				
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu	Goni/Sand Bag	5000 lembar	Baik				
7	Dinas Perhubungan Provsu	Speedboat	1 Unit	Baik				
8	PTPN II	Gepyok (Pemukul Api)	150 Unit					
		APAR	225 Unit					
9	PTPN IV	Gepyok (Pemukul Api)	240 Unit					
		APAR	2179 Unit					
10	MANGGALA AGNI	Pemukul Api	30 Unit					
		Kapak 2 Fungsi	45 Unit					
		Garu Tajam	45 Unit					
		Garu Pacul	45 Unit					
		Parang	45 Unit					
		Jetshooter	90 Unit					
		Mesin Pompa	15 Unit					
		Trail	81 Unit					
		Slip On/Pick Up	18 Unit					
		Tangki Air	4 Unit					
		Monilog	12 Unit					
		GPS	15 Unit					
		Drone	3 Unit					
		Tenda	6 Unit					
		Velbed	90 Unit					
G. Peralatan Pengungsian								Tercukupi
1	POLDA SUMUT	MTP (Makanan Siap Saji)	2 Kotak	Baik			DITSAMAPTA	
		Tenda Serbaguna	107 Set	Baik			SATBRIMOB	

No	Instansi	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan	Status
2	BNPP Medan/BASARNAS	Tenda Posko	1 Set	Baik dan Lengkap	Sibolga dan Madina			
3	Dinas Kesehatan Provsu	Tenda Rumah Sakit Darurat Lapangan	19 Unit	Baik			Dengan berbagai ukuran	
4	KODAM I/BB	Tenda Serbaguna	8 Set	Baik				
		Tenda Dapur	5 Set	Baik				
		Tenda Kesehatan	3 Set	Baik				
		Tenda Pleton	8 Set	Baik				
		Velbed	130 Unit	Baik				
5	BPBD PROVSU	Tenda Pengungsi	2 Unit	Baik				
		Tenda Pleton	6 unit	Baik				
		Tenda Keluarga	5 unit	Baik				
		Tenda Keluarga Keong	2	Baik				
		Tenda Keluarga	10	Baik				
		Tenda Posko	2	Baik				
		Tenda Gulung	25	Baik				
		WTP 250 Lt	2	Baik				
		WTP Mini	3	Baik				
		Flexibel Tank 1000 Ltr	2	Baik				
		Flexibel Tank 2000 Ltr	2	Baik				
		Velbed	150	Baik				
		Matras/Alas Tenda	110	Baik				
		Meja Lipat	6	Baik				
		Besi Gantungan Pakaian	3	Baik				
		White Board	1	Baik				
		Indoor AC Portable	2	Baik				
		Outdoor AC Portable	2	Baik				
		Tangga Konektor/Biru	1	Baik				
6	RAPI SUMUT	Tenda Keluarga	3 Unit	Baik				
H. Peralatan Publikasi dan Informasi								Tercukupi

No	Instansi	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan	Status
1	BASARNAS	Humas/Center						
		HT	30 Unit	Baik				
		Drone	3 Unit	Baik			2 Unit Medan 1 Unit Madina	
2	BPBD PROVSU	Drone	2 Unit	Baik				
		HT	10 Unit	Baik				
		Pesawat Radio SSB (Icom M700 Pro)	1	Baik				
		RIG (Icom) K-V8000	1	Baik				
		Power Supply M6 3000	1	Baik				
		Tripot Kamera	2	Baik				
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu	Drone	1 Unit	Baik				
4	POLDA SUMUT	Drone	1 Unit	Baik				
		Pemancar Mobile	2 Unit	Baik				
		HT	10 Unit	Baik				
		Mobil Unit Penerangan Masyarakat	1 Unit	Baik				
4	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu	Drone	1 Unit	Baik				
5	PEMDES	Drone	1 Unit	Baik				
6	KODAM I/BB	HT		Baik				
7	LANTAMAL I BELAWAN	HT	10 Unit	Baik				
8	Dinas Kesehatan Provsu	HT	10 Unit	Baik				
9	RAPI SUMUT	Pemancar	2 Set	Baik				
10	Dinas Komunikasi dan Informasi Provsu	Kamera	2 Unit	Baik				
		Drone	2 Unit	Baik				

No	Instansi	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan	Status
11	Dinas Perhubungan Provsu	HT	10 unit	Baik				
		Drone	1 Unit	Baik				
I. Tempat Pelayanan Kesehatan								Tercukupi
1	BNPP Medan/BASARNAS	Medis Person		Baik				
2	POLDA SUMUT	Poliklinik Biddokes POLDA SUMUT	1 Unit	Baik			BIDDOKES	
		RS TK.II Maskhadiran Medan	1 Unit	Baik			SATBRIMOB	
J. Gedung								Tercukupi
1	BASARNAS	Pos SAR	1 Unit	Baik	Sibolga			
		Pos Unit Siaga	1 Unit	Baik	Madina			
2	KODAM I/BB	Rumkit Tk II 01.05.01	1 Unit	Baik	Medan Kesdam I/BB			
		Rumkit Tk IV 01.07.01	1 Unit	Baik	P. Siantar			
		Rumkit Tk IV 01.07.02	1 Unit	Baik	Binjai			
		Rumkit Tk IV 01.07.03	1 Unit	Baik	P. Sidempuan			

Tabel 3. Ketersediaan Bahan/Sediaan (Habis Pakai)

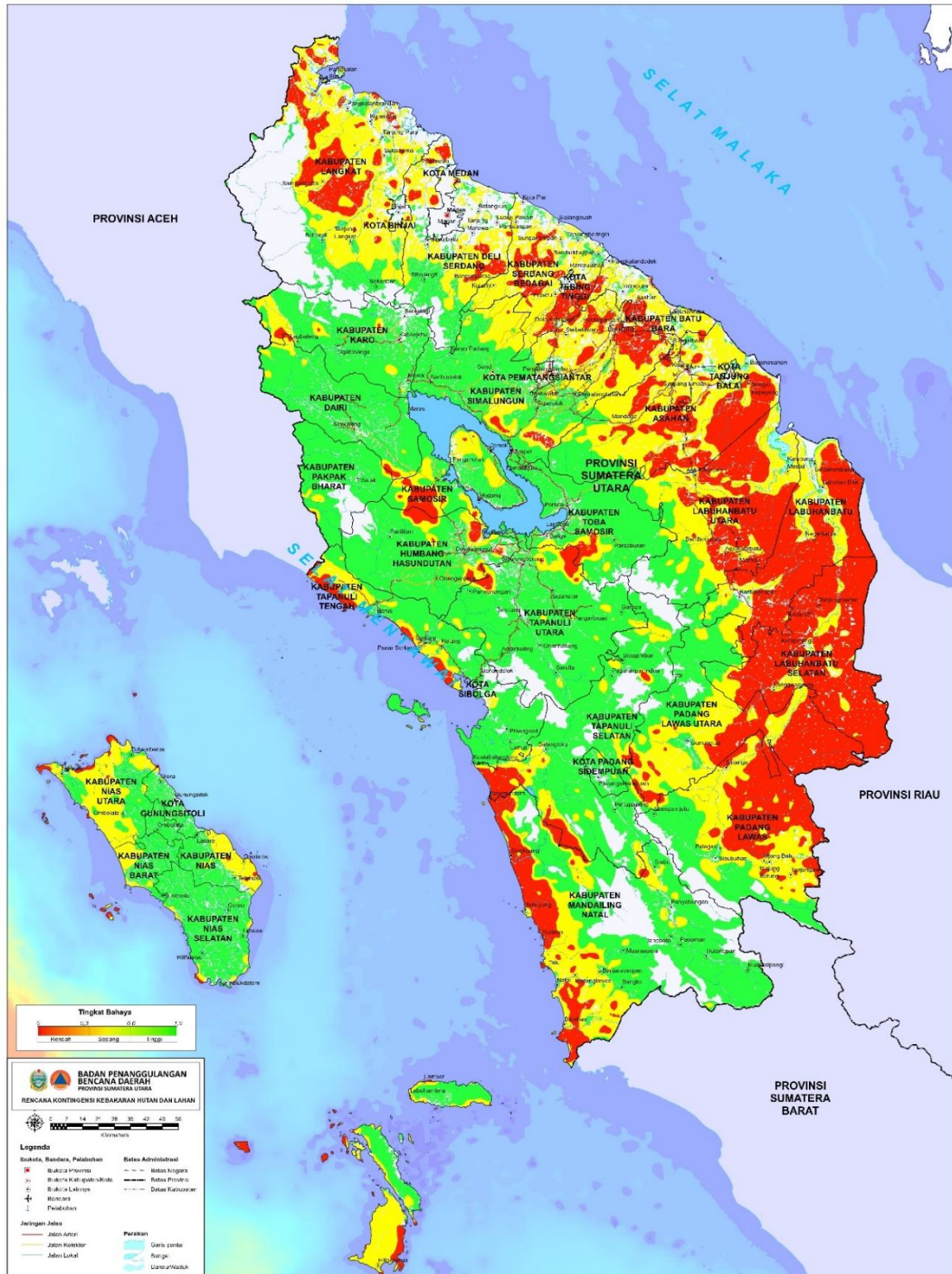
No	Instansi	Jenis	Jumlah	Satuan	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
Persediaan Alat								Tercukupi
1	BPBD Provinsi Sumatera Utara	Tensi Meter + STETOSKOP + THERM :1 SET	1		Baik			
		Tempat Tidur Pasien	1		Baik			
		Tangga Pasien	1		Baik			
		Tas Siaga Bencana (Warna Merah)	1		Baik			
		Lemari Obat (APBD 2021)	1		Baik			
	PTPN I	Masker	500	Kotak				
	PTPN IV	Masker	500	Kotak				

LAMPIRAN 6

ALBUM PETA

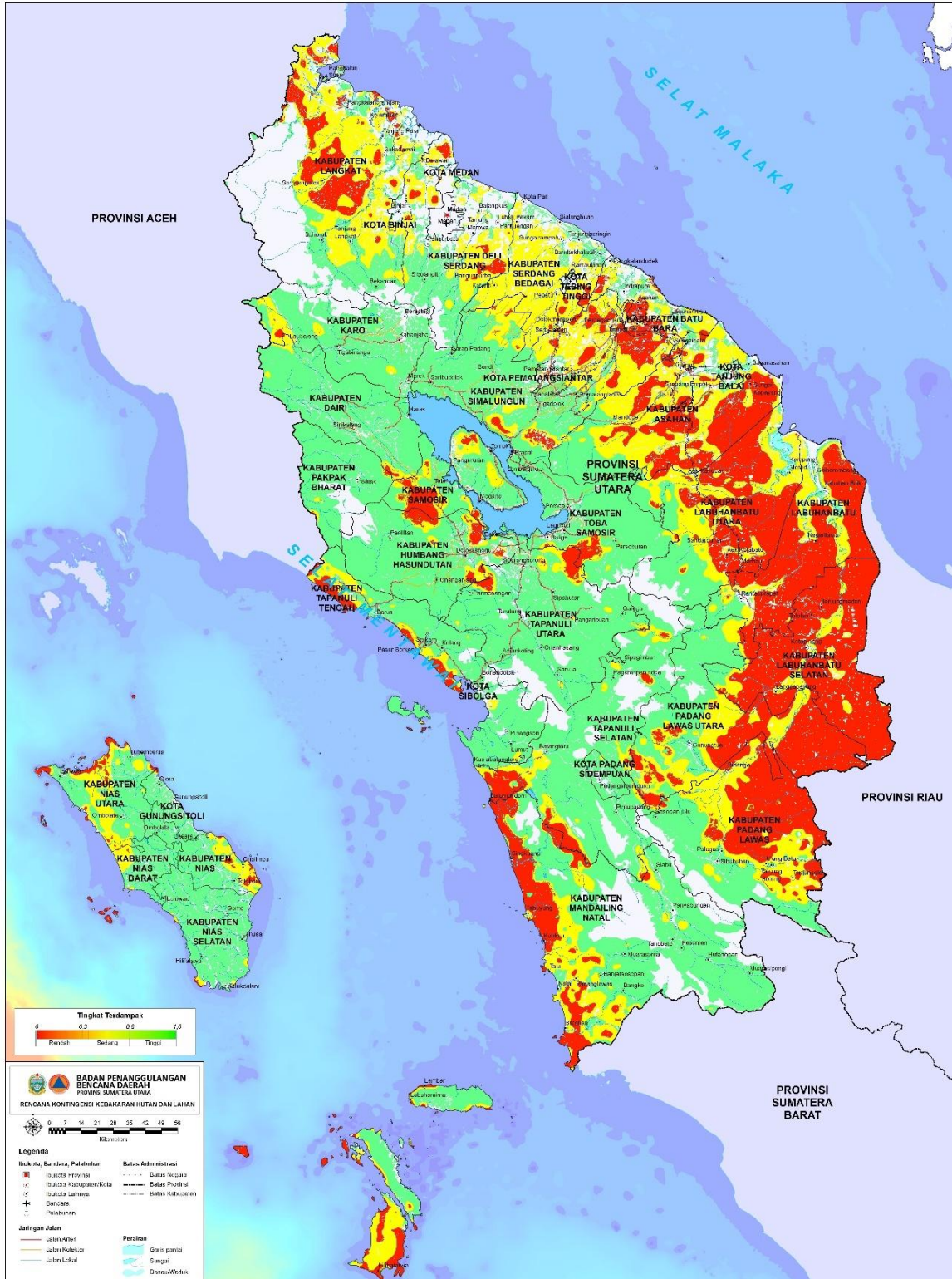
1. Peta Bahaya

PETA BAHAYA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA



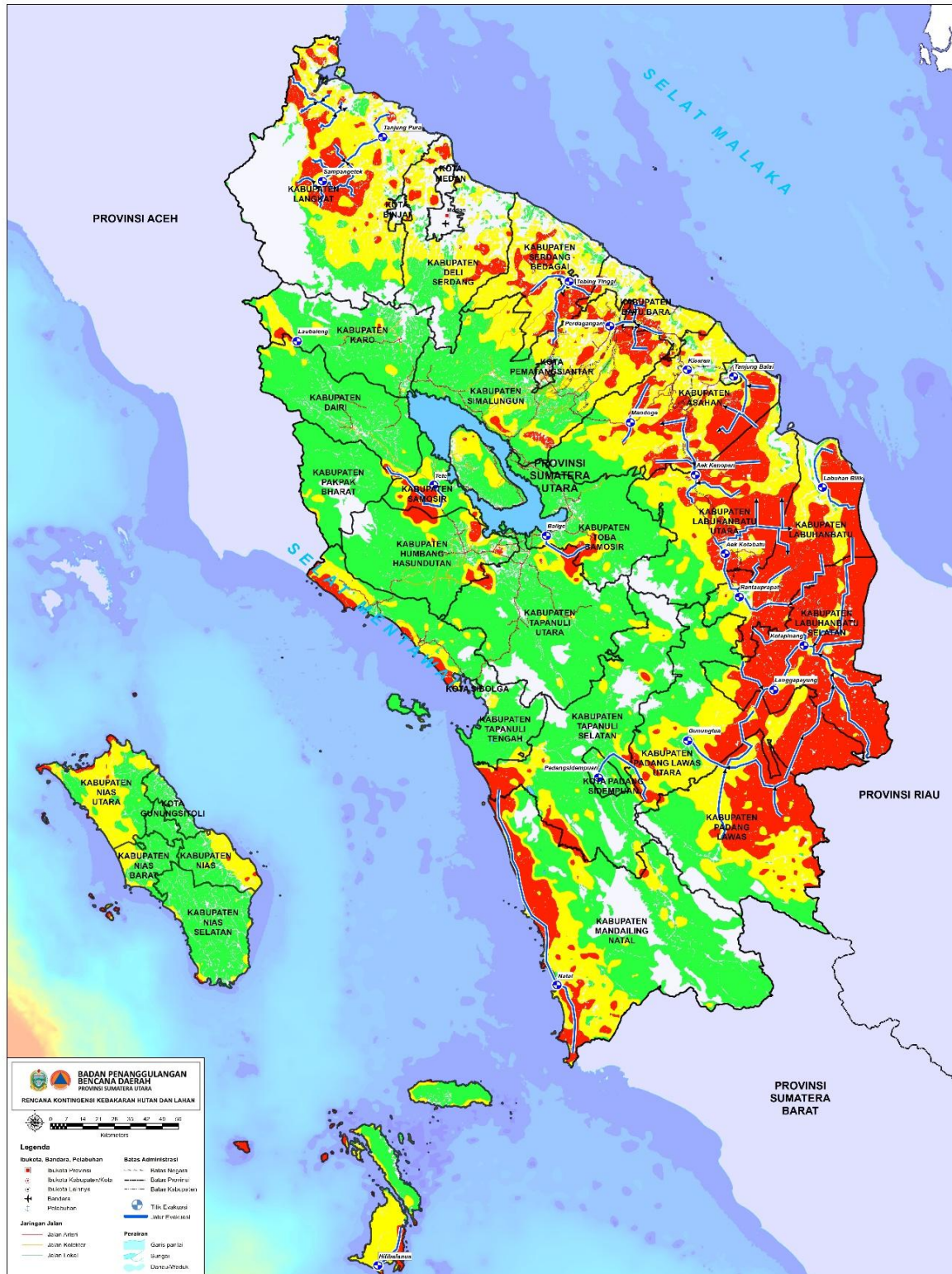
2. Peta Wilayah Terdampak

PETA TERDAMPAK KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA



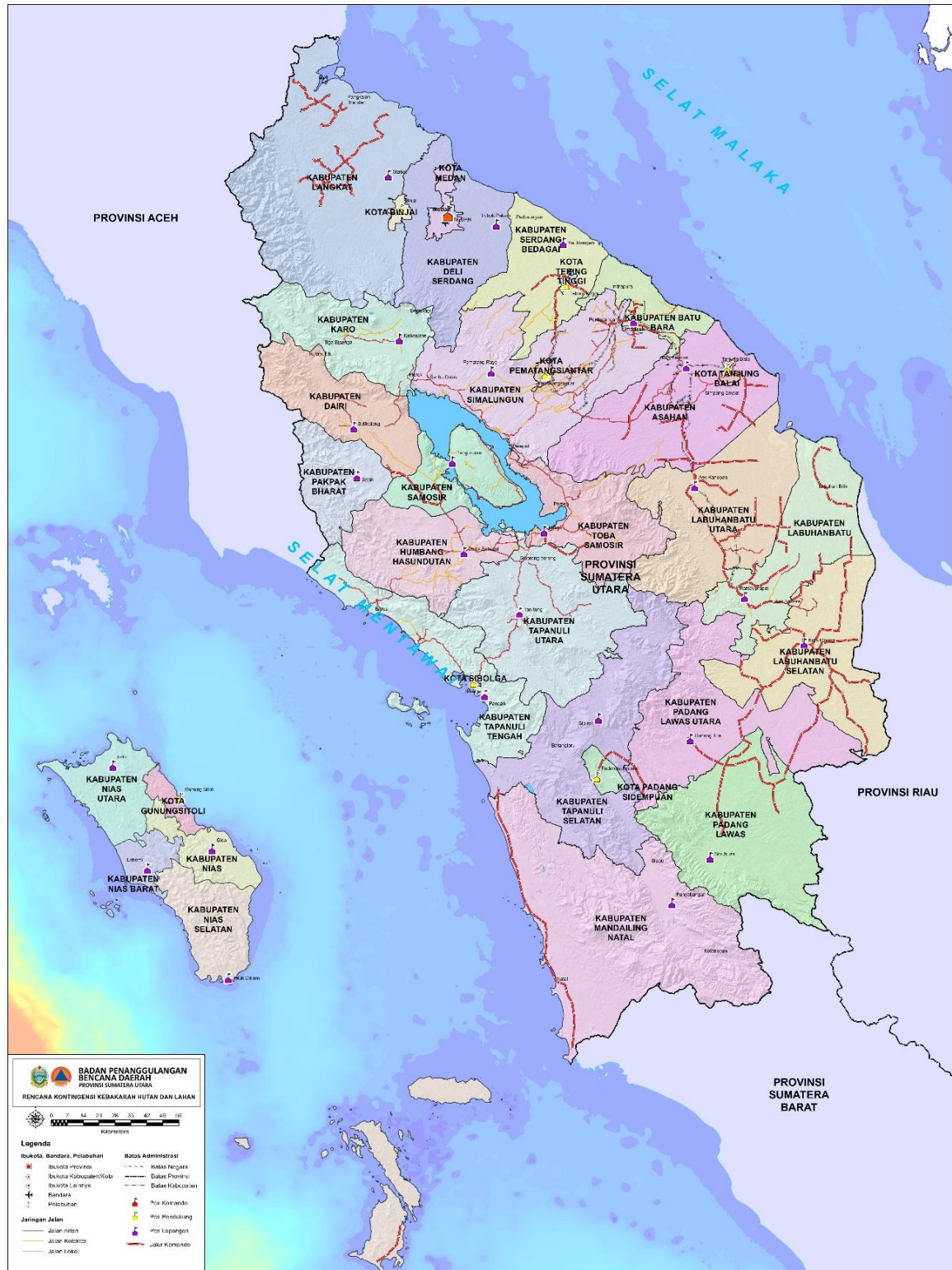
3. Peta Jalur dan Titik Evakuasi

PETA JALUR DAN TITIK EVAKUASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA



4. Peta Operasi Penanganan Kedaruratan

PETA PENANGANAN KEDARURATAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA



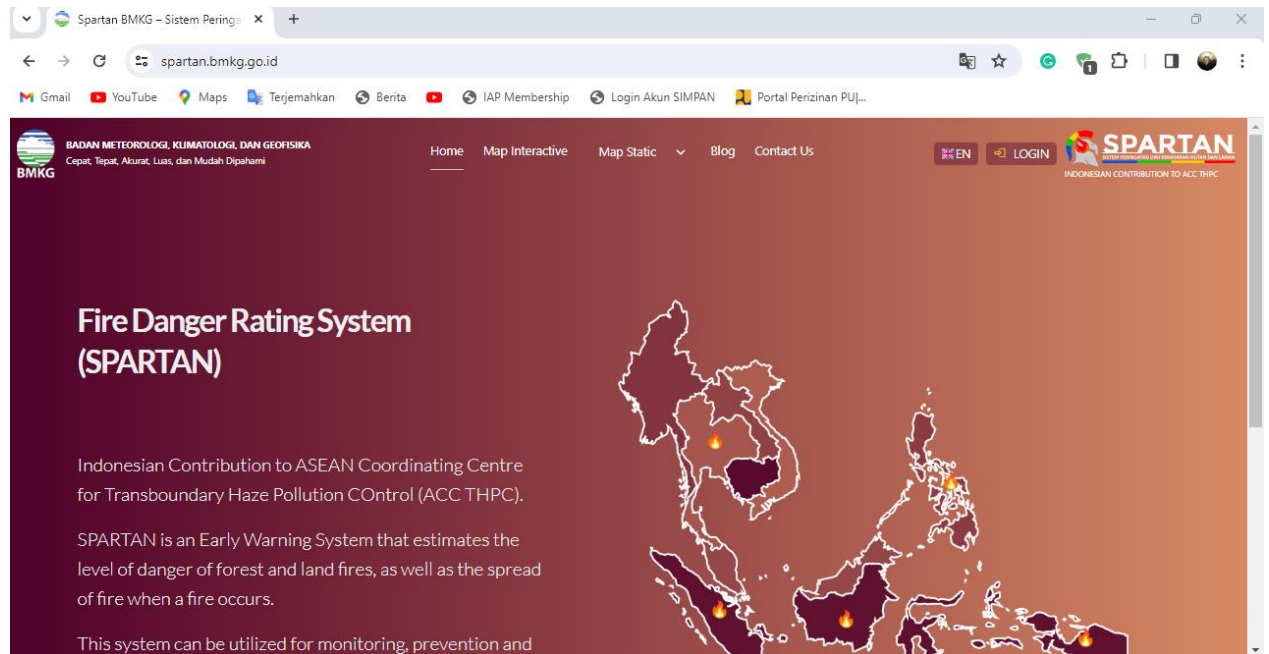
LAMPIRAN 7

MATA RANTAI PERINGATAN

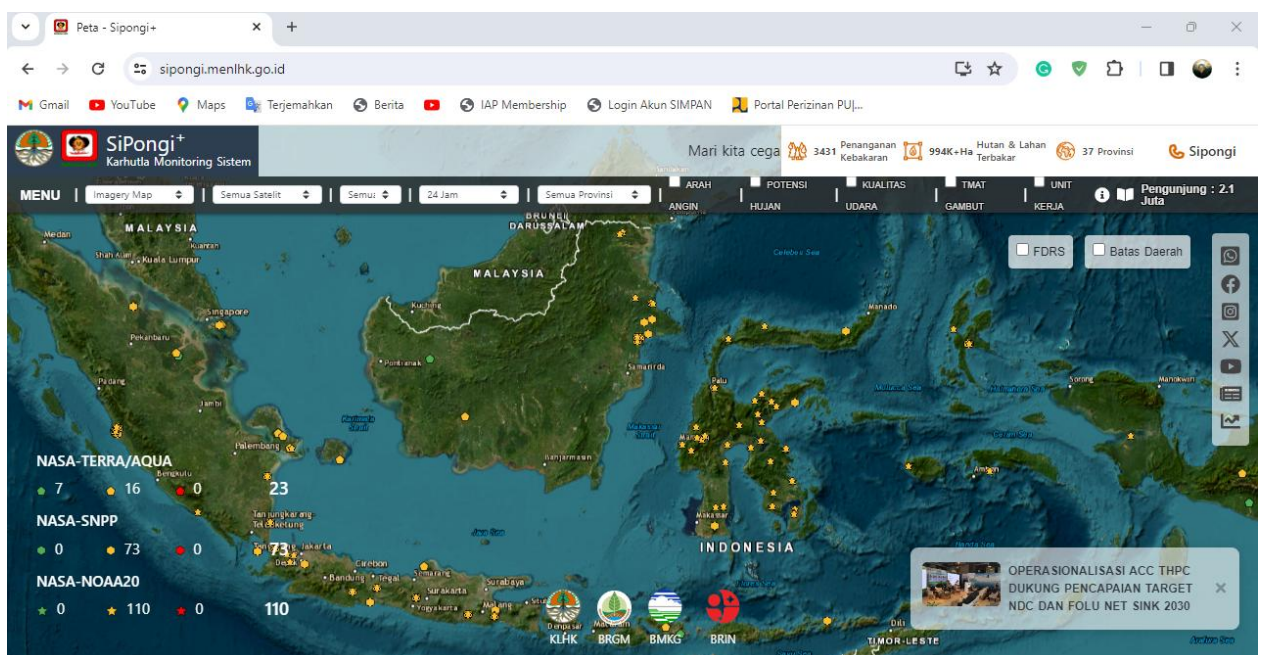
DINI

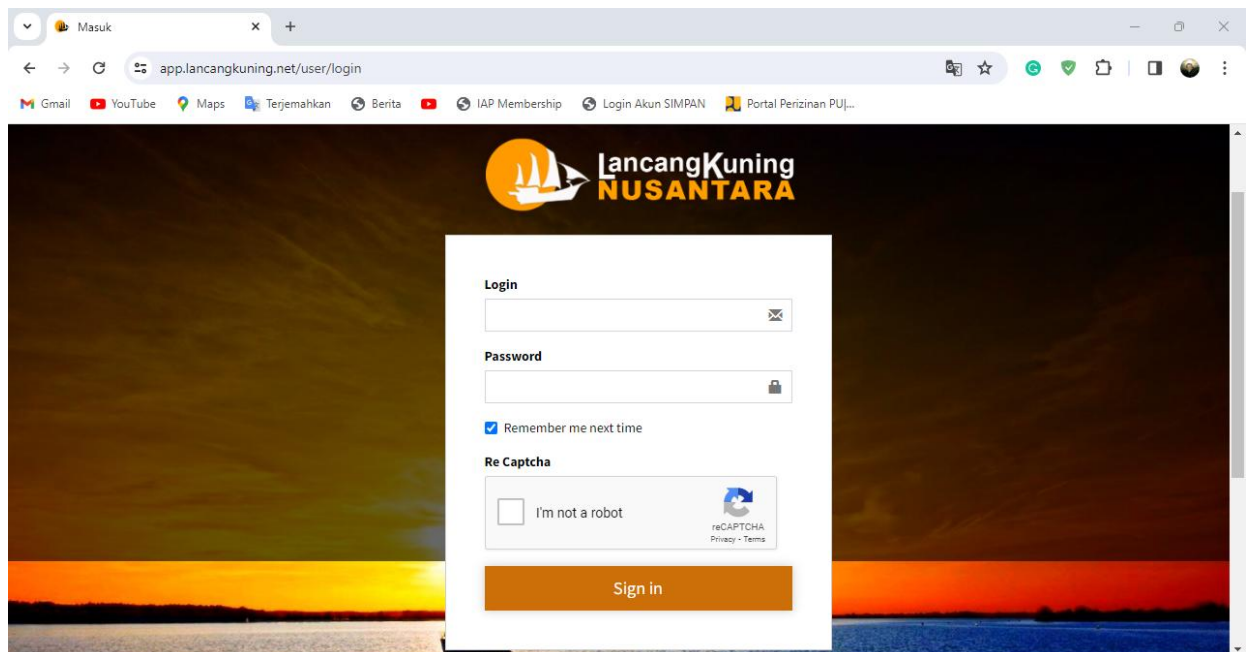
1. Akses Informasi Peringatan Dini

Fire Danger Rating System (SPARTAN)	https://spartan.bmkg.go.id/
-------------------------------------	---

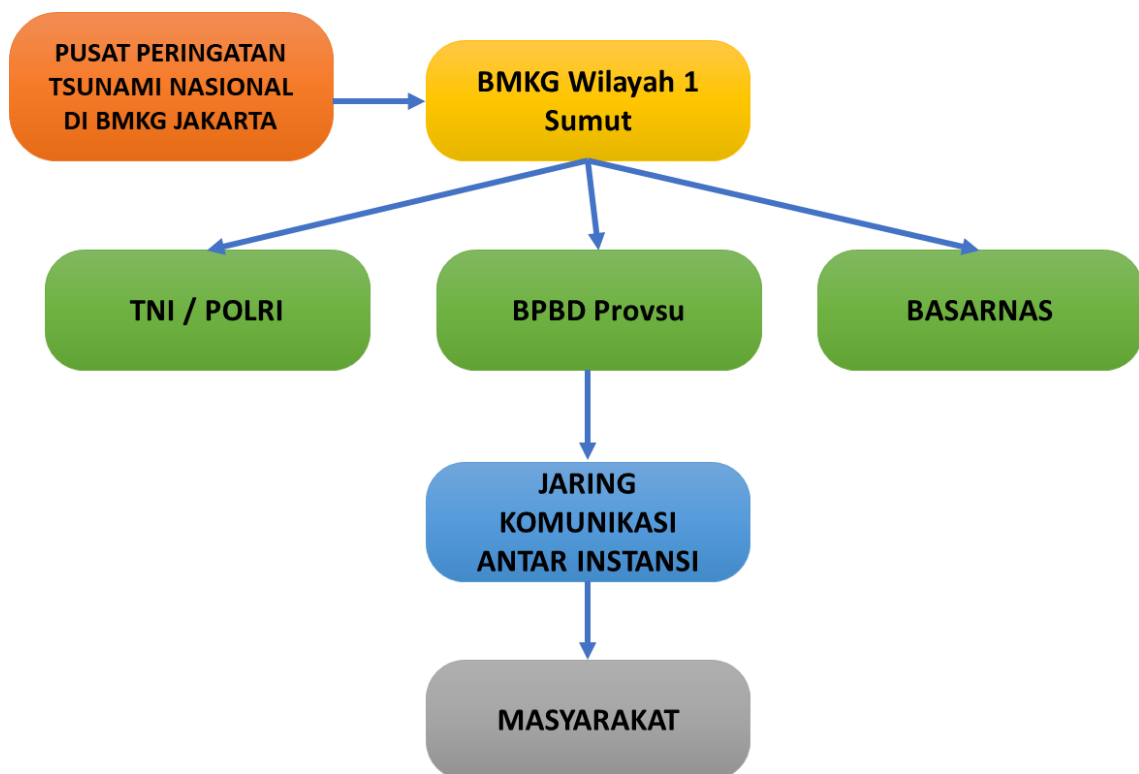


SiPongi+ Karhutla Monitoring Sistem	https://sipongi.menlhk.go.id/
-------------------------------------	---





2. Mata Rantai Peringatan Dini



LAMPIRAN 8

RENCANA EVAKUASI

Rencana Evakuasi Kebakaran hutan dan lahan

No.	Kabupaten	Jalur Evakuasi	Tempat Kumpul Sementara	Tempat Kumpul Akhir	Keterangan
1	Kabupaten Labuhan Batu	Semua Jalan menuju pusat kota melalui Jalan Lintas Kabupaten / Provinsi	- Lapangan Sepak Bola Sigambal (<i>Kapasitas ± 300 jiwa</i>) - Lapangan Eks Pasar Baru Rantauprapat (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>) - Lapangan Bola SMPN 1 Panai Hulu (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>) - Tanah Lapang Negeri Lama (<i>Kapasitas ± 300 jiwa</i>) - SD NEGERI No.116890 Negeri Lama (<i>Kapasitas ± 200 jiwa</i>) - Sepak Bola Persiluangan (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>)	- Lapangan KOMPI SENAPAN C YONIF 126/KC (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>) - Halaman PTPN III Kebun Rantau Prapat (<i>Kapasitas ± 800 jiwa</i>) - Lapangan Ika Bina Rantauprapat (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>) - Masjid Baitunnaim Aek Nabara (<i>Kapasitas ± 2000 jiwa</i>) - Lapangan Sepak Bola Lingga Tiga (<i>Kapasitas ± 500 jiwa</i>)	Menghindari area perkebunan, lahan gambut, semak belukar dan hutan
2	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Semua Jalan menuju pusat kota melalui Jalan Lintas Kabupaten / Provinsi	- Halaman SMA Negeri 1 Kualuh Hulu (<i>Kapasitas ± 300 jiwa</i>) - Lapangan PERSIDA JAYA Gunting Saga (<i>Kapasitas ± 200 jiwa</i>) - Masjid Raya Al - Akmal NA-IX (<i>Kapasitas ± 200 jiwa</i>) - Lapangan Bola Desa Pangkalan Lunang (<i>Kapasitas ± 300 jiwa</i>)	- Lapangan Bhayangkara Polsek Kualuh Hulu (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>) - Halaman SMP Negeri 2 Kualuh Selatan (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>) - Halaman Kantor Camat Na IX - X (<i>Kapasitas ± 500 jiwa</i>)	- Menghindari area perkebunan, lahan gambut, semak belukar dan hutan - Menghindari area perkebunan, lahan gambut, semak belukar dan hutan

No.	Kabupaten	Jalur Evakuasi	Tempat Kumpul Sementara	Tempat Kumpul Akhir	Keterangan
			Lapangan Sepak Bola Air Hitam (<i>Kapasitas ± 500 jiwa</i>)	- Stadion Tanjung Leidong (<i>Kapasitas ± 300 jiwa</i>) - Lapangan Bola Kaki Damuli (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>)	
3	Kabupaten Padang Lawas	Semua Jalan menuju pusat kota melalui Jalan Lintas Kabupaten / Provinsi	- Halaman MAN 2 Padang Lawas (<i>Kapasitas ± 500 jiwa</i>) - Halaman SD Negeri 0503 Parsombaan (<i>Kapasitas ± 200 jiwa</i>) - SMP N 1 Lubuk Barumun (<i>Kapasitas ± 500 jiwa</i>) - SD Negeri 0703 Huragi Tambusai (<i>Kapasitas ± 200 jiwa</i>)	- Halaman Kantor Camat Barumun Tengah (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>) - Lapangan MTQ Kec. Lubuk Barumun (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>) - SMAN 1 Barumun (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>) - Lapangan Sepak Bola mananti Huta Raja Tinggi (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>)	Menghindari area perkebunan, lahan gambut, semak belukar dan hutan
4	Kabupaten Padang Lawas Utara	Semua Jalan menuju pusat kota melalui Jalan Lintas Kabupaten / Provinsi	- Halaman SMP N 2 Padang Bolak Tenggara (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>) - Halaman Pondok Pesantren Al Hudawiyah (<i>Kapasitas ± 500 jiwa</i>) - Lapangan Siunggam Tonga (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>) - Lapangan Garuda Pijorkoling (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>)	- Halaman Mesjid agung gunung tua (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>) - Halaman Masjid Raya Sungai Dua (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>) - stadion padang lawas utara (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>)	Menghindari area perkebunan, lahan gambut, semak belukar dan hutan

No.	Kabupaten	Jalur Evakuasi	Tempat Kumpul Sementara	Tempat Kumpul Akhir	Keterangan
				- Lapangan Bola Hutaimbaru (<i>Kapasitas ± 100 Jiwa</i>) - Halaman Kantor Camat Portibi (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>)	

LAMPIRAN 9

SOP/PROTAP BENCANA

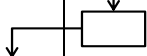
KEBAKARAN HUTAN DAN

LAHAN

SOP / PROTAP Bencana Kebakaran hutan dan lahan

1. SOP Tanggap Darurat

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PUSDALOPS-PB & EWS	Bidang Informasi Publik & Humas	Sekretariat	Tim Reaksi Cepat (TRC)	Bidang Operasi	Komandan	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima dan memastikan informasi masuk tentang kejadian bencana dan melaporkan ke Bidang Informasi Publikasi & Humas								Laporan Kejadian Bencana	30 menit	Laporan Kejadian Bencana	Informasi dari BMKG terkait karhutla
2.	Menerima informasi kejadian bencana dan melapor kepada Sekretariat								Laporan Kejadian Bencana	10 menit	Laporan Kejadian Bencana	
3.	Menerima informasi kejadian bencana dan melapor kepada Komandan								Laporan Kejadian Bencana	20 menit	Laporan Kejadian Bencana	
4.	Menerima informasi bencana dan menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan mengeluarkan SPT (Surat Penugasan)								Laporan Kejadian Bencana	30 menit	Surat Penugasan (SPT)	SOP Penugasan Tim Reaksi Cepat
5.	Melakukan kaji cepat dan tepat untuk mendapatkan informasi akurat tentang kejadian bencana, korban dan kerusakan								Laporan Kejadian Bencana	1,5 jam	Hasil kaji cepat	
7.	Mengundang instansi terkait untuk rapat koordinasi								Undangan rapat/via telepon	30 menit	Konfirmasi kedatangan	
8.	Melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam menentukan rekomendasi skala bencana. Jika skala bencana berskala provinsi, maka merekomendasikan kepada Kepala BPBD Provsu. Jika berskala Kabupaten/Kota, maka BPBD PROVSU cukup melakukan pendampingan dan selesai								Hasil Kaji Cepat	1 jam	Rekomendasi skala bencana	
9.	Melaporkan hasil rapat koordinasi dan merekomendasikan status bencana kepada Gubernur								Rekomendasi status bencana	10 menit	Rekomendasi status bencana	

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PUSDALOPS-PB & EWS	Bidang Informasi Publik & Humas	Sekretariat	Tim Reaksi Cepat (TRC)	Bidang Operasi	Komandan	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output	
10.	Menetapkan status bencana berskala provinsi								Rekomendasi status bencana	30 menit	Status Bencana	
11	Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat BPBD Provinsi sesuai jenis, lokasi dan tingkatan bencana								Perintah Komando Tanggap Darurat	1 jam	Pos Komando Tanggap Darurat aktif	
12	Membentuk Pos Lapangan PDB di lokasi bencana								Perintah Komando Tanggap Darurat	6 jam	Pos Lapangan PDB aktif	
13	Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat, dan melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana								Perintah Komando Tanggap Darurat	1 jam	Rencana strategis dan taktis	SOP Pencarian Korban Bencana, SOP Pertolongan Korban Bencana, SOP Evakuasi Korban Bencana,
14	Mengkoordinir pelaksanaan manajemen logistik dan peralatan								Koordinasi BPBD Provsu	2 x 24 jam	Manajemen logistik dan peralatan terkoordinir	SOP Manajemen Logistik dan Peralatan
15	Mengakhiri pos komando tanggap darurat								Surat Perintah Pengakhiran Tim Komando Tanggap Darurat	1 jam	Pos Komando Tanggap Darurat berakhir	
16	Melaporkan telah mengakhiri tanggap darurat bencana kepada Gubernur								Laporan Pengakhiran Tanggap Darurat	45 menit	Laporan Pengakhiran Tanggap Darurat	
17	Membubarkan Pos Komando Tanggap Darurat								Perintah pembubaran Pos Komando Tanggap Darurat	1 jam	Pos Komando Tanggap Darurat bubar	
18	Membuat Laporan hasil penanganan tanggap darurat bencana kepada Gubernur								Laporan Hasil Penanganan Tanggap Darurat Bencana	1 minggu	Laporan Hasil Penanganan Tanggap Darurat Bencana	

2. SOP Penugasan Tim Reaksi Cepat

No	Kegiatan	Pelaksana Tim Reaksi Cepat	Mutu Baku			Keterangan
			Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Tahap persiapan		Informasi bencana dari laporan bidang penanganan darurat, alat komunikasi, perlengkapan administrasi, dokumen dan keuangan, tiket transportasi, peralatan Tim dan sarana pendukung	5 jam	Rencana Kedatangan dan Rencana Aksi	Tahap persiapan meliputi : 1. Informasi awal darurat bencana 2. Penugasan Tim Reaksi Cepat a. Konfirmasi kesediaan perorangan b. Penetapan penugasan 3. Mobilisasi awal a. BPBD Provsu menyelesaikan kelengkapan administrasi, keuangan dan perlengkapan yang diperlukan Tim b. BPBD Provsu menyampaikan informasi penugasan TRC PB kepada pejabat yang berwenang c. Segera setelah penetapan TRC dilakukan pembagian tugas dalam struktur organisasi
2.	Tahap Pelaksanaan		Sarana transportasi, Rencana Kedatangan, Rencana Aksi Tim, Logistik dan peralatan	24 jam	Deskripsi bencana, data-data korban, pengungsi, sumber daya (stock), kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak, Peta bencana, jadwal piket Posko,	Tahap Pelaksanaan meliputi: 1. Pemberangkatan Tim Reaksi Cepat (TRC) Provinsi Sumatera Utara 2. Tim Reaksi Cepat PB Provinsi Sumatera Utara tiba di lokasi bencana a. Mengadakan pertemuan awal dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk b. Memberikan saran yang tepat untuk upaya penanganan darurat bencana c. Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait untuk melengkapi data/informasi bencana d. Menyempurnakan Rencana Aksi Tim e. Melaksanakan pembagian tugas dalam sub Tim sesuai kebutuhan f. Mengirimkan laporan awal kepada Kepala BPBD Provsu dengan tembusan atasan masing-masing anggota Tim, Posko BPBD, melalui telepon, facsimile, HP, sms, email 3. Peninjauan lapangan di lokasi bencana a. Masing-masing sub tim melaksanakan peninjauan lapangan b. TRC PB membantu melalui pola pendampingan dengan sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut yang diselenggarakan pada sore hari c. Setelah selesai pelaksanaan rapat, TRC PB membantu memberikan press release kepada mass media cetak/elektronika d. Mengirimkan laporan Tim tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala BPBD dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim. 4. Evaluasi a. Melanjutkan peninjauan lapangan pada daerah yang belum sempat ditinjau TRC PB Provsu setiap sore hari membantu sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut b. TRC PB Provsu membantu memberikan press release kepada mass media cetak/elektronika c. Mengirimkan laporan Tim tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala BPBD dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim.
3.	Tahap Pengakhiran			3 jam		Tahap pengakhiran meliputi: 1. Pengakhiran tugas TRC PB Provsu berdasarkan perintah dari Kepala BPBD Provsu 2. Persiapan meninggalkan lokasi bencana: a. Melaksanakan pengecekan kelengkapan peralatan Tim dan perlengkapan perorangan b. Menyusun laporan lengkap pelaksanaan tugas TRC PB Provsu c. Menyerahkannya tugas dan dokumen pendukung bencana kepada kepala daerah d. Menghadap Gubernur untuk memohon pamit meninggalkan daerah bencana karena pelaksanaan tugas Tim telah selesai dan menyerahkan laporan sementara hasil pelaksanaan tugas Tim e. TRC PB Provsu meninggalkan daerah bencana dengan sarana transportasi yang telah ditentukan

3. SOP Tahap Persiapan Tim Reaksi Cepat

No	Kegiatan	Pelaksana	BPBD Provsu	Mutu Baku			Keterangan
		Tim Reaksi Cepat		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima informasi awal darurat bencana			Telepon/ HP/ facsimile/ sms/ email	20 menit	Informasi awal bencana	
2.	Mengkonfirmasi kesediaan perorangan			Telepon/ HP/ facsimile/ sms/ email	30 menit	Konfirmasi kesediaan personil Tim	Mengkonfirmasi kesediaan perorangan meliputi: a. Anggota TRC PB pada kesempatan pertama melaporkan kepada atasan masing-masing tentang kesiapan untuk melaksanakan tugas b. Atasan dari Anggota TRC PB Provsu memberikan jawaban atas kesiapan anggotanya untuk melaksanakan tugas dalam Tim Reaksi Cepat PB Provsu c. Anggota TRC PB Provsu wajib segera membalas dan memberikan jawaban dalam waktu yang telah ditentukan pada informasi awal darurat bencana kepada Deputi Bidang Penanganan Darurat BPBD Provsu Up. Direktur Tanggap Darurat tentang kesiapan melaksanakan tugas melalui sarana komunikasi
3.	Menetapkan penugasan			Komputer, Printer	40 menit	Struktur Organisasi Tim TRC yang akan berangkat ke lokasi bencana	Penetapan penugasan meliputi: a. Memilih dan menyusun komposisi anggota TRC PB Provsu yang disesuaikan dengan macam/jenis bencana dan keahliannya yang dituangkan dalam Surat Perintah Kepala BPBD Provsu terdiri dari : Ketua Tim, Anggota, Petugas Administrasi : Personil BPBD Provsu b. Mengirimkan informasi kepada personil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai personil TRC PB Provsu untuk macam/jenis bencana yang terjadi. c. Memberikan informasi dan ucapan terima kasih kepada personil yang siap untuk melaksanakan tugas, tetapi tidak ditunjuk dalam TRC PB
4.	Menyelesaikan kelengkapan administrasi, keuangan dan perlengkapan yang diperlukan Tim.			Panduan administrasi, keuangan dan perlengkapan	45 menit	Kelengkapan administrasi, keuangan, dan perlengkapan	
5.	Menyampaikan informasi penugasan TRC PB Provsu kepada pejabat yang berwenang			Surat Penugasan (SPT)	30 menit	Surat Penugasan (SPT)	
6.	Segera setelah penetapan TRC dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:			Surat Penugasan (SPT)	45 menit	Pembagian Tugas Tim Reaksi Cepat	Segera setelah penetapan TRC dilakukan pembagian tugas sebagai berikut: 1. Ketua Tim a. Membuat konsep awal Rencana Kedatangan dan Rencana Aksi b. Melaksanakan pengecekan kesiapan personil Tim melalui sarana komunikasi telepon/HP. 2. Personil BPBD Provsu yang bertugas sebagai Petugas Administrasi Tim menyelesaikan administrasi keuangan, tiket transportasi, peralatan dan dukungan sarana pendukung Tim. 3. Anggota Tim dari sektor terkait berangkat dari kantor/rumah masing-masing dengan membawa perlengkapan pribadi dan sarana pendukung tugas menuju ke BNPB atau tempat yang telah ditentukan. 4. Setelah seluruh personil Tim berkumpul di BPBD Provsu atau tempat yang telah ditentukan: a. Menyempurnakan Rencana Kedatangan dan Rencana Aksi b. Pembagian tugas personil Tim. c. Menyelesaikan administrasi dan pengecekan kesiapan personil, perlengkapan dan sarana pendukung lainnya. d. Penyerahan dan penerimaan peralatan, dokumen dan keuangan dari BPBD Provsu.

4. SOP Tahap Pelaksanaan Tinjauan ke Lokasi Bencana

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Tim Reaksi Cepat (TRC)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Berangkat menuju ibukota Kabupaten/Kota lokasi bencana dengan sarana transportasi yang telah ditentukan.		Sarana Transportasi	6 jam		
2.	Mengadakan pertemuan awal dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk		Surat Penugasan (SPT)	1 jam	Informasi tentang kejadian bencana, korban, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak.	Mengadakan pertemuan awal dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk meliputi: a. Memperkenalkan personil Tim. b. Menyampaikan maksud, tujuan dan tugas Tim untuk melaksanakan tugas di daerah bencana. c. Menghimpun informasi mutakhir tentang kejadian bencana, korban, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak. d. Menyampaikan permintaan personil pendamping
3.	Membantu untuk mengaktifasi Posko Penanggulangan Bencana Provinsi		Peralatan perlengkapan	2 jam	Tempat, alat komunikasi dan sarana pendukung aktif di lokasi bencana	Mengaktifasi Posko Penanggulangan Bencana Provinsi dengan melakukan kegiatan antara lain: a. Penyiapan tempat, alat komunikasi dan sarana pendukung lainnya. b. Penataan peta bencana, deskripsi bencana, data-data korban, pengungsi, sumber daya (stock, telah disalurkan dan masih tersedia), jadwal piket Posko, upaya yang telah dilakukan dan kebutuhan yang mendesak. c. Memberikan asistensi teknis bidang Posko dan arus informasi penanganan bencana. d. Ketua Tim menyerahkan bantuan dukungan BPBD untuk penguatan Posko.
4.	Membantu untuk menyelenggarakan rapat guna memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana.		Laporan bencana terbaru	1 jam	Laporan bencana terbaru	
5.	Memberikan saran yang tepat untuk upaya penanganan darurat bencana		Laporan bencana terbaru	30 menit	Saran	
6.	Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait untuk melengkapi data / informasi bencana		Laporan bencana terbaru	40 menit	Data/Informasi Bencana	
7.	Menyempurnakan Rencana Aksi Tim		Data/Informasi Bencana	45 menit	Rencana Aksi Tim	
8.	Melaksanakan pembagian tugas dalam Sub Tim sesuai kebutuhan.		Rencana Aksi Tim	30 menit	Pembagian Tugas Sub Tim	
9.	Mengirimkan laporan awal kepada Kepala BPBD Provsu dengan tembusan atasan masing-masing anggota Tim, Posko PB melalui telepon/facsimile/HP/sms/email.		Laporan awal penanganan darurat	30 menit	Laporan awal penanganan darurat	
10.	Mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan.		Laporan bencana terbaru	40 menit	Infomasi jumlah korban, lokasi bencana, kerusakann gangguan pelayanan umum	

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Tim Reaksi Cepat (TRC)	Kelengkapan	Waktu	Output	
11.	Mengidentifikasi kebutuhan yang mendesak		Laporan bencana terbaru	45 menit	Kebutuhan mendesak	Identifikasi kebutuhan yang mendesak untuk : a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana dan evakuasi korban bencana b. Pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, air bersih/minum dan sanitasi, pelayanan kesehatan) c. Penampungan sementara (tenda, tikar, genset, MCK, dapur umum) d. Perlindungan terhadap kelompok rentan (balita, ibu hamil, lansia, cacat) e. Pemulihan darurat sarana dan prasarana, antara lain pembersihan puing/lumpur/tanah longsor, jalan/jembatan/tanggul, fasilitas pelayanan kesehatan, transportasi, telekomunikasi dan energi
12.	Membantu melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut yang diselenggarakan pada sore hari untuk membahas melalui pola pendampingan dengan sektor terkait		Laporan bencana terbaru	40 menit	Rencana Tindak Lanjut	Rapat evaluasi dan tindak lanjut membahas : a. Hasil peninjauan di lapangan. b. Pelaksanaan harian penanganan darurat bencana. c. Perkembangan dampak bencana. d. Sumber daya yang masih tersedia, dukungan yang masih dalam perjalanan dan kebutuhan yang mendesak. e. Kendala/hambatan yang dihadapi dan upaya mengatasi. f. Analisa kebutuhan sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana. g. Rencana kegiatan penanganan darurat bencana dan pengeralahan sumber daya untuk hari berikutnya.
13.	Membantu untuk memberikan Press Release kepada mass media cetak/elektronika.		Laporan bencana terbaru	30 menit	Press Release	
14.	Mengirimkan laporan Tim tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala BPBD Provsu dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim		Laporan bencana terbaru	20 menit	Laporan bencana terbaru	
15.	Melanjutkan peninjauan lapangan pada daerah yang belum sempat ditinjau.		Laporan bencana terbaru	3 jam	Laporan bencana terbaru	
16.	Membantu sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut setiap sore hari		Laporan bencana terbaru	30 menit	Tindak lanjut	TRC PB Provsu setiap sore hari membantu sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut : a. Melanjutkan peninjauan lapangan. b. Pelaksanaan harian penanganan bencana. c. Perkembangan dampak bencana. d. Sumber daya yang masih tersedia, dukungan yang masih dalam perjalanan dan kebutuhan yang mendesak. e. Kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi. f. Analisa kebutuhan sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana. g. Rencana kegiatan penanganan bencana dan pengeralahan sumber daya untuk hari berikutnya.
17.	Membantu untuk memberikan Press Release kepada mass media cetak/elektronika.		Laporan bencana terbaru	20 menit	Press Release	
18.	Mengirimkan laporan Tim tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala BPBD Provsu dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim		Laporan bencana terbaru	25 menit	Laporan bencana terbaru	

5. SOP Tahap Pengakhiran Tim Reaksi Cepat

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Tim Reaksi Cepat (TRC)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Surat Perintah Pengakhiran dari Kepala BPBD Provsu		Surat Perintah Pengakhiran	20 menit	Surat Perintah Pengakhiran	
2.	Melaksanakan pengecekan kelengkapan peralatan Tim dan perlengkapan perorangan.		Kelengkapan Peralatan	35 menit	Kelengkapan Peralatan	
3.	Menyusun laporan lengkap pelaksanaan tugas TRC PB Provsu		Informasi Penanganan Bencana	45 menit	Laporan TRC PB Provsu	
4.	Menyerahtherimakan tugas dan dokumen pendukung bencana kepada kepala daerah.		Dokumen Pendukung Bencana	20 menit	Dokumen Pendukung Bencana	
5.	Menghadap Gubernur untuk mohon pamit untuk meninggalkan daerah bencana karena pelaksanaan tugas Tim telah selesai dan menyerahkan laporan sementara hasil pelaksanaan tugas Tim		Laporan Sementara Pelaksanaan Tugas Tim	15 menit	Laporan Sementara Pelaksanaan Tugas Tim	
6.	Meninggalkan daerah bencana dengan sarana transportasi yang telah ditentukan		Sarana Transportasi	6 jam	TRC meninggalkan lokasi bencana	
7.	Mengembalikan peralatan inventaris kepada BPBD Provsu		Peralatan dan inventaris BPBD Provsu	40 menit	Peralatan dan inventaris BPBD Provsu	
8.	Menghadap Kepala BPBD Provsu Up. Deputi Bidang Penanganan Darurat untuk laporan selesai melaksanakan tugas dan menyerahkan laporan pelaksanaan tugas Tim		Laporan Pelaksanaan Tugas Tim	25 menit	Laporan Pelaksanaan Tugas Tim	
9.	Menyerahkan bukti-bukti pertanggungjawaban administrasi keuangan kepada pejabat yang berwenang.		Bukti administrasi keuangan	35 menit	Bukti administrasi keuangan	
10.	Masing-masing anggota Tim dari sektor terkait membawa laporan pelaksanaan tugas Tim untuk disampaikan kepada atasan langsungnya.		Laporan Pelaksanaan Tugas Tim	25 menit	Laporan Pelaksanaan Tugas Tim	

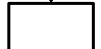
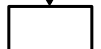
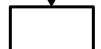
6. SOP Pencarian Korban Bencana

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Komandan Tanggap Darurat	Tim Komando Tanggap Darurat Bencana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mendapat informasi kejadian bencana karhutla yang bersumber dari BMKG dan informasi akurat lainnya			Laporan Kejadian Bencana	15 menit	Laporan Kejadian Bencana	
2.	Memerintahkan tim untuk melakukan pencarian ke lokasi bencana			Surat Penugasan (SPT)	10 menit	Surat Penugasan (SPT)	
3.	Menerima komando dari komandan tanggap darurat dan melakukan pencarian korban ke lokasi bencana			Surat Penugasan (SPT)	24 jam	Pencarian korban bencana	
4.	Memetakan kondisi cuaca, geografis, topografis, dan keadaan awal akibat bencana			Laporan Kejadian Bencana	45 menit	Peta kondisi cuaca, geografis dan topografis	
5.	Menentukan lokasi bencana dan luas dampak bencana serta mengadakan pembagian daerah pencarian dengan membuat batasan lokasi bencana berdasarkan klasifikasi tiga wilayah penanggulangan			Peta kondisi cuaca, geografis dan topografis	50 menit	Lokasi bencana dan luas dampak bencana dan pembagian daerah pencarian	Klasifikasi tiga wilayah penanggulangan sebagai berikut: a. Ring I yaitu daerah tempat terjadinya bencana, kemungkinan ditemukan korban paling banyak dan bahaya serta kemungkinan munculnya bencana susulan b. Ring II yaitu daerah sekitar terjadinya bencana yang masih dimungkinkan ditemukan korban c. Ring III yaitu daerah yang relatif aman untuk dijadikan tempat evakuasi sementara
6.	Memetakan kondisi serta jumlah korban : korban selamat, dan korban sakit.			Laporan Kejadian Bencana	1 jam	Jumlah korban selamat dan korban sakit	Pemetaan kondisi korban sakit menggunakan triase empat tingkat yaitu : a. Hijau : tidak gawat tidak darurat b. Kuning : gawat tidak darurat c. Merah : gawat darurat d. Hitam : meninggal dunia Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan perlu dilakukan identifikasi korban oleh pihak yang berwenang, terutama bagi korban bencana tertentu. (Misalnya: terorisme, kegagalan teknologi, dan lain-lain).
7.	Mengidentifikasi dan mengantisipasi kebutuhan yang diperlukan dalam pertolongan dan evakuasi korban bencana			Data korban bencana	45 menit	Kebutuhan yang diperlukan dalam pertolongan dan evakuasi korban bencana	
8.	Mengidentifikasi sumberdaya lokal dan potensi risiko sekunder bagi keselamatan korban dan penolong			Kebutuhan yang diperlukan dalam pertolongan dan evakuasi korban bencana	40 menit	Sumberdaya lokal dan potensi risiko sekunder bagi keselamatan korban dan penolong	
9.	Melaporkan kegiatan pencarian secara berkala per 3 jam atau per 6 jam atau sesuai kondisi			Laporan kegiatan berkala	15 menit	Laporan kegiatan berkala	

7. SOP Pertolongan Korban Bencana

No	Kegiatan	Tim Komando Tanggap Darurat	Mutu Baku			Keterangan
			Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun rencana pertolongan korban bencana karhutla		Rencana pertolongan korban bencana	30 menit	Rencana pertolongan korban bencana	
2.	Mempelajari batasan klasifikasi tiga wilayah penanggulangan yang telah ditetapkan oleh Tim Pencarian	 	Infomasi batasan klasifikasi tiga wilayah penanggulangan	20 menit	Infomasi batasan klasifikasi tiga wilayah penanggulangan	
3.	Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana di tempat kejadian	 	Kotak K3	Kondisional	Pertolongan pertama korban bencana	
4.	Pengobatan sementara kepada korban bencana di tempat kejadian;	 	Peralatan pengobatan dan obat-obatan	Kondisional	Pengobatan sementara korban bencana	
5.	Melakukan rujukan bagi korban yang memerlukan tindakan lebih lanjut	 	Surat Rujukan	15 menit	Rujukan korban kritis	
6.	Melaporkan kegiatan pertolongan secara berkala per 3 jam atau per 6 jam atau sesuai kondisi.	 	Laporan kegiatan berkala	15 menit	Laporan kegiatan berkala	

8. SOP Evakuasi Korban Bencana

No	Kegiatan	Mutu Baku			
		Tim Komando Tanggap Darurat	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Tim evakuasi menuju lokasi bencana karhutla bersama tim pencarian dan tim penolong		Transportasi	6 jam	Tim evakuasi tiba di lokasi bencana
2.	Memindahkan korban bencana keluar dari sumber bencana ke tempat yang lebih aman untuk mendapat tindakan selanjutnya		Transportasi umum dan khusus	24 jam	Korban bencana berada di tempat yang lebih aman
3.	Memberikan pengobatan sementara kepada korban bencana selama dalam perjalanan		Peralatan pengobatan dan obat-obatan	Kondisional	Korban bencana diobati sementara
4.	Memberikan dukungan sosial dan psikologis kepada korban bencana		Ahli sosial dan psikologis	Kondisional	Korban bencana diberi dukungan sosial dan psikologis
5.	Melaporkan kegiatan evakuasi secara berkala per 3 jam atau per 6 jam atau sesuai kondisi		Laporan kegiatan berkala	15 menit	Laporan kegiatan berkala

9. SOP Manajemen Logistik Dan Perencana

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbid Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan proses inventarisasi kebutuhan		-Laporan-laporan - Media Massa	30 menit	Formulir Inventarisasi kebutuhan	1. Proses Inventarisasi ini membutuhkan ketelitian dan keterampilan serta kemampuan untuk mengetahui secara pasti kondisi korban bencana yang akan ditanggulangi 2. Perencanaan inventarisasi kebutuhan terdiri dari: a. Penyusunan standar kebutuhan minimal b. Penyusunan kebutuhan jangka pendek, menengah dan panjang
2.	Melakukan proses penerimaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dimulai dari : 1. Pencatatan atau inventarisasi termasuk kategori logistik atau peralatan 2. Darimana bantuan diterima 3. Kapan diterima 4. Apa jenis bantuannya 5. Seberapa banyak jumlahnya 6. Bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan logistik atau peralatan yang disampaikan 7. Apakah ada permintaan untuk siapa bantuan ini ditujukan		Formulir penerimaan	2 hari	Formulir penerimaan	1. Proses penerimaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dimulai dari pencatatan atau inventarisasi 2. Penerimaan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana dan harus dicatat sesuai formulir 3. Sumber penerimaan : a. Penerimaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari dalam negeri antara lain dari Pemerintah (APBN), masyarakat, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat b. Penerimaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari luar negeri antara lain dari pemerintah, masyarakat, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat 4. Proses penerimaan: a. Proses pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, yang dapat dilakukan melalui pelelangan, pemilihan dan penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Penerimaan logistik dan peralatan melalui hibah dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi pada keadaan darurat
3.	Melakukan proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan disertai dengan berita acara penerimaan logistik dan peralatan pada waktu itu.		Formulir penyimpanan dan pergudangan	5 jam	Formulir penyimpanan dan pergudangan	1. Pencatatan data penerimaan antara lain meliputi : a. Jenis barang logistik dan peralatan b. Berapa jumlahnya c. Bagaimana keadaannya d. Siapa yang menyerahkan dan menerima e. Cara penyimpanan (First-in First-out atau Last-in First-out) 2. Sistem penyimpanan dan pergudangan, antara lain: a. Pemilihan tempat b. Tipe gudang c. Kapasitas dan fasilitas penyimpanan d. Sistem pengamanan dan keselamatan
4.	Lakukan proses pendistribusian dengan membuat terlebih dahulu perencanaan pendistribusian terdiri dari data : siapa saja yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, kapan waktu penyampaian, lokasi cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggungjawab atas penyampaian tersebut.		Formulir Pendistribusian	Kondisional	Formulir Pendistribusian	

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbid Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
4.	Lakukan proses pendistribusian dengan membuat terlebih dahulu perencanaan pendistribusian terdiri dari data :siapa saja yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, kapan waktu penyampaian, lokasi cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggungjawab atas penyampaian tersebut.		Formulir Pendistribusian	Kondisional	Formulir Pendistribusian	
6.	Melakukan proses penerimaan di Tempat Tujuan dengan langkah-langkah: 1. Mencocokkan antara data di manifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima 2. Men-check kembali jenis, jumlah, berat, dan kondisi barang 3. Mencatat tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim dan penerima barang 4. Membuat berita acara serah terima dan bukti penerimaan		Formulir Penerimaan di Tempat Tujuan	2 jam	Formulir Penerimaan di Tempat Tujuan, Bukti Penerimaan	
7.	Lakukan Penghapusan apabila barang logistik dan peralatan yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah		Formulir Penghapusan Logistik dan Peralatan	1 jam	Berita acara penghapusan	1. Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan berita acara penghapusan
8.	Lakukan pertanggungjawaban penanggulangan bencana baik keuangan maupun kinerja, dilakukan pada setiap tahapan proses dan secara paripurna untuk seluruh proses, dalam bentuk laporan oleh setiap pemangku proses secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.		Laporan pertanggung jawaban logistik dan peralatan	1 jam	Laporan pertanggung jawaban logistik dan peralatan	

10. SOP Perencanaan Dan/Atau Inventarisasi Kebutuhan Logistik Dan Peralatan

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbid Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi tentang jumlah korban bencana, pengungsi dan kondisi kerusakan	<pre> graph TD Start([Start]) --> S2[] S2 --> S3[] S3 --> S4[] S4 --> S5[] S5 --> S6[] S6 --> End([End]) </pre>	-Laporan-laporan dari Tim Reaksi Cepat, Media Massa, Instansi Terkait, rapat koordinasi	5 menit	Formulir Inventarisasi kebutuhan	
2.	Menghitung jumlah bantuan logistik atau peralatan yang dibutuhkan		-Laporan-laporan dari Tim Reaksi Cepat, Media Massa, Instansi Terkait, rapat koordinasi	6 menit	Formulir Inventarisasi kebutuhan	
3.	Mengidentifikasi jenis kebutuhan (pangan, sandang, papan)		-Laporan-laporan dari Tim Reaksi Cepat, Media Massa, Instansi Terkait, rapat koordinasi	5 menit	Formulir Inventarisasi kebutuhan	
4.	Menetapkan cara menyampaikan bantuan		-Laporan-laporan dari Tim Reaksi Cepat, Media Massa, Instansi Terkait, rapat koordinasi	3 menit	Formulir Inventarisasi kebutuhan	
5.	Menetapkan penanggung jawab kelompok penerima bantuan		-Laporan-laporan dari Tim Reaksi Cepat, Media Massa, Instansi Terkait, rapat koordinasi	2 menit	Formulir Inventarisasi kebutuhan	
6.	Menentukan kapan bantuan harus disampaikan		-Laporan-laporan dari Tim Reaksi Cepat, Media Massa, Instansi Terkait, rapat koordinasi	3 menit	Formulir Inventarisasi kebutuhan	
7.	Menyusun standar kebutuhan minimal, jangka pendek, menengah, dan panjang		-Laporan-laporan dari Tim Reaksi Cepat, Media Massa, Instansi Terkait, rapat koordinasi	6 menit	Formulir Inventarisasi kebutuhan	

11. SOP Penerimaan Logistik Dan Peralatan

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbid Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mencatat atau inventarisasi yang termasuk kategori logistik dan peralatan yang diterima dari berbagai sumber		Formulir penerimaan logistik dan peralatan	12 jam	Formulir penerimaan logistik dan peralatan	Catatan inventarisasi berisi: dari mana bantuan diterima, kapan diterima, apa jenis bantuannya, berapa banyak jumlahnya, bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikannya, apakah ada permintaan untuk siapa bantuan ditujukan Penerimaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari dalam dan luar negeri antara lain dari Pemerintah (APBN), masyarakat, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat
2.	Menyesuaikan antara kebutuhan dengan logistik dan peralatan yang ada		Formulir penerimaan logistik dan peralatan	6 jam	Formulir penerimaan logistik dan peralatan	Proses pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan yang dilakukan melalui pelelangan, pemilihan, penunjukan maupun hibah langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi pada keadaan darurat
3.	Menginformasikan logistik dan peralatan sesuai skala prioritas kebutuhan		Formulir penerimaan logistik dan peralatan	3 jam	Formulir penerimaan logistik dan peralatan	
4.	Mengendalikan dan mengawasi penggunaan logistik dan peralatan		Formulir penerimaan logistik dan peralatan	24 jam	Formulir penerimaan logistik dan peralatan	
5.	Menyesuaikan dalam hal penyimpanan		Formulir penerimaan logistik dan peralatan	3 jam	Formulir penerimaan logistik dan peralatan	

12. SOP Pergudangan dan Penyimpanan

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbid Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mendata penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan		Berita acara penerimaan & bukti penerimaan logistik dan peralatan	40 menit	Berita acara penerimaan & bukti penerimaan logistik dan peralatan	Catatan berisi: jenis barang logistik dan peralatan yang akan dimasukkan ke gudang, jumlahnya, keadaannya, siapa yang menyerahkannya, siapa yang menerima, cara penyimpanan, (First-in First-out) atau (Last-in First-out)
2.	Melakukan prosedur penyimpanan dan pergudangan		Berita acara penerimaan & bukti penerimaan logistik dan peralatan	2 jam	Berita acara penerimaan & bukti penerimaan logistik dan peralatan	Prosedur meliputi: pemilihan tempat, tipe gudang, kapasitas dan fasilitas penyimpanan, sistem pengamanan dan keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku
3.	Melindungi logistik dan peralatan dari kerusakan dan kehilangan atau berkurangnya standar mutu		Berita acara penerimaan & bukti penerimaan logistik dan peralatan	24 jam	Berita acara penerimaan & bukti penerimaan logistik dan peralatan	
4.	Mengetahui dan menjamin ketersediaan pada setiap waktu		Berita acara penerimaan & bukti penerimaan logistik dan peralatan	24 jam	Berita acara penerimaan & bukti penerimaan logistik dan peralatan	

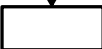
13. SOP Pendistribusian

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbid Logistik dan Peralatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan dengan disertai data pendukung yaitu didasarkan kepada permintaan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana		Data inventarisasi kebutuhan	Kondisional	Rencana pendistribusian	Rencana pendistribusian terdiri dari : siapa yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, kapan waktu penyampaian, lokasi, cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas penyampaian tersebut
2.	Mengetahui sasaran penerima bantuan		Data inventarisasi kebutuhan	Kondisional	Rencana pendistribusian	
3.	Mengetahui jenis dan jumlah bantuan logistik dan peralatan yang harus disampaikan		Data inventarisasi kebutuhan	Kondisional	Rencana pendistribusian	
4.	Merencanakan cara penyampaian atau pengangkutannya		Data inventarisasi kebutuhan	Kondisional	Rencana pendistribusian	

14. SOP Pengangkutan

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbid Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mendata jenis logistik dan peralatan yang diangkut, jumlah, tujuan, siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan termasuk keamanannya, siapa yang bertanggung jawab menyampaikan kepada penerima		Data rencana distribusi	Kondisional	Data Rencana pengangkutan	
2.	Mengangkut dan/atau memindahkan logistik dan peralatan dari gudang penyimpanan ke tujuan penerima		Data Rencana Pengangkutan, Berita acara, Bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut	Kondisional	Berita acara, Bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut	Jenis pengangkutan terdiri dari : angkutan darat, laut, sungai, danau, dan udara. Pemilihan moda angkutan berdasarkan: situasi dan kondisi keadaan darurat, kecepatan distribusi, ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada, kondisi wilayah asal dan tujuan, efektifitas dan efisiensi, keamanan dan kesehatan
3.	Menjamin keamanan, keselamatan, dan keutuhan logistik dan peralatan dari gudang ke tujuan		Berita acara, Bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut	Kondisional	Berita acara, Bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut	

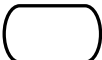
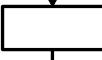
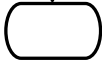
15. SOP Penerimaan di Tempat Tujuan

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbid Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mencocokkan antara data di manifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima		Berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan	40 menit	Berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan	
2.	Menge-check kembali jenis, jumlah, berat, dan kondisi barang		Berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan	30 menit	Berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan	
3.	Mencatat tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim dan penerima barang		Berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan	30 menit	Berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan	
4.	Membuat berita acara serah terima dan bukti penerimaan		Berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan	20 menit	Berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan	

16. SOP Penghapusan

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbid Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengidentifikasi barang logistik dan peralatan yang akan dihapuskan		Data kondisi inventaris logistik dan peralatan	30 menit	Data logistik dan peralatan yang akan dihapus	Barang logistik dan peralatan yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan
2.	Membuat permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan		Komputer, Printer	15 menit	Surat permohonan penghapusan	
3.	Membuat berita acara penghapusan		Komputer, Printer	15 menit	Berita acara penghapusan	

17. Pertanggungjawaban

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbid Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mempertanggung jawabkan seluruh pekerjaan logistik dan peralatan kepada para pemangku kepentingan		Laporan pertanggung jawaban logistik dan peralatan	2 jam	Laporan pertanggung jawaban logistik dan peralatan	
2.	Membuat laporan pertanggung jawaban seluruh pekerjaan logistik dan peralatan kepada para pemangku kepentingan		Komputer, Printer, Berita acara penerimaan dan pengangkutan logistik dan peralatan	1 jam	Laporan pertanggung jawaban logistik dan peralatan	
3.	Mempertanggung jawabkan kepada masyarakat		Laporan pertanggung jawaban logistik dan peralatan	2 jam	Laporan pertanggung jawaban logistik dan peralatan	
4.	Membuat tanda pelacakan apabila terjadi kesalahan		Laporan pertanggung jawaban logistik dan peralatan	40 menit	Laporan pertanggung jawaban logistik dan peralatan	

LAMPIRAN 10

LEMBAR KOMITMEN



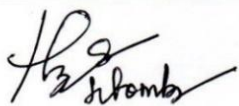
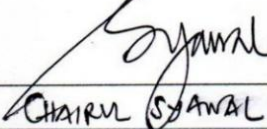
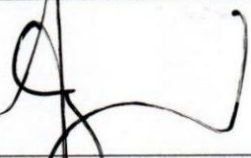
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

LEMBAR KOMITMEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan Langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Sumatera Utara yang di laksanakan di Hotel Grandhika Jl. Dr. Mansyur No. 169 Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 5 Desember 2023, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini :

NO.	KEGIATAN
1.	Diseminasi Rencana Kontingensi Ancaman Bencana Karhutla
2.	Uji coba Rencana Kontingensi melalui simulasi dan gladi
3.	Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontingensi setidaknya sekali setiap tahun
4.	Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontingensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi
5.	Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana pada saat terjadi bencana
6.	De-Aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakan tidak berlaku jika sampai pada akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana
7.	Aktivasi Kembali rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu-waktu diperlukan

	
HENDRI	RIVAN HASIBUAN
MAYOR INF / 11080114510387	LETHAL KAL / 532476
PABANDA LATSAT DATI / BB	KADISLOK LANUD SWO
	
CHAIRUL SYAWAL	ARNIS BRUMA: 812 MHI
MAYOR LANT (P) NRP. 19478/P	KOMPAL MHI 02031857
	ESD PULANGJAYA. RA OPS

	
Tenku Rahmat Syahputra, A.Md. 198706122005121003	GUNAWAN HARY MULYA 27771559
Pranata Pencarian dan Penyelidikan Melayu	FABID, SME & K3
	
Kausar Abdi, SH, M.Pd 197311192002121008	AMRAN NIP. 197202022007011008
F. Peneliti Ahli Muda	KAGI. PPOPT, DPI dan HKP.
	
RIVI HAWDYKA SINAGA, SE Nip. 198105132009021002	ZULHAM EFENDI SINAGA NIP. 197912202003121004
Penyusun Lap Kebijakan dishub	SUKABIN RR BPBD PROVINSI
	
EDY SYAHPUTRA 9974118838	METANO- A. ARNASAID 197305251994032003
SUPERVISOR	SAF

	
Rizka Hasyah	Tri Wibowo ST MAP
19680425190011001	196704041909021001
Hasabul Program	Analisis RPK
	
RIZKA AMANASYAHRIO HARAHAP, S.Kep.Ns.	AHMAD SULAIMAN GAZALI
19920519 201403 1 001	19850310 202012 1 006
ANALIS KESEHATAN.	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
	
EKAN FIRALOLO-R. S.Kem.M.AIC	BUSTAMI RANGKUTI, ST-MT
NIP. 19830806 20101006	NIP. 19750211 2008011 002
Analisis Data dan Informasi	Kabid Pemukiman
	
Jr. Tukkot Erika Friska, ST	
NIP. 19760305 200604 2002	
Kasi Penataan Ruang	

LAMPIRAN 11

LEMBAR BERITA ACARA

PENYUSUNAN



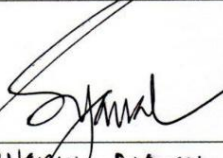
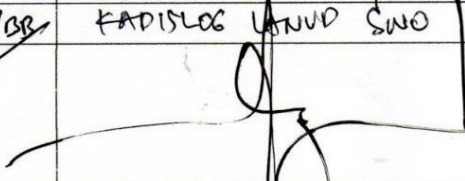
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

BERITA ACARA

PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI
MENGHADAPI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Menghadapi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada tanggal 08 November 2023 s.d 05 Desember 2023 di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. *Focus Group Discussion* (FGD) telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademisi. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi.

	
HENDRI	IRWAN HASIBUAN
MAYOR INF / 11080114510387	LETKOL KAL / 532476
PABANDA LATSAT DAMI/BR	KADISLOG LAMUD SMO
	
CHAIRUL SYAWAL	AGUS BAIDURI, SIK MH
MAYOR LAUT (P) NRP. 19478/P.	KOMPOL NRP 82031357
PABAN OPS LANTAMAL I	KSB PULAUHANTARA Ro ops
	
Tongku Rahmat Syahputra, A.MR.	GUNAWAN HARY MULYA
198706122000121003	27771559
Pranata Pencarian & Pertolongan Mahir	KABID. SMR & K3

LAMPIRAN 12

PROFIL LEMBAGA / ORGANISASI

1. Kodam I Bukit Barisan

A. Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	: Kodam I Bukit Barisan
	Unit/Divisi/Bagian	:
	Alamat	: Jl. Gatot Subroto No.Km. 7, RW.5, Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20122
	No. Telpon/Faksimili	:
	Email	:
2	Narahubung (Contact Person)	: Letkol Kav. Teuku Hamdani
	Jabatan	: Pabendya Wamil Sterdam
	No. Telpon	:
	No. HP	: 082370721974
	Email	:
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	: Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
	Cakupan wilayah kerja	: Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau
B. Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	: Membantu penanggulangan bencana alam baik pada tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	: Mendampingi Pemerintah Daerah dalam upaya kesiapsiagaan terhadap bencana
3	Kepentingan terkait kebencanaan	: Melakukan pengamanan dan penyelamatan serta pengawalan korban dampak bencana
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)	
	Sebelum status bencana ditetapkan	: Mencegah berkembangnya kerugian, baik jiwa maupun harta benda rakyat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat agar tidak menimbulkan akibat yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan bangsa yang dilaksanakan melalui kemampuan pembinaan teritorial dan dukungan
	Dalam status 'siaga darurat'	: 1. Membuat Pemetaan dan Sosialisasi kerawanan/risiko bencana Kebakaran hutan dan lahan . 2. Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana Kebakaran hutan dan lahan 3. Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah. 4. Penyiapan personil dan peralatan. 5. Peningkatan kapasitas personil. 6. Keterlibatan dalam penyusunan rencana kontingensi.
	Dalam status 'tanggap darurat'	: 1. Pengiriman armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan. 2. Pengamanan daerah bencana Kebakaran hutan dan lahan ; 3. Pengamanan aset, penghidupan korban bencana 4. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat

			5. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat 6. Pembuatan jalur evakuasi bencana Kebakaran hutan dan lahan .
	Dalam status 'transisi darurat'	:	1. Membantu Pemulihan keamanan dan ketertiban 2. Dukungan pemulihan infrastruktur penting, contoh : jembatan <i>bailey</i> 3. Pembersihan puing-puing reruntuhan Kebakaran hutan dan lahan .
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)	:	Melakukan pendampingan kepada korban bencana maupun petugas pelaksana pasca bencana.

C. Sumberdaya Organisasi

1 Sumberdaya Manusia

No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
	Operasi Tanggap Darurat	8 SST + 1 SSK	1. Makorem Sibolga 2. Kodim Padang Sidempuan 3. Batalyon 123 Rajawali		SST = Satuan Setingkat Pleton (±240 Personil) SSK = Satuan Setingkat Kompi (±100 Personil)

2 Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Excavator	1 Unit	Baik	ZIDAM I/BB		
	Dozer	1 Unit	Baik	ZIDAM I/BB		
	Excavator	5 Unit	Baik	YONZIPUR 1/DD		
	Dozer	2 Unit	Baik	YONZIPUR 1/DD		
	Grader	2 Unit	Baik	YONZIPUR 1/DD		
	Dump Truck	14 Unit	Baik	YONZIPUR 1/DD		
	Ambulance	2 Unit		Denkeslap Kesdam I/BB		
	Ambulance	1 Unit		Denkesyah 01.04.01 P.S		
	Ambulance	1 Unit		01.04.02 SBG		
	Tenda Serbaguna	8 Set				
	Tenda Dapur	5 Set				
	Tenda Kesehatan	3 Set				
	Tenda Pleton	8 Set				
	Velbed	130 Unit				

	HT					
	Rumkit Tk II 01.05.01	1 Unit		Medan Kesdam I/BB		
	Rumkit Tk IV 01.07.01	1 Unit		P. Siantar		
	Rumkit Tk IV 01.07.02	1 Unit		Binjai		
	Rumkit Tk IV 01.07.03	1 Unit		P. Sidempuan		
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

2. Lanud Soewondo

A. Profil Organisasi			
1	Nama Organisasi	:	Lanud Soewondo
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Letkol Adm. A Rusli
	Jabatan	:	Kadispordirga SWO
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	081264750099
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
	Cakupan wilayah kerja	:	
B. Peran Kebencanaan			
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	membina dan mengoperasikan semua satuan dalam jajarannya, mendukung Operasi Udara satuan lainnya serta membina potensi kedarigantaraan di daerah
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	Mencegah berkembangnya kerugian, baik jiwa maupun harta benda rakyat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat agar tidak menimbulkan akibat yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan bangsa yang dilaksanakan melalui kemampuan pembinaan teritorial dan dukungan
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Membuat Pemetaan dan Sosialisasi kerawanan/risiko bencana Kebakaran hutan dan lahan .

			2. Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana Kebakaran hutan dan lahan 3. Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah. 4. Penyiapan personil dan peralatan. 5. Peningkatan kapasitas personil. Keterlibatan dalam penyusunan rencana kontingensi.
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Pengiriman armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan. 2. Pengamanan daerah bencana Kebakaran hutan dan lahan ; 3. Pengamanan aset, penghidupan korban bencana 4. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 5. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat Pembuatan jalur evakuasi bencana Kebakaran hutan dan lahan .
	Dalam status 'transisi darurat'	:	1. Membantu Pemulihan keamanan dan ketertiban 2. Pembersihan puing-puing reruntuhan Kebakaran hutan dan lahan .
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)		Melakukan pendampingan kepada korban bencana maupun petugas pelaksana pasca bencana.

C.	Sumberdaya Organisasi					
1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
	Operasi Tanggap Darurat	443 Personil	Lanud			
	Operasi Tanggap Darurat	243 Personil	Kosek			
	Operasi Tanggap Darurat	186 Personil	Pasgad			
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

3. Pangkalan Utama TNI AL I Belawan

A. Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	: Pangkalan Utama TNI AL I Belawan

	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Mayor Chairul Syawal
	Jabatan	:	Paban Ops Lant. I
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	081330785930
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan guna menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur TNI AL, menyelenggarakan patroli keamanan laut di wilayah kerja Lantamal I, dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut di wilayah kerjanya
	Cakupan wilayah kerja	:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra- Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	Mencegah berkembangnya kerugian, baik jiwa maupun harta benda rakyat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat agar tidak menimbulkan akibat yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan bangsa yang dilaksanakan melalui kemampuan pembinaan teritorial dan dukungan
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Membuat Pemetaan dan Sosialisasi kerawanan/risiko bencana Kebakaran hutan dan lahan . 2. Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana Kebakaran hutan dan lahan 3. Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah. 4. Penyiapan personil dan peralatan. 5. Peningkatan kapasitas personil. Keterlibatan dalam penyusunan rencana kontingensi.
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Pengiriman armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan. 2. Pengamanan daerah bencana Kebakaran hutan dan lahan ; 3. Pengamanan aset, penghidupan korban bencana 4. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 5. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat Pembuatan jalur evakuasi bencana Kebakaran hutan dan lahan .

	Dalam status 'transisi darurat'	:	Membantu Pemulihan keamanan dan ketertiban Pembersihan puing-puing reruntuhan Kebakaran hutan dan lahan .			
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)		Melakukan pendampingan kepada korban bencana maupun petugas pelaksana pasca bencana.			
C.	Sumberdaya Organisasi					
1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
	Operasi Tanggap Darurat	50 Personil	Lanal Tanjung Balai Asahan (Type C)			
	Operasi Tanggap Darurat	100 Personil	Yon Marhanlan I Belawan			
	Operasi Tanggap Darurat	100 Personil	Yonif 8 Marinir			
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

4. Polda Sumatera Utara

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Polda Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	AKBP Triyadi
	Jabatan	:	Kabag Bin Ops
	No. Telpon	:	082167892001

	No. HP	:			
	Email	:			
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	Melakukan pengamanan dan penyelamatan serta pengawasan korban dampak bencana.		
	Cakupan wilayah kerja	:	Provinsi Sumatera Utara		
B.	Peran Kebencanaan				
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	Memberikan pelayanan harkamtibmas dalam pengaturan, pengawasan serta patroli.		
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:	Melakukan koordinasi dan penyiapan personil serta peralatan satuan, dalam antisipasi dampak bencana.		
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	Pengamanan dalam evakuasi dan penyelamatan orang, barang dan dokumen.		
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)				
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	Menyiapkan perlengkapan dan personil satuan dalam antisipasi bencana.		
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Membuat Rencana Pengamanan Kontingensi (AMAN NUSA DUA) 2. Peningkatan kapasitas personil. 3. Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan TNI		
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan. 2. Penegakan hukum. 3. Pengamanan aset penghidupan korban bencana. 4. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat. 5. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat. 6. Pemulihan keamanan dan ketertiban. 7. Dukungan pemulihan infrastruktur penting.		
	Dalam status 'transisi darurat'	:	Pemulihan keamanan, ketertiban dan psikologis masyarakat		
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)				
C.	Sumberdaya Organisasi				
1	Sumberdaya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
	Administrasi dan Sekretariat	5 Personil	POLDA SUMUT	08126557712	
	Publikasi dan Informasi	42 Personil	POLDA SUMUT	0852 4454 7477	
	Perencanaan dan Pendataan	50 Personil	POLDA SUMUT		

	Operasi Tanggap Darurat	662 Personil	POLDA SUMUT	0813 1995	3732	DIT SAMAPTA
	Operasi Tanggap Darurat	200 Personil	POLDA SUMUT	0812 0001	6806	DITPOLAIRUD
	Operasi Tanggap Darurat	97 Personil	POLDA SUMUT	0853 1472	7020	BIDDOKES
	Operasi Tanggap Darurat	1.803 Personil	POLDA SUMUT	0852 1993	1523	SATBRIMOB
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Kendaraan Dinas Roda 4	9 Unit				
	Dump Truck	1 Unit	Baik	POLDA SUMUT		
	Kendaraan Khusus Water Treatment	1 Unit	Baik	POLDA SUMUT		
	Kendaraan Khusus Dapur Lapangan	1 Unit		SATBRIMOB		
	Perahu Karet LCR	2 Unit	Baik			
	Kayak	2 Unit	Baik			
	Life Jacket	29 Unit	Baik			
	Alat Deteksi Korban Vibrascope	2 Set	Baik			
	Alat eteksi Korban Vibraphone	2 Set	Baik			
	Gergaji Mesin Chain Saw	3 Unit	Baik			
	Ring Buoy	3 Buah	Baik			
	Senter Polarion	1 Unit	Baik			
	Rigid Inflatable Boat	1 Unit	Baik			
	Pelampung	18 Unit	Baik			
	Pelampung Otomatis	40 Unit	Baik			
	Lifebuoy	4 Unit	Baik			
	Peralatan Selam	8 Set	Baik			
	DVI	1 Unit	Baik			
	Pelampung Perorangan	86 Buah	Baik			

	Carbiner	36 Buah	Baik			
	Tai Karmantel Besar	1 Utas	Baik			
	Tali Karmantel Kecul	8 Utas	Baik			
	Figour X	25 Buah	Baik			
	Ransus SAR	1 Unit	Baik			
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	MTP (Makanan Siap Saji)	2 Kotak				DITSAMAPTA
	Tenda Serbaguna	107 Set				SATBRIMOB

5. BMKG Wilayah I - Medan

A. Profil Organisasi			
1	Nama Organisasi	:	BMKG Wilayah I- Medan
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	Jl. Ngumban Surbakti No.15, Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara 20131
	No. Telpon/Faksimili	:	(061) 8222877
	Email	:	bbmkg1@bmkg.go.id.
2	Narahubung (Contact Person)	:	Utami Al Khaidiyais
	Jabatan	:	PMG Pertama
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	085361094490
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
B. Peran Kebencanaan			
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	

	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Dukungan Prakiraan cuaca harian kajian Kebakaran hutan dan lahan ; 2. Peringatan Dini Cuaca yang bersifat anomali;
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	5. Peringatan Dini Kebakaran hutan dan lahan . 6. Diseminasi info Kebakaran hutan dan lahan dan cuaca ekstrem 7. Pengukuran skala getaran tanah (intensitas) 8. Memberikan informasi waktu peluruhan Kebakaran hutan dan lahan
	Dalam status 'transisi darurat'	:	Membantu rekomendasi wilayah berbahaya Kebakaran hutan dan lahan
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)		

C. Sumberdaya Organisasi					
1 Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
	Administrasi dan Sekretariat	1 Personil			Edukasi mitigasi kebakaran hutan dan lahan Dukungan data terhadap kegiatan kajian pengurangan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan . Pemantauan dan penyebarluasan peringatan bahaya yang terkait kebakaran hutan dan lahan Peringatan Dini Kebakaran hutan dan lahan .
	Publikasi dan Informasi	8 Personil		0821 6804 3653	Peringatan Dini Kebakaran hutan dan lahan . Desiminasi info kebakaran hutan dan lahan dan cuaca ekstrim Pengukuran skala getaran tanah (intensitas)

						Memberikan informasi waktu peluruhan kebakaran hutan dan lahan susulan (after shock)
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

6. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	T. Rahmat Syahputra
	Jabatan	:	Pranata Pend & Past
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	085270396005
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:	

3	Kepentingan terkait kebencanaan	:			
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)				
	Sebelum status bencana ditetapkan	:			
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. <i>Stand by</i> 24 jam petugas <i>Rescuer On Calling</i> 2. Melakukan pengecekan alat utama <i>serviceable</i> dan <i>endurance</i> 75% s.d 100% 3. Menyiapkan peralatan SAR dan Posko SAR 4. Mengaktifkan fungsi intelijen, investigasi dan mengumpulkan semua informasi yang menjadi data pendukung; 5. Meningkatkan koordinasi tentang updating data Kebakaran hutan dan lahan dari instansi pemerintah setempat		
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Membentuk organisasi SAR 2. Mendirikan tenda posko SAR 3. Menyusun perencanaan operasi SAR terkait apabila dalam kebakaran hutan dan lahan dicurigai terdapat korban jiwa 4. Membuat jaring komunikasi SAR 5. Membriefing (menugaskan) <i>Rescuer</i> dan SRU (<i>Search Rescue Unit</i>) 6. Melaksanakan operasi SAR (Mencari, menolong, menyelamatkan dan evakuasi) 7. Melaksanakan <i>degriefing</i> (Pengakhiran tugas) dan evaluasi.		
	Dalam status 'transisi darurat'	:	1. Penghentian operasi SAR 2. Pemantauan <i>update</i> kondisi Kebakaran hutan dan lahan secara berkala 3. Dokumentasi dan laporan untuk bahan evaluasi		
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)				
C.	Sumberdaya Organisasi				
1	Sumberdaya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
	Operasi Tanggap Darurat	53 Orang Personil	Tj Balai Asahan 10 personil D. Toba 8 Personil Unit POS SAR Madina 5 Personil		5 (Lima) Personil bersertifikat
	Kesehatan	2 Personil			Perawat
2	Peralatan				

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Mobil Double Cabin	6 Unit	Baik	Sibolga/Madina		Sibolga 4 Unit Madina 2 Unit
	Truk Compartement	2 Unit	Baik	Medan		
	Truk Ampibi	1 Unit	Baik	Medan		
	Dapur Umum	1 Unit				Untuk TIM SAR
	Truk Dapur Umum	1 Unit				
	Medis Personal	1 Set				
	Kapal 40 m	1 Unit		Sibolga		
	Heli	2 Unit		Atang Sandjaja		
	Palsar Air	1 Set		Sibolga/Madina		
	Palsar Darat/Mountering	1 Set				
	Alat Ekstrikasi	1 Set		Sibolga		
	RIB	1 Unit		Sibolga		
	Perahu Karet	4 Unit		Sibolga/Madina		SIBOLGA 3 UNIT MADINA 1 UNIT
	Alkom	1 Set		Sibolga		
	Kantong Jenazah	100 Lembar				
	Chainsaw	4 Unit	Baik			2 Unit Chainsaw Uk.Besar dan 2 Unit Chainsaw uk. kecil
	Tenda Posko	1 Set	Baik dan Lengkap	Sibolga dan Madina		
	Humas/Center					
	HT	30 Unit				
	Drone	3 Unit				2 Unit Medan 1 Unit Madina
	Medis Person					
	Pos SAR	1 Unit		Sibolga		
	Pos Unit Siaga	1 Unit		Madina		
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Kawol Abdi
	Jabatan	:	F. Peneliti
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	08116550707
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra- Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Mengakordinir OPD dalam membuat suatu kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan untuk menangani mitigasi bencana 2. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan 3. Koordinasi antar OPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana 4. <i>Updating</i> data kependudukan, fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, serta infrastruktur 5. Perencanaan kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana 6. Akselerasi program dan kegiatan OPD

			7. Membuat inovasi daerah
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	3. Membantu BPBD dalam Penyusunan Rencana Operasi tanggap darurat 4. Mengkoordinir dalam menentukan kawasan rawan bencana
	Dalam status 'transisi darurat'	:	1. Membantu BPBD dalam Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2. Review perencanaan pembangunan 3. Pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Bappelitbang bersama tim TAPD melakukan koordinasi dengan bersinergi dalam menentukan tipe bencana seperti mendesak atau tidak sehingga pengguna anggaran lebih tepat,
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)		

C. Sumberdaya Organisasi

1 Sumberdaya Manusia

No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
	Jitupasna	5 Personil	Bappelitbang Provsu		

2 Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

3 Logistik (Bahan/Sediaan)

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara

A. Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:
	Alamat	:
	No. Telpon/Faksimili	:
	Email	:
2	Narahubung (Contact Person)	: Triwibowo
	Jabatan	: Analis

	No. Telpn	:	
	No. HP	:	082366636667
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Memberikan himbauan kepada Kabupaten/Kota dalam hal potensi bencana di daerah; 2. Memberikan Penyuluhan dan sosialisasi kepada Forum-forum dan Ormas di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota 3. Siaga tenaga pendukung dan SDM yang dapat membantu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat saat darurat; 4. Tersedianya fasilitas yang dapat untuk dimanfaatkan pada saat darurat
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Penanganan pencegahan konflik pada saat pemberian logistik di daerah yang mengalami bencana; 2. Meningkatkan kewaspadaan dini dalam menangani konflik sosial dimasyarakat; 3. Mengkoordinir forum-forum dan Ormas yang terdaftar dalam membantu penanganan saat darurat; 4. Memobilisasi tenaga dan SDM pada saat darurat 5. Mendukung dengan memberikan fasilitas dalam penanganan saat darurat
	Dalam status 'transisi darurat'	:	Memantau perkembangan agar tidak menjadi konflik sosial di masyarakat
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)		
C.	Sumberdaya Organisasi		
1	Sumberdaya Manusia		

No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
	Operasi Tanggap Darurat	10 personil	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu			
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Minibus	3 Unit		Medan		
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

9. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Regina Ria Yohana Siahaan
	Jabatan	:	Staff Program
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	081262966714
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi	:	

	(mandat)					
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:				
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:				
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)					
	Sebelum status bencana ditetapkan	:				
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Penyiapan personil 2. Penyiapan peralatan 3. Pengamanan logistik			
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Penyelenggaraan trantibum dan tranmas 2. Distribusi air bersih 3. Pendataan korban jiwa 4. Pengiriman logistik 5. Mengoptimalkan pengamanan aset -aset pemerintah 6. Pengamanan aset pemerintah 7. Penegakan Perda dan Perkada 8. Mendirikan Shelter/Huntara			
	Dalam status 'transisi darurat'	:	Pengamanan aset pemerintah dan masyarakat			
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)					
C.	Sumberdaya Organisasi					
1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
	Operasi Tanggap Darurat	200 Personil			Total seluruh Personil 325 Orang Dengan catatan : yang dapat diarahkan dalam penanganan bencana sebanyak 200 Personil	
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

	Truk Dalmas	6 Unit				
	Mobil Komando	1 Unit				
	Mobil Patroli	5 Unit				
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Gusar Tampubolon, ST
	Jabatan	:	Staff Bina Marga
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	081270379715
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra-Bencana	:	

	(normal)		
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Perencanaan Dan Pembangunan Instalasi Air Bersih (Persediaan Dan Distribusi) 2. Perencanaan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Yang Aman
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Mobilisasi alat berat untuk penanganan darurat Kebakaran hutan dan lahan 2. Penyiapan tempat pengungsian 3. Pelaksanaan penyediaan aksesibilitas jalan menuju lokasi bencana Kebakaran hutan dan lahan 4. Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah bencana Kebakaran hutan dan lahan 5. Penyediaan tempat pengungsian 6. Membangun dan mengembalikan berfungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya 7. Pembangunan hunian sementara
	Dalam status 'transisi darurat'	:	14. Rehabilitasi jalan jembatan dan sumberdaya air 15. Membuat tabulasi penanganan terhadap bangunan yang terdampak Kebakaran hutan dan lahan 16. Perbaikan lingkungan daerah bencana 17. Perbaikan sarana dan prasarana umum 18. Pembangunan hunian sementara 19. Perhitungan anggaran biaya rehab/rekonstruksi jalan dan jembatan 20. Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat, prasarana transportasi 21. Perbaikan hunian 22. Pembangunan hunian tetap 23. Pembangunan sarana pelayanan publik 24. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana 25. Relokasi rumah masyarakat terdampak bencana 26. Rehabilitasi rumah warga terdampak bencana
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)		
C.	Sumberdaya Organisasi		
1	Sumberdaya Manusia		

No.	Jenis Keahlian		Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
	Operasi Tanggap Darurat		20 Personil	Dinas PUPR		
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Mobil Double Cabin	1 Unit	Baik			
	Excavator Standart	3 Unit		Medan		
	Dump Truck	1 Unit				
	Perahu Karet	1 Unit				
	Goni/Sand Bag	5000 lembar				
	Speedboat	1 Unit				
	Drone	1 Unit				
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

11. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	

2	Narahubung (Contact Person)	:	Henry N. Sijinjak		
	Jabatan	:	Staff		
	No. Telpon	:			
	No. HP	:	081263375925		
	Email	:			
		:			
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:			
	Cakupan wilayah kerja	:			
		:			
B.	Peran Kebencanaan				
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:			
2	Peran dalam Pra- Bencana (normal)	:			
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:			
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)				
	Sebelum status bencana ditetapkan	:			
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana dengan berkoordinasi dengan kabupaten/kota 2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan risiko bencana 3. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana 4. Merencanakan kebutuhan logistik dengan <i>buffer stock</i>		
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Memberikan bantuan logistik/membangun dapur umum; 2. Memfasilitasi <i>safe house</i> 3. Penyediaan air bersih 4. Membagi <i>kit wad</i> untuk bayi/anak/dewasa		
	Dalam status 'transisi darurat'	:	1. Mendata keluarga/korban yang masih tinggal di pengungsian 2. Menyiapkan logistik bagi yang masih tinggal 3. Memberikan terapi okupasi agar korban dapat hidup mandiri pasca bencana.		
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)				
C.	Sumberdaya Organisasi				
1	Sumberdaya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan

	Operasi Tanggap Darurat	20 Personil	Dinas Sosial Provsu		20 Personil untuk Rescuer dan Dapur Umum 200 Personil TAGANA	
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Duble Cabin	2 Unit				
	Minibus	1 Unit				
	Safe House	4 Unit				
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

12. Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Rebecca Tampubolon
	Jabatan	:	Program
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	087769907520
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	

B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	
	Dalam status 'siaga darurat'	:	
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	
	Dalam status 'transisi darurat'	:	
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)		
C.	Sumberdaya Organisasi		
1	Sumberdaya Manusia		
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil
2	Peralatan		
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
3	Logistik (Bahan/Sediaan)		
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi

13. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Amran
	Jabatan	:	Kasi PPUPT BBI
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	081361567236
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana 2. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana 3. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan 4. Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stakeholder yang bertanggungjawab atas penurunan ketersediaan pangan untuk mencegah kerawanan pangan 5. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan 6. Menyiapkan lumbung pangan
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	Pemenuhan kebutuhan pangan

	Dalam status 'transisi darurat'	:	Kajian daerah terpapar dalam aspek wilayah pertanian			
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)					
C.	Sumberdaya Organisasi					
1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
	Operasi Tanggap Darurat	10 Personil	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara			
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Mobil	3 Unit				
	Kendaraan Roda 2	14 Unit				
	Drone	1 Unit				
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

14. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

A. Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:
	Alamat	:
	No. Telpon/Faksimili	:
	Email	:
2	Narahubung (Contact Person)	: M. Rivaldi
	Jabatan	: Staff
	No. Telpon	:

	No. HP	:	081263100562
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Koordinasi ke dinas kesehatan kabupaten/kota; 2. Membuat RHA (Rapid Health Assesment) yang terdiri dari : - Ketersediaan tenaga medis; - Ketersediaan fasilitas kesehatan; - Jalur evakuasi medis/jalur rujukan. 3. Persiapan penyaluran logistik dibidang medis; 4. Persiapan mobilisasi <i>ambulance</i> 5. Persiapan SDM Medis 6. Persiapan aktivasi klaster kesehatan (Sub. klaster pelayanan kesehatan; Sub. klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan; Sub. Klaster pelayanan gizi, sub klaster kesehatan jiwa, sub klaster kesehatan reproduksi dan sub klaster Disaster Victim Identification (DVI))
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Membuka posko kesehatan; 2. Mobilisasi petugas medis 3. Penyaluran logistik kesehatan (alkes dan obat-obatan) 4. Aktivasi klaster kesehatan
	Dalam status 'transisi darurat'	:	1. Pelayanan dan Pendampingan Psikososial 2. Sanitasi Lingkungan (Air bersih, jamban, dll) 3. Perbaikan pusat layanan kesehatan 4. Pembangunan pusat layanan Kesehatan 5. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)		
C.	Sumberdaya Organisasi		

1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
	Operasi Tanggap Darurat	16 Personil			1 (Satu) Tim terdiri dari 4 Orang; saat bencana diturunkan sebanyak 4 Tim	
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Double Cabin	2 Unit				
	Sepeda Motor (Lapangan)	2 Unit				
	Ambulance Jenazah	1 Unit				
	Ambulance Basic	4 Unit				
	Perahu Karet	2 Unit				
	Alkom	1 Set				
	Kantong Jenazah	50				
	Tenda Rumah Sakit Darurat Lapangan	19 Unit				Dengan berbagai ukuran
	Tenda RS Lapangan 4x6	2 Unit				
	Tenda RS Lapangan 4x12	6 Unit				
	Tenda RS Lapangan 6x12	11 Unit				
	Velbed	80 Set				
	HT	10 Unit				
	Oksigen Konsentrator	270 Unit				
	Masker Anak	24 koli				
	Masker Dewasa	3 koli				
	Masker KN95	990 Pcs				
	BPAP	10 Unit				
	Pulse Oxymetri	200 Buah				
	Emergency Kit	11 Set				
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

15. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
		:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Jonathan Tobing
	Jabatan	:	JF TBP
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	082165636413
	Email	:	
		:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
		:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Pendataan bangunan 2. Persiapan kegiatan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah; 3. Persiapan pembuatan sumur bor untuk keperluan air bersih
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	Fasilitasi Pendataan kerusakan bangunan;

	Dalam status 'transisi darurat'	:	Rehabilitasi rumah			
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)					
C.	Sumberdaya Organisasi					
1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
1	Operasi Tanggap Darurat	5 Personil	Dinas PKP			
2	Teknisi	5 Personil	Dinas PKP			
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

16. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Utara

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Keke Ariantha Meliala
	Jabatan	:	
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	081294531649

	Email	:				
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:				
	Cakupan wilayah kerja	:				
B.	Peran Kebencanaan					
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:				
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:				
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:				
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)					
	Sebelum status bencana ditetapkan	:				
	Dalam status 'siaga darurat'	:	Penyusunan pedoman rencana keberlanjutan usaha (business continuity plan) pada industri dan UKM			
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Berkoordinasi langsung dengan PLN berkaitan dengan energi Listrik 2. Penyediaan genset <i>mobile</i>			
	Dalam status 'transisi darurat'	:	1. Pemulihan fungsi fasilitas ekonomi 2. Bantuan permodalan dan pendampingan terhadap UKM terdampak bencana 3. Bantuan Sarana Usaha			
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)					
C.	Sumberdaya Organisasi					
1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
	Operasi Tanggap Darurat	20 Personil	Cabdis Padang Sidempuan, Dairi, Siantar, Labuhanbatu		Total Pegawai 204 Personil	
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Double Cabin	1 Unit	Baik	Medan		
	Minibus	1 Unit	Baik	Medan		

3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

17. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Dominikus Ein
	Jabatan	:	Kasi Perkeretaapian
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	081265533660
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra- Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Penyiapan kendaraan / angkutan untuk evakuasi, distribusi logistik 2. Perbaikan rambu jalan dan rambu tempat tertentu' 3. Menyediakan sarana kendaraan
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Pengerahan kendaraan / angkutan untuk evakuasi, distribusi logistik 2. Pembuatan rambu jalan dan rambu tempat tertentu

			3. Melakukan Rekayasa Lalu Lintas 4. Koordinasi dengan dishub kab/ko di lokasi bencana untuk mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan: pelaksanaan rekayasa lalulintas, peralatan rambu dan perlengkapan lainnya; 5. Penambahan personil sesuai kebutuhan			
	Dalam status 'transisi darurat'	:	1. Pemulihan pelayanan transportasi umum 2. Perbaikan pelayanan transportasi umum 3. Memberikan pengaturan trayek sementara 4. Penambahan bus pendukung			
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)					
C.	Sumberdaya Organisasi					
1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Mobile Traffic	2 Unit				
	Mobil Patroli/Double Cabin	2 Unit				
	Mobil Box	2 Unit				
	Speedboat	1 Unit				
	HT	10 unit				
	Drone	1 Unit				
	Rambu Portable	20 Pcs				
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

18. Dinas Pendidikan

A. Profil Organisasi		
1 Nama Organisasi	:	Dinas Pendidikan
Unit/Divisi/Bagian	:	
Alamat	:	
No. Telpon/Faksimili	:	

	Email	:				
2	Narahubung (Contact Person)	:	Aprianto			
	Jabatan	:	Staf			
	No. Telpon	:				
	No. HP	:	081396428706			
	Email	:				
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:				
	Cakupan wilayah kerja	:				
B.	Peran Kebencanaan					
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:				
2	Peran dalam Pra- Bencana (normal)	:				
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:				
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)					
	Sebelum status bencana ditetapkan	:				
	Dalam status 'siaga darurat'	:	3. Mengumpulkan Kepala sekolah dan cabang dinas sekabupaten/kota 4. Koordinasi dengan cabang dinas			
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	3. Meliburkan aktivitas sekolah atau 4. Melaksanakan sekolah daring			
	Dalam status 'transisi darurat'	:	Mendata gedung yang rusak (bangunan sekolah-sekolah)			
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)					
C.	Sumberdaya Organisasi					
1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
		150 Personil				
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

	Minibus	5 Unit				
	Pick Up	2 Unit				
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

19. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

A. Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:
	Alamat	:
	No. Telpon/Faksimili	:
	Email	:
2	Narahubung (Contact Person)	: Ahmad Basri
	Jabatan	: Ahli Kebijakan
	No. Telpon	:
	No. HP	: 082267185594
	Email	:
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:
	Cakupan wilayah kerja	:
B. Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)	
	Sebelum status bencana ditetapkan	:
	Dalam status 'siaga darurat'	: Mobilisasi Tim Peliput Data

	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Mengirim tenaga peliput untuk mendokumentasi kejadian yang sebenar-benarnya 2. Memberitakan dan menceritakan informasi yang didapat melalui televisi dan media sosial, media cetak 3. Melakukan dokumentasi berita bencana kebakaran hutan dan lahan			
	Dalam status 'transisi darurat'	:	Pengolahan data hasil dari liputan yang akan dipublikasikan melalui <i>press release</i> dan media massa			
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)					
C.	Sumberdaya Organisasi					
1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
1	Publikasi dan Informasi	8 Personil			Tim Peliput	
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Kamera	2 Unit				
	Drone	2 Unit				
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

20. Perum Bulog Divre Sumatera Utara

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Perum Bulog Divre Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telp/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Dadang Apriando

	Jabatan	:	Asman PODP			
	No. Telpn	:				
	No. HP	:	081377943677			
	Email	:				
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:				
	Cakupan wilayah kerja	:				
B. Peran Kebencanaan						
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:				
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:				
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:				
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)					
	Sebelum status bencana ditetapkan	:				
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. <u>Suply Chain stok</u> pangan pokok (beras) dan pangan pokok lain (non beras) 2. Penyiagaan <i>buffer stock</i>			
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	Menyediakan beras dipintu gudang Perum Bulog yang ada diwilayah bencana			
	Dalam status 'transisi darurat'	:	Penyaluran beras pasca bencana (sampai pintu gudang)			
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)	:				
C. Sumberdaya Organisasi						
1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
	Operasi Tanggap Darurat	20 Personil	Padang Sidimpuan			
	Operasi Tanggap Darurat	10 Personil	Sibolga			
	Operasi Tanggap Darurat	50 Personil	Prov Kanwil			
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Stok Dinsos Reguler/ Pemerintah	14,5 Ton				
	Stok Beras	60 Ton				
	Cadangan beras/kabupaten					

21. PDAM Tirtanadi Sumut

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	PDAM Tirtanadi Sumut
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Ade Juadi Hamzah
	Jabatan	:	Kabid. P. Mutu
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	081262597323
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra- Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	
	Dalam status 'siaga darurat'	:	
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	

	Dalam status 'transisi darurat'	:				
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)	:				
		:				
C.	Sumberdaya Organisasi					
1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
	Teknisi	8 Personil	Cabang Tapsel			
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

22. Bank Mandiri Regional I

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Bank Mandiri Regional I
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
		:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Endy. S
	Jabatan	:	NM-GA
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	081510332957
	Email	:	
		:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	

	Cakupan wilayah kerja	:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Melakukan perencanaan dan monitoring pelaksanaan program krisis manajemen dan emergency respon. 2. Mengelola pelaporan aktivitas krisis manajemen dan emergency respon dan menyampaikan kepada ketua manajemen krisis; 3. Berkoordinasi dengan pihak stakeholder internal (cabang, area, region dan kantor pusat) terkait persiapan menghadapi bencana. 4. Berkoordinasi dengan pihak stakeholder eksternal (basarnas, KNKT, Polisi, Pemadam kebakaran dan pihak terkait lainnya) persiapan menghadapi bencana; 5. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas program awareness/training/testing/exercise
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Berkoordinasi dengan pihak stakeholder internal (cabang, area, region dan kantor pusat) dalam penanggulangan krisis; 2. Melaksanakan koordinasi penanggulangan dan pengendalian yang terkait dengan keselamatan pegawai saat terjadi bencana. 3. Memberikan masukan kepada CMT (crisis managemet team) atas laporan hasil analisa, penilaian serta cakupan insiden yang terjadi di lokasi terdampak.
	Dalam status 'transisi darurat'	:	1. Menjaga keamanan aset Bank Mandiri; 2. Tindak lanjut pasca kritis dengan berkoordinasi dengan stakeholder internal (cabang, area, region dan kantor pusat) dan eksternal (basarnas, KNKT, Polisi, Pemadam kebakaran dan pihak terkait lainnya);
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)		
C.	Sumberdaya Organisasi		
1	Sumberdaya Manusia		

No.	Jenis Keahlian		Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Ambulance	1 Unit		Medan		
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

23. Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

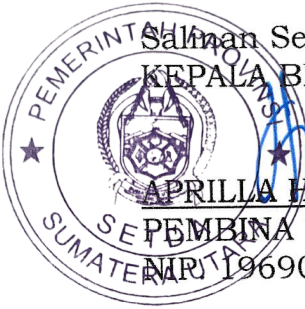
A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Sri Aulia Sitepu
	Jabatan	:	JFT Analis PSP
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	081396494464
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana	:	

	ditetapkan					
	Dalam status 'siaga darurat'	:				
	Dalam status 'tanggap darurat'	:				
	Dalam status 'transisi darurat'	:				
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)					
C.	Sumberdaya Organisasi					
1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
APRILLA H. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA



RENCANA KONTINGENSI BENCANA

GEMPA BUMI

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2025-2028

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan perkenannya dapat diselesaikan penyusunan Rencana Kontingensi gempa bumi di Provinsi Sumatera Utara.

Penanggulangan Bencana merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, media massa, akademisi maupun masyarakat, sehingga semua ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana untuk keselamatan diri, keluarga maupun lingkungan.

Pengalaman terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami yang semakin meningkat pada kurun waktu 10 tahun terakhir di Indonesia yang berdampak adanya korban jiwa, kerugian dan kerusakan serius pada aset penghidupan warga terdampak, membuat pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Utara, sehingga pentingnya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana gempa bumi sangat perlu direncanakan.

Menanggapi kondisi tersebut, dirasa perlu menyusun Rencana Kontingensi sebagai pedoman dalam penanganan darurat bencana. Rencana Kontingensi dilengkapi skenario kejadian dan asumsi dampak, untuk mendeskripsikan kondisi yang akan dihadapi dari kejadian gempa bumi dan tsunami serta dampaknya terhadap aspek kependudukan, sosial ekonomi, lingkungan dan sarana prasarana.

Perencanaan Kontingensi telah menjadi salah satu piranti dasar untuk membangun koordinasi dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan yang mengarah pada pengaturan fungsi dan pembagian tugas-tugas saat penanganan darurat bencana serta mobilisasi sumberdaya pada saat operasi tanggap darurat.

Rencana Kontingensi ini diharapkan dapat dimanfaatkan, serta diaktivasi jika kondisi kedaruratan benar-benar terjadi, sehingga penanganan darurat bencana menjadi lebih sinergis antar stakeholder, serta dapat lebih efektif dan efisien. Bilamana bencana tidak terjadi,

rencana Kontingensi diperbaharui secara berkala agar memberikan manfaat secara optimal.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyusun dokumen rencana Kontingensi ini, sebagai wujud nyata terbangunnya kemitraan serta membangun komitmen dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana gempa bumi Provinsi Sumatera Utara serta menjadi pedoman dalam perencanaan Kontingensi di tingkat Kabupaten Kota.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen rencana kontingensi bencana gempa bumi provinsi Sumatera Utara 2025-2028 yang disusun bersama-sama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) instansi vertikal, Kodam I/BB, Komandan Lanud Soewondo medan, Komandan Pangkalan Utama TNI AL I Belawan, Organisasi kebencanaan dalam melakukan organisasi penanganan bencana gempa bumi, sehingga dapat mengurangi korban dan kerugian.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi Sumatera Utara dalam menyusun dokumen rencana kontingensi merupakan rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi dimana provinsi Sumatera Utara memiliki kerentanan dan risiko tinggi yang mengancam.

Ruang lingkup cakupan luasan ancaman gempa bumi dalam bencana gempa bumi terdapat 21 kabupaten/kota dari 33 kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara.

Proses Penyusunan

Kegiatan penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana gempa bumi tentang pentingnya rencana kontingensi.
2. Pengumpulan data dan pembaharuan, pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas sekitar penanganan bencana dan lintas administratif.
3. Verifikasi data: analisis data sumberdaya yang ada di bandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
4. Pengumuman rancangan awal rencana kontingensi: penyusunan draft renkon, pembahasan dan perumusan dokumen renkon yang telah di sepakati.

Aktivasi Rencana Kontingensi

Aktivasi rencana kontingensi ini dilakukan beberapa saat setelah terjadi gempa bumi, dengan kriteria di wilayah Sumatera Utara secara historis berdampak kepada manusia dan kerugian adalah dalam skala 5,5 Richter dan Skala intensitas IX-XII MMI.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

NO.	DEFINISI :	
1	Aktivasi	Mengaktifkan dokumen (rencana kontingensi) sebagai Pedoman / acuan dalam penanganan darurat
2	Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3	Ancaman bencana	Suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana
4	Bahaya	Adalah suatu proses, fenomena atau aktifitas manusia yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak kesehatan lainnya, kerusakan properti, gangguan sosial dan ekonomi serta kerusakan lingkungan
5	Kerentanan	Kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan atau proses yang meningkatkan risiko individu, komunitas, aset atau sistem terhadap dampak bahaya (UNISDR, 2017)
6	Kesiapsiagaan	Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
7	Penanggulangan bencana	Upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi
8	Perencanaan kontingensi	Adalah suatu proses perencanaan situasi darurat bencana pada jenis bahaya tertentu dalam keadaan yang tidak menentu dengan skenario dan tujuan yang disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat dan ditetapkan secara formal.
9	Rencana kontingensi (Renkon)	Dokumen yang disusun melalui suatu proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya tertentu, dalam keadaan yang tidak

		menentu, dengan skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan,
10	Skenario	Gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
11	Sumberdaya	Segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil, misalnya peralatan, sediaan, waktu, tenaga, uang dan metode.
12	Kaji Cepat	Penilaian yang dilakukan segera setelah ada informasi awal adanya ancaman atau kejadian darurat bencana untuk memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat
13	Risiko Bencana	Potensi kehilangan nyawa, cedera, atau kerusakan atau kerusakan aset yang dapat terjadi pada suatu sistem, masyarakat atau komunitas dalam periode waktu tertentu, ditentukan secara probabilistik sebagai fungsi dari bahaya, paparan, kerentanan dan kapasitas (UNISDR, 2017)
14	Prosedur tetap	Dokumen memuat rincian tugas/peran para pemangku kepentingan dalam penanganan situasi darurat bencana. bentuk dokumen ini meliputi; siapa, melakukan apa, kapan dan bagaimana cara melakukannya beserta alur aktivitasnya
15	Simulasi	Kegiatan latihan dimana pengetahuan maupun keterampilan peserta latih ditingkatkan melalui latihan yang menggunakan berbagai macam peragaan – dengan situasi dan kondisi yang mendekati sebenarnya.
16	Peringatan dini	serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17	Komando	Kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.
18	Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan

		menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
19	Penanganan Darurat Bencana (Posko)	penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
20	Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana	Institusi yang berperan mengkoordinasikan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana meliputi pos pendamping nasional Penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah.
21	Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana	Institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.
22	Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana	Institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana dan pengungsian.
23	Rencana Operasi	Rencana yang dibuat atau disusun dalam rangka pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana, rencana operasi ini disusun oleh komando operasi tanggap darurat dengan mempertimbangkan rencana kontingensi dan hasil kaji cepat.
25	Siaga Darurat	keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana dan sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
26	Tanggap Darurat	Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana

27	Gempa Bumi	Adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuh batuan.
28	Transisi Darurat ke Pemulihan	Adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok masyarakat masih tetap berlangsung.
ISTILAH / DAFTAR SINGKATAN :		
1	BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
2	BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
3	BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	PDB	Penanganan Darurat Bencana
5	PMI	Palang Merah Indonesia
6	Polri	Kepolisian Republik Indonesia
7	SKPDB	Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
8	TNI	Tentara Nasional Indonesia
9	BPS	Badan Pusat Statistik
10	RAPI	Radio Antar Penduduk Indonesia
11	KODIM	Komando Distrik Militer
12	SAR	Search and Rescue (Pencarian dan Pertolongan)
13	SEKDA	Sekretaris Daerah
14	BAPPEDA	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
15	DINKES	Dinas Kesehatan
16	BPKP	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
17	DINSOS	Dinas Sosial
18	DISHUB	Dinas Perhubungan
19	RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
20	SATPOL PP	Satuan Polisi Pamong Praja
21	DAMRI	Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia
22	PDB	Penanganan Darurat Bencana
23	OPDB	Operasi Penanganan Darurat Daerah
24	DSP	Dana Siap Pakai
25	BANSOS	Bantuan Sosial
26	Dana BTT	Dana Belanja Tak Terduga
27	POSKO	Pos Komando
28	OPD	Organisasi Perangkat Daerah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR PETA.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Kebijakan Dan Strategi	4
1.3.1 Kebijakan.....	4
1.3.2 Strategi.....	4
1.4 Maksud Dan Tujuan	5
1.5 Ruang Lingkup.....	5
1.6 Pendekatan, Metode, Dan Tahapan Proses	5
1.7 Umpan Balik.....	6
1.8 Masa Berlaku Dan Pemutakhiran.....	6
1.9 Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi	6
BAB II SITUASI	7
2.1 Karakteristik Bahaya	7
2.2 Skenario Kejadian	23
2.3 Asumsi Dampak.....	35
BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI	
KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA.....	38
3.1 Tugas Pokok	38
3.2 Sasaran	39
BAB IV PELAKSANAAN	40
4.1 Konsep Operasi Dan Sasaran Tindakan	40
4.2 Struktur Organisasi Komando.....	42
4.3 Fungsi dan Kegiatan pokok	43
4.4 Tugas-Tugas Bidang.....	44
4.5 Instruksi Koordinasi.....	56
BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK.....	59
5.1 Administrasi	59
5.2 Logistik	59

BAB VI PENGENDALIAN	61
6.1 Komando.....	61
6.2 Kendali	64
6.3 Koordinasi.....	64
6.4 Komunikasi.....	66
6.5 Informasi.....	67
BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT	68
7.1 Komitmen Parapihak dalam Penanganan Kedaruratan.....	68
7.2 Penyiapan Kesiapsiagaan	69
LAMPIRAN	70
LAMPIRAN 1 : Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat.....	70
LAMPIRAN 2 : Proyeksi Wilayah Dan Penduduk Terdampak	73
LAMPIRAN 3 : Susunan Pelaksana Tugas	78
LAMPIRAN 4 : Jaring Komunikasi	89
LAMPIRAN 5 : Rencana Evakuasi	92
LAMPIRAN 6 : Album Peta	97
LAMPIRAN 7 : Mata Rantai Peringatan Dini	102
LAMPIRAN 8 : Estimasi Ketersediaan Dan Kebutuhan Sumberdaya.....	104
LAMPIRAN 9 : Sop/Protap Bencana gempa Bumi.....	120
LAMPIRAN 10: Lembar Komitmen	141
LAMPIRAN 11: Lembar Berita Acara Penyusunan	144
LAMPIRAN 12: Profil Lembaga / Organisasi	147

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Sesar Darat Di Wilayah Sumatera Utara	7
Tabel 2.2	Daftar Panjang Kejadian gempa bumi di Provinsi Sumatera Utara	11
Tabel 2.3	Daftar Panjang Kejadian Tsunami di Provinsi Sumatera Utara	20
Tabel 2.4	Potensi Bahaya gempa bumi di Provinsi Sumatera Utara	36
Tabel 2.5	Rincian Skenario Kejadian gempa bumi	24
Tabel 2.6	Rincina Skenario Kejadian gempa bumi	25
Tabel 2.7	Asumsi Dampak Kejadian gempa bumi	27
Tabel 2.8	Rincian Skenario Kejadian gempa bumi Berdampak Terjadi Tsunami	29
Tabel 2.9	Rincian Skenario Kejadian gempa bumi disertai Gelombang Tsunami	30
Tabel 2.10	Asumsi Dampak Kejadian gempa bumi disertai Gelombang Tsunami.....	33
Tabel 4.1	Konsep Operasi Penanganan Darurat Bencana gempa bumi Provinsi Sumatera Uatra.	40
Tabel 4.2	Rencana Tindakan (Sasaran Tindakan).....	41
Tabel 4.3	Tugas Bidang Penanganan Darurat Bencana Provinsi Sumatera Utara.....	45
Tabel 6.1	Pos Lapangan	61
Tabel 6.2	Lokasi Pos Pendukung	62
Tabel 6.3	Tugas Dan Fungsi Pos Pendukung.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Historis Kejadian gempa Merusak Provinsi Sumatera Utara (1934-2023).....	19
Gambar 2.2	Historis Kejadian Tsunami Provinsi Sumatera Utara (1934-2023)	21
Gambar 2.3	Peta Seismitas Provinsi Sumatera Utara dan Aceh (2018 - 2022)	22
Gambar 2.4	Grafik Potensi Bahaya gempa bumi di Provinsi Sumatera Utara	37
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana gempa bumi.....	43

DAFTAR PETA

Peta 2.1	Sebaran Sesar Darat di Wilayah Sumatera Utara.....	9
Peta 2.2	Peta Historis Kejadian gempa Merusak Provinsi Sumatra Utara (1934-2023).....	19
Peta 2.3	Historis Kejadian Tsunami Provinsi Sumatra Utara (1934-2023).....	21
Peta 2.4	Peta Seismitas Provinsi Sumatra Utara dan Aceh (2018 – 2022).....	22
Peta 2.5	Skenario gempa Segmen Renun	37
Peta 2.6	Skenario gempa gempa Megathrust	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi dipermukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba – tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi dapat berdampak kepada korban jiwa, dan dampak fisik seperti robohnya bangunan, tanah longsor dan dampak ikutan lainnya.

Menurut KRB Provinsi Sumatera Utara 2022 – 2026, indeks risiko bencana Gempa bumi adalah tinggi. Selama tahun 2022 terdapat kejadian Gempa bumi di Sumatera Utara sebanyak 2056 kali. Terdampak beberapa Kab/Kota yang memiliki risiko Gempa bumi, antara lain kabupaten Dairi, Karo, Langkat, Binjai, Samosir, Humbahas, Pakpak Bharat, Taput, Sibolga, Nias, Gunung Sitoli, Nias Utara, Nias Bharat, Tapteng, Nias Selatan, Tapsel, Padang Sidempuan, Madina, Padang Lawas, Paluta, Labusel, Toba, Labuhan Batu, Simalungun, Pematang Siantar, dan Deli Serdang.

Sebagian besar Gempa bumi tersebut hanya bersifat *natural phenomenon*, sedangkan terdapat 1 (satu) bencana Gempa bumi di Kabupaten Tapanuli Utara yang berdampak kepada 1 orang meninggal dunia, 24 luka – luka, 1146 bangunan rusak yang terdiri dari 962 rumah dan 184 fasilitas umum.

Sejarah kebencanaan di Provinsi Sumatera Utara, Khususnya kejadian Gempa bumi memiliki frekuensi kejadian yang cukup tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir. Demi memastikan perlindungan warga dari bahaya (bencana) maka Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar. Permendagri tersebut menegaskan perencanaan kontingensi sebagai kewajiban dalam standar pelayanan minimal suburusan bencana daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan Permendagri 101/2018 diatur dan dijelaskan lebih rinci dalam Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020. Permendagri ini menetapkan nomenklatur perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di dalamnya tegas menyatakan perencanaan kontingensi merupakan urusan wajib

pemerintah kabupaten/kota dan diakomodir dalam perencanaan pembangunan dengan kode rekening pembiayaan khusus.

Pedoman perencanaan kontingensi 5.0 merupakan pembaharuan pedoman yang ada dengan mempertimbangkan perkembangan situasi mutakhir, terutama :

- Peningkatan kompleksitas karakteristik bahaya dan penanganan kedaruratannya;
- Peningkatan risiko akibat pandemi dan atau endemi;
- Perkembangan pola pengendalian penanggulangan kedaruratan bencana.

Rencana Kontingensi (Renkon) Gempa bumi merupakan proses identifikasi dan penyusunan rencana kedepan yang kemungkinan besar bencana Gempa bumi akan terjadi, namun juga belum tentu terjadi. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta membangun komitmen bersama antar pemangku kepentingan ketika terjadi Siaga Darurat dan Tanggap Darurat bencana Gempa bumi tingkat Provinsi Sumatera Utara.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Gempa bumi berdasarkan pada landasan hukum yang berlaku di tingkat Nasional dan Provinsi. Adapun landasan operasional hukum yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Badan Penanggulangan Nasional Penanggulangan Bencana No. 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Rencana Kontingensi Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 46).

1.3 Kebijakan Dan Strategi

1.3.1 Kebijakan

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Menetapkan status darurat bencana dalam waktu paling lambat 1 x 12 jam dan dapat diperpanjang;
2. Membentuk komando penanganan darurat bencana;
3. Menyusun rencana operasi dan penanganan tanggap darurat bencana yang terkoordinir sesuai dengan cluster yang ada;
4. Pencarian dan Penyelamatan Korban;
5. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar;
6. Perlindungan keamanan serta kenyamanan pada kelompok rentan terdampak bencana (ibu hamil, anak kecil, orang tua dan disabilitas);
7. Memastikan fasilitas layanan kesehatan masih dapat berjalan;
8. Pemulihan dini sarana prasarana serta pelayanan publik;
9. Terselenggaranya penanganan darurat yang efektif efisien dan inklusif;
10. Memastikan pencegahan dan penanganan Gempa bumi.

1.3.2 Strategi

Strategi penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan umum bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai efektivitas kebijakan. Strategi- strategi tersebut adalah;

1. Menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melaksanakan Kaji Cepat (*Speed Assesment*)
2. Pembentukan dan mengaktifkan pos komando penanganan darurat bencana Provinsi Sumatera Utara yang terintegrasi dengan lintas *sector* atau *cluster* tanggap darurat.
3. Memobilisasi unsur dinas terkait TNI, POLRI, masyarakat dan dunia usaha atau *cluster* tanggap darurat untuk mendukung terlaksananya operasi tanggap darurat bencana.

4. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak antara lain Menyediakan tempat penampungan sementara bagi korban bencana, dapur umum, air bersih, layanan kesehatan dan sanitasi yang inklusif dengan mengedepankan prinsip partisipatif serta kearifan lokal.
5. Melibatkan seluruh sector terkait (*cluster*) dalam penanggulangan darurat bencana, dengan tetap memperhatikan keragaman dan ramah terhadap kelompok rentan.
6. Melakukan penilaian kerusakan serta tafsiran kebutuhan untuk Tanggap Darurat Bencana dan pemulihan darurat bencana.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Dokumen rencana Kontingensi ini disusun sebagai landasan strategi, operasional, dan pedoman dalam penanganan darurat Gempa bumi Provinsi Sumatera Utara dan sebagai dasar untuk pengerahan sumberdaya dari seluruh pemangku kepentingan

Tujuan disusunnya Dokumen rencana Kontingensi ialah agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki dokumen Rencana Kontingensi Gempa bumi yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan Rencana Operasi.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana Kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya darurat bencana Gempa bumi di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Pendekatan, Metode, Dan Tahapan Proses

Rencana Kontingensi ini disepakati para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat Gempa bumi di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana tentang pentingnya rencana kontingensi.
2. Pengumpulan data dan pembaruan: Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif.
3. Verifikasi data: Analisa data sumberdaya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.

4. Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati dalam *Focus Group Discussion* (FGD) meliputi penilaian bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, merumuskan tugas pokok dan fungsi tiap *stakeholder*, menginventarisasi sumberdaya, peralatan dan logistik, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut.
5. Penandatanganan komitmen, hasil rumusan rencana kontingensi: Penyebaran/ diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada pelaku penanggulangan bencana (multi stake holder).

1.7 Umpan Balik

Untuk memastikan rencana kontingensi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru maka diperlukan masukan-masukan terutama terkait data, sehingga perlu dilakukan dengan *Focus Group Discussion* (FGD).

1.8 Masa Berlaku Dan Pemutakhiran

Dokumen rencana Kontingensi Gempa bumi Provinsi Sumatera Utara ini berlaku selama 3 (tiga) tahun. Agar rencana Kontingensi sesuai dengan situasi terbaru seperti misalnya: perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumberdaya maka dapat dilakukan kaji ulang atau *update* sesuai kebutuhan.

1.9 Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi

Rencana Kontingensi menjadi dasar dalam menyusun rencana operasi. Aktivasi rencana Kontingensi dilakukan setelah mendapatkan data dan analisis Kaji Cepat dari Tim Reaksi Cepat (TRC), selanjutnya rencana Kontingensi diaktivasi setelah ada penetapan status darurat bencana gempa bumi oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan telah ditetapkan serta diaktivasinya Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana oleh Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara. Rencana Kontingensi diaktivasi ditetapkan melalui rapat penyusunan rencana operasi yang dipimpin oleh Komandan Tanggap Darurat Bencana.

BAB II SITUASI

2.1 Karakteristik Bahaya

2.1.1 Profil Gempa bumi di Provinsi Sumatera Utara

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas Gunung Api, atau runtuh batuan (BNPB, <https://bnpb.go.id/definisi-bencana>). Metode kajian untuk gempa bumi pada dokumen ini menggunakan data guncangan di batuan dasar yang dikonversi menjadi data guncangan di permukaan. Konversi ini dilakukan karena gempa dengan magnitudo yang tinggi di lokasi yang dalam belum tentu menghasilkan guncangan permukaan yang lebih besar dibandingkan gempa dengan magnitudo yang lebih rendah di lokasi yang lebih dangkal.

Sumatera Utara yang merupakan salah satu zona tektonik aktif di Indonesia karena terdapat lempeng atau sesar darat dan laut. Adapun sesar darat yaitu Semangko dan Lempeng Subduksi Indo-Australia. Adapun adanya pergerakan Lempeng Subduksi Indo-Australia ini dapat juga menimbulkan ancaman tsunami.

Berdasarkan data dan informasi yang dikeluarkan oleh BMKG, diketahui sesar semangko di Provinsi Sumatera Utara terbagi-bagi menjadi terdapat 4 segmen yaitu Barumun, Torum Angkola dan Renun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan peta berikut.

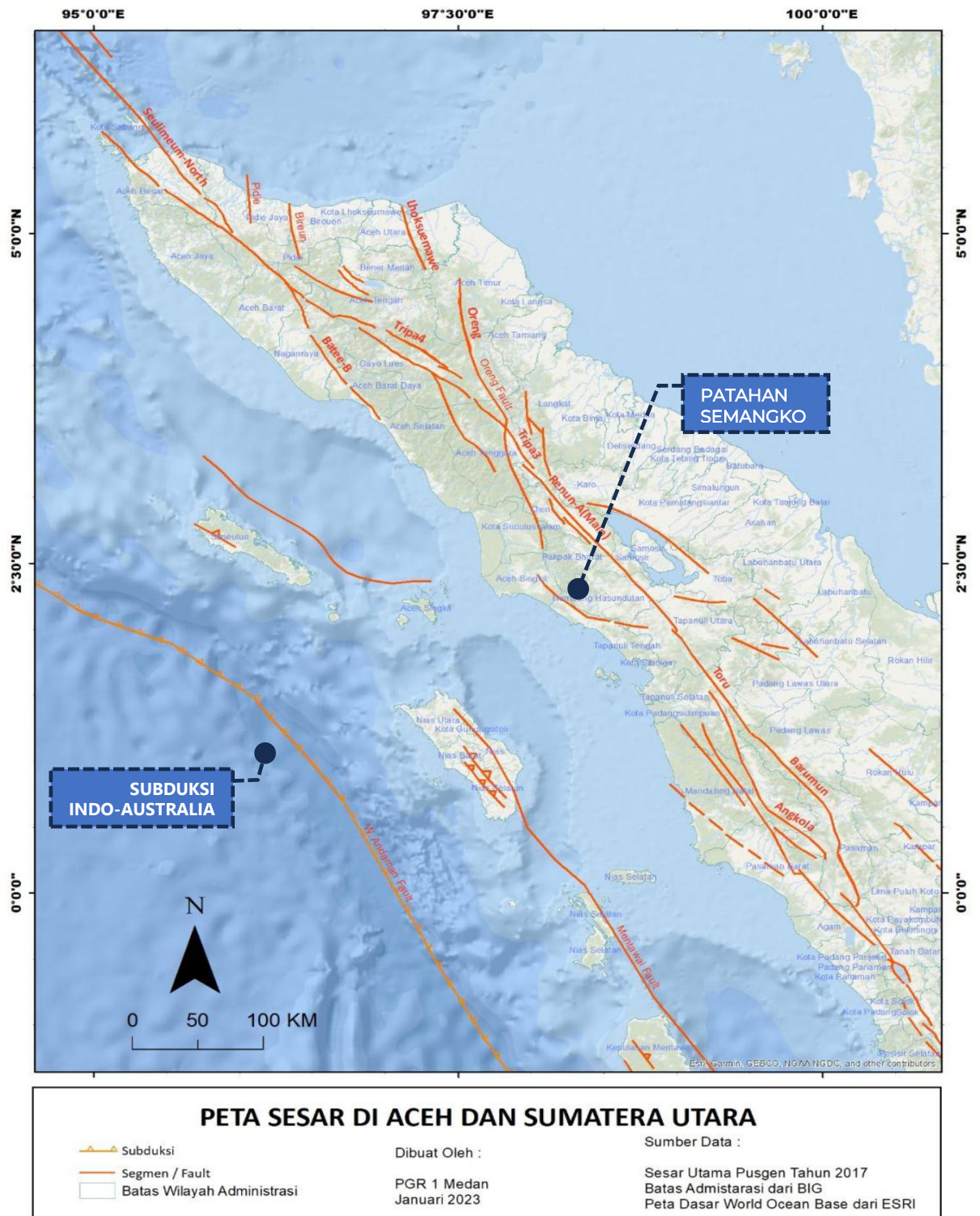
Tabel 2.1 Daftar Sesar Darat Di Wilayah Sumatera Utara

No.	Sesar Darat	Panjang (Km)	Tipe Patahan	Mmax
1	Barumun	125	Strike Slip	7.5
2	Toru	95	Strike Slip	7.4
3	Angkola	160	Strike Slip	7.7
4	Renun-A	180	Strike Slip	7.7
5	Renun-B	31	Strike Slip	6.8
6	Renun-C	26	Strike Slip	6.7

Sumber : BBMKG Wilayah I

Untuk lebih jelasnya terkait sebaran Sesar Darat di Wilayah Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar peta pada lembar lampiran.

Peta 2.1 Sebaran Sesar Darat di Wilayah Sumatera Utara



Sumber : Bbmkg Wilayah I

2.1.2 Sejarah Gempa bumi di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data daftar kejadian Gempa bumi di Provinsi Sumatera Utara Tahun sejak 1843 hingga 2022 yang dihimpun dari **Katalog Gempa bumi Merusak – BMKG tahun 2023**. Diketahui bahwa sedikitnya terdapat 28 Kejadian Gempa bumi yang diantaranya terdapat kejadian Gempa bumi yang menimbulkan Tsunami. Untuk lebih jelasnya terkait daftar kejadian Gempa bumi di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Daftar Panjang Kejadian Gempa bumi di Provinsi Sumatera Utara

No	Tanggal/Wilayah	OT (Origin Time) UTC	Mag	Wilayah yang merasakan (MMI)	Keterangan
1	1 Oktober 2022 Tidak Tsunami	02:28:41	6.0	Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Tarutung dengan skala intensitas VI MMI (Modified Mercalli Insensity), daerah Sipahutar V MMI.	1 korban jiwa, 25 luka-luka, dan sekitar 900 rumah mengalami kerusakan di Kabupaten Tapanuli Utara.
2	30 April 2020 Padang Lawas Sumatera Utara Tidak Tsunami	08:20:25 (15:20:25 WIB)	5.6	- Aek Godang : III MMI - Pinangsori : III MMI - Rokan Hilir : II MMI - Medan : II MMI - Rantau Prapat : II MMI (Pusat gempa berada di darat 24 km Barat Laut Padang Lawas, Sumut)	Korban Meninggal : - orang Korban luka-luka : - orang Kerusakkan : 30 bangunan yang terdampak dan rusak akibat gempa seperti, 27 rumah warga di Desa Aek Libung, Kecamatan Sayur Matinggi, 2 masjid dan 1 bangunan sekolah dasar. (Sumber : Laporan Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribudi sumut.antaranews.com, tanggal 30 April 2020 pukul 22.46 WIB)
3	14 Januari 2019 Tapanuli Utara Sumatera Utara Tidak Tsunami	23:59:52 15 Januari 2019 (06:59:52 WIB)	5.0	Tarutung : IV MMI Sipahutar : IV MMI Porsea : II-III MMI (Pusat gempa berada di darat 26 km TG Tapanuli Utara – Sumatera Utara) Gempa bumi susulan : M3,8 tanggal 15 Januari 2019 pukul 11:46:01, di 1,87 LU – 99,22 BT (di darat 23 km TGTapanuli Utara) kedalaman 6 km dirasakan di Sarula III MMI	Dampak keseluruhan : Korban Meninggal : - orang Korban luka-luka : - orang Kerusakkan : - 1. Kerusakkan rumah : a. Rusak Ringan (RR) : - unit b. Rusak Sedang (RS) : - unit c. Rusak Berat (RB) : - unit 2. Infrastruktur Beberapa instalasi gardu induk PT. PLN di Dusun Sigurunggurung, Kecamatan Pahae Jae rusak, instalasi gardu yang rusak sbb : (Sumber : Kasubag Humas Polres Tapanuli Utara, Aiptu Sutomo Mangapul di news.okezone.com, tanggal 15 Januari 2019 pkl 14:27)

No	Tanggal/Wilayah	OT (Origin Time) UTC	Mag	Wilayah yang merasakan (MMI)	Keterangan
4	16 Januari 2017 Deli Serdang Sumatera Utara Tidak Tsunami	12:42:12	5,6	Sibolangit : VI MMI Medan : IV – V MMI Tebing Tinggi : III MMI Sidikalang : III MMI Pematang Siantar : II MMI (Pusat gempa berada di darat 28 km BD Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara)	Korban Meninggal : - orang Korban luka-luka : - orang luka berat Kerusakkan : Rusak : 7 unit rumah, 6 rumah di Desa Kebayaken - Kecamatan Namanteran dan 1 rumah di desa Ujung Payung – Kecamatan Payung. (Sumber : Kabid Kedaruratan BPBD Karo, Natanail Perangin-angin, di http://m.inilah.com , Rabu, 18 Januari 2017 pk. 02:11 WIB)
5	14 Juli 2017 Padang Sidempuan Sumatera Utara Tidak Tsunami	01:25:16	5,5	Aekgodang : IV MMI Padang Sidempuan : III MMI Sialang : III MMI Sipirok : III MMI (Pusat gempa berada di darat 9 km Barat Daya Kota Padang Sidempuan - Sumatera Utara)	Korban Meninggal : - Korban luka-luka : 1 orang di desa Sitaratoit, Kec. Angkola Barat Kerusakkan : Total 60 rumah rusak tersebar di kota Padang Sidempuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan, provinsi Sumatera Utara. Di Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu : 9 rumah rusak yakni di Desa Pokenjior (6 unit), Desa Mompang (1 unit), dan Desa Simatohir (2 unit), selain itu 1 gedung SD rusak. Di Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru : 1 unit rumah rusak di desa Palopat Maria. Di Kab. Tapanuli Selatan total 50 unit rumah rusak berada di desa Sitaratoit (10 unit) dan desa Lobuyan Sigordang (40 unit), Kec. Angkola Barat. (Sumber: Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo PN, di www.republika.co.id , Jumat, 14 Juli 2017 pk. 17:28 WIB)

No	Tanggal/Wilayah	OT (Origin Time) UTC	Mag	Wilayah yang merasakan (MMI)	Keterangan
6	14 Juni 2011 Sumatra Utara Tarutung Tidak Tsunami	00:08:31	5,5	- Tarutung : V MMI - Sibolga : IV MMI - Medan, Gunung Sitoli : III MMI (Gempa di darat, 30 km Tenggara Tarutung)	Gempa menyebabkan longsornya perbukitan dan menimbulkan ruas jalan di Kab. Tapanuli Utara, (desa Silakitang, Kec. Pahae Julu) detik.com 14 Juni 2011 15:39 - Listrik padam di 4 kecamatan : Pahae Jae, Pahae Julu, Purba Tua dan Simagumban. - 165 rumah penduduk Rusak yg terbanyak di Kec. Pahae Jae dan Kec. Simangambat. - S.d 14 Juni 2011 19:13 WIB dilaporkan tidak ada korban jiwa. Menurut bnpb.go.id 16 Juni 2011 09:50 WIB : Ka BPBD Tapanuli Utara, Tumbur Hutabarat di Tarutung, Rabu 15 Juni 2011 : Korban Meninggal : - Korban luka-luka : 50 orang luka ringan Kerusakkan : Rusak Berat : 1 unit gereja Bethel Injil Rusak : 1 unit Masjid, 2 unit Gereja 79 unit rumah penduduk, 1 balai benih ikan, 2 unit bangunan PAUD, 1 unit TK. di Kecamatan Simangumban : Kerusakkan : Rusak Berat : 7 unit rumah penduduk Rusak Ringan : 26 unit rumah , 1 unit gereja, 1 unit masjid, 1 unit gedung SD.

No	Tanggal/Wilayah	OT (Origin Time) UTC	Mag	Wilayah yang merasakan (MMI)	Keterangan
7	24 Juli 2010 Sumatra Utara Mandailing Natal Tidak Tsunami	02:11:24	6,0	- Mandailing Natal : V - Panyabungan (Sumut) : IV-V - Padang Sidempuan : IV - Sibolga : III-IV - Lubuk Sikaping, Pekanbaru (Riau) : III - Painan : I-II (Gempa terjadi di darat)	Korban Luka Ringan: 5 orang akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Kerusakkan : - di Kecamatan Siabu (18 km dari Mandailing Natal) 1 unit mushola, dan sebagian dinding Sekolah Dasar, Gedung perpustakaan sekolah, plafon ruang kelas ambruk. (Sumber : Posko PMI Mandailing Natal s.d 25 Juli 2010 pukul 05:29 WIB) 'Suara Indonesia Baru'
8	17 Des 2006 Sumatra Utara Tidak Tsunami	21:39:19	6.06	- Muarasipongi : VI - Aekgodang dan Payakumbuh : IV - Airbangis, Kotanopan, Mandailing Pekanbaru, Padangpanjang : III Padang : II - Malaysia : II - Singapura : II	Korban meninggal : - 7 orang Korban luka-luka : - 100 orang Kerusakkan : - 680 rumah rusak atau hancur di Muarasipongi
9	28 Maret 2005 Sumatra Utara Tsunami	16:09:37	8.6	-Gunungsitoli : VIII - Teluk dalem : VII - Banda Aceh : VI - Medan, Padang, Palembang : V - Jambi : IV - Bengkulu : III - Pantai Barat Malaysia : IV - Bangkok : IV - Phuket, Thailand : III - Singapura dan Male (Maladewa) : III - Andaman dan Pulau Nikobar, India dan Srilanka. Tinggi gelombang tsunami (puncak-lembah) tercatat stasiun Tide di :	Di Nias : Korban meninggal : - sedikitnya : 1.000 orang Korban luka-luka : - 300 orang Kerusakkan : - 300 bangunan rusak Di Simeulue : Korban meninggal : - sedikitnya 100 orang Korban luka-luka : - beberapa orang Kerusakkan : - beberapa bangunan rusak Di Kepulauan Banyak : Korban meninggal :

No	Tanggal/Wilayah	OT (Origin Time) UTC	Mag	Wilayah yang merasakan (MMI)	Keterangan
				- Panjang : 40 cm - Colombo, Srilanka : 25 cm - Hanimadu : 40 cm - Male (Maladewa) : 18 cm - Gan (Maladewa) : 10 cm Tsunami 3 meter merusak pelabuhan dan Bandara di Simeulue. Ketinggian 'run-up' tsunami tercatat 2 meter di pantai barat Nias, dan 1 meter di Singkil dan Meulaboh.	- sedikitnya 200 orang - Di Sekitar Meulaboh : Korban meninggal : - sedikitnya 3 orang Korban luka-luka : - 40 orang Kerusakkan : - beberapa bangunan rusak
10	08 Nov 1995 Sumatra Utara Tidak Tsunami	7:14:19	6.8	- Medan, Gunungsitoli : III - Bengkulu dan Padangpanjang : II - Banda Aceh, Meulaboh, Sigli, dan Tapaktuan, - serta beberapa tempat di utara Sumatra - selatan Thailand	-
11	15 Nov 1990 Sumatra Utara Tidak Tsunami	2:34:32	6.8	- Blangkejeren-Kutacane-Medan sekitarnya - Banda Aceh dan Lhokseumawe - Ipoh, Keland, Kuala Lumpur, Pinang dan Taiping, Malaysia - Bangkok dan Phuket, Thailand	Korban meninggal : - sedikitnya 1 orang Korban luka-luka : - 32 orang Kerusakkan - diperkirakan mencapai 2.1 juta USD yang terjadi di sekitar Blangkejeren-Kutacane-Medan
12	27 Agt 1984 Sumatra Utara Tidak Tsunami	6:41:26	5.1	- Sarula : VIII - Gunung Sitoli, Rantau Prapat, dan Balige-Danau Toba - Pantai barat Malaysia	Korban luka-luka : - 123 orang Kerusakkan : - di Sarula : - 3 gedung SD, 1 gedung SMP : roboh - 1 gedung SMA rusak parah, pos satpam sekolah bergeser 30 cm dari pondasinya. - gedung pemda, kantor pos dan klinik retak-retak.

No	Tanggal/Wilayah	OT (Origin Time) UTC	Mag	Wilayah yang merasakan (MMI)	Keterangan
					di Perdamaian dan Selangkitang : - 2 gedung SD sebagian roboh. - tanah longsor di jalan antara Tarutung-Padangsidempuan : - tanah rekah dan keluar gas belerang (sulphur) di Pinangsori-Sibolga : - dinding rumah retak-retak kecil
13	17 Nov 1984 Sumatra Utara Tidak Tsunami	6:49:30	7.4	- dirasakan kuat di beberapa tempat di bagian utara Sumatra dari Padang sampai Medan	Korban luka-luka : - 1 orang Kerusakkan : - 2 bangunan rusak di Nias
14	04 Feb 1971 Sumatra Utara Tidak Tsunami	15:33:22	6.3	- Pasaman, Natal, Pinangsore, Sibolga Pasir Ulu. (V – VI)	Kerusakkan : - Bangunan rusak terjadi di Pasaman, Natal, Pinang sore, Sibolga dan Pasir Ulu. - Rekahan terjadi di Sibolga dan 'hot spring' ter bentuk di Tarutung - Dilaporkan tidak ada korban meninggal
15	25 Juli 1965 Sumatra Utara Tidak Tsunami	3:40:40	5.3	- Sarula dan Onang Hasang di Tapanuli : VII	Kerusakkan : - beberapa bangunan batubata rusak - tanah turun
16	11 Okt 1941 Sumatra Utara Tidak Tsunami	-	-	- Tapanuli : VII - Sibolga	Kerusakkan : - rusak ringan di Sibolga
17	19 Sept 1936 Sumatra Utara Tidak Tsunami	-	-	- Medan, Tapanuli - Karo : VIII - Kutacane, Kabanjahe - Parapat, Brastagi, dan Tanjung Putri - Langkat - Malaysia	Korban meninggal di Karo: - 17 orang (akibat longsor di bukit) Kerusakkan : - sejumlah rekahan tanah terjadi antara Kutacane dan Kabanjahe. - terjadi kerusakan di Parapat, Brastagi, dan

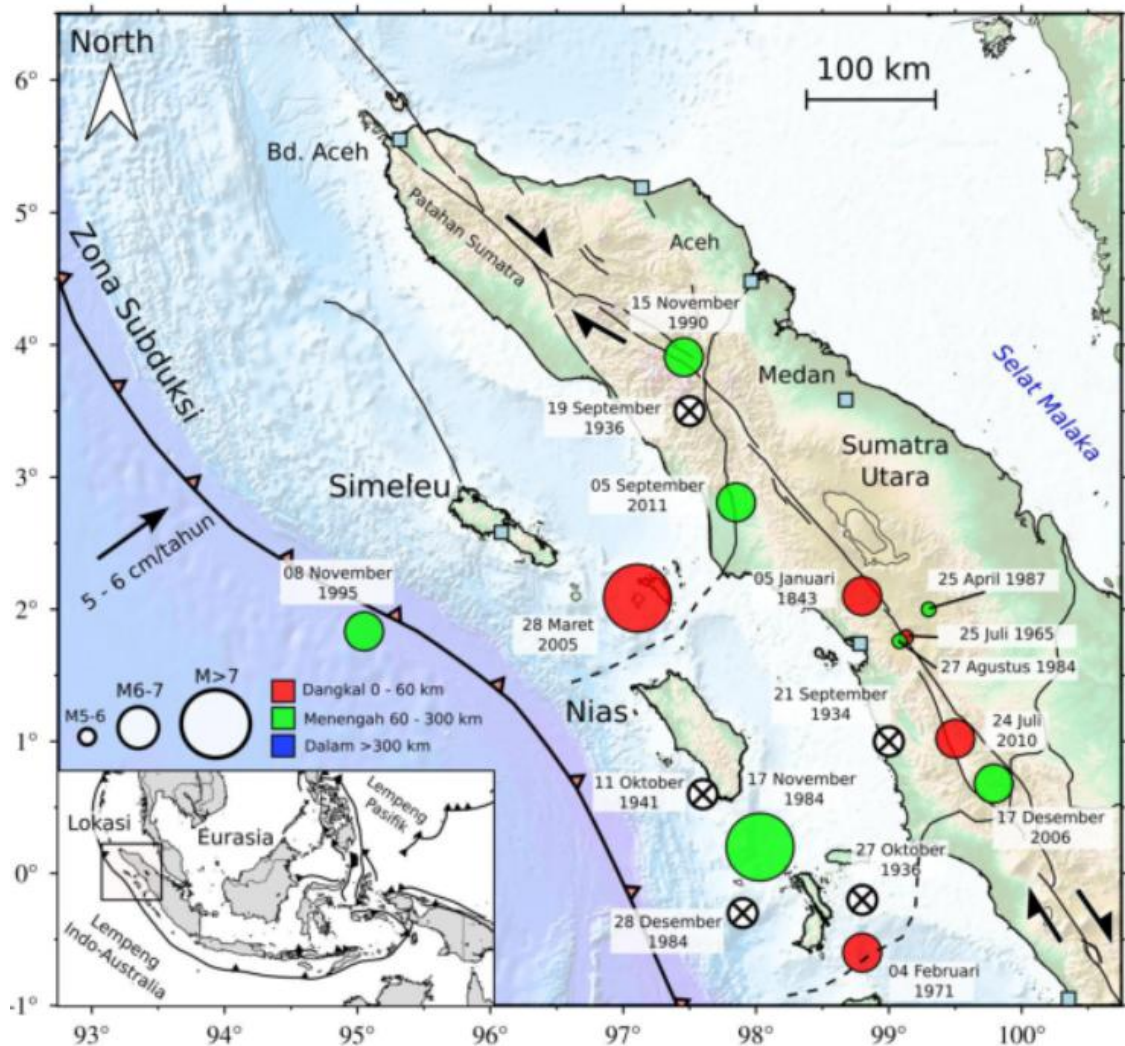
No	Tanggal/Wilayah	OT (Origin Time) UTC	Mag	Wilayah yang merasakan (MMI)	Keterangan
18	27 Okt 1936 Sumatra Utara Tidak Tsunami	-	-	- Tapanuli : VII - Sumatra Barat dan Timur Sumatra	Kerusakkan : - rusak ringan pada struktur di beberapa tempat - tanah turun
19	28 Des 1935 Sumatra Utara Tidak Tsunami	-	-	- Pulau Batu : VII – VIII - Bola dan Sigata - Padang - Sibolga	Kerusakkan : - Terjadi di Pulau Batu - dinding retak di Padang, pohon dan tiang telphon terayun - beberapa bangunan roboh di Sibolga
20	21 Sept 1934 Sumatra Utara Tidak Tsunami	-	-	- Tapanuli Selatan : VII (guncangan kuat)	Kerusakkan : - dinding – dinding retak - atap rumah beberapa rumah hancur
21	01 April 1921 Sumatra Utara	-	-	- Barat Daya danau Toba : IX - Sipoholon - Sabang, Penang dan Gunung Sitoli	Kerusakkan : - terparah di Barat Daya danau Toba - bangunan dan jembatan roboh di Sipoholon - terjadi pergeseran tanah
22	17 Mei 1892 Sumatra Utara Tidak Tsunami	-	-	Prapat : VI	Kerusakkan : - guncangan mengakibatkan rusak parah pada bangunan
23	19 Agtus 1873 Sumatra Utara Tidak Tsunami	-	-	Mandailing : VI	Kerusakkan : - banyak rumah rusak
24	07 Okt 1873 Sumatra Utara Tidak Tsunami	-	-	Tapanuli : VI	Kerusakkan : - rumah dan jembatan rusak

No	Tanggal/Wilayah	OT (Origin Time) UTC	Mag	Wilayah yang merasakan (MMI)	Keterangan
25	16 Feb 1861 Sumatra Utara Tsunami	-	-	Tapaneli dan Sibolga : VIII – IX Tsunami teramati di Singkil, Nias, dan Tello	Kerusakkan : - sejumlah rumah roboh
26	05 Januari 1843 Sumatra Utara Tsunami	-	-	Gunung Sitoli dan Baras : VII – VIII H5	Kerusakkan : - kapal-kapal rusak akibat tsunami - terjadi pula tanah turun

Sumber : <https://dibi.bnppb.go.id/>, tahun 2023



Peta 2.2 Peta Historis Kejadian Gempa Merusak Provinsi Sumatera Utara (1934-2023)



Sumber : BMKG, tahun 2023

2.1.3 Sejarah Tsunami di Provinsi Sumatera Utara

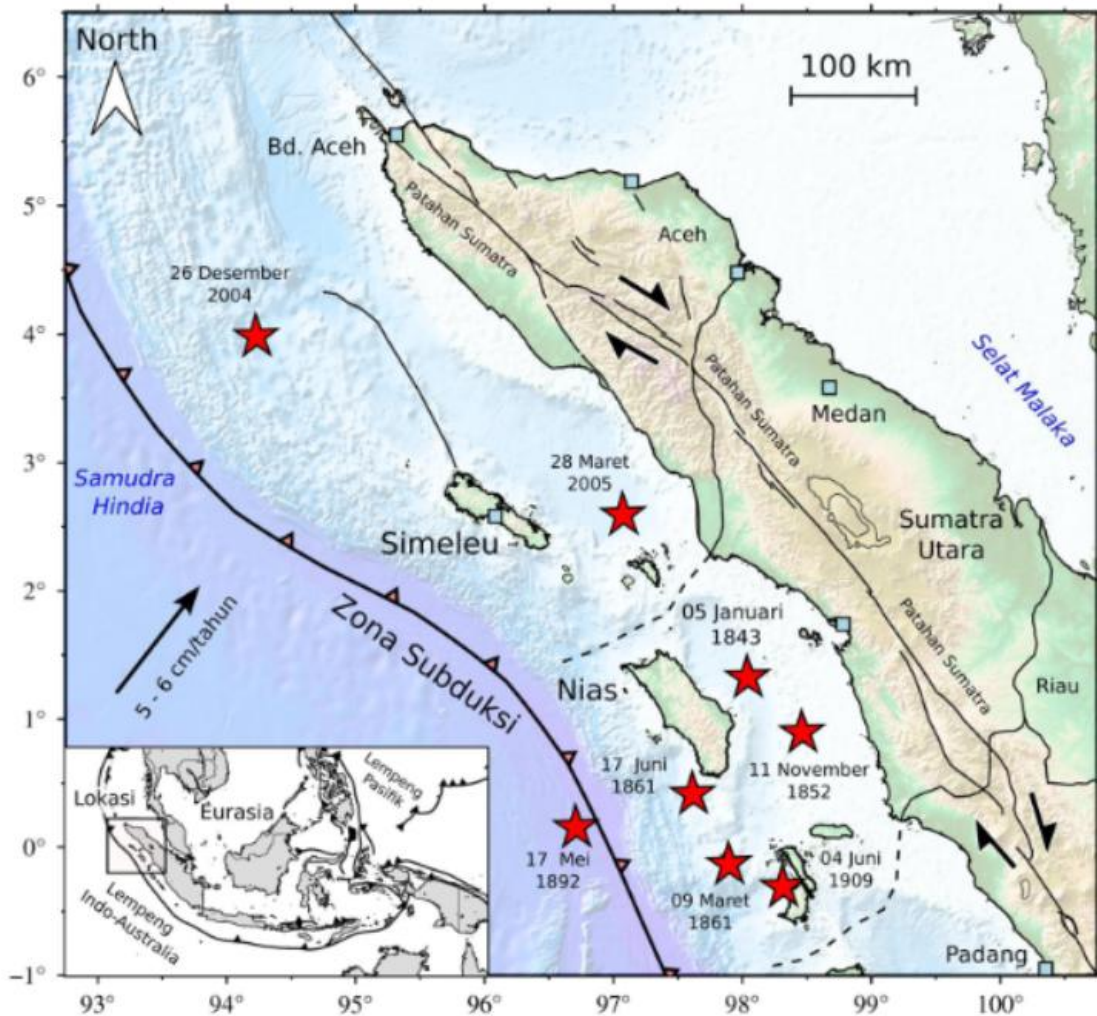
Berdasarkan data daftar kejadian Tsunami di Provinsi Sumatera Utara Tahun sejak 1843 hingga 2022 yang dihimpun dari **Katalog Tsunami Indonesia Per-Wilayah Tahun 416-2018** dikutip pada tahun 2023. Diketahui bahwa sedikitnya terdapat 6 Kejadian Tsunami yang tersebar dibagian Barat Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya terkait daftar kejadian Tsunami di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Daftar Panjang Kejadian Tsunami di Provinsi Sumatera Utara

No.	Tanggal/Wilayah	Mag	Sumber Tsunami	Keterangan
1	28 Maret 2005	8,6	Barat Daya Sumatera	Lihat Keterangan di bawah
	Di Nias : Korban meninggal : sedikitnya : 1.000 orang Korban luka-luka : 300 orang Kerusakkan : 300 bangunan rusak Di Simeulue : Korban meninggal : sedikitnya 100 orang Korban luka-luka : beberapa orang Kerusakkan : beberapa bangunan rusak Di Kepulauan Banyak : Korban meninggal : sedikitnya 200 orang Di Sekitar Meulaboh : Korban meninggal : sedikitnya 3 orang Korban luka-luka : 40 orang Kerusakkan : beberapa bangunan rusak			
2	5 Januari 1843	7,2	Barat Daya Sumatera	Lihat Keterangan di bawah
	Catatan Pengamatan : Borus, P. Nias: Desa Borus (2,00 N – 18,23 E) dan P. Nias (1,05 N- 97,33 E) dilaporkan terjadi gelombang besar selama dua hari. Sebuah gelombang yang tidak begitu besar, dengan suara seperti angin topan, menyerang dari barat daya. Tiga kapal mesin ditemukan terdampar 600 meter di darat dan lepas dari tautannya. G.Sitoli: Pada jam 0:30 waktu setempat, sebuah gelombang pasang datang dari tenggara dengan suara yang mengerikan. Hampir seluruh pantai di P.Nias terkena gelombang. Kampung De Mego (2 km dari Gunung Sitoli) tersapu seluruhnya. Kapal-kapal ikan di sungai terbawa ke daratan sejauh 30 – 50 meter dari tempatnya menambat.			
3	11 November 1852	6,8	Sibolga, Sumatera	Di Singkil, Sibolga dan G.Sitoli. Seluruh wilayah pantai dipengaruhi gempa
4	17 Juni 1861	6,8	Barat Daya Sumatera	Airbangis: Satu menit setelah gempa bumi yang terjadi beberapa saat, air laut naik dan berulang sampai tiga kali.
5	21 Februari 1861	-	Barat Daya Sumatera	Tidak ada keterangan
6	17 Mei 1892	-	Timur Laut Sumatera	Tebingtinggi, Tanjungpura, Kualamencirim, Klambirlima:

Sumber : Katalog Tsunami Indonesia Per-Wilayah Tahun 416-2018

Peta 2.3 Historis Kejadian Tsunami Provinsi Sumatera Utara (1934-2023)

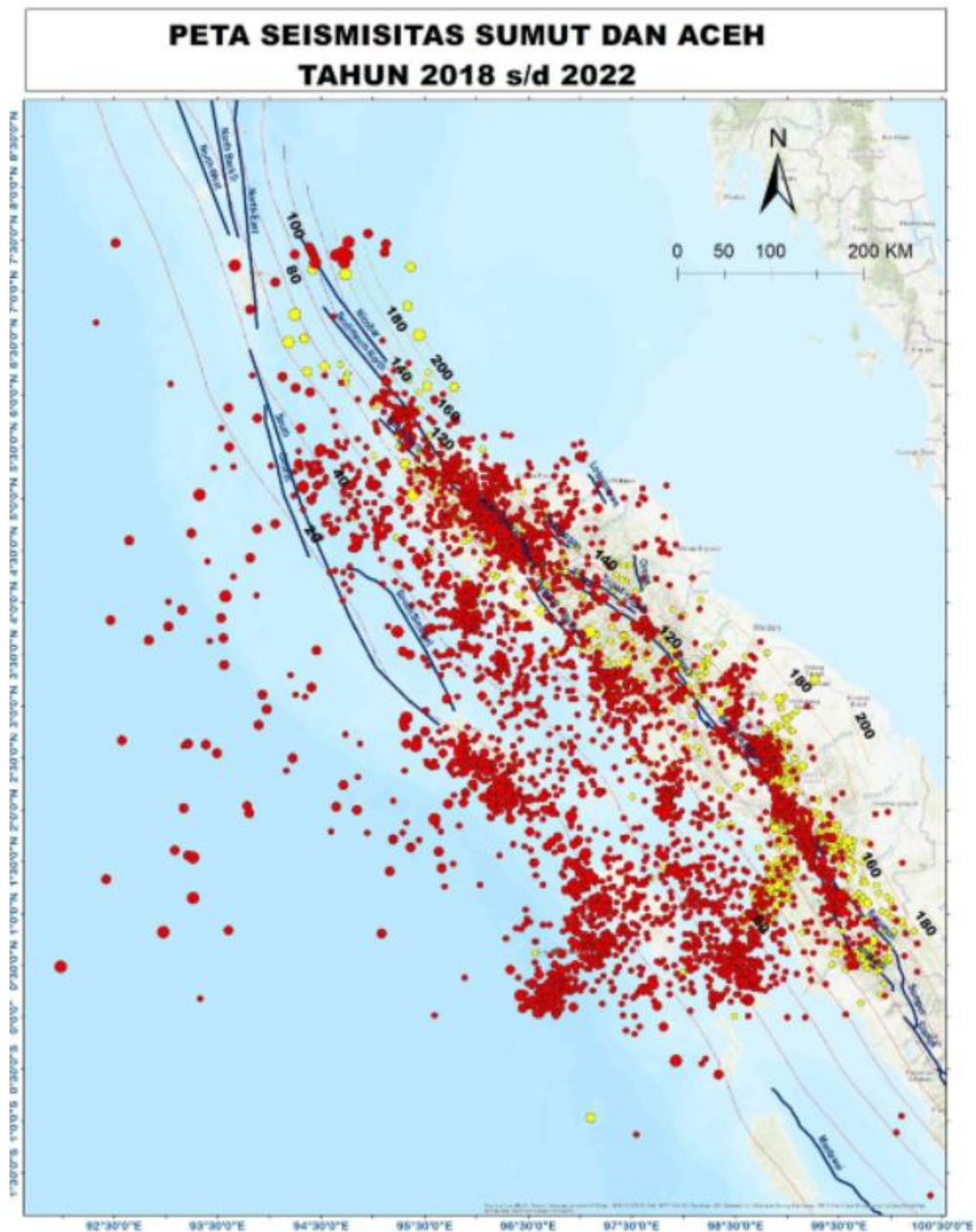


Sumber : BMKG, tahun 2023

2.1.4. Aktivitas Kegempaan Provinsi Sumatera Utara

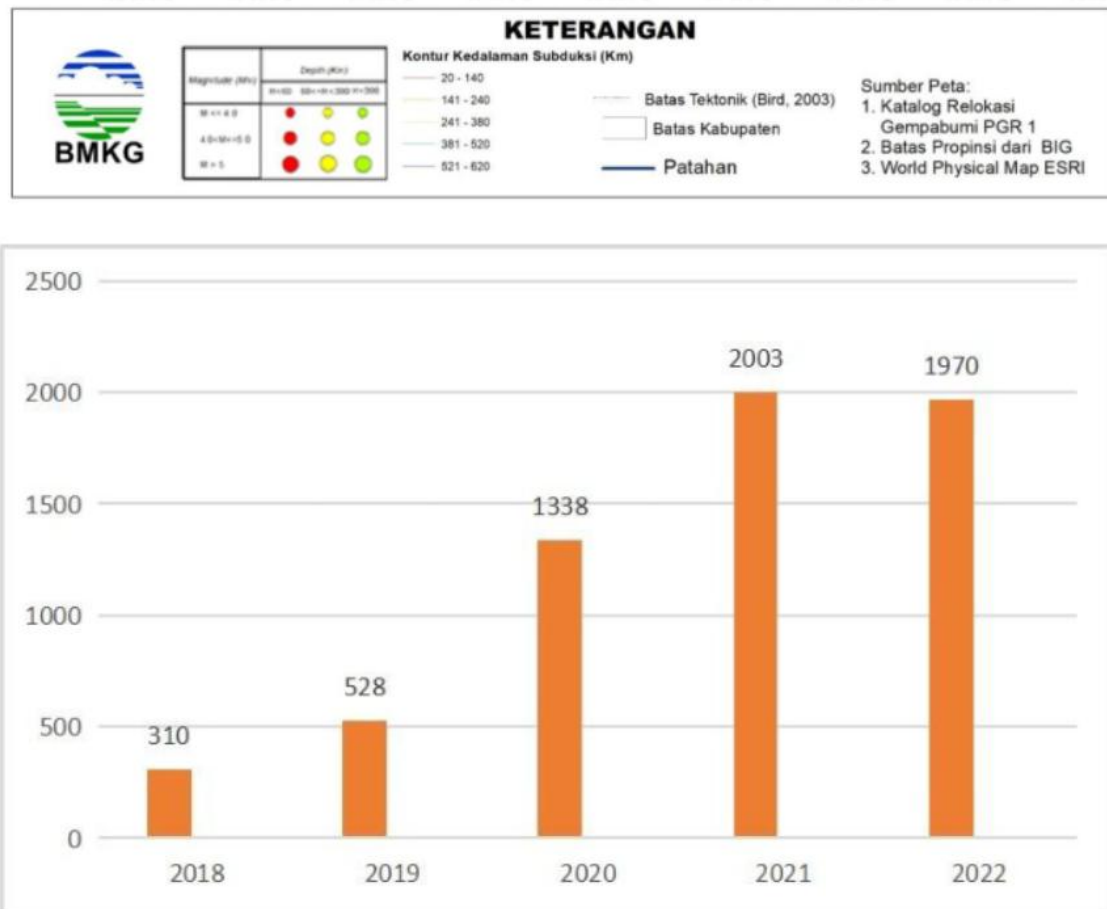
Berdasarkan hasil analisa BMKG pada tahun 2021, aktivitas kegempaan di wilayah Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan secara signifikan dalam 5 tahun terakhir dan terdapatnya ancaman gempa bumi yang dapat terjadi kapan saja tanpa terprediksi. Sehingga, dalam hal ini, perlu meningkatkan upaya mitigasi bekerja sama dengan seluruh pihak terkait kebencanaan, masyarakat dan akademisi.

Peta 2.4 Peta Seismitas Provinsi Sumatra Utara dan Aceh (2018 – 2022)



Sumber : BMKG, 2022

Gambar 2. Grafik Kedalaman Subduksi (2018 – 2022)



Sumber : Pusat Gempa Regional 1 BMKG Medan, 2022

2.2 Skenario Kejadian

Pada bab ini memuat tentang bahaya primer dan bahaya sekunder, dimana skenario ini dikembangkan dengan menggunakan perkiraan skenario yang didasarkan dari data dan analisis BMKG Wilayah-I Medan.

Adapun skenario ini dibentuk untuk menentukan langkah yang efektif dan efisien penanganan kedaruratan bencana, dimana gambaran skenario kejadian dan asumsi dampak bencana gempa bumi dan tsunami yang kemungkinan terjadi di bagian selatan Provinsi Sumatera Utara.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa skenario yang di bentuk menjadi dua jenis yaitu skenario kejadian gempa bumi yang berasal dari daratan dan skenario kejadian gempa bumi perairan yang asumsinya menimbulkan dampak tsunami. Untuk lebih jelas terkait skenario yang dibentuk dapat dilihat pada penjelasan berikut.

1. Skenario Kejadian Gempa Bumi

a. Profil Kejadian Gempa Bumi

Kejadian Gempa bumi akibat aktivitas Patahan/Sesar-Segmen Renun yang terbentang dari Tapanuli Utara memanjang hingga Tapanuli Selatan. Adapun sumber gempa Epicenter 2.62° LU – 98.48° BT dan Kedalaman 10 Km Magnitude 7,7 dengan intensitas wilayah terdampak sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Rincian Skenario Kejadian Gempa bumi

ASUMSI SKENARIO KEJADIAN	
Waktu Kejadian	Hari : Minggu, Dini hari Tanggal : 14 Juli 20xx Pukul : 00.00.00 WIB
Lokasi	Kawasan Dairi, Samosir, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, dan Sekitarnya.
Pemicu	Kejadian Gempa berdurasi 20-30 detik dengan skala magnitude 7,7 atau Skala MMI V – VIII, terjadi di Segmen Renun, Koordinat : 2.62° LU; 98.48 BT dikedalaman 10 Km.
Bahaya Primer	Energi getaran gempa dirambahkan keseluruh permukaan bumi, getaran menyebabkan kerusakan dan runtuhnya struktur bangunan yang dapat menimbulkan korban jiwa.
Cakupan Wilayah Terdampak	21 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. (Untuk lebih jelas terkait Cakupan Wilayah Terdampak dan besaran dampak yang ditimbulkan dapat dilihat pada tabel berikutnya)
Bahaya Sekunder	Bencana tanah longsor, runtuhnya batuan, banjir akibat runtuhnya bendungan, likuifaksi, kebakaran akibat rusaknya jaringan listrik.

Tabel 2.5 Rincian Skenario Kejadian Gempa bumi

No.	Kabupaten/Kota	Skala (MMI)	Dampak	Keterangan
1	Kabupaten Dairi	VIII	Kerusakan Sedang	Banyak retakan terjadi pada dinding bangunan sederhana sebagian roboh, kaca pecah Sebagian plester dinding lepas Hampir sebagian besar atap bergeser ke bawah atau jatuh Struktur bangunan mengalami kerusakan ringan.
2	Kabupaten Samosir	VII-VIII		
3	Kabupaten Pakpak Bharat	VII-VIII		
4	Kabupaten Humbang Hasundutan	VII-VIII		
5	Kabupaten Karo	VI-VII		
6	Kabupaten Tapanuli Tengah	VI-VII		
7	Kabupaten Simalungun	VI-VII		
8	Kota Binjai	VI	Kerusakan Ringan	Bagan non struktur bangunan mengalami kerusakan ringan, seperti retak rambut pada dinding, atap bergeser ke bawah dan sebagian berjatuh.
9	Kota Medan	VI		
10	Kabupaten Deli Serdang	VI		
11	Kabupaten Serdang Bedagai	VI		
12	Kota Tebing Tinggi	VI		
13	Kotaematang Siantar	VI		
14	Kabupaten Batu Bara	VI		
15	Kabupaten Asahan	VI		
16	Kota Tanjung Balai	VI		
17	Kabupaten Tapanuli Utara	VI		
18	Kabupaten Toba Samosir	VI		
19	Kota Sibolga	VI		
20	Kabupaten Langkat	V-VI		
21	Kabupaten Labuhan Batu Utara	V-VI		

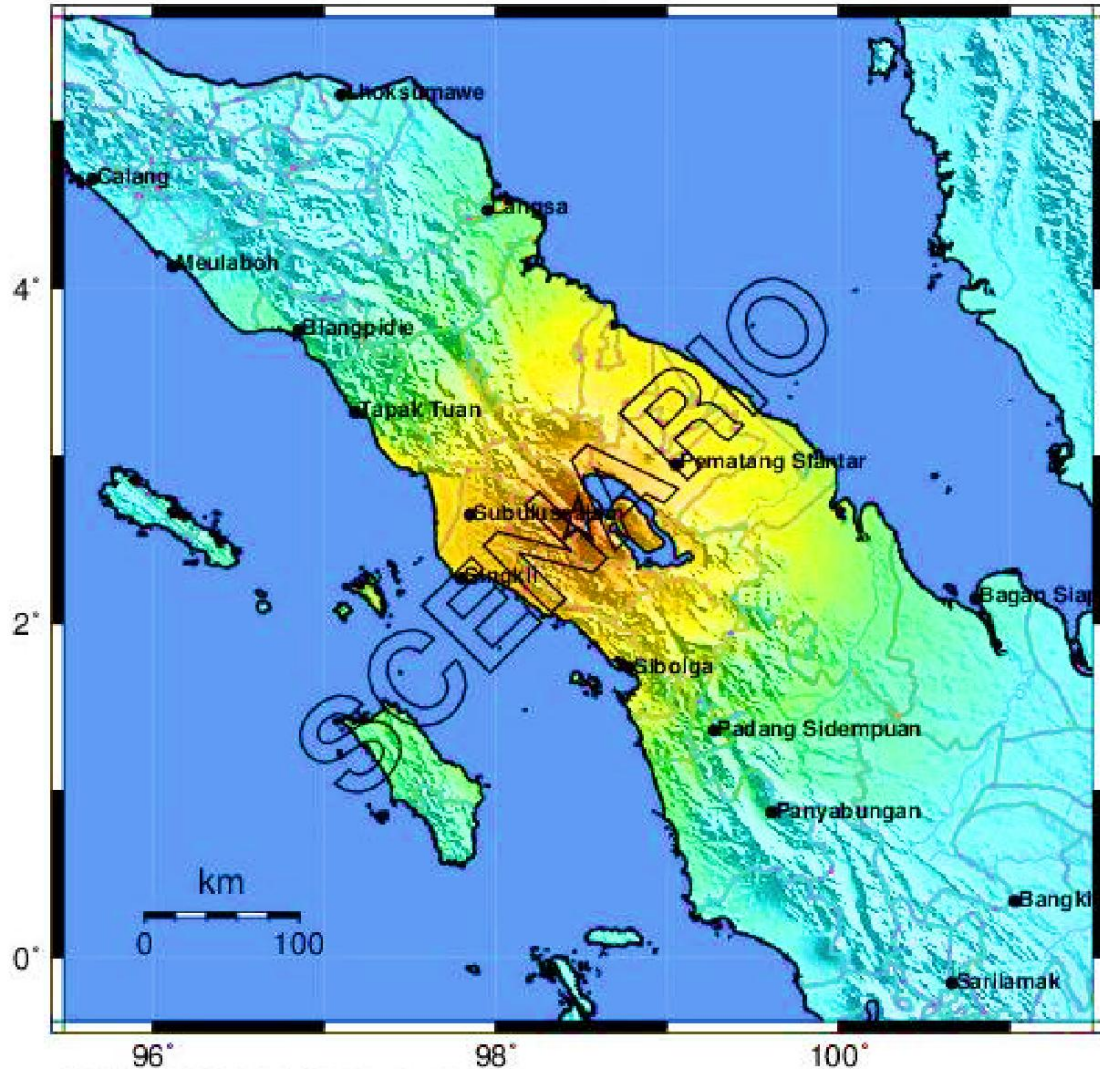
Sumber : Analisis Skenario BMKG Wilayah I Medan.

Peta 2.5 Skenario Gempa Segmen Renun

-- Earthquake Planning Scenario --

ShakeMap for Renun_A_Fault Scenario

Scenario Date: JUL 21, 2021 00:00:00 WIB, M:7.7, 2.62LU 98.48BT, Kedlmn:10km



PLANNING SCENARIO ONLY -- Map Version 1

PERCEIVED SHAKING	Not felt	Weak	Light	Moderate	Strong	Very strong	Severe	Violent	Extreme
POTENTIAL DAMAGE	none	none	none	Very light	Light	Moderate	Mod./Heavy	Heavy	Very Heavy
PEAK ACC.(%g)	<0.05	0.3	2.8	6.2	12	22	40	75	>139
PEAK VEL.(cm/s)	<0.02	0.1	1.4	4.7	9.6	20	41	86	>178
INSTRUMENTAL INTENSITY	I	II-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X+

Scale based upon Worden et al. (2011)

b. Asumsi Dampak Kejadian Gempa bumi

Asumsi jumlah penduduk yang akan terdampak langsung dengan adanya kejadian gempa bumi akibat aktivitas Patahan/Sesar-Segmen Renun yang berdampak pada 21 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Adapun asumsi dampak yang akan diperkirakan terdiri dari beberapa aspek yaitu Aspek Kependudukan, Aspek Fisik, Aspek Ekonomi, Aspek Lingkungan dan Aspek Layanan Publik/Pemerintahan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Asumsi Dampak Kejadian Gempa bumi

ASUMSI DAMPAK KEJADIAN	
1. ASPEK KEPENDUDUKAN	Asumsi yang digunakan dalam mengalisa dampak kependudukan yaitu menggunakan dasar asumsi risiko gempa bumi InaRisk sebesar 35% atau 5.298.030 Jiwa dari total jumlah Penduduk Sumatera Utara yang berjumlah 15.115.206 Jiwa (Data BPS, 2023), selanjutnya angka tersebut di proposionalkan terhadap Skala dampak (MMI) dari hasil analisis skenario. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut maka dihasilkan perkiraan jumlah penduduk terdampak yang terdiri dari : ▪ Jumlah penduduk terancam : 1.784.266 Jiwa ▪ Korban meninggal : 72 Jiwa ▪ Korban Hilang : 12 Jiwa ▪ Korban Mengungsi : 74.838 Jiwa ▪ Luka Berat : 130 Jiwa ▪ Luka Ringan : 317 Jiwa Untuk lebih jelasnya terkait asumsi-asumsi dampak yang ditimbulkan berdasarkan Kabupaten/kota terdampak dapat dilihat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
2. ASPEK FISIK	1. Rumah terdampak yang rusak: 147.800 unit - rusak berat : 73.900 unit - rusak sedang: 73.900 unit 2. Jalan terdampak yang rusak: 1562 m - rusak berat : 625 m - rusak sedang: 625 m - rusak ringan: 312 m 3. Jembatan terdampak yang rusak: 45 unit - rusak berat : 17 unit - rusak sedang: 13 unit - rusak ringan: 15 unit 4. Perkantoran Pemerintah:

ASUMSI DAMPAK KEJADIAN	
	- Kantor Bupati/Walikota: 10% Rusak Berat, 0 % Rusak Sedang, 00% Rusak Ringan - Kantor Kecamatan: 10% Rusak Berat, 0% rusak sedang, 0% rusak ringan - Kantor Pemda dan DPRD: 10% Rusak Berat, 0% rusak sedang, 0% rusak ringan 5. Objek Wisata terdampak yang rusak: 6 lokasi - rusak berat: 3 lokasi - rusak sedang: 2 lokasi - rusak ringan: 1 lokasi 6. Fasilitas telekomunikasi umum terganggu 7. Fasilitas PLN/ Gardu distribusi terdampak yang rusak: 2 unit - rusak berat: 1 unit - rusak sedang: 1 unit 8. Pipa distribusi air terganggu. Saluran Air PDAM yang rusak: - rusak berat: 8 saluran - rusak sedang: 6 saluran 9. Bandar udara terdampak yang rusak: 1 lokasi - rusak ringan: 1 bandara
3. ASPEK EKONOMI	1. Kegiatan ekonomi terganggu cenderung akan lumpuh khususnya daerah pusat titik gempa 2. Kehilangan dari Sektor Pasar 3. Terganggunya produktifitas ekonomi dan peredaran uang di daerah terdampak 4. Tidak terjadi transaksi jual beli di pasar 5. Kegiatan jual beli terhambat karena kekurangan barang. 6. Kesulitan mengirim barang ke lokasi bencana 7. Mengurangi tingkat beli suatu barang karna tidak punya harta untuk membeli sesuatu 8. Konsumsi rumah tangga melambat 9. Beberapa masyarakat kehilangan/barang-barang berharga 10. Kehilangan dari Sektor Pertanian/ Perkebunan 11. dampak terhadap pasokan pupuk,bibit dll 12. dampak terhadap distribusi hasil pertanian 13. dampak pada tanaman pertanian/perkebunan 14. dampak pada penghasilan/Pendapatan Petani 15. Lahan untuk kegiatan pertanian hancur 16. Jalan usaha tani mengalami kerusakan 17. Kehilangan sektor perindustrian. 18. Dampak terhadap industri (home industry) 19. Menurunnya hasil produksi tambak, kolam dan lainnya 20. Menurunnya hasil produksi UMKM

ASUMSI DAMPAK KEJADIAN	
4. ASPEK LINGKUNGAN	Asumsi dampak terganggunya sebagian infrastruktur pengairan air bersih dan pengairan pertanian, hilangnya sebagian sumber mata air, sumber air dari sungai dan sumur, sehingga sebagian tidak dapat melayani masyarakat.
5. ASPEK PELAYANAN PEMERINTAHAN	Pelayanan pemerintahan yang terganggu di level kabupaten/Kota hingga kecamatan, Layanan pemerintahan berupa : 1. Pelayanan catatan sipil dan kependudukan lumpuh total selama 7 hari; 2. Data kepemilikan tanah/lahan/rumah/asset pribadi dan lembaga terganggu dan lumpuh total selama 30 hari; 3. Fasilitas dan Pelayanan Medis puskesmas, pustu, klinik dan rumah sakit lumpuh di beberapa lokasi terdampak total selama 3 hari; 4. Fasilitas dan pengajar di Lembaga Pendidikan tidak dapat dioperasikan karena bangunan dan fasilitasnya hilang/rusak lumpuh total selama 14 hari

2. Skenario Kejadian Gempa Bumi Berdampak Disertai Gelombang Tsunami

a. Profil Kejadian Gempa bumi Berdampak disertai Gelombang Tsunami

Kejadian Gempa bumi akibat aktivitas Patahan/Sesar (Megathrust) – Zona Subduksi Lempeng Indo – Australia. Sumber gempa Epicenter 0.42° LS – 96.23° BT dan Kedalaman 10 Km Magnitude 8,2, dengan intensitas wilayah terdampak sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Rincian Skenario Kejadian Gempa bumi Berdampak Terjadi Tsunami

ASUMSI SKENARIO KEJADIAN	
Waktu Kejadian	Hari : Minggu, Dini hari Tanggal : 14 Juli 20xx Pukul : 00.00.00 WIB
Lokasi	Kabupaten Nias dan Sekitarnya.
Pemicu	Kejadian Gempa berdurasi 20-30 detik dengan skala magnitude 8,2 atau Skala MMI IV – VIII, terjadi di Segmen Renun, Koordinat : 0.42° LS – 96.23° BT dikedalaman 10 Km.

ASUMSI SKENARIO KEJADIAN	
Bahaya Primer	Energi getaran gempa dirambahkan hingga daratan, getaran menyebabkan kerusakan dan runtuhnya struktur bangunan yang dapat menimbulkan korban jiwa selanjutnya diikuti gelombang tsunami. Tinggi gelombang maksimal 10-15 meter, kedatangan landaan tsunami ke wilayah terdampak 17-20 menit
Peringatan Dini Bencana	Peringatan dini potensi bencana tsunami dari BMKG dikeluarkan 5 menit setelah kejadian gempa
Cakupan Wilayah Terdampak	16 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. (Untuk lebih jelas terkait Cakupan Wilayah Terdampak dan besaran dampak yang ditimbulkan dapat dilihat pada tabel berikutnya)
Bahaya Sekunder	Wabah atau sumber penyakit dari pembusukan bahan organik pada sisa-sisa genangan tsunami.

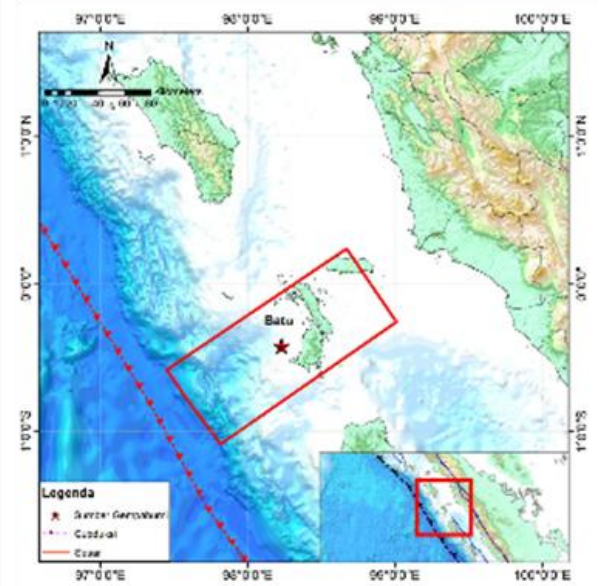
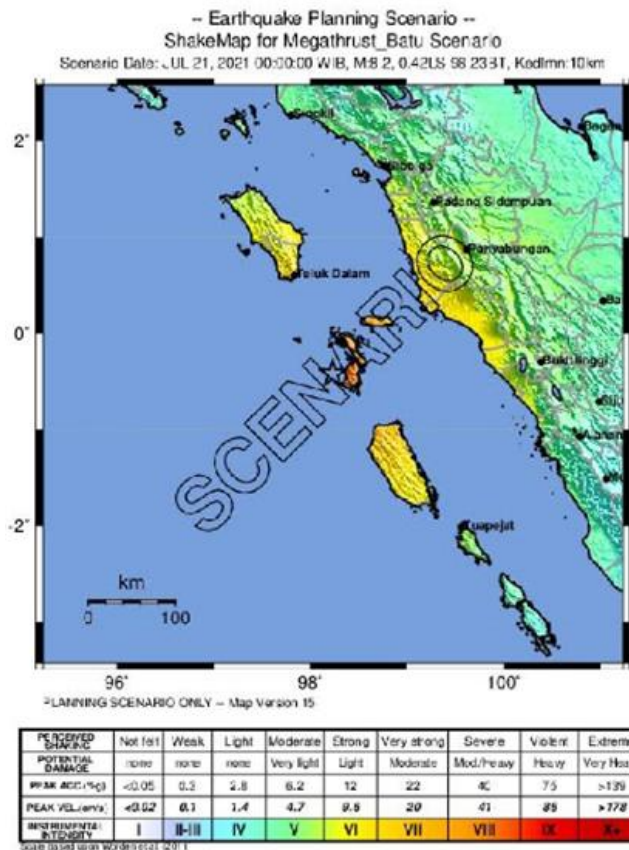
Tabel 2.8 Rincian Skenario Kejadian Gempa bumi disertai Gelombang Tsunami

No.	Kabupaten/Kota	Skala (MMI)	Dampak	Keterangan
1	Kabupaten Nias Selatan	VI-VIII	Kerusakan Sedang	Banyak retakan terjadi pada dinding bangunan sederhana, sebagian roboh, kaca pecah. Sebagian plester dinding lepas. Hampir sebagian besar atap bergeser ke bawah atau jatuh. Struktur bangunan mengalami kerusakan ringan sampai sedang.
2	Kabupaten Nias	VI		Kerusakan Ringan
3	Kabupaten Nias Barat	VI		
4	Kota Gunung Sitoli	VI		
5	Kabupaten Nias Utara	VI		
6	Kabupaten Mandailing Natal	VI		
7	Kabupaten Tapanuli Tengah	V	Dirasakan Kuat	Dirasakan oleh banyak orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang dan jendela kaca bergetar, berpotensi menimbulkan kerusakan ringan.
8	Kota Sibolga	V		
9	Kabupaten Tapanuli Selatan	V		

No.	Kabupaten/Kota	Skala (MMI)	Dampak	Keterangan
10	Kota Padang Sidempuan	V		
11	Kabupaten Padang Lawas	V		
12	Kabupaten Tapanuli Utara	V		
13	Kabupaten Padang Lawas Utara	V		
14	Kabupaten Labuhan Batu Utara	V		
15	Kabupaten Labuhan Batu	IV	Kerusakan Sedang	Bagian non struktur bangunan mengalami kerusakan ringan, seperti retak rambut pada dinding, atap bergeser ke bawah dan sebagian berjatuhan,
16	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	IV		

Sumber : Analisis Skenario BMKG Wilayah I Medan.

Peta 2.6 Skenario Gempa gempa Megathrust



Skenario peta guncangan Megathrust

dengan parameter :

Magnitudo 8.2,

Lokasi 2.62 LU , 98.48 BT

Kedalaman 10 Km

b. Asumsi Dampak Kejadian Gempa bumi disertai Gelombang Tsunami

Asumsi jumlah penduduk yang akan terdampak langsung dengan adanya kejadian gempa bumi akibat aktivitas Patahan/Sesar (Megathrust) – Zona Subduksi Lempeng Indo – Australia yang berdampak pada 16 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Adapun asumsi dampak yang akan diperkirakan terdiri dari beberapa aspek yaitu Aspek Kependudukan, Aspek Fisik, Aspek Ekonomi, Aspek Lingkungan dan Aspek Layanan Publik/Pemerintahan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9 Asumsi Dampak Kejadian Gempa bumi disertai Gelombang Tsunami

ASUMSI DAMPAK KEJADIAN	
1. ASPEK KEPENDUDUKAN	Asumsi yang digunakan dalam menganalisa dampak kependudukan yaitu menggunakan dasar asumsi risiko gempa bumi InaRisk sebesar 1% atau 94.548 Jiwa dari total jumlah Penduduk Sumatera Utara yang berjumlah 15.115.206 Jiwa (Data BPS, 2023), selanjutnya angka tersebut di proposionalkan terhadap Skala dampak (MMI) dari hasil analisis skenario. Berdasarkan asumsi-asumsi tersbut maka dihasilkan perkiraan jumlah penduduk terdampak yang terdiri dari : ▪ Jumlah penduduk terancam : 14.755 Jiwa ▪ Korban meninggal : 96 Jiwa ▪ Korban Hilang : 27 Jiwa ▪ Korban Mengungsi : 1.513 Jiwa ▪ Luka Berat : 152 Jiwa ▪ Luka Ringan : 379 Jiwa Untuk lebih jelasnya terkait asumsi-asumsi dapak yang ditimbulkan berdasarkan Kabupaten/kota terdampak dapat dilihat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
2. ASPEK FISIK	1. Rumah terdampak yang rusak: 5.730 unit - rusak berat : 4.011 unit - rusak sedang: 1.719 unit 2. Jalan terdampak yang rusak: 937 m - rusak berat : 156 m - rusak sedang: 312 m - rusak ringan: 469 m 3. Jembatan terdampak yang rusak: 7 unit - rusak berat : 2 unit - rusak sedang: 4 unit - rusak ringan: 1 unit 4. Perkantoran Pemerintah: - Kantor Bupati/Walikota: 10% Rusak Berat, 0 % Rusak Sedang, 00% Rusak Ringan - Kantor Kecamatan: 10% Rusak Berat, 0% rusak sedang, 0% rusak ringan - Kantor Pemda dan DPRD: 10% Rusak Berat, 0% rusak sedang, 0% rusak ringan 5. Objek Wisata terdampak yang rusak: 8 lokasi - rusak berat: 5 lokasi - rusak sedang: 2 lokasi - rusak ringan: 1 lokasi 6. Fasilitas telekomunikasi umum terganggu 7. Fasilitas PLN/ Gardu distribusi terdampak yang rusak: - unit

ASUMSI DAMPAK KEJADIAN	
	- rusak berat: - unit - rusak sedang: - unit 8. Pipa distribusi air terganggu. Saluran Air PDAM yang rusak: - rusak berat: 8 saluran - rusak sedang: 6 saluran - rusak ringan: 2 saluran 9. Bandar udara terdampak yang rusak: 1 lokasi - rusak ringan: 1 bandara
3. ASPEK EKONOMI	1. Kegiatan ekonomi terganggu cenderung akan lumpuh khususnya daerah pusat titik gempa 2. Kehilangan dari Sektor Pasar 3. Terganggunya produktifitas ekonomi dan peredaran uang di daerah terdampak 4. Tidak terjadi transaksi jual beli di pasar 5. Kegiatan jual beli terhambat karena kekurangan barang. 6. Kesulitan mengirim barang ke lokasi bencana 7. Mengurangi tingkat beli suatu barang karna tidak punya harta untuk membeli sesuatu 8. Konsumsi rumah tangga melambat 9. Beberapa masyarakat kehilangan/barang-barang berharga 10. Kehilangan dari Sektor Pertanian/ Perkebunan 11. dampak terhadap pasokan pupuk, bibit dll 12. dampak terhadap distribusi hasil pertanian 13. dampak pada tanaman pertanian/perkebunan 14. dampak pada penghasilan/Pendapatan Petani 15. Lahan untuk kegiatan pertanian hancur - Jalan usaha tani mengalami kerusakan - Kehilangan sektor perindustrian. - Dampak terhadap industri (home industry) - Menurunnya hasil produksi tambak, kolam dan lainnya - Menurunnya hasil produksi UMKM
4. ASPEK LINGKUNGAN	- Asumsi dampak terganggunya sebagian infrastruktur pengairan air bersih dan pengairan pertanian, hilangnya sebagian sumber mata air, sumber air dari sungai dan sumur, sehingga sebagian tidak dapat melayani masyarakat. - Timbulan sampah organik yang terbawa gelombang tsunami

ASUMSI DAMPAK KEJADIAN	
5. ASPEK PELAYANAN PEMERINTAHAN	Pelayanan pemerintahan yang terganggu di level kabupaten/Kota hingga kecamatan, Layanan pemerintahan berupa : 1. Pelayanan catatan sipil dan kependudukan lumpuh total selama 7 hari; 2. Data kepemilikan tanah/lahan/rumah/asset pribadi dan lembaga terganggu dan lumpuh total selama 30 hari; 3. Fasilitas dan Pelayanan Medis puskesmas, pustu, klinik dan rumah sakit lumpuh di beberapa lokasi terdampak total selama 3 hari; 4. Fasilitas dan pengajar di Lembaga Pendidikan tidak dapat dioperasikan karena bangunan dan fasilitasnya hilang/rusak lumpuh total selama 14 hari

2.3 ASUMSI DAMPAK

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas Gunung api atau runtuhuan batuan. Dari penjelasan bencana gempa bumi tersebut, maka pengkajian untuk bahaya gempa bumi dilihat berdasarkan parameter – parameter sebagai tolok ukur penghitungan sebagai berikut. (a) Kelas topografi (b) Intensitas guncangan di batuan dasar, dan (c) Intensitas guncangan di permukaan. Kajian potensi luas dan kelas bahaya gempa bumi dengan menggunakan parameter-parameter tersebut, menghasilkan potensi luas dan kelas bahaya gempa bumi di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

Tabel 2.10 Potensi Bahaya Gempa bumi di Provinsi Sumatera Utara

NO.	KABUPATEN/KOTA	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)			Total	
		Rendah	Sedang	Tinggi		
A	Kabupaten					
1	TAPANULI TENGAH	17.960	124.405	76.435	218.800	TINGGI
2	TAPANULI UTARA	25.127	108.525	245.512	379.164	TINGGI
3	TAPANULI SELATAN	86.814	209.197	307.036	603.047	TINGGI
4	NIAS	7	0	184.244	184.251	TINGGI
5	LANGKAT	464.081	129.027	33.092	626.200	SEDANG
6	KARO	25.172	82.080	105.449	212.700	TINGGI
7	DELI SERDANG	213.321	10.847	0	224.168	RENDAH
8	SIMALUNGUN	372.453	65.228	979	438.660	SEDANG
9	ASAHAN	366.717	3.504	0	370.221	RENDAH
10	LABUHANBATU	213.759	1.843	0	215.602	RENDAH
11	DAIRI	290	14.131	178.360	192.780	TINGGI
12	TOBA SAMOSIR	151.610	74.395	6.884	232.889	SEDANG
13	MANDAILING NATAL	84.549	365.946	162.904	613.400	TINGGI
14	NIAS SELATAN	424	0	182.096	182.520	TINGGI
15	PAKPAK BHARAT	310	36.885	84.635	121.830	TINGGI
16	HUMBANG HASUNDUTAN	7.774	78.412	147.346	233.533	TINGGI
17	SAMOSIR	24.646	75.989	106.270	206.905	TINGGI
18	SERDANG BEDAGAI	189.998	24	0	190.022	RENDAH
19	BATU BARA	92.220	0	0	92.220	RENDAH
20	PADANG LAWAS UTARA	228.928	96.396	66.481	391.805	TINGGI
21	PADANG LAWAS	133.531	165.712	90.031	389.274	TINGGI
22	LABUHANBATU SELATAN	354.056	5.544	0	359.600	RENDAH
23	LABUHANBATU UTARA	354.523	2.575	0	357.098	RENDAH
24	NIAS UTARA	627	0	119.651	120.278	TINGGI
25	NIAS BARAT	8	0	47.365	47.373	TINGGI
B	Kota					
1	KOTA MEDAN	24.387	2.123	0	26.510	RENDAH
2	KOTA PEMATANGSIANTAR	4.795	771	0	5.566	RENDAH
3	KOTA SIBOLGA	1.674	2.007	450	4.131	SEDANG
4	KOTA TANJUNG BALAI	10.783	0	0	10.783	RENDAH
5	KOTA BINJAI	3.536	2.383	0	5.919	SEDANG
6	KOTA TEBING TINGGI	3.100	0	0	3.100	RENDAH
7	KOTA PADANG SIDEMPUAN	0	42	11.423	11.466	TINGGI
8	KOTA GUNUNGSITOLI	0	0	28.078	28.078	TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA		3.457.180	1.657.992	2.184.720	7.299.893	TINGGI

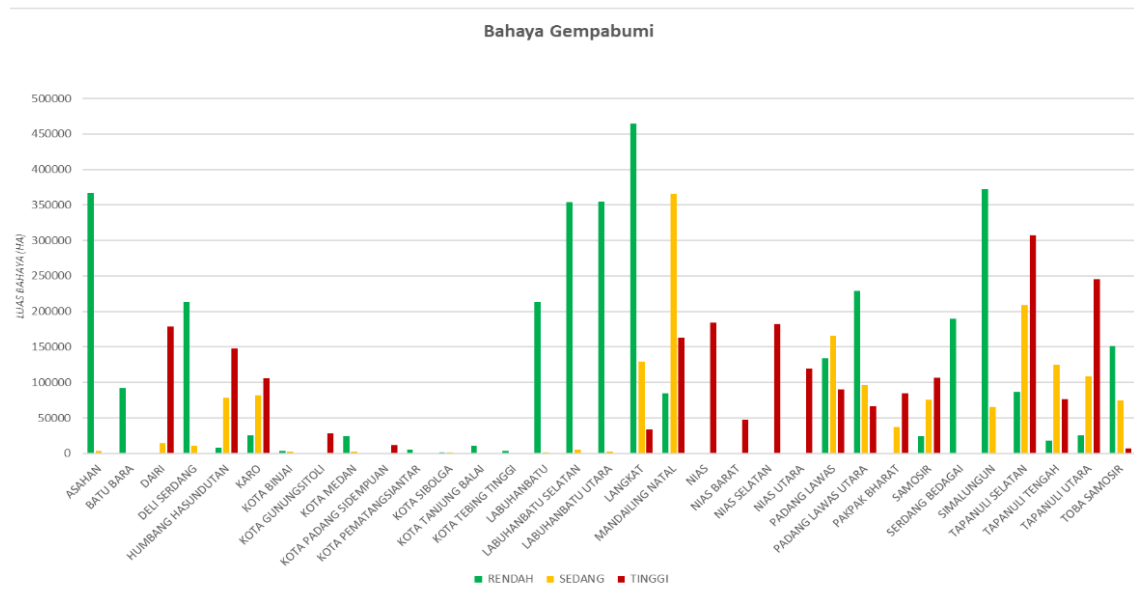
Sumber : Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Utara 2022 – 2026

Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya gempa bumi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara terpapar bencana gempa bumi. Potensi bahaya gempa bumi tersebut merupakan luasan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gempa bumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Sumatera Utara ditentukan berdasarkan total luas

bahaya kabupaten/kota. Sedangkan kelas bahaya gempa bumi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara terdampak bahaya gempa bumi.

Potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan adalah 7.299.893 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Potensi luas bahaya tersebut meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 3.457.180 Ha, pada kelas sedang seluas 1.657.992 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 2.184.720 Ha.

Gambar 2.4 Grafik Potensi Bahaya Gempa bumi di Provinsi Sumatera Utara



BAB III

TUGAS POKOK DAN SASARAN POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

3.1 Tugas Pokok

Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa bumi Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Operasi Penanganan Darurat Bencana selama 30 hari dengan tujuan menjalankan tugas kemanusiaan dan memulihkan segera dampak yang ditimbulkan. Waktu tersebut dapat lebih singkat atau diperpanjang sesuai dengan kondisi yang ada, dengan memprioritaskan efektivitas dan keterpaduan kebijakan dan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, dan mobilisasi sumberdaya serta upaya pencegahan dan penanganan Gempa bumi dengan asas dan prinsip penanggulangan bencana.

Adapun Tugas Pokok Dan Fungsi Pokok Organisasi Komando Penanggulangan Darurat Bencana sebagaimana Hasil dari Focus Group Discussion (FGD) I yaitu dijabarkan dalam **Lampiran 3** Susunan Pelaksana Tugas.

Satuan komando penanggulangan darurat bencana Gempa bumi provinsi Sumatera Utara tentunya untuk merencanakan dan melaksanakan operasi darurat gempa bumi tingkat provinsi Sumatera Utara.

Struktur komando penanganan darurat bencana (SKPDB) menjalankan fungsi tugas operasi penanganan darurat gempa bumi. Sejak penetapan status darurat selama 14 hari untuk (a) penyelamatan jiwa; (b) penyelamatan aset warga/pemerintah; dan (c) pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi/pengintai di wilayah terdampak bencana gempa bumi dengan memprioritaskan efektivitas dan kesepaduan kebijakan dan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas dan memenuhi sumberdaya.

Pos komando penanganan darurat bencana gempa bumi mempunyai tugas, sebagai berikut.

1. Menyusun rencana operasi penanganan darurat bencana
2. Melakukan mobilisasi bantuan darurat bencana dari instansi/lembaga terkait ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.

3. Menyiapkan bantuan sumberdaya (manusia, peralatan dan logistik) sesuai dengan hasil kaji cepat (speed assesment).
4. Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat kepada pos lapangan sesuai kebutuhan.
5. Melakukan permintaan dukungan kepada pos pendukung dan pos pendamping terkait bantuan penanganan darurat .
6. Melakukan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana.
8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BPBD provinsi dengan tembusan kepada perangkat daerah/lembaga terkait tingkat provinsi.

3.2 Sasaran

Sasaran Komando Penanggulangan Darurat Bencana merupakan satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana. Adapun sasaran tersebut yaitu sebagai berikut :

- Adanya rapat koordinasi dan mobilisasi bantuan darurat bencana dari instansi/lembaga terkait ditingkat provinsi.
- Adanya rapat koordinasi dan dokumen untuk menyajikan permintaan bantuan sumberdaya kepada pos pendukung pos pendamping.
- Wilayah kabupaten/kota yang terdampak bencana gempa bumi mendapatkan distribusi bantuan penanganan darurat bencana serta koordinasi melalui pos komando penanganan darurat bencana (posko-PDB).
- Pertemuan monitoring evaluasi pelaksanaan PDB gempa bumi di Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV PELAKSANAAN

4.1 Konsep Operasi Dan Sasaran Tindakan

Skenario kejadian dan dampak gempa bumi telah menimbulkan korban jiwa, kerugian dan kerusakan dan gangguan sosial. Berdasarkan skenario dampak ini, maka konsep operasi penanganan darurat bencana menjadikan provinsi sebagai komando penanganan darurat bencana dengan fungsi operasi, setelah pos komando PDB terbentuk serta mulai dibuka pos lapangan yang berfungsi memberikan pelayanan kedaruratan pada korban. Selanjutnya dibentuk pos pendukung dan pendamping.

Satuan komando penanganan darurat bencana (SKPDB) gempa bumi provinsi Sumatera Utara melaksanakan operasi lapangan, operasi pendukung dan operasi pendampingan secara serentak dan terintegrasi dan berada di bawah pos komando penanganan darurat bencana (Posko PDB) yang di pimpin oleh seorang komandan.

Setelah pos komando penanganan darurat bencana gempa bumi provinsi Sumatera Utara terbentuk berkoordinasi dengan pos komando penanganan darurat bencana kabupaten/kota yang terlebih dahulu terbentuk.

Operasi penanganan darurat dilaksanakan pada angka 2 (fase) sebagai berikut;

Tabel 4.1 Konsep Operasi Penanganan Darurat Bencana Gempa bumi Provinsi Sumatera Utara.

Fase tanggap darurat	Fase transisi menuju pemulihan
• Kaji cepat bencana gempa bumi. • Penetapan situasi tanggap darurat • Pembentukan struktur organisasi komando penanganan darurat bencana. • Membuat perencanaan tanggap darurat mulai dari analisis situasi, sumberdaya, dokumentasi, dan demobilisasi. • Mobilisasi sumberdaya personil dan logistik untuk penanganan darurat. • Membentuk pos lapangan, pos pendukung, dan pos pendamping. • Aktivasi SKPDB untuk 14 hari setelah di tetapkan tanggap darurat.	• Memastikan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan. • Memastikan dan meberikan dukungan kebutuhan pada penyintas • Penilaian pelaksanaan darurat bencana sebagai basis penetapan status darurat dan pengakhiran operasi darurat. • Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan transisi darurat menuju pemulihan secara berkala.

• Memastikan dukungan operasi SAR, evaluasi korban dan harta benda. • Memastikan upaya perlindungan kepada wilayah rentan (wanita, anak, lansia, penyandang disabilitas dan penyandang homorbid(penyakit bawaan). • Memastikan operasi pemenuhan kebutuhan dasar pada korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.	• Demobilisasi sumberdaya baik seluruh personil, peralatan maupun logistik jika operasi berakhir.
--	---

Tabel 4.2 Rencana Tindakan (Sasaran Tindakan)

Tahap	Tindakan
a. Tanggap Darurat	• Melakukan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana gempa bumi • Mobilisasi dan penugasan personil sesuai dengan tupoksi dan kewenangan dalam penanganan darurat bencana. • Memberikan intruksi dan arahan terhadap personil untuk penugasan penanganan darurat bencana. • Melakukan kegiatan SAR untuk penyelamatan korban terdampak gempa bumi. • Mengaktivasi rencana kongtingensi gempa bumi menjadi rencana operasi (RENOP) • Aktivasi sistem komunikasi kondisi darurat yang terkondinisasi dalam satu komando dengan melibatkan pihak pihak terkait. • Mendirikan pusat pengendalian operasi penanganan darurat bencana (pusdalop) dan pos lapangan. • Mendirikkann pos pengungsian sebagai temoat perlindungan sementara korban terdampak bencana. • Melakukan evaluasi setiap 8 jam untuk perubahan dan efektivitas penanganan darurat yang sedang dilakukan • Melakukan koordinasi dan supervisi penanganan darurat bencana.
b. Transisi Darurat	• Mebersihkan puing puing bangunan yang rusak dan memindahkan nya ke tempat lain. • Memperbaiki jalan dan jembatan darurat. • Memperbaiki rumah (yang rusak non-konrtuksi) dan fasilitas umum dan fasilitas sosial. • Memastikan aktivitas sosial, ekonomi masyarakat sudah lancar walaupun belum kepada kondisi sebelum terjadi gempa. • Memastikan fasilitas kesehatan dan pendidikan sudah dapat terlaksana. • Memastikan aktivitas pelayanan publik/pemerintah sudah berjalan.

4.2 Struktur Organisasi Komando

Struktur organisasi komando penanggulangan darurat bencana gempa bumi wilayah Provinsi Sumatera Utara. Struktur organisasi adalah suatu susunan atau hubungan antara komponen bagian-bagian dan posisi dalam sebuah organisasi, komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan. Sehingga jika terdapat suatu komponen baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan tentunya akan berpengaruh juga kepada organisasi tersebut.

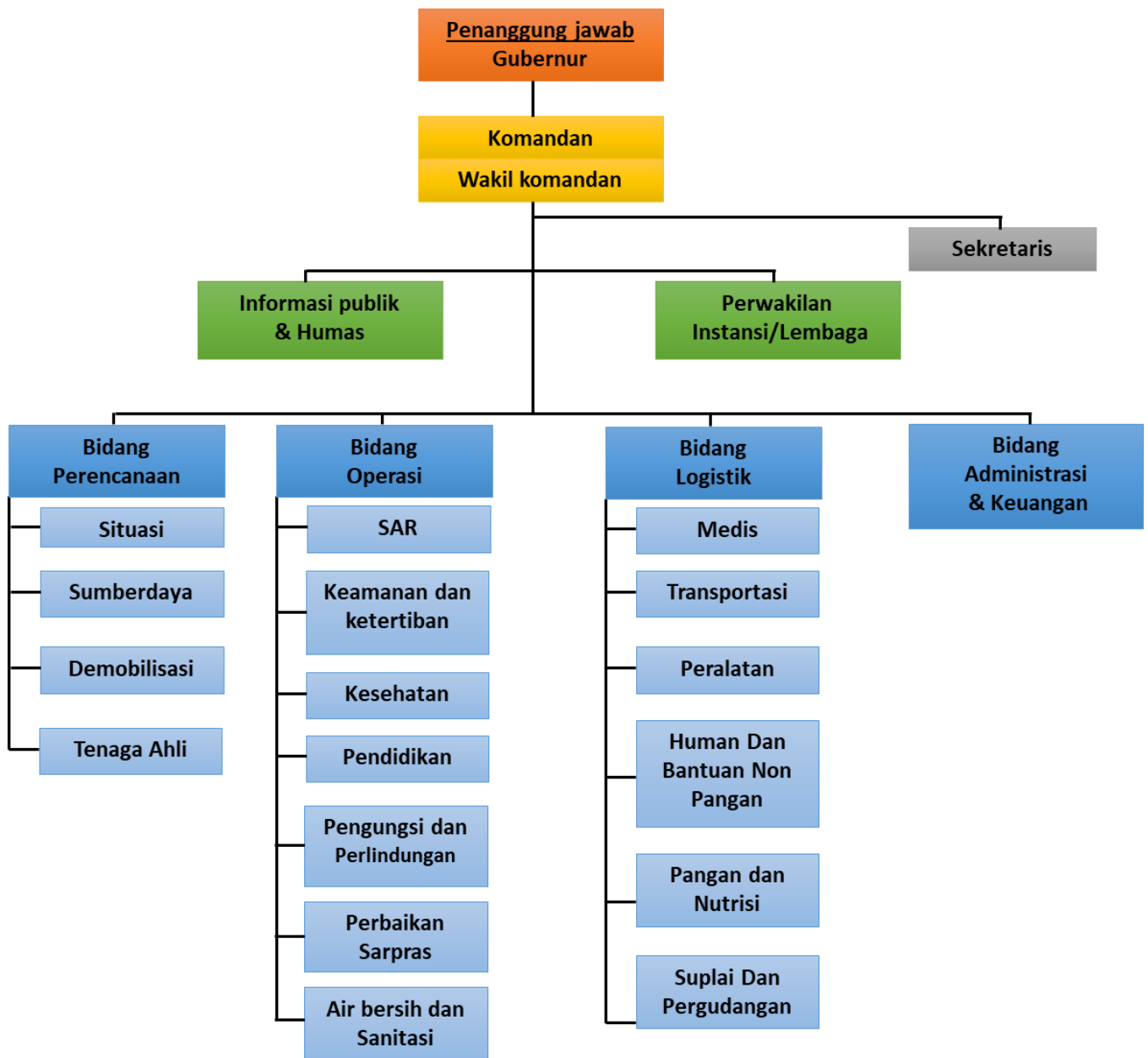
Dalam melaksanakan operasi tanggap darurat merujuk kepada peraturan kepala BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB), yang meliputi (1) komando, kenadali, koordinasi, komunikasi dan informasi.(2) perencanaan, (3) operasi, (4) logistik, (5) administrasi dan keuangan.

Struktur komando penangan darurat bencana gempa bumi provinsi Sumatera Utara, pada bagan di bawah;

1. Pos Pendamping PDB Provinsi dan Pos Pendamping PDB wilayah dipimpin seorang koordinator dibantu oleh:
 - a. Wakil koordinator
 - b. Sekretariat
 - c. Bagian data, informasi dan humas
 - d. Perwakilan instansi/lembaga terkait
 - e. Bidang operasi
2. Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan struktur organisasi standar yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan uraian tugas unit organisasi Pos Pendamping PDB Provinsi dan Pos Pendamping PDB wilayah diatur dengan petunjuk pelaksana.

Berikut adalah gambar Struktur Organisasi Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana Provinsi dan Wilayah :

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana
Gempa bumi**



4.3 Fungsi Dan Kegiatan Pokok

Fungsi dan kegiatan pokok SKPDB penanganan gempa bumi tingkat provinsi Sumatera Utara sebagai komando dalam mengarahkan sumberdaya (personil, peralatan, dan logistik), mencari dan menolong korban serta memberikan kebutuhan dasar, antara lain makan/minum, air bersih, sandang, sanitasi, pelayanan pendidikan dan kesehatan. Selain fungsi komando, SKPDB juga berfungsi sebagai koordinator untuk mengintegrasikan semua aktivitas untuk

menyatukan langkah dalam penanganan darurat gempa bumi. Berdasarkan Perka BNPB No. 03 Tahun 2016 pasal 20 bahwa :

1. Pos Pendamping PDB Provinsi Sumatera Utara Bencana Gempa bumi mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumberdaya melalui koordinasi dengan Posko PDB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara
 - b. Melakukan mobilisasi bantuan darurat bencana dari instansi/lembaga terkait di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang tidak terdampak bencana Gempa bumi
 - c. Mengajukan permintaan bantuan sumberdaya kepada Pos Pendamping Nasional atau BNPB jika diperlukan
 - d. Menyiapkan bantuan sumberdaya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan
 - e. Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana Gempa bumi kepada Posko PDB sesuai kebutuhan
 - f. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
 - g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BPBD Provinsi dengan tembusan kepada perangkat daerah/lembaga terkait tingkat Provinsi
2. Pos Pendamping PDB Provinsi, Pos Pendamping dan Pos Pendamping Nasional PDB mempunyai fungsi:
 - a. Pengkajian cepat kebutuhan sumberdaya
 - b. Pengelolaan bantuan sumberdaya
 - c. Pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

4.4 Tugas-Tugas Bidang

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membentuk SKPDB bencana gempa bumi sebagai sebuah sistem dengan fungsi dan tugas efektif. Berikut tugas tugas bidang kerja;

1. Komandan PDB

- Mengaktifkan pos komando penanganan darurat bencana gempa bumi.
- Memberikan perintah pelaksanaan penanganan darurat bencana gempa bumi

- Memfasilitasi dan menetapkan perencanaan PDB, pengelolaan dan pelaksanaan operasi.
- Melaksanakan koordinasi, mengintegrasikan dan menyelaraskan upaya upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait dalam SKPDB.
- Mengkoordinir dan mengendalikan para pihak (phantahelix) yang terbuat dalam PDB gempa bumi diluar SKPDB yang tidak tercantum dalam skenario Renkon.
- Menyampaikan informasi dan situasi perkembangan penyelenggaraan PDB gempa bumi kepada gubernur dan masyarakat secara berkala.

2. Sekretariat

- Melaksanakan surat menyurat, pengarsipan
- Melaksanakan tata kelola keuangan

3. Wakil Komandan

- Memberikan pertimbangan dan saran kepada komandan tanggap darurat dalam merencanakan, mengorganisasikan ,melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana
- Bertanggung jawab kepada komandan tanggap darurat.
- Membantu komandan dalam mengelola tugas kesekretariatan dan informasi publik.
- Mewakili komandan tanggap darurat bencana gempa bumi apabila komandan tanggap darurat berhalangan.

Pada tahap/fase saat terjadi bencana/tanggap darurat, pada hari “H” jam “J” WIB, Komando penanganan darurat bencana Provinsi Sumatera Utara menjalankan tugas-tugas yang mencakup:

Tabel 4.3 Tugas Bidang Penanganan Darurat Bencana Provinsi Sumatera Utara

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
1	Kesehatan	- Pelayanan Kesehatan - Pengendalian Penyakit - Penyehatan Lingkungan - Penyiapan air bersih dan sanitasi yang kualitas - Pelayanan kesehatan gizi - Pengelolaan obat bencana	Koordinator : - Kepala Dinas Kesehatan Provsu Anggota : - Kakesdam I/BB - Dokkes POLDA Sumut

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
		- Penyiapan kesehatan reproduksi dalam situasi bencana - Penanganan kesehatan jiwa - Penatalaksanaan korban mati - Pengelolaan informasi dibidang kesehatan	- Rumkit Lanud - RS AL - RS Lokal/setempat - PMI Sumut - Organisasi Profesi Kesehatan
2	Pencarian dan Penyelamatan	- Mengerahkan, mengoordinir serta mengendalikan sarana dan personil dalam pelaksanaan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana secara cepat, efisien dan efektif - Pengelolaan informasi dibidang pencarian dan penyelamatan	Koordinator : - Badan Nasional Pencarian Pertolongan Anggota : - TNI/POLRI - BPBD Provinsi Sumut - SATPOL PP Provsu - Dinas Sosial Provsu - Provsu/UPT.KPH - PMI Sumut - Relawan - ORMAS
3	Logistik	- Pengadaan barang: sandang, permakanan, peralatan - Bea cukai (untuk barang yang dibawa dari luar negeri/ di impor: - Penyimpanan/ pergudangan distribusi logistik - Keamanan logistic - Pengelolaan informasi dibidang logistic.	Koordinator : Dinas Sosial Provsu Anggota : - TNI/POLRI - BPBD Provsu - Perum Bulog - Dishub Provsu - Dinas Ketapang Provsu - SATPOL PP Provsu - Dinkes Provsu
4	Pengungsian dan Perlindungan	- Penyiapan Dapur umum - Pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, tempat pengungsian, keamanan - Manajemen pengungsian dan penyiapan hunian sementara - Perlindungan kelompok rentan - Pengelolaan informasi di bidang pengungsian dan perlindungan - Perlindungan pengungsi berbasis gender	Koordinator : BPBD Provsu Anggota : - TNI/POLRI - Dinas Sosial Provsu - Kesbangpol Provsu - SATPOL PP Provsu - Dinas Kominfo Provsu - Dinas PKP Provsu - Dinas PUPR Provsu - Dinas PMD Dukupil Provsu - Dinas P3AKB Provsu - Dinkes Provsu - Kakesdam I/BB - Dokkes POLDA Sumut - Rumkit Lanud - RS AL

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
			- PMI Sumut - Organisasi Kesehatan Profesi - PDAM - PLN
5	Pendidikan	- Pelayanan belajar mengajar formal dan informal - Penyiapan sekolah darurat - Bimbingan dan penyuluhan bagi pengungsi dan anak dewasa - Kerohanian - Pengelolaan informasi di bidang pendidikan	Koordinator : Dinas Pendidikan Provsu Anggota : - TNI/POLRI - BPBD Provsu - Dinas Sosial Provsu - Dinas PKP Provsu - Dinas PUPR Provsu - Relawan
6	Sarana dan Prasarana	- Pembersihan puing-puing/<i>debris clearance</i> - Penyediaan alat transportasi, telekomunikasi dan energy - Penyediaan air dan sanitasi - Penyediaan hunian tetap (huntap) - Pengelolaan informasi di bidang sarana dan prasarana - Penguatan kapasitas pemerintah pusat/daerah untuk koordinasi - Revitalisasi fungsi pemerintah desa/camat/kabupaten/provinsi - Pemulihan layanan publik, sarana pendukung pemerintah - Penguatan kapasitas perencanaan dan pendanaan - Pengelolaan informasi dibidang pemulihan dini	Koordinator : Dinas PUPR Provsu Anggota : - TNI/POLRI - Dinas PKP Provsu - BPBD Provsu - SATPOL PP Provsu - Diskominfo Provsu - PLN - PDAM - PTPN II, III dan IV - Provider Komunikasi
7	Bag. Perencanaan	Bidang Situasi • Melakukan kajian situasi penanganan darurat bencana gempa bumi • Melakukan koordinasi dengan komando dalam penyusunan rencana operasi secara berkala. • Memastikan update informasi secara berkala berkaitan dengan cuaca, sebagai bahan pertimbangan operasi penanganan darurat bencana gempa bumi.	Koordinator : Bappelitbang Provsu Anggota : - TNI/POLRI - BPBD Provsu - Dinas Sosial Provsu - BKAD Provsu

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
		• Membuat laporan harian perkembangan kejadian bencana dan dampaknya. • Menyediakan data dan informasi bencana sebagai bahan publikasi. • Menyediakan peta yang berkaitan dengan penanganan darurat. Bidang Sumberdaya • Memetakan kebutuhan sumberdaya untuk operasional PDB • Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyiapan sumberdaya dan pengerahan sumberdaya • Memastikan sumberdaya yang tersedia dapat di gunakan dan tersebar untuk memudahkan PDB • Mengkoordinasikan penempatan sumberdaya manusia dari luar daerah sampai dengan kebutuhan pos komando darurat. Demobilisasi • Merencanakan demobilisasi sumberdaya PDB • Menyiapkan prosedur teknis dan administratif demobilisasi sumberdaya • Demobilisasi sumberdaya penanganan darurat bencana Tenaga Ahli • Memberikan masukan dan arahan kepada pemangku kepentingan kunci didalam tindakan komando PDB • Memetakan dan melakukan konsolidasi tenaga ahli untuk menjadi bagian dari PDB • Pertemuan secara berkala untuk mendiskusikan perkembangan situasi penanganan darurat bencana Unit Suplai Dan Pergudangan • Menyusun dan memetakan alur suplai barang untuk mempermudah suplai dan distribusi logistik • Memastikan alur suplai pangan tidak mengalami hambatan untuk mendukung PDB	

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
		• Membangun/memperkuat prosedur suplai pangan dan barang untuk mendukung PDB yang terdampak gempa bumi • Menyiapkan dan merancang kebutuhan makanan untuk korban bencana, membuat suatu manajemen penyimpanan, penyaluran makanan dll • Memberikan dukungan melalui ketersediaan penyimpanan dan pergudangan serta memastikan mekanisme barang masuk dan keluar	
8	Administrasi Dan Keuangan	• Memastikan rencana kerja anggaran keuangan • Melakukan persiapan data dan dokumen PDB • Melakukan penataan dan evaluasi dan pelaporan dibidang keuangan • Menyiapkan draf perpanjangan/pengahiran batas darurat • Mempersiapkan administrasi logistik meliputi; penerimaan, pengeluaran dan laporan pertanggungjawaban • Mempersiapkan permohonan pencairan belanja tak terduga (BTT), dana siap pakai (DSP) dan bantuan lain dari para pihak -	Koordinator : BPBD Provsu Anggota : - Dinas Sosial Provsu - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provsu - TNI / POLRI
9	Bidang Komunikasi dan Informasi	- Merekap semua data dan informasi dari setiap bidang serta pos lapangan. - Menyampaikan perkembangan terkait proses penanganan darurat bencana. - Melaksanakan pemberian tanggapan terhadap isu yang beredar pada proses penanganan bencana. - Memastikan semua informasi antar bidang berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. - Menyebarkan informasi terkait situasi terkini tentang bencana gempa bumi kemedi massa dan masyarakat luas. - Memastikan masyarakat dan wartawan dapat mengakses informasi	Koordinator : Dinas Kominfo Provsu Anggota : - TNI/POLRI - BPBD Provsu - Dinas Sosial Provsu - BMKG Wil-I Sumut - TVRI - RRI - Mass Media - RAPI Sumut - ORARI Sumut - PT. Telkom - PWI

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
		mutakhir penanganan darurat yang dibutuhkan. - Melakukan pemantauan informasi baik dari media masa lokal maupun internasional. - Mengakomodasi informasi dari dan untuk pihak internasional.	
10	Bidang Operasi	Unit SAR Dan Evakuasi • Mendukung proses evaluasi untuk penyelamatan penduduk. • Membuka dan pengamanan jalan jalan evaluasi • Assesment atas korban terdampak serta situasi dan keadaan korban darurat • Melakukan koordinasi sumberdaya untuk pelaksanaan pencarian dan pertolongan bagi korban • Memberikan dukungan dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan bagi korban • Menyelenggarakan pertolongan pertama (triase) • Memastikan penyatuan keluarga Unit Keamanan Dan Ketertiban • Melakukan pemetaan sumberdaya keamanan dan ketertiban bisa digunakan dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban pada PDB. • Melakukan koordinasi dan konsolidasi sumberdaya keamanan dan ketertiban di wilayah terdampak gempa bumi • Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masa tanggap darurat • Laporan kepada komandan PDB tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dalam kerangka PDB Unit Medis • Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan • Memberikan dukungan sesuai dengan SPGDT (sistem penanggulangan gawat darurat tertentu yang telah di sepakati • Melakukan koordinasi dan konsolidasi sumberdaya kesehatan	

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
		• Memastikan dan mendukung adanya kaji cepat kesehatan untuk memastikan wilayah aman berbasis kesehatan • Memastikan upaya pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular • Memastikan adanya pelayanan rujukan rumah sakit umum • Mendukung pelayanan pemulihan kesehatan fisik, mental dan psikososial • Memastikan pemenuhan standard minimal bantuan kesehatan • Melakukan pemetaan sumberdaya kesehatan yang bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan • Mobilisasi EMT (Emergency Medical Tim) PHRRT (Public Health Rapid Reponse Team), pengumuman rencana operasi penanganan krisis kesehatan, memobilisasi sarana-prasana kesehatan dan pembekalan kesehatan yang memadai, memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai dengan standard nya, memperhatikan kepentingan kelompok sekitar • Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan kesehatan • Koordinasi penanganan darurat bencana untuk cluster kesehatan • Laporan kepada komandan PDB tentang penyelenggaraan kesehatan dalam kerangka PDB • Pada masa transisi darurat ke pemulihan memastikan layanan kesehatan sudah berfungsi mudah memenuhi kesehatan masyarakat Unit Pendidikan • Melakukan pemetaan sumberdaya pendidikan yang bisa digunakan untuk memberi dukungan pada PDB dalam pelaksanaan pendidikan • Melakukan koordinasi sumberdaya pendidikan kepada wilayah terdampak	

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
		• Memastikan dan mendukung penyelenggaraan fasilitas pendampingan kelompok rentan • Memastikan penyelenggaraan keagamaan • Memastikan ketersediaan ruang ramah anak • Memastikan penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat • Memastikan penyediaan perlengkapan sekolah dan sarana bermain • Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan masa tanggap darurat • Laporan kepada komandan PDB tentang penyelenggaraan pendidikan kerangka PDB • Pada masa transisi darurat ke pemulihan memastikan layanan pendidikan sudah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Unit Perlindungan dan Pengungsian • Koordinasi pemerintah, pemerintah daerah serta fasilitas peran masyarakat, media, akademisi, dan dunia usaha dalam mobilisasi sumberdaya untuk pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat terdampak bencana secara menyeluruh dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan • Mobilisasi sumberdaya kepada wilayah terdampak bencana dalam pengelolaan pengungsian, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, dan penyiapan hunian sementara, perlindungan kewilayah rentan, pengelolaan informasi di bidang pengungsian dan perlindungan • Memastikan ketersediaan bantuan pangan dan sandang • Penyediaan dapur umum untuk pemenuhan makan bagi pengungsi	

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
		• Aktivasi tempat-tempat pengungsian • Memastikan pendataan terhadap pengungsi dan wilayah rentan yang dilakukam secara berkala • Memastikan dan memberikan dukungan ketersediaan air secara memadai dan sanitasi yang cukup • Memastikan dan mendukung pengelolaan pengungsian secara bermartabat Unit Sarana dan Prasarana • Melaukan pemetaan sumberdaya perbaikan sarpras yang diperbaiki masa transisi darurat • Melakukan koordinasi dan konsolidasi sumberdaya perbaikan sarpras kepada wilayah yang tidak terdampak. • Melakukan perubahan sarpras, pembersihan puing-puing/debris clearance, penyediaan alat transportasi, telekominikasi, dan energi, penyediaan hunian tetap, penyediaan air dan sanitasi • Melaukan upaya perubahan serta pembangunan sementara sarana kesehatan. • Memberikan dukungan dalam upaya perbaikan serta pembangunan sementara sarana pendidikan • Menyiapkan tempat tinggal sementara untuk pengungsi • Memastikan upaya perbaikan objek vital • Memastikan pemulihaan dan penyaluran atas jalan • Mendukung pembangunan jembatan sementara dan perbaikan jembatan rusak. • Memastikan ketersediaan penampungan air bersih dan MCK untuk kebutuhan sementara • Memastikan tersedianya aliran bersih sementara. • Mendukung pendirian sarana ibadah sementara.	

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
		• Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perbaikan sarpras tanggap darurat • Laporan kepada komandan PDB tentang penyelenggaraan perubahan sarpras • Pada masa transisi darurat ke pemulihan memastikan layanan pemulihan dini sarana-prasarana sudah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Unit Air Bersih dan Sanitasi • Melakukan pemetaan sumberdaya bisa digunakan untuk penyediaan layanan air dan sanitasi pada masa tanggap darurat. • Melakukan koordinasi dan konsolidasi sumberdaya air dan sanitasi pada wilayah yang tidak terdampak untuk digunakan pada wilayah terdampak • Melakukan penyediaan layanan air bersih dan sanitasi lingkungan, operasi penanganan krisis air bersih kepada masyarakat terdampak sesuai standard dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan. • Memastikan pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian sektor serta pembuangan tinja. • Laporan pada komandan PDB tentang penyelenggaraan layanan air bersih dalam kerangka PDB.	
11	Bidang Logistik	Unit Medis • Memastikan dan memberikan dukungan dalam penanganan darurat pada sektor kesehatan, khususnya pada tenaga kesehatan dan obat-obatan • Memastikan dan memberikan dukungan pada perencanaan dan	

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
		distribusi tenaga kesehatan, obat-obatan dan mekanisme rujukan. Unit Transportasi • Memastikan dan memberikan dukungan dalam perencanaan kebutuhan transportasi PDB • Memastikan dalam mobilisasi sumberdaya transportasi baik pemerintah maupun non pemerintah • Memastikan dan memberikan dukungan ketersediaan sarana transportasi darurat dari/ke lokasi kejadian bencana unruk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat bencana • Membuka akses jalan yang tertutup oleh piung puing/debris dan mengatur lalu lintas untuk kemudahan operasional penangana darurat bencana Unit Peralatan • Memastikan memberikan dukungan pada ketersediaan alat berat untuk penanganan darurat bencana • Memastikan dan memberikan dukungan hunian sementara, dapur umum dan pos operasi tanggap darurat Unit Bantuan Dan Hunian Bantuan/Non Pangan • Memastikan dan memberikan dukungan bantuan non-pangan • Memastikan dan memberikan dukungan penyediaan hunian sementara yang layak Unit Pangan Dan Nutrisi • Memastikan ketersediaan air dan kesiapan dukungan pangan bagi penyintas • Melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait untuk memastikan ketersediaan pangan pangan yang di perlukan untuk penyintas	

No	Nama Klaster	Tugas	Keanggotaan
		• Memastikan keamanan pangan dan pemenuhan nutrisi bagi kelompok rentan • Merencanakan keberlangsungan rantai pasok pangan bagi warga terdampak maupun operasional selama tanggap darurat • Mendata kebutuhan pangan bagi penyintas • Memberikan bantuan pangan melalui mekanisme yang telah ditentukan • Memastikan dan memberikan kebutuhan pangan bagi kelompok rentan secara layak dan memadai.	
12	Perwakilan Instansi/Lemba ga	- Mengundang FORKOPIMDA dalam rangka penanganan bencana - Memfasilitasi/mediasi terkait penanganan konflik sosial akibat Gempa bumi dengan negara tetangga - Melakukan pendistribusian bahan-bahan bantuan lapangan - Memfasilitasi pertemuan dengan pihak DPRD dalam rangka kebijakan penanganan akibat Gempa bumi Provsu - Membantu komandan PDB dalam merencanakan kebutuhan dan memvalidasi sumberdaya untuk penanganan darurat bencana gempa bumi.	Koordinator : Kanwil Kemenkumhan Sumut Anggota: - TNI/POLRI - Kesbangpol Provsu

4.5 Instruksi dan Koordinasi

Kajian cepat akibat bencana gempa bumi Sumatera Utara tim reaski cepat (TRC) yang bertugas mulai dari informasi awal kejadian gempa bumi setelah mendapatkan informasi awal dari BMKG, mas media atau masyarakat, maka sekretaris daerah, ex officio kepada BPBD provinsi Sumatera Utara mengintruksikan TRC untuk melakukan kaji cepat atas dampak bencana, kebutuhan penanganan darurat, penilaian kerusakan serta langsung melaksanakan aktivitas SAR dan pembentukan SKPL (Sistem Komando Penanganan Lapangan)

Kaji cepat darurat bencana gempa bumi menggunakan pertanyaan terkait bencana yang terjadi, terdiri dari;

- Apa : Jenis Bencana**
- Bilamana : Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, Jam, Waktu setempat**
- Diamana : Tempat/lokasi/daerah bencana**
- Berapa : Jumlah korban, kerusakan sarana prasarana**
- Bagaimana : Upaya yang tetap dilakukan**

Kaji cepat kebutuhan terkait dengan keperluan SAR dan pemenuhan kebutuhan dasar (makan, minum, sanitasi, sandang, air bersih, kesehatan dan pendidikan) bagi korban/penyintas.

Dari hasil kaji cepat ini di rekomendasikan sebagai pertimbangan bagi gubernur Sumatera Utara untuk menerapkan status darurat bencana tingkat provinsi.

1. Penetapan Status/Tingkat Bencana

Gubernur Sumatera Utara menetapkan status darurat bencana provinsi Sumatera Utara dengan mempertimbangkan;

- a. Laporan atau rekomendasi dari TRC atau hasil Kaji Cepat akibat bencana gempa bumi.
- b. Pertimbangan dan masukan bapak/walikota di provinsi Sumatera Utara serta para pihak dalam forum rapat dengan instansi/lembaga/organisasi
- c. Penerbitan surat keputusan Gubernur tentang status darurat bencana gempa bumi Sumatera Utara
 - Surat keputusan Gubernur sekaligus sebagai keputusan mengaktifasi rencana kontingensi gempabumi.
- d. Penerbitan surat keputusan Gubernur tentang komando penanganan darurat bencana.

2. Penyusunan Rencana Operasi (Renop)

Renkon gempa bumi setelah di *review* di sesuaikan dengan hadiri terkini berfungsi atau diaktivasi menjadi rencana operasi (Renop)

3. Penyelenggaraan operasi penanganan darurat bencana gempabum sumatera utara, melalui;

- Pengerahan sumberdaya untuk penanganan darurat bencana gempa bumi di provinsi Sumatera Utara
 - Aktivasi pos lapangan
 - Aktivasi jaringan komunikasi
4. Pengorganisasian satuan komando tanggap darurat bencana akibat gempa bumi.

BAB V

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

5.1 Administrasi

Mobilisasi sumberdaya pendampingan dan pendudukan PDB dilakukan dengan ketentuan berikut:

1. Pengiriman sumberdaya oleh instansi/lembaga dan organisasi harus dilakukan oleh personil instansi lembaga atau organisasi melalui mekanisme yang di tentukan.
2. Memastikan sumberdaya yang di kirimkan oleh instansi/lembaga atau organisasi sesuai dengan kebutuhan PDB. Jika sumberdaya yang dikirimkan tidak memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan, maka SKPDB provinsi Sumatera Utara memiliki kewenangan untuk mengembalikan sumberdaya ke instansi/lembaga atau organisasi.

Biaya operasional pos komando darurat bencana daerah provinsi Sumatera Utara bersumber dari:

1. APBD provinsi Sumatera Utara
2. APBN
3. Bantuan lain yang tidak mengikat

5.2 Logistik

Pengerahan sumberdaya di tingkat provinsi Sumatera Utara di lakukan dengan pola sebagai berikut:

1. Dalam hal bencana tingkat provinsi, BPBD kabupaten/kota yang terdampak wajib mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan lokasi bencana.
2. Apabila provinsi Sumatera Utara tidak memiliki sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah provinsi Sumatera Utara dapat meminta bantuan kepada instansi terdekat, atau kepada pemerintah pusat.
3. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan ini di tanggung oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara.
4. Pelaksanaan pengerahan sumberdaya dari asal sampai lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali kepala BPBD provinsi Sumatera Utara

5. Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik, maka BNPB dapat melalui pola pembangunan
6. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biaya pengerahan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat

BAB VI PENGENDALIAN

6.1 Komando

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana Gempa bumi di Provinsi Sumatera Utara dipimpin Gubernur dan/atau Komandan yang ditunjuk oleh Gubernur.

6.1.1 Pos Komando

Pos komando penanganan darurat bencana gempa bumi provinsi Sumatera Utara berfungsi sebagai pusat komando, kordinasi dan pengendalian fungsi darurat bencana yang berkedudukan di kantor BPBD provisi Sumatera Utara, jl. Binjai Km.10,3 No.8 Deliserdang.

6.1.2 Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat bencana kepada SKPDB Kabupaten, berkedudukan dan lebur dalam Komando SKPDB di masing-masing Pos Komando Kabupaten. Adapun Pos Lapangan sebagaimana dimaksud dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 6.1 Pos Lapangan

NO.	Lokasi Pos Lapangan	Koordinat
1	BPBD Medan	3°33'56"N 98°43'25"E
2	BPBD Tapanuli Utara	2°01'13"N 98°58'41"E
3	BPBD Tapanuli selatan	1°24'26"N 99°16'49"E
4	BPBD Dairi	2°45'15"N 98°17'41"E
5	BPBD Asahan	2°58'09"N 99°37'04"E
6	BPBD Batubara	3°17'06"N 99°30'22"E
7	BPBD Deli Serdang	3°32'44"N 98°52'08"E
8	BPBD Humbang Hasundutan	2°15'01"N 98°47'20"E
9	BPBD Karo	3°07'11"N 98°30'26"E
10	BPBD Labuhan Batu	2°04'15"N 99°51'18"E
11	BPBD Labuhan Batu Selatan	1°53'26"N 100°05'34"E
12	BPBD Labuhanbatu Utara	2°31'07"N 99°38'55"E
13	BPBD Langkat	3°44'12"N 98°26'39"E

NO.	Lokasi Pos Lapangan	Koordinat
14	BPBD Mandailing Natal	0°48'53"N 99°34'09"E
15	BPBD Nias	1°07'13"N 97°43'35"E
16	BPBD Nias Barat	0°59'54"N 97°29'47"E
17	BPBD Nias Selatan	0°35'03"N 97°46'38"E
18	BPBD Nias Utara	1°23'27.14"U 97°21'21.34"T
19	BPBD Padang Lawas	1° 3'24.15"U 99°46'32.02"T
20	BPBD Padang Lawas Utara	1°29'40.31"U 99°37'10.00"T
21	BPBD Pakpak Bharat	2°32'24"N 98°19'17"E
22	BPBD Samosir	2°33'36"N 98°43'13"E
23	BPBD Serdang Bedagai	3°30'10"N 99°07'04"E
24	BPBD Simalungun	3°34'25"N 98°42'56"E
25	BPBD Tapanuli Tengah	1°42'40"N 98°51'02"E
26	BPBD Toba	2°19'11"N 99°03'09"E
27	BPBD Binjai	3°35'24"N 98°30'17"E
28	BPBD Gunungsitoli	1°18'57"N 97°36'10"E
29	BPBD Padang Sidempuan	1°20'16"N 99°18'29"E
30	BPBD Pematang Siantar	2°57'05"N 99°03'47"E
31	BPBD Sibolga	1°44'24"N 98°46'32"E
32	BPBD Tanjung Balai	2°57'48"N 99°48'01"E
33	BPBD Tebing Tinggi	3°20'47"N 99°09'32"E

6.1.3 Pos Pendukung

Pos Pendukung Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pos Pendukung, berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri. Pos Pendukung berkedudukan seperti pada tabel berikut.

Tabel 6.2 Lokasi Pos Pendukung

Pos Pendukung	Lokasi	Koodinat
Pos Pendukung 1	Bandara Internasional Kualanamu	3°37'58.84"U 98°52'32.93"T
Pos Pendukung 2	Pangkalan Udara Soewondo	3°33'48.21"U 98°40'43.57"T
Pos Pendukung 3	Bandara Aek Godang	1°23'55.65"U 99°25'46.64"T
Pos Pendukung 4	Bandara Silangit	2°15'44.98"U 98°59'15.35"T
Pos Pendukung 5	Bandara Ferdinand Lumban Tobing	1°33'17.23"U 98°53'47.51"T
Pos Pendukung 6	Bandara Binaka	1° 9'53.82"U 97°42'16.97"T
Pos Pendukung 7	Bandara Sibisa	2°36'0.21"U 98°57'50.92"T
Pos Pendukung 8	Bandara Lasondre	0° 1'10.39"S 98°18'4.82"T

Tabel 6.3 Tugas Dan Fungsi Pos Pendukung

Tugas	Fungsi
Bantuan Nasional	
• Melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumberdaya. • Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan penanganan darurat bencana yang di kirim • Melakukan pengelolaan sementara bantuan PDB. • Mengerahkan bantuan PDB yang di terima ke posko PDB. • Melakukan distribusi bantuan darurat bencana ke pos lapangan PDB • Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan • Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada komandan posko	Pengelolaan penerimaan bantuan Penanganan sementara bantuan darurat bencana sebelum distribusi Pengelolaan distribusi bantuan PDB Pencatatan, evaluasi, dan pelayanan kegiatan
Bantuan Internasional	
• Melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumberdaya • Melakukan pencatatan dan pelayanan terhadap bantuan penanganan darurat bencana yang di terima dan kembalikan • Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana • Melakukan pengelolaan perizinan • Melakukan pengelolaan bantuan • Menyerahkan bantuan PDB ke pos pendamping nasional • Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana ke posko PDB atas pos lapangan PDB atas petunjuk pos pendamping nasional PDB • Melakukan fasilitasi pengembalian bantuan untuk bantuan penanganan darurat bencana yang berasal dari komunitas internasional. • Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada koordinator pos pendamping nasional	

6.1.4 Pos Pendamping

Pos Pendamping Nasional, selanjutnya disebut Pospenas atau Pos BNPB berfungsi untuk mempermudah akses dan efektivitas terhadap sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat, berkedudukan **di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jl. Pramuka No.38 11, RT.11/RW.5, Utan Kayu**

Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
adapun Tugas Dan Fungsi Pos Pendamping Nasional ialah :

- Melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumberdaya berkoordinasi dengan komandan posko PDB dan/atau pos pendamping nasional
- Melakukan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana dari kementrian/lembaga terkait dan provinsi yang wilayahnya tidak terdampak bencana.
- Mengelola bantuan yang di terima dari komunitas internasional
- Menyiapkan bantuan sumberdaya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan
- Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana kepada posko PDB atau posko pendamping nasional
- Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BNPB dengan tembusan kepada kementrian/lembaga(KL)

6.2 Kendali

Komando penanganan darurat bencana langsung mendukung serta mengendalikan bidang-bidang dibawah nya. Komandan penanganan darurat bencana ke bidang-bidang dan dari koordinator bidang ke unit-unit dibawah nya.

6.3 Koordinasi

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB bersifat wajib di pimpin oleh komandan dan dilaksanakan di pos komando penanganan darurat sebanyak 1(satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi.

A. Pengkajian Cepat Akibat Bencana Gempa bumi

BPBD Provinsi Sumatera Utara melakukan pengkajian cepat untuk menilai akibat langsung dari bencana Gempa bumi. Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi terdampak

bencana. Data sekunder dihimpun dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan. Lingkup kaji cepat meliputi:

- Apa : Jenis Bencana
- Bilamana : Hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
- Dimana : Tempat/lokasi/daerah bencana
- Berapa : Jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana
- Penyebab : Penyebab terjadinya bencana
- Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan

Analisa akibat langsung dari kejadian Gempa bumi di Sumatera Utara dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dipergunakan sebagai pertimbangan Penetapan Status Bencana.

B. Penetapan Status/Tingkat Bencana

Gubernur Sumatera Utara menetapkan Status Darurat Bencana Provinsi Utara dengan mempertimbangkan:

1. Laporan BPBD Provinsi Sumatera Utara atas hasil pengkajian cepat akibat Gempa bumi
2. Pertimbangan dan masukan dari Bupati/Walikota di daerah terdampak, serta para pihak dalam forum rapat dengan instansi/lembaga/organisasi.
3. Penerbitan Surat Keputusan Gubernur tentang Status Darurat Bencana Provinsi Sumatera Utara
 - a) Surat Keputusan Gubernur sekaligus sebagai keputusan mengaktifasi rencana kontingensi operasi penanganan kedaruratan, melalui pemutakhiran atau penyesuaian situasi dan dampak kejadian yang ada, menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana.
 - b) Dalam Surat Keputusan Gubernur sekaligus keputusan mengaktifasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana Provinsi Sumatera Utara dan personal-personil yang diberi mandat sebagai pengampu tugas pendukung penanganan kedaruratan bencana Gempa bumi Provinsi Sumatera Utara.
 - c) Dalam Surat Keputusan Gubernur sekaligus memastikan dan menegaskan pemerintah kabupaten/kota merupakan pengampu

utama penanganan kedaruratan melalui Satuan Komando dan Pos Komando yang dibentuk oleh masing-masing Bupati/Walikota.

C. Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana berdasarkan Rencana Kontingensi yang disesuaikan dengan intensitas dampak langsung bencana.

D. Penyelenggaraan Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana Gempa bumi

6.4 Komunikasi

Komunikasi dalam PDB, penyampaian informasi, dari satu pihak ke pihak lain dilakukan secara langsung/tidak langsung. Proses pembicara memberikan informasi sistematis dan memindahkan pengertian kepada orang lain.

Adapun sarana dan prasarana Komunikasi ini merupakan salah satu fasilitas penting komando darurat bencana untuk mengatur jalur informasi, mendukung arus komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos lapangan, para pihak yang terkait. Komandan PDB bertanggung jawab atas kejelasan atas komunikasi untuk mendukung efektivitas operasi darurat Gempa bumi dalam menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibantu oleh Bagian Data Informasi melalui media dan alat komunikasi.

A. Pos Komando

1. Telepon : **(061) 8468469**
2. Telepon Genggam/HP/Whatsapp
3. Radio

1) Frekuensi Radio HF/SSB

Frekuensi Radio HF yang dialokasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah **11.473.5 MHz**. Penggunaan frekuensi ini diperuntukkan bagi BNPB dan BPBD.

2) Frekuensi Radio VHF

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah **171.300 MHz**, dengan frekuensi repeater **170.300 MHz** untuk RX dan **165.300 MHz**

untuk TX dengan **Tone TX 123** Penggunaan frekuensi diperuntukkan bagi BNPB dan BPBD

3) Frekuensi Cadangan : **26.960 - 27.410 MHz Mhz (RAPI)**

4) Frekuensi Cadangan : **146,900 - 146,30 Mhz (ORARI)**

4. Email: **bpbd@sumutprov.go.id**

5. Faksimile: **(061) 8468015**

6. Website : **bpbd.sumutprov.go.id.**

6.5 Informasi

Informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari laporan dari aparat desa dan kecamatan dan juga laporan dari berbagai media sosial secara *real-time*. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Operasi dan yang terlibat di dalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana. Pengelolaan informasi tidak hanya mencakup pengolahan data saja, tetapi juga sistem dan aplikasi yang digunakan. Adapun informasi dari sistem peringatan dini yang sudah dikembangkan yaitu :

Informasi	Situs
WRS (Warning Receiver System) BMKG	https://inatews.bmkg.go.id/wrs/index.html
INATEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System) BMKG	https://inatews.bmkg.go.id/eng/realtime

BAB VII

RENCANA TINDAK LANJUT

7.1 Komitmen Parapihak Dalam Penanganan Kedaruratan

Komitmen para pihak sangat dibutuhkan agar semua rencana yang telah disusun ini dapat dikoordinasikan saat sebelum maupun diimplementasikan nantinya di dalam pelaksanaan apabila memang benar-benar terjadi. Para Pihak telah bersepakat dan berkomitmen untuk sama-sama berkontribusi terhadap rencana kontingensi ini sebagaimana yang telah ditanda tangani Bersama dalam lampiran komitmen. Berikut adalah komitmen para pihak dalam penanganan kedaruratan.

- Proses penyusunan rencana kontingensi dilakukan secara partisipatif dan disusun bersama oleh seluruh pemangku kepentingan (pentahelix) di provinsi Sumatera Utara yang terkait dengan gempa bumi.
- Aktivasi rencana kontingensi gempa bumi menjadi rencana operasi pada saat terjadi bencana gempa bumi akan dilakukan oleh gubernur Sumatera Utara, selaku penanggungjawab penendalian operasi.
- Pemutakhiran data dan informasi guna penyesuaian isi dokumen rencana kontingensi dilakukan minimal 2 (dua) tahun sekali setelah melakukan pemantauan dan evaluasi sumberdaya
- Apabila hingga batas waktu yang direncanakan tidak terjadi wacana, maka rencana kontingensi ini akan berakhir setelah 3 (tiga) Tahun.
- Koordinasi untuk pengumuman, pemantauan dan pemutakhiran rencana kontingensi ini dilakukan oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara dibawah koordinasi BPBD provinsi Sumatera Utara
- Aktivasi rencana kontingensi gempa bumi provinsi Sumatera Utara bersifat dinamis dan operasional. oleh karena, dokumen ini harus di simulasikan dengan dasar skenario dari dokumen rencana kontingensi bencana gempa bumi yang ada

7.2 Penyiapan Kesiapsiagaan

Sebagai tindak lanjut dari rencana kontingensi BPBD Provinsi Sumatera Utara Bersama instansi terkait akan melaksanakan kegiatan Latihan kesiapsiagaan guna menguji Renkon yang telah dibuat Bersama. Latihan kesiapsiagaan akan dilaksanakan setiap 1 (satu) semester tiap tahun.

Setelah disusun dan dikaji ulang, rencana kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut.

1. Simulasi Rapat Koordinasi

Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontingensi tingkat daerah. Ketentuan simulasi yakni:

- a. Dipimpin oleh Gubernur Sumatera Utara/Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
- b. Diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumberdaya
- c. Merumuskan hasil Rencana Kontingensi final disepakati bersama

2. Kegiatan *Table Top Exercise* (TTX)

Kegiatan ini merupakan latihan di dalam ruangan, untuk menguji kemampuan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada rencana kontingensi.

3. Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko

Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana kontingensi sesuai bidang masing-masing. Uji/geladi posko ini bertujuan memastikan setiap peserta mengetahui/memahami peran masing-masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi

4. Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang

Merupakan latihan di lapangan bertujuan untuk menguji/evaluasi perencanaan bidang operasi. Geladi lapang melibatkan sumberdaya yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

LAMPIRAN 1

KONVERSI RENCANA KONTINGENSI MENJADI RENCANA OPERASI: PENYUSUNAN RENCANA OPERASI PENANGANAN DARURAT

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA

Lembar No. ____ dari ____ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) : _____

Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : _____

RENCANA OPERASI :

Nomor : _____

PENUNJUKAN :

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : _____ (skala peta)
3. Tahun : _____ (tahun pengeluaran peta)
4. Daerah Waktu : _____ WIB / WITA / WIT
5. Landasan Hukum : _____ (landasan hukum pembuatan Rencana Operasi)
6. Dokumen : Rencana Kontingensi _____

DAERAH WAKTU : _____ WIB

SANDI OPERASI :

SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi

- a. Macam/jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (tuliskan informasi dari Informasi Bencana)
 - 1) Macam/jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.
 - 2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

Lihat Bab 3

3. Pelaksanaan

a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi

Lihat BAB 4 SUB BAB 4.1

b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana.

Lihat BAB 4 SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3

c. Instruksi dan Koordinasi.

Lihat BAB 4 SUB BAB 4.5

d. Administrasi dan Logistik

Lihat BAB V

e. Pengendalian

Lihat BAB VI

f. Penutup

Tanggal _____(penetapan)

Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran :

- A. Surat Penetapan Status Darurat Gubernur
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi
- E. Rencana Dukungan Anggaran.

LAMPIRAN 2

PROYEKSI WILAYAH DAN PENDUDUK TERDAMPAK

PROYEKSI WILAYAH DAN PENDUDUK TERDAMPAK

Lampiran ini menyajikan proyeksi/estimasi wilayah dan penduduk terdampak bencana sesuai skenario kejadian. Lampiran ini merupakan penjabaran dari BAB II Sub-Bab 2.3. Asumsi Dampak, dimana skenario yang dibuat yaitu terdapat 2 (dua) kejadian yaitu Gempa bumi Renun dan Gempa bumi Megatrast.

Adapun asumsi yang digunakan dalam Proyeksi Gempa bumi Renun, Wilayah Dan Penduduk Terdampak yaitu menggunakan dasar asumsi risiko gempa bumi InaRisk yakni sebesar **35% atau 4,145,281 Jiwa** dari total jumlah Penduduk 21 kabupaten/kota yang terpapar di Provinsi Sumatera Utara atau berjumlah 11,826,428 Jiwa (Data BPS, 2023), selanjutnya angka tersebut di proporsionalkan terhadap Skala dampak (MMI) dari hasil analisis skenario.

PROYEKSI GEMPA BUMI RENUN

No.	Wilayah/Lokasi	Skala MMI*	Jumlah Jiwa	Persentase Terdampak InaRisk	Proposional Persentase Terdampak*	Jiwa Terancam	Meninggal	Hilang	Meng ungsi	Luka Berat	Luka Ringan
1	Kabupaten Dairi	VIII	315,460	110,572	100%	110,572	25	7	33,172	53	115
2	Kabupaten Samosir	VII-VIII	139,337	48,839	100%	48,839	15	2	14,652	25	70
3	Kabupaten Pakpak Bharat	VII-VIII	54,609	19,141	100%	19,141	25	3	5,742	35	100
4	Kabupaten Humbang Hasundutan	VII-VIII	202,299	70,908	100%	70,908	7	-	21,272	17	32
5	Kabupaten Karo	VI-VII	414,429	145,261	60%	87,157	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Tapanuli Tengah	VI-VII	374,734	131,348	60%	78,809	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Simalungun	VI-VII	1,021,615	358,086	60%	214,852	-	-	-	-	-
8	Kota Binjai	VI	300,009	105,156	40%	42,062	-	-	-	-	-
9	Kota Medan	VI	2,494,512	874,351	40%	349,741	-	-	-	-	-
10	Kabupaten Deli Serdang	VI	1,953,986	684,892	40%	273,957	-	-	-	-	-
11	Kabupaten Serdang Bedagai	VI	667,998	234,140	40%	93,656	-	-	-	-	-
12	Kota Tebing Tinggi	VI	177,785	62,315	40%	24,926	-	-	-	-	-
13	Kota Pematang Siantar	VI	274,056	96,059	40%	38,424	-	-	-	-	-
14	Kabupaten Batu Bara	VI	416,367	145,941	40%	58,376	-	-	-	-	-

No.	Wilayah/Lokasi	Skala MMI*	Jumlah Jiwa	Persentase Terdampak InaRisk	Proporsional Persentase Terdampak*	Jiwa Terancam	Meninggal	Hilang	Meng ungsi	Luka Berat	Luka Ringan
15	Kabupaten Asahan	VI	787,681	276,090	40%	110,436	-	-	-	-	-
16	Kota Tanjung Balai	VI	179,748	63,003	40%	25,201	-	-	-	-	-
17	Kabupaten Tapanuli Utara	VI	318,424	111,611	40%	44,644	-	-	-	-	-
18	Kabupaten Toba	VI	212,133	74,355	40%	29,742	-	-	-	-	-
19	Kota Sibolga	VI	90,366	31,674	40%	12,670	-	-	-	-	-
20	Kabupaten Langkat	V-VI	1,039,926	364,504	10%	36,450	-	-	-	-	-
21	Kabupaten Labuhan Batu Utara	V-VI	390,954	137,033	10%	13,703	-	-	-	-	-
Jumlah		V-VIII	11,826,428	4,145,281	-	1,784,266	72	12	74,838	130	317

* Skala MMI yang dihasilkan dari Analisis Skenario

** Proporsional persentase antara persentase terdampak InaRisk (35%) terhadap Skala MMI hasil Skenario

PROYEKSI GEMPA BUMI MEGATRUST (DISERTAI GELOMBANG TSUNAMI)

Adapun asumsi yang digunakan dalam Proyeksi Gempa bumi Gempa bumi Mega Trust yang disertai gelombang Tsunami, Wilayah Dan Penduduk Terdampak yaitu menggunakan dasar asumsi risiko gempa bumi InaRisk yakni sebesar 35% atau 146,206 Jiwa dari total jumlah Penduduk 16 kabupaten/kota yang terpapar di Provinsi Sumatera Utara atau berjumlah 9,774,625 Jiwa (Data BPS, 2023), selanjutnya angka tersebut di proporsionalkan terhadap Skala dampak (MMI) dari hasil analisis skenario.

No.	Wilayah/Lokasi	Skala MMI*	Jumlah Jiwa	Persentase Terdampak InaRisk	Proposional Persentase Terdampak*	Jiwa Terancam	Meninggal	Hilang	Mengungsi	Luka Berat	Luka Ringan
1	Kabupaten Nias Selatan	VI-VIII	315,460	3,051	70%	2,136	45	15	641	40	115
2	Kabupaten Nias	VI	139,337	1,348	50%	674	5	-	202	25	63
3	Kabupaten Nias Barat	VI	54,609	528	40%	211	2	-	63	35	83
4	Kota Gunung Sitoli	VI	202,299	1,957	40%	783	7	-	43	17	32
5	Kabupaten Nias Utara	VI	414,429	4,009	40%	1,603	4	-	20	-	13
6	Kabupaten Mandailing Natal	VI	374,734	3,625	50%	1,812	33	12	544	35	73
7	Kabupaten Tapanuli Tengah	V	1,021,615	9,882	10%	988	-	-	-	-	-
8	Kota Sibolga	V	300,009	2,902	10%	290	-	-	-	-	-
9	Kabupaten Tapanuli Selatan	V	2,494,512	24,129	10%	2,413	-	-	-	-	-
10	Kota Padang Sidempuan	V	1,953,986	18,900	10%	1,890	-	-	-	-	-
11	Kabupaten Padang Lawas	V	667,998	6,461	10%	646	-	-	-	-	-
12	Kabupaten Tapanuli Utara	V	177,785	1,720	10%	172	-	-	-	-	-
13	Kabupaten Padang Lawas Utara	V	274,056	2,651	10%	265	-	-	-	-	-

No.	Wilayah/Lokasi	Skala MMI*	Jumlah Jiwa	Persentase Terdampak InaRisk	Proposional Persentase Terdampak* *	Jiwa Terancam	Meninggal	Hilang	Mengungsi	Luka Berat	Luka Ringan
14	Kabupaten Labuhan Batu Utara	V	416,367	4,027	10%	403	-	-	-	-	-
15	Kabupaten Labuhan Batu	IV	787,681	7,619	5%	381	-	-	-	-	-
16	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	IV	179,748	1,739	5%	87	-	-	-	-	-
Jumlah		IV-VIII	9,774,625	94,548	-	14,755	96	27	1,513	152	379

LAMPIRAN 3

SUSUNAN PELAKSANA TUGAS

1. Susunan Pelaksana

No.	Tugas/ Posisi	Institusi (Lembaga)
BIDANG PENGENDALI, KOORDINASI DAN KOMUNIKASI		
1	Unit PENGENDALIAN DAN KOORDINASI	
	Pemimpin (lead)	: BPBD (Sekda selaku kepala BPPD ex officio)
	Pendukung	: FORKOPIMDA
2	Unit HUMAS	
	Pemimpin (lead)	: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik
	Pendukung	: TNI/POLRI, Satpol PP, BPS
3	Unit KEAMANAN	
	Pemimpin (lead)	: POLRI
	Pendukung	: TNI, Satpol PP, Tokoh Masyarakat (Pemangku Wilayah)
4	Unit PERWAKILAN INSTITUSI (Lembaga)	
	Pemimpin (lead)	: Kepala Bagian Humas dan Protokoler
	Pendukung	: Semua Institusi (sesuai kebutuhan), TNI/POLRI, Satpol PP, BPBD, Dinas PUPR
BIDANG PERENCANAAN lead TNI		
1	Unit ANALISIS	
	Pemimpin (lead)	: BASARNAS
	Pendukung	: TNI, BPBD, BAPPEDA, LITBANG, DINAS PUPR
2	Unit TENAGA AHLI	
	Pemimpin (lead)	: BMKG
	Pendukung	: DINAS PENDIDIKAN, BPS, PERGURUAN TINGGI
BIDANG OPERASI Lead BASARNAS		
1	Unit SARANA DAN PRASARANA VITAL	
	Pemimpin(lead)	: DINAS PUPR
	Pendukung	: PLN, PDAM, DINAS PERKIM, TELKOM
2	Unit PENANGANAN PENGUNGSI	
	Pemimpin (lead)	: DINAS SOSIAL
	Pendukung	: BPBD, RELAWAN, DINAS PERKIM, DINAS PU, DINKES, DUKCAPIL, KEMENAG, BKKBN
3	Unit KESEHATAN	
	Pemimpin (lead)	: DINAS KESEHATAN
	Pendukung	: PMI, TNI, POLRI, Rumah Sakit Umum / Swasta
4	Unit PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI	
	Pemimpin (lead)	: BASARNAS
	Pendukung	: TNI, POLRI, SATPOLPP, LINMAS, PMI
5	Unit TRANSPORTASI	
	Pemimpin (lead)	: DINAS PERHUBUNGAN
	Pendukung	: SYAHBANDAR, TNI, POLRI, PELNI, PELINDO
6	Unit PENANGANAN WISATAWAN ASING	
	Pemimpin (lead)	: DINAS PARIWISATA
	Pendukung	: IMIGRASI, DINKES
BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN Lead BPBD		
1	Unit PERGUDANGAN lead DINSOS	
	Pemimpin (lead)	: DINAS SOSIAL
	Pendukung	: BPBD, BULOG
2	Unit DAPUR UMUM	
	Pemimpin (lead)	: DINAS SOSIAL
	Pendukung	: DINSOS, RELAWAN, MASYARAKAT
3	Unit PERALATAN	
	Pemimpin (lead)	: DINAS PUPR
	Pendukung	: TNI, POLRI, DINAS LHK, PERUSAHAAN SWASTA
4	Unit LAYANAN LOGISTIK	

No.	Tugas/ Posisi		Institusi (Lembaga)
	Pemimpin (lead)	:	BPBD
	Pendukung	:	BPKAD
5	Unit KOMUNIKASI		
	Pemimpin (lead)	:	DINAS KOMINFO
	Pendukung	:	TELKOM, ORARI, RAPI, RRI
BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN Lead BPBD			
1	Unit BENDAHARA		
	Pemimpin (lead)	:	BPBD
	Pendukung	:	BPKAD
2	Unit PELAPORAN		
	Pemimpin (lead)	:	BPBD
	Pendukung	:	BPKAD
3	Unit ADMINISTRASI		
	Pemimpin (lead)	:	BPBD
	Pendukung	:	BPKAD

2. Susunan Tupoksi

Kelompok	Organisasi	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
OPD	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provsu	1. Membantu BPBD dalam Penyusunan Rencana Operasi tanggap darurat 2. Mengkoordinir dalam menentukan kawasan rawan bencana	1. Membantu BPBD dalam Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2. Review perencanaan pembangunan 3. Pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 4. Bappelitbang bersama tim TAPD melakukan koordinasi dengan bersinergi dalam menentukan tipe bencana seperti mendesak atau tidak sehingga pengguna anggaran lebih tepat,
	BPBD Provsu	1. Koordinasi penanganan kedaruratan bencana 2. Pemantauan informasi kebencanaan 3. Penyebarluasan peringatan dini 4. Penyiapan peralatan dan logistic 5. Penyiapan jalur evakuasi dan tempat pengungsian 6. Penugasan Satuan Tugas Reaksi Cepat 7. Analisis kemampuan sumberdaya alam maupun buatan 8. Analisis lingkup bencana, jumlah korban, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan 9. Penetapan status darurat bencana	1. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi 2. Pemulihan sosial dan ekonomi 3. Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi 4. Peningkatan sosial dan ekonomi Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur tentang

Kelompok	Organisasi	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
		10. Mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando tanggap darurat 11. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 12. Evakuasi, dan penempatan pada lokasi aman Koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar penyintas 13. Penilaian kebutuhan pasca bencana 14. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar	pengelolaan risiko bencana. 5. Melaksanakan Jitupasna
	Dinas Sosial Provsu	1. Memberikan bantuan logistik/membangun dapur umum; 2. Memfasilitasi <i>safe house</i> 3. Penyediaan air bersih 4. Membagi <i>kit wad</i> untuk bayi/anak/dewasa	1. Mendata keluarga/korban yang masih tinggal di pengungsian 2. Menyiapkan logistik bagi yang masih tinggal 3. Memberikan terapi okupasi agar korban dapat hidup mandiri pasca bencana.
	Dinas Komunikasi dan Informasi Provsu	1. Mengirim tenaga peliput untuk mendokumentasi kejadian yang sebenar-benarnya 2. Memberitakan dan menceritakan informasi yang didapat melalui televisi dan media sosial, media cetak 3. Melakukan dokumentasi berita bencana Gempa bumi	1. Pengolahan data hasil dari liputan yang akan dipublikasikan melalui <i>press release</i> dan media massa
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu	1. Fasilitasi Pendataan kerusakan bangunan;	1. Rehabilitasi rumah
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu	1. Mobilisasi alat berat untuk penanganan darurat Gempa bumi 2. Penyiapan tempat pengungsian	1. Rehabilitasi jalan jembatan dan sumberdaya air 2. Membuat tabulasi penanganan terhadap

Kelompok	Organisasi	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
		3. Pelaksanaan penyediaan aksesibilitas jalan menuju lokasi bencana Gempa bumi 4. Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah bencana Gempa bumi 5. Penyediaan tempat pengungsian 6. Membangun dan mengembalikan fungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya 7. Pembangunan hunian sementara	bangunan yang terdampak Gempa bumi 3. Perbaikan lingkungan daerah bencana 4. Perbaikan sarana dan prasarana umum 5. Pembangunan hunian sementara 6. Perhitungan anggaran biaya rehab/rekonstruksi jalan dan jembatan 7. Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat, prasarana transportasi 8. Perbaikan hunian 9. Pembangunan hunian tetap 10. Pembangunan sarana pelayanan publik 11. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana 12. Relokasi rumah masyarakat terdampak bencana 13. Rehabilitasi rumah warga terdampak bencana

Kelompok	Organisasi	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultural Provsu	1. Pemenuhan kebutuhan pangan	1. Kajian daerah terpapar dalam aspek wilayah pertanian
	Dinas Pendidikan Provsu	1. Meliburkan aktivitas sekolah atau 2. Melaksanakan sekolah daring	1. Mendata gedung yang rusak (bangunan sekolah-sekolah)
	Dinas Kesehatan Provsu	1. Membuka posko kesehatan; 2. Mobilisasi petugas medis 3. Penyaluran logistik kesehatan (alkes dan obat-obatan) 4. Aktivasi klaster kesehatan	1. Pelayanan dan Pendampingan Psikososial 2. Sanitasi Lingkungan (Air bersih, jamban, dll) 3. Perbaikan pusat layanan kesehatan 4. Pembangunan pusat layanan kesehatan 5. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu	1. Penanganan pencegahan konflik pada saat pemberian logistik di daerah yang mengalami bencana; 2. Meningkatkan kewaspadaan dini dalam menangani konflik sosial dimasyarakat; 3. Mengkoordinir forum-forum dan Ormas yang terdaftar dalam membantu penanganan saat darurat; 4. Memobilisasi tenaga dan SDM pada saat darurat 5. Mendukung dengan memberikan fasilitas dalam penanganan saat darurat	1. Memantau perkembangan agar tidak menjadi konflik sosial di masyarakat

Kelompok	Organisasi	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
	Satuan Pamong Provsu Polisi Praja	1. Penyelenggaraan trantibum dan tranmas 2. Distribusi air bersih 3. Pendataan korban jiwa 4. Pengiriman logistik 5. Mengoptimalkan pengamanan aset -aset pemerintah 6. Pengamanan aset pemerintah 7. Penegakan Perda dan Perkada 8. Mendirikan <i>Shelter</i>/Huntara	1. Pengamanan aset pemerintah dan masyarakat
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1. Perbaikan infrastruktur pariwisata 2. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 3. Perbaikan layanan destinasi wisata
	Dinas Perhubungan Provsu	1. Pengerahan kendaraan / angkutan untuk evakuasi, distribusi logistik 2. Pembuatan rambu jalan dan rambu tempat tertentu 3. Melakukan Rekayasa Lalu Lintas 4. Koordinasi dengan dishub di lokasi bencana untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan: pelaksanaan rekayasa lalulintas, peralatan rambu; 5. Penambahan personil sesuai kebutuhan	1. Pemulihan pelayanan transportasi umum 2. Perbaikan pelayanan transportasi umum 3. Memberikan pengaturan trayek sementara 4. Penambahan bus pendukung
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumberdaya Mineral Provsu	1. Berkoordinasi langsung dengan PLN berkaitan dengan energi listrik 2. Penyediaan genset <i>mobile</i>	1. Pemulihan fungsi fasilitas ekonomi 2. Bantuan permodalan dan pendampingan terhadap UKM terdampak bencana 3. Bantuan Sarana Usaha

Kelompok	Organisasi	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu	1. Pendataan korban yang trekena bencana untuk mendapatkan bantuan dari dinas-dinas terkait (implementasi pendataan penduduk)	1. Pemulihan layanan pemerintahan desa
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provsu	1. Perlindungan bagi kelompok rentan pada saat evakuasi. 2. Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak dalam situasi bencana. 3. Pemenuhan kebutuhan bagi kelompok rentan di tempat pengungsian. 4. Perlindungan bagi kelompok rentan dari kekerasan fisik, kekerasan berbasis gender. 5. Perlindungan bagi kelompok rentan.	1. Pemulihan sosial, ekonomi. 2. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
TNI/POLRI	KODAM I/BB, LANTAMAL I, LANUD SOEWONDO	1. Pengiriman armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan. 2. Pengamanan daerah bencana Gempa bumi; 3. Pengamanan aset, penghidupan korban bencana 4. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 5. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat 6.	1. Membantu Pemulihan keamanan dan ketertiban 2. Dukungan pemulihan infrastruktur penting, contoh : jembatan <i>bailey</i> 3. Pembersihan puing-puing reruntuhan.
	POLDA SUMUT	1. Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan. 2. Penegakan hukum. 3. Pengamanan aset penghidupan korban 4. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat. 5. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat. 6. Pemulihan keamanan dan ketertiban. 7. Dukungan pemulihan infrastruktur penting.	1. Pemulihan keamanan, ketertiban dan psikologis masyarakat

Kelompok	Organisasi	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
Organisasi/ Lembaga Vertikal	BMKG Wilayah I Sumatera Utara	1. Peringatan Dini Gempa bumi. 2. Desiminasi info gempa bumi dan cuaca ekstrim 3. Pengukuran skala getaran tanah (intensitas) 4. Memberikan informasi waktu peluruhan gempa bumi susulan (after shock)	1. Melakukan kajian gempa susulan 2. Membantu rekomendasi wilayah berbahaya gempa bumi
	PVMBG	1. Ikut Membantu evakuasi korban.	
	BNPP Medan/ BASARNAS	1. Membentuk organisasi SAR 2. Mendirikan tenda posko SAR 3. Menyusun perencanaan operasi SAR terkait apabila dalam Gempa bumi dicurigai terdapat korban jiwa 4. Membuat jaring komunikasi SAR 5. Membriefing (menugaskan) Rescuer dan SRU (Search Rescue Unit) 6. Melaksanakan operasi SAR (Mencari, menolong, menyelamatkan dan evakuasi) 7. Melaksanakan <i>degriefing</i> (Pengakhiran tugas) dan evaluasi.	1. Mengevaluasi SK Tanggap Darurat 2. Penghentian operasi SAR 3. Pemantauan <i>update</i> kondusu Gempa bumi secara berkala 4. Dokumentasi dan laporan untuk bahan evaluasi
Lembaga Masyarakat	FPRB SUMUT	-	1. Mengkaji dampak bencana Gempa bumi untuk situasi berikutnya
Dunia Usaha	PT PLN	1. Perbaikan jaringan listrik. 2. Penyediaan energi listrik cadangan.	
	Bank Mandiri	1. Berkoordinasi dengan pihak stakeholder internal (cabang, area, region dan kantor pusat) dalam penanggulangan krisis; 2. Melaksanakan kooridnasi penanggulangan dan pengendalian yang terkait dengan keselamatan pegawai saat terjadi bencana.	1. Menjaga keamanan aset Bank Mandiri; 2. Tindak lanjut pasca kritis dengan berkoordinasi dengan stakeholder internal (cabang, area, region dan kantor pusat) dan eksternal

Kelompok	Organisasi	SAAT DARURAT	DARURAT MENUJU PEMULIHAN
		3. Memberikan masukan kepada CMT (crisis managemet team) atas laporan hasil analisa, penilaian serta cakupan insiden yang terjadi di lokasi terdampak.	(basarnas, KNKT, Polisi, Pemadam kebakaran dan pihak terkait lainnya);
	PERUM BULOG	1. Menyediakan beras dipintu gudang Perum Bulog yang ada diwilayah bencana	1. Penyaluran beras pasca bencana (sampai pintu gudang)
	RAPI	1. Menggalang komunikasi dalam bentuk jaringan komunikasi untuk mendata potensi-potensi bencana 2. Membantu jaringan komunikasi radio	

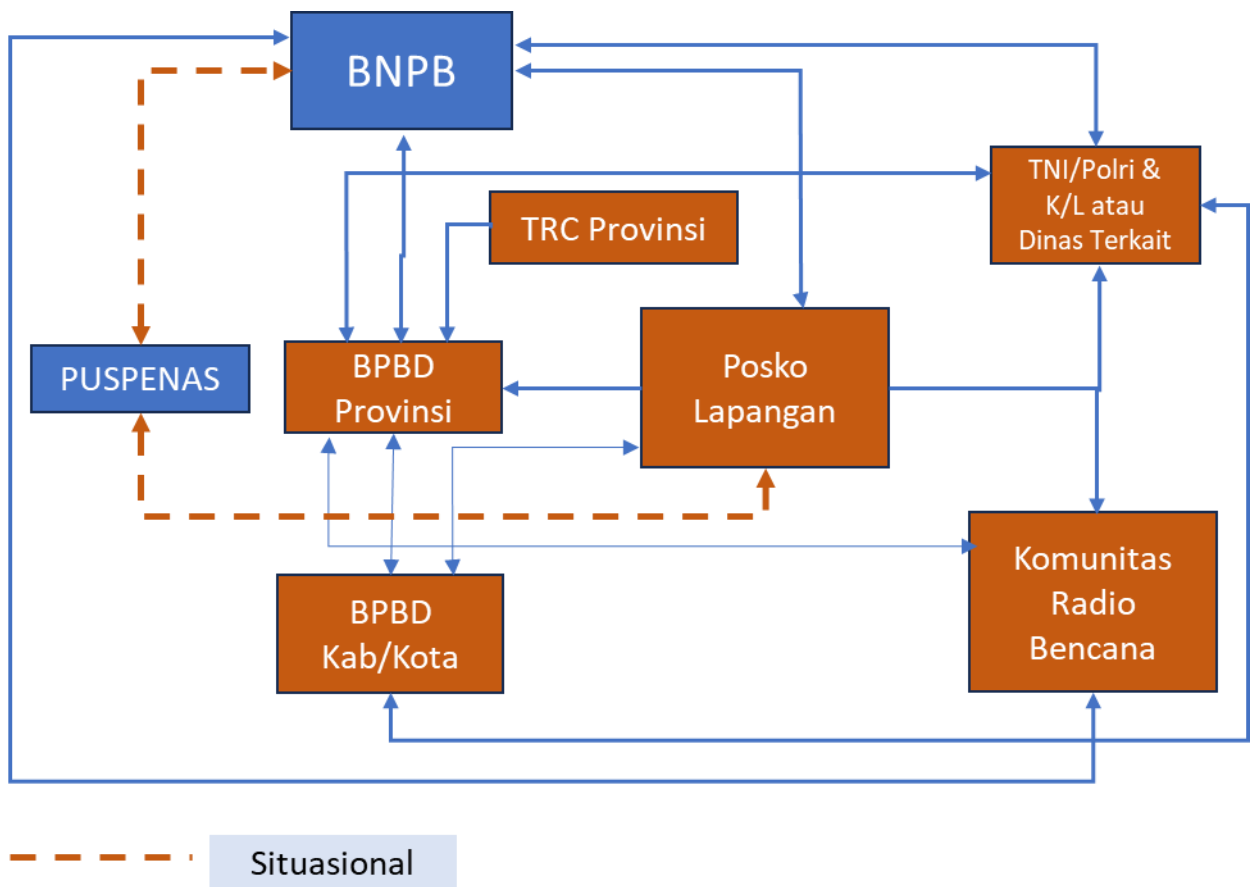
Sumber : Penjaringan melalui FGD, 2023

LAMPIRAN 4

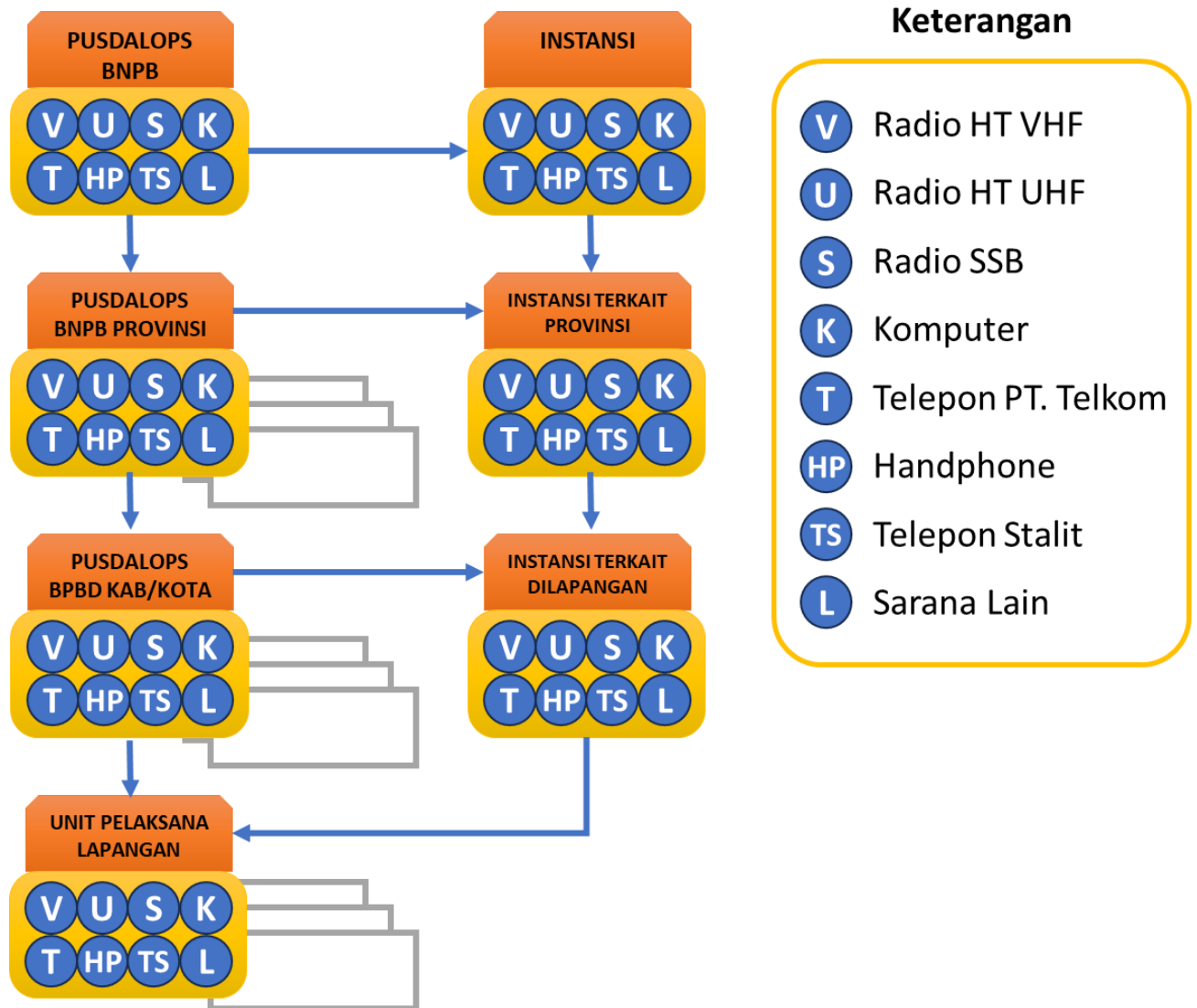
JARING KOMUNIKASI

Jaring Komunikasi Pada Saat Tanggap Darurat :

- Hampir seluruh komponen dapat berkomunikasi pada saat tanggap darurat.
- Untuk PUSPENAS (Pusat Pendamping Nasional) hanya berkomunikasi dengan BNPB dan posko lapangan
- Untuk Tim Reaksi Cepat provinsi hanya dapat berkomunikasi lapangan dengan BPBD provinsi dan Posko
- Koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Polisi dan Kementerian, Lembaga atau Dinas terkait disesuaikan setiap tingkat provinsi/kabupaten.



Konfigurasi Jaring Komunikasi dapat dilihat pada gambar berikut:



LAMPIRAN 5

RENCANA EVAKUASI



Rencana Evakuasi Gempa bumi

No.	Kabupaten	Jalur Evakuasi	Tempat Kumpul Sementara	Tempat Kumpul Akhir	Keterangan
1	Kabupaten Dairi	Semua Jalan menuju pusat kota melalui Jalan Lintas Kabupaten / Provinsi	- Lapangan SDN 030296 Parbekalan (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>) - Halaman Yonif 125 Sidikalang (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>) - Halaman HKBP Parongil (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>) - Halaman SMP Negeri 1 Berampu (<i>Kapasitas ± 300 jiwa</i>) - Halaman HKBP Eben Ezer Sitinjo (<i>Kapasitas ± 200 jiwa</i>) - Halaman SDN 030298 Simallopuk (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>)	- Lapangan Sudirman Sidikalang (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>) - Halaman Yonif 125 Sidikalang (<i>Kapasitas ± 800 jiwa</i>) - Halaman Masjid Agung Sidikalang (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>) - Halaman Sopo Godang HKBP Sidikalang (<i>Kapasitas ± 2000 jiwa</i>) - Halaman Sekolah Santo Petrus Sidikalang (<i>Kapasitas ± 500 jiwa</i>) - Stadion Panji Bako (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>)	- Menghindari area perbukitan curam untuk menghindari longsor - Menghindari bangunan tinggi sekitar kota.
2	Kabupaten Samosir	Semua Jalan menuju pusat kota melalui Jalan Lintas Kabupaten / Provinsi	- Halaman SMA Swasta HKBP Pangururan (<i>Kapasitas ± 300 jiwa</i>) - Halaman Mess Pemprovsu Aek Rangat (<i>Kapasitas ± 200 jiwa</i>) - Halaman Open Stage Tuk Tuk (<i>Kapasitas ± 200 jiwa</i>)	- Tanah Lapang Pangururan (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>) - Pelabuhan Tomok Halaman (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>) - Halaman SMP Negeri 1 Harian (<i>Kapasitas ± 500 jiwa</i>) - Halaman SMP N 3 Harian (<i>Kapasitas ± 300 jiwa</i>)	- Menghindari area perbukitan curam untuk menghindari longsor - Menghindari Tepi Danau Toba - Menghindari bangunan tinggi sekitar kota.

No.	Kabupaten	Jalur Evakuasi	Tempat Kumpul Sementara	Tempat Kumpul Akhir	Keterangan
			• Halaman Gereja HKBP Aek Tintin Limbong (<i>Kapasitas ± 300 jiwa</i>) • Halaman SMP Negeri 1 Sianjur Mulamula (<i>Kapasitas ± 500 jiwa</i>)	• Halaman Pantai Batu Hoda Simanindo (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>)	
3	Kabupaten Pakpak Bharat	Semua Jalan menuju pusat kota melalui Jalan Lintas Kabupaten / Provinsi	• Halaman SD Jambu Mbellang (<i>Kapasitas ± 200 jiwa</i>) • Halaman SMP Negeri 1 Siempat Rube (<i>Kapasitas ± 200 jiwa</i>) • Halaman Lapangan Tinada (<i>Kapasitas ± 500 jiwa</i>) • Halaman SMK Negeri 1 Pergetteng Getteng Sengkut (<i>Kapasitas ± 200 jiwa</i>) • SD Negeri 035945 Binalun (<i>Kapasitas ± 300 jiwa</i>)	• Alun-alun Kota Salak (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>) • Halaman SMP Negeri 1 Salak (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>) • Lapangan Napasengkut (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>) • Tanah Lapang Sukaramai Kerajaan (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>)	• Menghindari area perbukitan untuk menghindari longsor • Menghindari bangunan tinggi sekitar kota.
4	Kabupaten Humbang Hasundutan	Semua Jalan menuju pusat kota melalui Jalan Lintas Kabupaten / Provinsi	• Halaman SMAN 2 Lintong Nihuta (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>) • Halaman SD HKBP 2, Lintongnihuta (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>) • Halaman Kantor Kepala Desa Hutajulu (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>)	• Lapangan Merdeka Dolok Sanggul (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>) • Halaman Hutamas Hall (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>) • Halaman SMPN 2 Lintong Nihuta (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>)	• Menghindari area perbukitan untuk menghindari longsor • Menghindari bangunan tinggi sekitar kota.

No.	Kabupaten	Jalur Evakuasi	Tempat Kumpul Sementara	Tempat Kumpul Akhir	Keterangan
			• Halaman HKBP Resort Sibuluan (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>) • Halaman Puskesmas Pakkat (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>) • Halaman SD Negeri 175790 Hutagalung Parlilitan (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>)	• Halaman Kantor Camat Pollung (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>) • Lapangan Sepak Bola Pulobali Pakkat (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>) • Halaman SDN 175792 Sibuluan (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>)	
5	Kabupaten Karo	Semua Jalan menuju pusat kota melalui Jalan Lintas Kabupaten / Provinsi	• Halaman SMA Negeri 1 Berastagi (<i>Kapasitas ± 300 jiwa</i>) • Halaman Lapangan Kuning Laubaleng (<i>Kapasitas ± 200 jiwa</i>) • Halaman SD Negeri 1 Kabanjahe (<i>Kapasitas ± 300 jiwa</i>) • Halaman SMA Negeri 1 Berastagi (<i>Kapasitas ± 500 jiwa</i>) • Halaman Lapangan Bola Jaranguda (<i>Kapasitas ± 700 jiwa</i>)	• Halaman Batalyon Infanteri (YONIF) 125 Si'Mbisa (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>) • Stadion Samura (<i>Kapasitas ± 700 jiwa</i>) • Halaman AKBID PEMDA KARO (<i>Kapasitas ± 800 jiwa</i>) • Halaman Taman Mejuah Juah Berastagi (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>)	• Menghindari area perbukitan untuk menghindari longsor • Menghindari bangunan tinggi sekitar kota.
6	Kabupaten Tapanuli Tengah	Semua Jalan menuju pusat kota melalui Jalan Lintas Kabupaten / Provinsi	• Halaman SD Negeri 152997 Unte Mukkur IV (<i>Kapasitas ± 200 jiwa</i>) • Halaman SD Negeri 1 Barus (<i>Kapasitas ± 300 jiwa</i>)	• Halaman Puskesmas Sibabangun (<i>Kapasitas ± 500 jiwa</i>) • Halaman SMA Negeri 1 Pinangsori (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>)	• Menghindari area perbukitan untuk menghindari longsor • Menghindari bangunan tinggi sekitar kota.

No.	Kabupaten	Jalur Evakuasi	Tempat Kumpul Sementara	Tempat Kumpul Akhir	Keterangan
7	Kabupaten Simalungun	Semua Jalan menuju pusat kota melalui Jalan Lintas Kabupaten / Provinsi	• Halaman SD Negeri 153044 Tumba jae (<i>Kapasitas ± 500 jiwa</i>) • Halaman SMP Negeri 1 RAYA KAB SIMALUNGUN (<i>Kapasitas ± 500 jiwa</i>) • Halaman SMA Negeri 1 Purba (<i>Kapasitas ± 500 jiwa</i>) • Halaman Lapangan Sepak Bola Serbelawan (<i>Kapasitas ± 500 jiwa</i>) • Halaman Lapangan bola Tiga Dolok (<i>Kapasitas ± 500 jiwa</i>) • Halaman Lapangan Bola Sarimatondang Sidamanik (<i>Kapasitas ± 500 jiwa</i>)	• Halaman Masjid Taqwa Hutabalang (<i>Kapasitas ± 800 jiwa</i>) • Halaman Kantor Bupati Simalungun (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>) • Halaman Pantai Bebas Parapat (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>) • Halaman SMP Negeri 1 Dolok Pardamean (<i>Kapasitas ± 500 jiwa</i>) • Halaman Lapangan Merdeka Saribudolok (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>) • Halaman Stadion Kota Perdagangan (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>)	• Menghindari area perbukitan untuk menghindari longsor • Menghindari bangunan tinggi sekitar kota.
8	Kabupaten Nias Selatan	Semua Jalan menuju pusat kota melalui Jalan Lintas Kabupaten melalui jalan lintas pantai timur	• Halaman SDN Dharma Caraka (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>) • Halaman Desa Bawomataluo (Lompat Batu) (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>) • Halaman SMP Negeri 1 O'o'u (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>) • Halaman SMA Negeri 1 Somambawa (<i>Kapasitas ± 100 jiwa</i>)	• Halaman Lapangan Orurusa (<i>Kapasitas ± 1000 jiwa</i>) • Halaman Hadesa Amandraya (<i>Kapasitas ± 500 jiwa</i>) • Halaman SD Negeri 076089 Hilimbowo IDANOTAE (<i>Kapasitas ± 500 jiwa</i>)	• Menghindari area perbukitan untuk menghindari longsor • Menghindari bangunan tinggi sekitar kota.

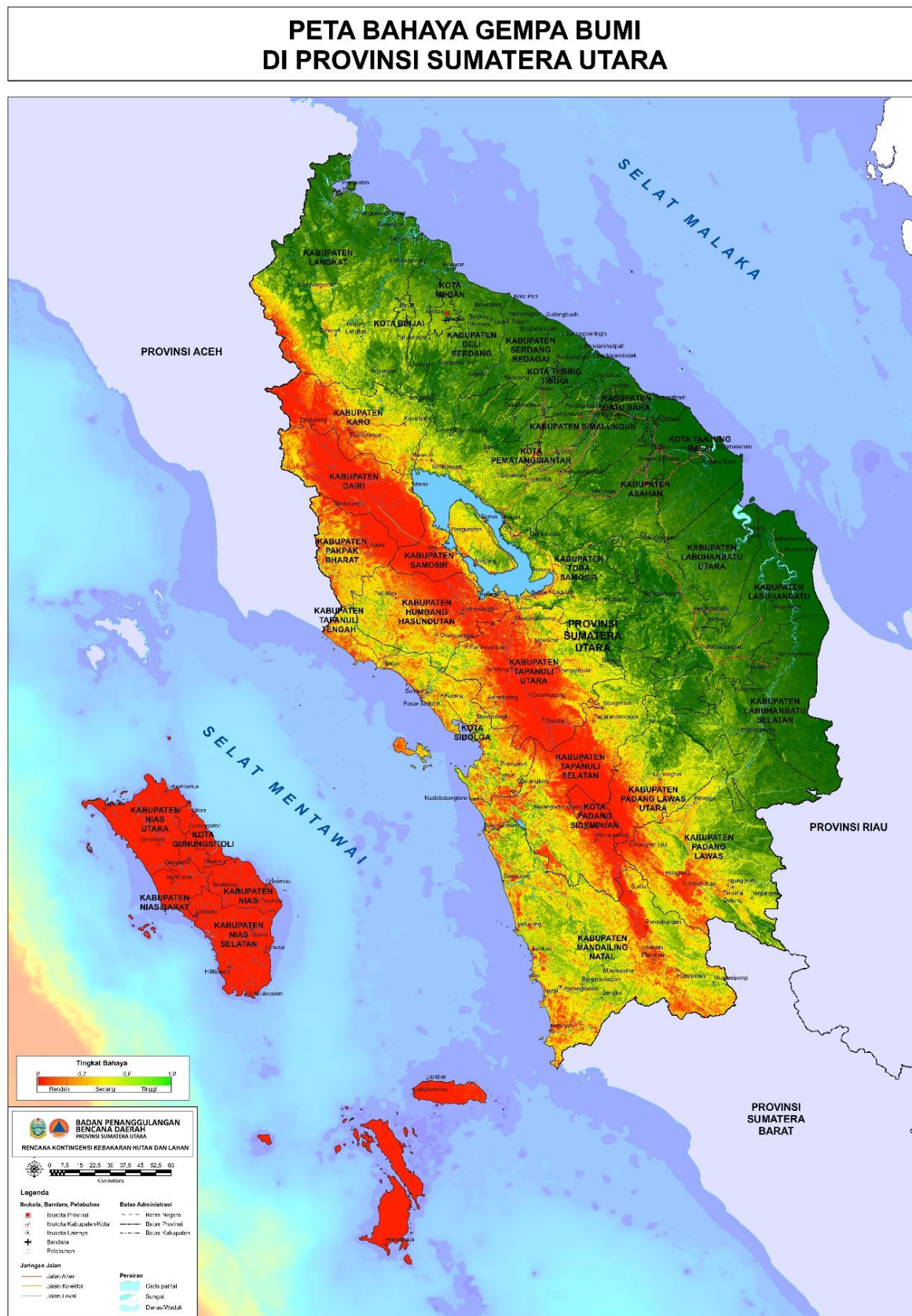
LAMPIRAN 6

ALBUM PETA



1. Peta Bahaya

Peta 0.1 Peta Bahaya Gempa bumi di Provinsi Sumatera Utara



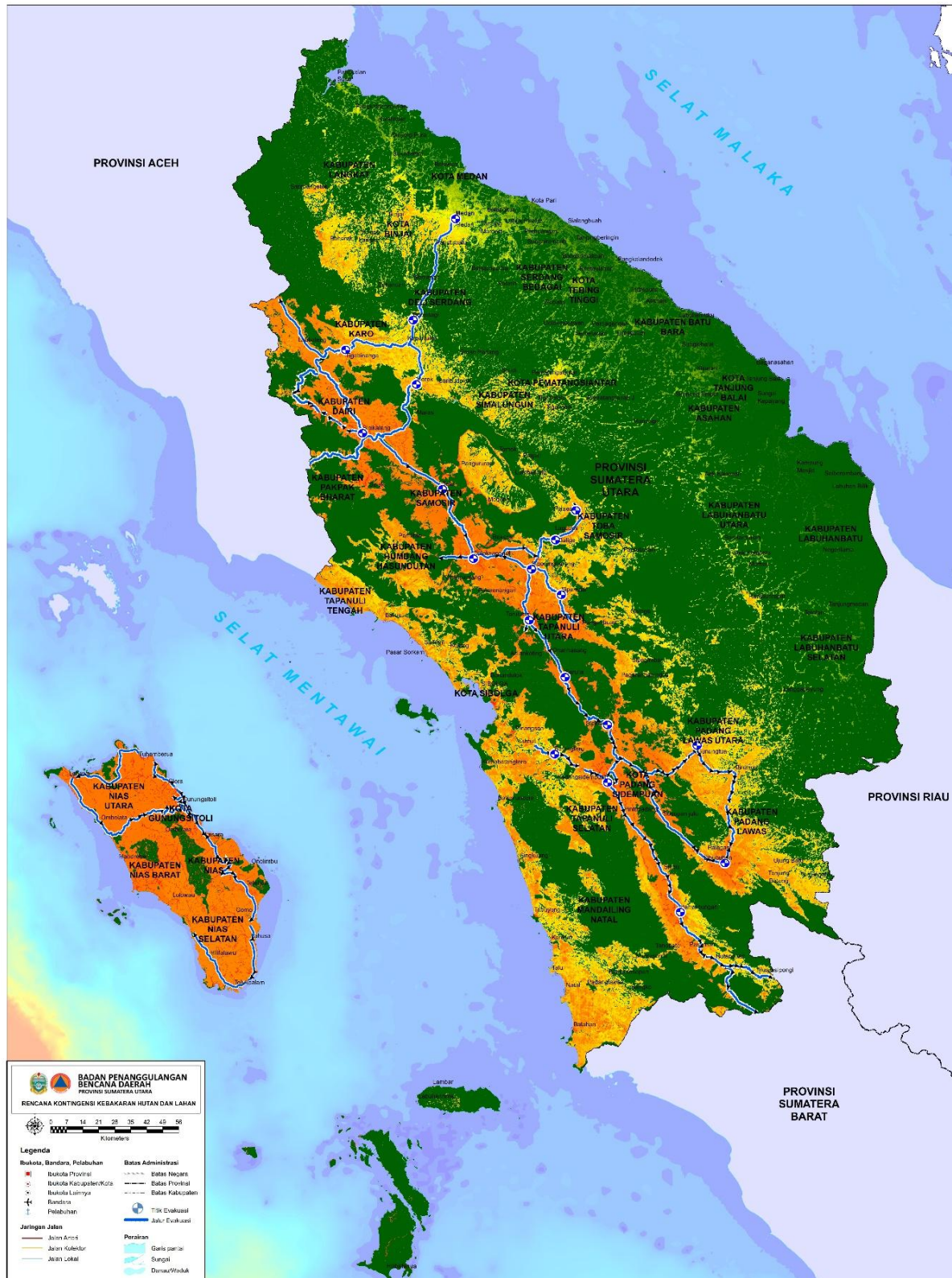
2. Peta Wilayah Terdampak

PETA TERDAMPAK GEMPA BUMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA



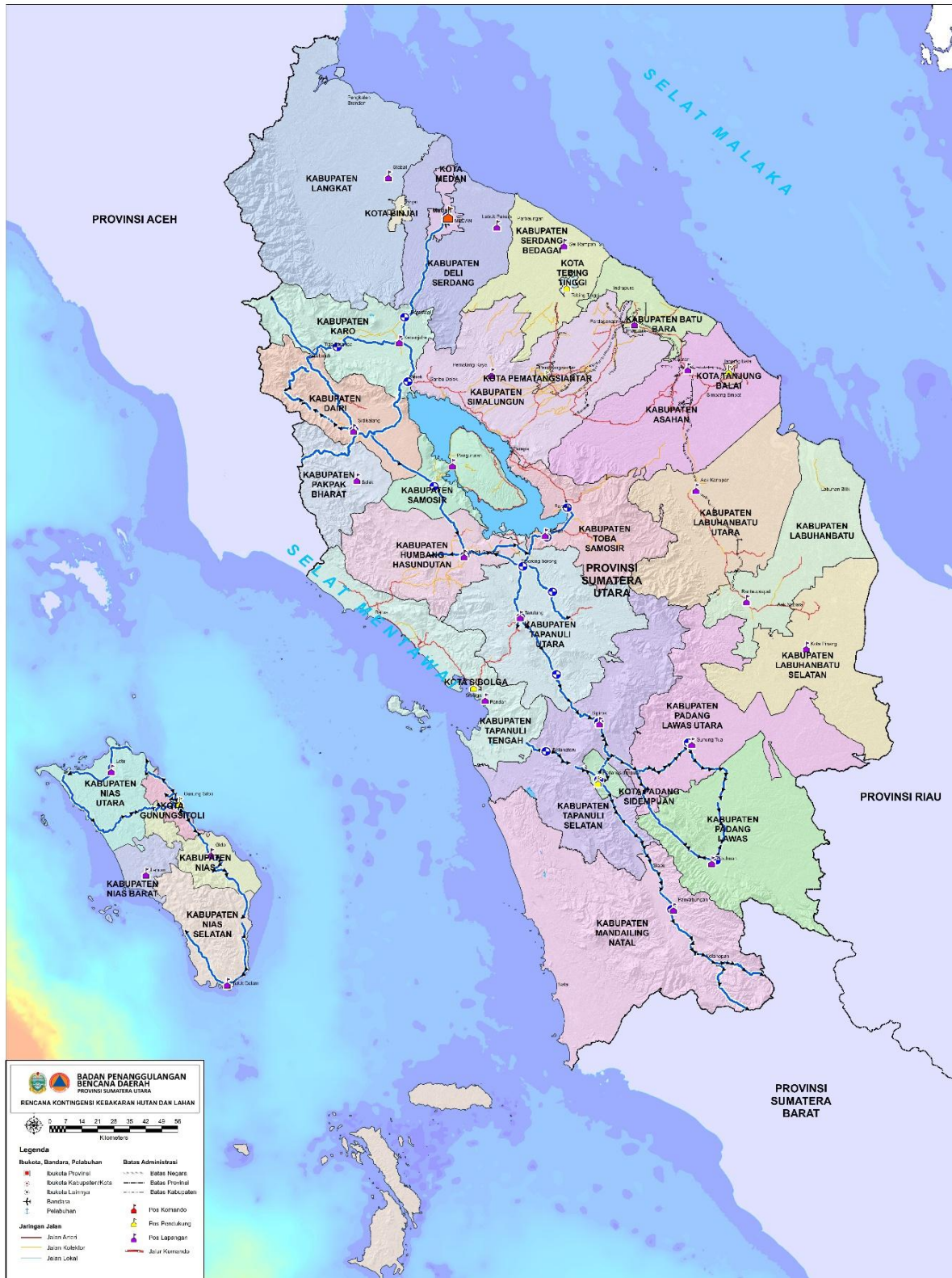
3. Peta Jalur dan Titik Evakuasi

PETA JALUR DAN TITIK EVAKUASI GEMPA BUMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA



4. Peta Operasi Penanganan Kedaruratan

PETA PENANGANAN KEDARURATAN GEMPA BUMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

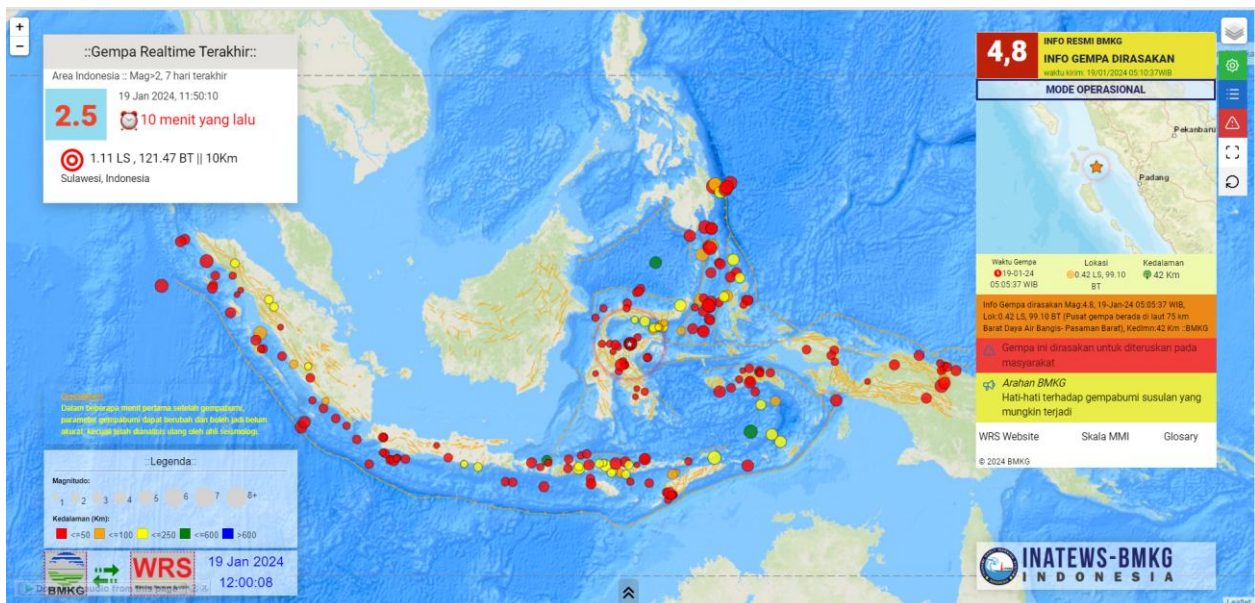


LAMPIRAN 7

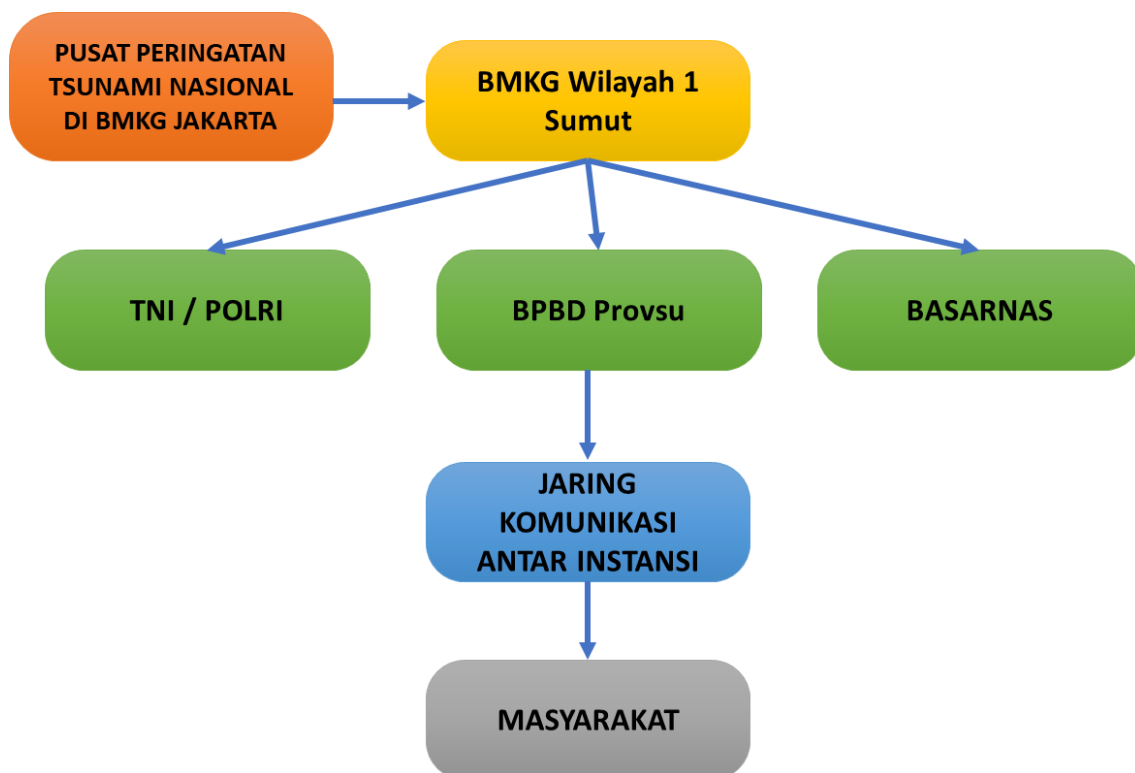
MATA RANTAI PERINGATAN DINI

1. Akses Informasi Peringatan Dini

Informasi	Situs
WRS (Warning Receiver System) BMKG	https://inatews.bmkg.go.id/wrs/index.html
INATEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System) BMKG	https://inatews.bmkg.go.id/eng/realtime



2. Mata Rantai Peringatan Dini



LAMPIRAN 8

ESTIMASI KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN SUMBERDAYA

Tabel 1. Ketersediaan Sumberdaya Manusia (Skenario Gempa bumi)

No	Instansi	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	Status
1	BMKG Wil-I Medan	Administrasi dan Sekretariat	10 Personil				Tercukupi
	POLDA SUMUT		5 Personil	POLDA SUMUT	08126557712		
2	BMKG Wil-I Medan	Publikasi dan Informasi	8 Personil			Publikasi dan Informasi Yang terdiri dari : 1. Prakiraan Cuaca Harian 2. Prakiraan Musim 3. Potensi Bencana Hidrometereologi setiap bulan 4. Informasi iklim dasar harian 5. Laporan pengamatan Hotspot 6. Informasi iklim bulanan 7. Sistem peringatan hutan dan lahan (spartan) 8. Peringatan dini cuaca tiap 3 jam 9. Informasi tentang hari tanpa hujan 10. Press Realease tentang iklim musim kemarau	Tercukupi

No	Instansi	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	Status
	POLDA SUMUT		42 Personil	POLDA SUMUT	0852 4454 7477		
	Dinas Komunikasi dan Informasi Provsu		8 Personil			Tim Peliput	
3	BMKG Wil-I Medan	Perencanaan dan Pendataan			0818 799 301	Perencanaan dan pendataan yang terdiri dari : 1. Data observasi metereologi 2. Data satelit penginderaan jarak jauh (satelit dan radar)	Tercukupi
	POLDA SUMUT		50 Personil	POLDA SUMUT			
4	Kodam I/BB (Skenario : ± 1000 personil pengungsi)	Operasi Tanggap Darurat	8 SST + 1 SSK	1. Makorem Sibolga 2. Kodim Padang Sidimpuan 3. Batalyon 123 Rajawali		SST = Satuan Setingkat Pleton (±240 Personil) SSK = Satuan Setingkat Kompi (±100 Personil)	Tercukupi
	Lanud Soewondo		443 Personil 243 Personil 186 Personil	1. Lanud 2. Kosek 3. Pasgad			
	TNI AL (Lantamal I Belawan)		250 Personil = - 50 Personil - 100 Personil - 100 Personil	- Lanal Tanjung Balai Asahan (Type C) - Yon Marhanlan I Belawan - Yonif 8 Marinir			
	POLDA SUMUT		662 Personil	POLDA SUMUT	0813 3732 1995	DIT SAMAPTA	
			200 Personil	POLDA SUMUT	0812 6806 0001	DITPOLAIRUD	
			97 Personil	POLDA SUMUT	0853 7020 1472	BIDDOKES	
			1.803 Personil	POLDA SUMUT	0852 1523 1993	SATBRIMOB	

No	Instansi	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	Status
	BNPP Medan/BASARNAS		115 Personil : - 25 Personil - 13 Personil - 5 Personil - 24 Personil - 48 Personil	- Tanjung Balai - Belawan - Madina - Sibolga - KANSAR Medan			
	BPBD Provsu		± 160 Personil	BPBD Provsu		Yang terdiri dari 8 Klaster = 1. Logistik 2. Kesehatan 3. Operasi SAR 4. Pendidikan 5. Pemulihan Dini 6. SARPRAS 7. Pengurangan Risiko Bencana 8. Pudalops	
	Perum BULOG		20 Personil 10 Personil 50 Personil	Padang Sidimpuan Sibolga Prov Kanwil			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		20 Personil	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu		10 personil	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu			
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumberdaya Mineral Provsu		20 Personil	Cabdis Padang Sidimpuan, Dairi, Siantar, Labuhanbatu		Total Pegawai 204 Personil	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil		5 Personil				

No	Instansi	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	Status
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu		5 Personil				
	Dinas Sosial Provsu		220 Personil	Dinas Sosial Provsu		20 Personil untuk Rescuer dan Dapur Umum 200 Personil TAGANA	
	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu		10 Personil				
	PTPN II		125 Personil				
	PTPN IV		200 Personil				
	Satuan Polisi Pamong Praja Provsu		200 Personil			Total seluruh Personil 325 Orang Dengan catatan : yang dapat diarahkan dalam penanganan bencana sebanyak 200 Personil	
	Dinas Perhubungan Provsu		6 Personil	UPT ADP. Danau Toba			
	Dinas Pendidikan Provsu		150 Personil				
5	RAPI Sumut	Komunikasi	2.300 Personil			Dari seluruh kab/ko di Provinsi Sumatera Utara	Tercukupi
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provsu	Jitupasna	5 Personil	Bappelitbang Provsu			Tercukupi
	Perum Tirtanadi	Teknisi	8 Personil	Cabang Tapsel			Tercukupi
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu		5 Personil				

Tabel 2. Ketersediaan Peralatan

No	Instansi	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan	Status
A. Kendaraan Roda 4								Tercukupi
1	POLDA SUMUT	Kendaraan Dinas	9 Unit					
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu	Mobil Double Cabin	1 Unit	Baik				
3	BNPP Medan/BASARNAS	Mobil Double Cabin	6 Unit	Baik	Sibolga/Madina		Sibolga 4 Unit Madina 2 Unit	
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu	Double Cabin	1 Unit	Baik				
		Minibus	2 Unit	Baik				
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumberdaya Mineral Provsu	Double Cabin	1 Unit	Baik	Medan			
		Minibus	1 Unit	Baik	Medan			
6	BPBD Provinsi Sumut	Mobil Rescue Komando	1 Unit	Baik				
		Mobil Truk Serbaguna	2 Unit	Baik				
		Mobil Logpal	1 Unit	Baik				
		Mobil Evalog	1 Unit	Baik				
		Mobil Komunikasi	1 Unit	Baik				
7	Dinas Sosial Provsu	Duble Cabin	2 Unit	Baik				
		Minibus	1 Unit	Baik				
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu	Minibus	1 Unit	Baik	Medan			
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu	Minibus	3 Unit	Baik	Medan			
10	Dinas Kesehatan Provsu	Double Cabin	2 Unit	Baik				
		Sepeda Motor (Lapangan)	2 Unit	Baik				
11	Dinas Ketahanan Pangan,	Mobil	3 Unit	Baik				

No	Instansi	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan	Status
	Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu	Kendaraan Roda 2	14 Unit	Baik				
12	Satuan Polisi Pamong Praja Provsu	Truk Dalmas	6 Unit	Baik				
		Mobil Komando	1 Unit	Baik				
		Mobil Patroli	5 Unit	Baik				
13	Dinas Pendidikan Provsu	Minibus	5 Unit	Baik				
		Pick Up	2 Unit	Baik				
14	PTPN IV	Double Cabin	40 Unit	Baik				
15	PTPN II	Double Cabin	25 Unit	Baik				
B. Alat Berat								Tercukupi
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu	Excavator Standart	3 Unit	Baik	Medan			
		Dump Truck	1 Unit	Baik				
2	BNPP Medan/BASARNAS	Truk Compartement	2 Unit	Baik	Medan			
		Truk Ampibi	1 Unit	Baik	Medan			
3	KODAM I/BB	Excavator	1 Unit	Baik	ZIDAM I/BB			
		Dozer	1 Unit	Baik	ZIDAM I/BB			
		Excavator	5 Unit	Baik	YONZIPUR 1/DD			
		Dozer	2 Unit	Baik	YONZIPUR 1/DD			
		Grader	2 Unit	Baik	YONZIPUR 1/DD			
		Dump Truck	14 Unit	Baik	YONZIPUR 1/DD			
4	POLDA SUMUT	Dump Truck	1 Unit	Baik	POLDA SUMUT			
C. Kendaraan Penyedia Air								Tercukupi

No	Instansi	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan	Status
1	PERUM TIRTANADI	Mobil Tangki Air 5000 Ltr	2 Unit	Baik	Medan			
2	BPBD PROVSU	Mobil Tangki Air 5000 Ltr	2 Unit	Baik	Medan			
		Mobil Toilet	1 Unit	Baik				
		Mobil Water Treatment	1 Unit	Baik				
3	POLDA SUMUT	Kendaraan Khusus Water Treatment	1 Unit	Baik	POLDA SUMUT			
D. Kendaraan Dapur Umum								Tercukupi
1	POLDA SUMUT	Kendaraan Khusus Dapur Lapangan	1 Unit	Baik	SATBRIMOB			
		Kendaraan Khusus Dapur Lapangan	1 Unit	Baik	DITSAMAPTA			
2	BNPP Medan/BASARNAS	Dapur Umum	1 Unit	Baik			Untuk TIM SAR	
3	BPBD Provsu	Truk Dapur Umum	1 Unit					
E. Kendaraan Pelayanan Kesehatan								Tercukupi
1	KODAM I/BB	Ambulance	2 Unit	Baik	Denkeslap Kesdam I/BB			
		Ambulance	1 Unit	Baik	Denkesyah 01.04.01 P.S			
		Ambulance	1 Unit	Baik	01.04.02 SBG			
2	BASARNAS	Medis Personal	1 Set	Baik				
3	BANK MANDIRI	Ambulance	1 Unit	Baik	Medan			
4	BPBD Provsu	Mobil Ambulance	1 Unit	Baik				
5	Dinas Kesehatan Provsu	Ambulance Jenazah	1 Unit	Baik				
		Ambulance Basic	4 Unit	Baik				

No	Instansi	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan	Status
F. Peralatan Penyelamatan								Tercukupi
1	POLDA SUMUT	Perahu Karet LCR	2 Unit	Baik				
		Kayak	2 Unit	Baik				
		Life Jacket	29 Unit	Baik				
		Alat Deteksi Korban Vibrascope	2 Set	Baik				
		Alat eteksi Korban Vibraphone	2 Set	Baik				
		Gergaji Mesin Chain Saw	3 Unit	Baik				
		Ring Buoy	3 Buah	Baik				
		Senter Polarion	1 Unit	Baik				
		Rigid Inflatable Boat	1 Unit	Baik				
		Pelampung	18 Unit	Baik				
		Pelampung Otomatis	40 Unit	Baik				
		Lifebuoy	4 Unit	Baik				
		Peralatan Selam	8 Set	Baik				
		DVI	1 Unit	Baik				
		Pelampung Perorangan	86 Buah	Baik				
		Carbiner	36 Buah	Baik				
		Tai Karmantel Besar	1 Utas	Baik				
		Tali Karmantel Kecul	8 Utas	Baik				
		Figour X	25 Buah	Baik				

No	Instansi	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan	Status
		Ransus SAR	1 Unit	Baik				
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu	Perahu Karet	1 Unit	Baik				
3	BNPP Medan/BASARNAS	Kapal 40 m	1 Unit	Baik	Sibolga			
		Heli	2 Unit	Baik	Atang Sandjaja			
		Palsar Air	1 Set	Baik	Sibolga/Madina			
		Palsar Darat/Mountering	1 Set	Baik				
		Alat Ekstrikasi	1 Set	Baik	Sibolga			
		RIB	1 Unit	Baik	Sibolga			
		Perahu Karet	4 Unit	Baik	Sibolga/Madina		SIBOLGA 3 UNIT MADINA 1 UNIT	
		Alkom	1 Set	Baik	Sibolga			
		Kantong Jenazah	100 Lembar	Baik				
4	Dinas Kesehatan Provsu	Perahu Karet	2 Unit	Baik				
		Kantong Jenazah	50	Baik				
5	BPBD Provsu	Perahu Polythelyne	2	Baik				
		Perahu Karet (Slinger)	2	Baik				
		Perahu Lipat	3	Baik				
		Perahu Karet Merk Ocean	1	Baik				
		Perahu Karet isi 6 Merk Zebec	2	Baik				
		Rompi Pelampung	30	Baik				
		Helmet Water Rescue	10	Baik				
		Pompa Kaki Perahu	1	Baik				

No	Instansi	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan	Status
		Dayung	30	Baik				
		Tangki Perahu	9	Baik				
		Pompa Tangan Perahu	1	Baik				
		Selang Tangki Perahu	2	Baik				
		Tali Putih Perahu	1	Baik				
		Trailer	1	Baik				
		Pendayung Perahu Karet	20	Baik				
		Pelampung	25	Baik				
		Tandu Scope	1	Baik				
		Tandu Lipat	1	Baik				
		Tandu Basket	6	Baik				
		Tandu Spinal	7	Baik				
		Tandu Vertical Rescue Repling Orange	1	Baik				
		Tandu Vertical Rescue Repling Kuning	1	Baik				
		Mesin Perahu 40 PK (Mercury)	1	Baik				
		Mesin Perahu 25 PK (Parsun)	1	Baik				
		Mesin Perahu 9.8 PK (Tohatsu)	2	Baik				
		Mesin Perahu 18 PK (Tohatsu)	1	Baik				
		Tali Karmantel Putih (APBD 2021)	3	Baik				

No	Instansi	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan	Status
		Tali Karmantel Kuning (BNPB)	1	Baik				
		Vertical Rescue Back Tali Temali & Carbiner	1	Baik				
		Life Jacket	40	Baik				
		Water Pump	2	Baik				
		Helm Safety	16	Baik				
		Mesin Pompa Air (Honda)	3	Baik				
		Pelampung Air	6	Baik				
		Tali Tambang Hijau	1	Baik				
		Chinsaw (APBD 2021)	5	Baik				
		Mesin Pemotong Batu (Fire Rescue)	1	Baik				
		Selang Air Kain	4	Baik				
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu	Goni/Sand Bag	5000 lembar	Baik				
7	Dinas Perhubungan Provsu	Speedboat	1 Unit	Baik				
G. Peralatan Pengungsian								Tercukupi
1	POLDA SUMUT	MTP (Makanan Siap Saji)	2 Kotak	Baik			DITSAMAPTA	
		Tenda Serbaguna	107 Set	Baik			SATBRIMOB	
2	BNPP Medan/BASARNAS	Tenda Posko	1 Set	Baik dan Lengkap	Sibolga dan Madina			
3	Dinas Kesehatan Provsu	Tenda Rumah Sakit Darurat Lapangan	19 Unit	Baik			Dengan berbagai ukuran	
4	KODAM I/BB	Tenda Serbaguna	8 Set	Baik				

No	Instansi	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan	Status
		Tenda Dapur	5 Set	Baik				
		Tenda Kesehatan	3 Set	Baik				
		Tenda Pleton	8 Set	Baik				
		Velbed	130 Unit	Baik				
5	BPBD PROVSU	Tenda Pengungsi	2 Unit	Baik				
		Tenda Pleton	6 unit	Baik				
		Tenda Keluarga	5 unit	Baik				
		Tenda Keluarga Keong	2	Baik				
		Tenda Keluarga	10	Baik				
		Tenda Posko	2	Baik				
		Tenda Gulung	25	Baik				
		WTP 250 Lt	2	Baik				
		WTP Mini	3	Baik				
		Flexibel Tank 1000 Ltr	2	Baik				
		Flexibel Tank 2000 Ltr	2	Baik				
		Velbed	150	Baik				
		Matras/Alas Tenda	110	Baik				
		Meja Lipat	6	Baik				
		Besi Gantungan Pakaian	3	Baik				
		White Board	1	Baik				
		Indoor AC Portable	2	Baik				
		Outdoor AC Portable	2	Baik				
		Tangga	1	Baik				

No	Instansi	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan	Status
		Konektor/Biru						
6	RAPI SUMUT	Tenda Keluarga	3 Unit	Baik				
H. Peralatan Publikasi dan Informasi								Tercukupi
1	BASARNAS	Humas/Center						
		HT	30 Unit	Baik				
		Drone	3 Unit	Baik			2 Unit Medan 1 Unit Madina	
2	BPBD PROVSU	Drone	2 Unit	Baik				
		HT	10 Unit	Baik				
		Pesawat Radio SSB (Icom M700 Pro)	1	Baik				
		RIG (Icom) K- V8000	1	Baik				
		Power Supply M6 3000	1	Baik				
		Tripot Kamera	2	Baik				
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu	Drone	1 Unit	Baik				
4	POLDA SUMUT	Drone	1 Unit	Baik				
		Pemancar Mobile	2 Unit	Baik				
		HT	10 Unit	Baik				
		Mobil Unit Penerangan Masyarakat	1 Unit	Baik				
4	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu	Drone	1 Unit	Baik				
5	PEMDES	Drone	1 Unit	Baik				
6	KODAM I/BB	HT		Baik				

No	Instansi	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan	Status
7	LANTAMAL I BELAWAN	HT	10 Unit	Baik				
8	Dinas Kesehatan Provsu	HT	10 Unit	Baik				
9	RAPI SUMUT	Pemancar	2 Set	Baik				
10	Dinas Komunikasi dan Informasi Provsu	Kamera	2 Unit	Baik				
		Drone	2 Unit	Baik				
11	Dinas Perhubungan Provsu	HT	10 unit	Baik				
		Drone	1 Unit	Baik				
I. Tempat Pelayanan Kesehatan								Tercukupi
1	BNPP Medan/BASARNAS	Medis Person		Baik				
2	POLDA SUMUT	Poliklinik Biddokes POLDA SUMUT	1 Unit	Baik			BIDDOKES	
		RS TK.II Maskhadiran Medan	1 Unit	Baik			SATBRIMOB	
J. Gedung								Tercukupi
1	BASARNAS	Pos SAR	1 Unit	Baik	Sibolga			
		Pos Unit Siaga	1 Unit	Baik	Madina			
2	KODAM I/BB	Rumkit Tk II 01.05.01	1 Unit	Baik	Medan Kesdam I/BB			
		Rumkit Tk IV 01.07.01	1 Unit	Baik	P. Siantar			
		Rumkit Tk IV 01.07.02	1 Unit	Baik	Binjai			
		Rumkit Tk IV 01.07.03	1 Unit	Baik	P. Sidempuan			

Tabel 3. Ketersediaan Bahan/Sediaan (Habis Pakai)

No	Instansi	Jenis	Jumlah	Satuan	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
Persediaan Alat								
1	BPBD Provinsi Sumatera Utara	Tensi Meter + STETOSKOP + THERM :1 SET	1		Baik			
		Tempat Tidur Pasien	1		Baik			
		Tangga Pasien	1		Baik			
		Tas Siaga Bencana (Warna Merah)	1		Baik			
		Lemari Obat (APBD 2021)	1		Baik			

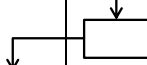
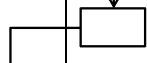
LAMPIRAN 9

SOP/PROTAP BENCANA GEMPA BUMI

SOP / PROTAP Bencana Gempa bumi

1. SOP Tanggap Darurat

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PUSDALOPS-PB & EWS	Bidang Informasi Publik & Humas	Sekretariat	Tim Reaksi Cepat (TRC)	Bidang Operasi	Komandan	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima dan memastikan informasi masuk tentang kejadian bencana dan melaporkan ke Bidang Informasi Publikasi & Humas								Laporan Kejadian Bencana	30 menit	Laporan Kejadian Bencana	Informasi dari BMKG terkait karhutla
2.	Menerima informasi kejadian bencana dan melapor kepada Sekretariat								Laporan Kejadian Bencana	10 menit	Laporan Kejadian Bencana	
3.	Menerima informasi kejadian bencana dan melapor kepada Komandan								Laporan Kejadian Bencana	20 menit	Laporan Kejadian Bencana	
4.	Menerima informasi bencana dan menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan mengeluarkan SPT (Surat Penugasan)								Laporan Kejadian Bencana	30 menit	Surat Penugasan (SPT)	SOP Penugasan Tim Reaksi Cepat
5.	Melakukan kaji cepat dan tepat untuk mendapatkan informasi akurat tentang kejadian bencana, korban dan kerusakan								Laporan Kejadian Bencana	1,5 jam	Hasil kaji cepat	
7.	Mengundang instansi terkait untuk rapat koordinasi								Undangan rapat/via telepon	30 menit	Konfirmasi kedatangan	
8.	Melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam menentukan rekomendasi skala bencana. Jika skala bencana berskala provinsi, maka merekomendasikan kepada Kepala BPBD Provsu. Jika berskala Kabupaten/Kota, maka BPBD PROVSU cukup melakukan pendampingan dan selesai								Hasil Kaji Cepat	1 jam	Rekomendasi skala bencana	
9.	Melaporkan hasil rapat koordinasi dan merekomendasikan status bencana kepada Gubernur								Rekomendasi status bencana	10 menit	Rekomendasi status bencana	

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PUSDALOPS-PB & EWS	Bidang Informasi Publik & Humas	Sekretariat	Tim Reaksi Cepat (TRC)	Bidang Operasi	Komandan	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output	
10.	Menetapkan status bencana berskala provinsi								Rekomendasi status bencana	30 menit	Status Bencana	
11	Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat BPBD Provinsi sesuai jenis, lokasi dan tingkatan bencana								Perintah Komando Tanggap Darurat	1 jam	Pos Komando Tanggap Darurat aktif	
12	Membentuk Pos Lapangan PDB di lokasi bencana								Perintah Komando Tanggap Darurat	6 jam	Pos Lapangan PDB aktif	
13	Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat, dan melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana								Perintah Komando Tanggap Darurat	1 jam	Rencana strategis dan taktis	SOP Pencarian Korban Bencana, SOP Pertolongan Korban Bencana, SOP Evakuasi Korban Bencana,
14	Mengkoordinir pelaksanaan manajemen logistik dan peralatan								Koordinasi BPBD Provsu	2 x 24 jam	Manajemen logistik dan peralatan terkoordinir	SOP Manajemen Logistik dan Peralatan
15	Mengakhiri pos komando tanggap darurat								Surat Perintah Pengakhiran Tim Komando Tanggap Darurat	1 jam	Pos Komando Tanggap Darurat berakhir	
16	Melaporkan telah mengakhiri tanggap darurat bencana kepada Gubernur								Laporan Pengakhiran Tanggap Darurat	45 menit	Laporan Pengakhiran Tanggap Darurat	
17	Membubarkan Pos Komando Tanggap Darurat								Perintah pembubaran Pos Komando Tanggap Darurat	1 jam	Pos Komando Tanggap Darurat bubar	
18	Membuat Laporan hasil penanganan tanggap darurat bencana kepada Gubernur								Laporan Hasil Penanganan Tanggap Darurat Bencana	1 minggu	Laporan Hasil Penanganan Tanggap Darurat Bencana	

2. SOP Penugasan Tim Reaksi Cepat

No	Kegiatan	Pelaksana Tim Reaksi Cepat	Mutu Baku			Keterangan
			Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Tahap persiapan		Informasi bencana dari laporan bidang penanganan darurat, alat komunikasi, perlengkapan administrasi, dokumen dan keuangan, tiket transportasi, peralatan Tim dan sarana pendukung	5 jam	Rencana Kedatangan dan Rencana Aksi	Tahap persiapan meliputi : 1. Informasi awal darurat bencana 2. Penugasan Tim Reaksi Cepat a. Konfirmasi kesediaan perorangan b. Penetapan penugasan 3. Mobilisasi awal a. BPBD Provsu menyelesaikan kelengkapan administrasi, keuangan dan perlengkapan yang diperlukan Tim b. BPBD Provsu menyampaikan informasi penugasan TRC PB kepada pejabat yang berwenang c. Segera setelah penetapan TRC dilakukan pembagian tugas dalam struktur organisasi
2.	Tahap Pelaksanaan		Sarana transportasi, Rencana Kedatangan, Rencana Aksi Tim, Logistik dan peralatan	24 jam	Deskripsi bencana, data-data korban, pengungsi, sumber daya (stock), kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak, Peta bencana, jadwal piket Posko,	Tahap Pelaksanaan meliputi: 1. Pemberangkatan Tim Reaksi Cepat (TRC) Provinsi Sumatera Utara 2. Tim Reaksi Cepat PB Provinsi Sumatera Utara tiba di lokasi bencana a. Mengadakan pertemuan awal dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk b. Memberikan saran yang tepat untuk upaya penanganan darurat bencana c. Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait untuk melengkapi data/informasi bencana d. Menyempurnakan Rencana Aksi Tim e. Melaksanakan pembagian tugas dalam sub Tim sesuai kebutuhan f. Mengirimkan laporan awal kepada Kepala BPBD Provsu dengan tembusan atasan masing-masing anggota Tim, Posko BPBD, melalui telepon, facsimile, HP, sms, email 3. Peninjauan lapangan di lokasi bencana a. Masing-masing sub tim melaksanakan peninjauan lapangan b. TRC PB membantu melalui pola pendampingan dengan sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut yang diselenggarakan pada sore hari c. Setelah selesai pelaksanaan rapat, TRC PB membantu memberikan press release kepada mass media cetak/elektronika d. Mengirimkan laporan Tim tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala BPBD dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim. 4. Evaluasi a. Melanjutkan peninjauan lapangan pada daerah yang belum sempat ditinjau TRC PB Provsu setiap sore hari membantu sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut b. TRC PB Provsu membantu memberikan press release kepada mass media cetak/elektronika c. Mengirimkan laporan Tim tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala BPBD dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim.
3.	Tahap Pengakhiran			3 jam		Tahap pengakhiran meliputi: 1. Pengakhiran tugas TRC PB Provsu berdasarkan perintah dari Kepala BPBD Provsu 2. Persiapan meninggalkan lokasi bencana: a. Melaksanakan pengecekan kelengkapan peralatan Tim dan perlengkapan perorangan b. Menyusun laporan lengkap pelaksanaan tugas TRC PB Provsu c. Menyerahkannya tugas dan dokumen pendukung bencana kepada kepala daerah d. Menghadap Gubernur untuk memohon pamit meninggalkan daerah bencana karena pelaksanaan tugas Tim telah selesai dan menyerahkan laporan sementara hasil pelaksanaan tugas Tim e. TRC PB Provsu meninggalkan daerah bencana dengan sarana transportasi yang telah ditentukan

3. SOP Tahap Persiapan Tim Reaksi Cepat

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Tim Reaksi Cepat	BPBD Provsu	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima informasi awal darurat bencana			Telepon/ HP/ facsimile/ sms/ email	20 menit	Informasi awal bencana
2.	Mengkonfirmasi kesediaan perorangan			Telepon/ HP/ facsimile/ sms/ email	30 menit	Konfirmasi kesediaan personil Tim
3.	Menetapkan penugasan			Komputer, Printer	40 menit	Struktur Organisasi Tim TRC yang akan berangkat ke lokasi bencana
4.	Menyelesaikan kelengkapan administrasi, keuangan dan perlengkapan yang diperlukan Tim.			Panduan administrasi, keuangan dan perlengkapan	45 menit	Kelengkapan administrasi, keuangan, dan perlengkapan
5.	Menyampaikan informasi penugasan TRC PB Provsu kepada pejabat yang berwenang			Surat Penugasan (SPT)	30 menit	Surat Penugasan (SPT)
6.	Segera setelah penetapan TRC dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:			Surat Penugasan (SPT)	45 menit	Pembagian Tugas Tim Reaksi Cepat

4. SOP Tahap Pelaksanaan Tinjauan ke Lokasi Bencana

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Tim Reaksi Cepat (TRC)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Berangkat menuju ibukota Kabupaten/Kota lokasi bencana dengan sarana transportasi yang telah ditentukan.		Sarana Transportasi	6 jam		
2.	Mengadakan pertemuan awal dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk		Surat Penugasan (SPT)	1 jam	Informasi tentang kejadian bencana, korban, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak.	Mengadakan pertemuan awal dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk meliputi: a. Memperkenalkan personil Tim. b. Menyampaikan maksud, tujuan dan tugas Tim untuk melaksanakan tugas di daerah bencana. c. Menghimpun informasi mutakhir tentang kejadian bencana, korban, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak. d. Menyampaikan permintaan personil pendamping
3.	Membantu untuk mengaktifasi Posko Penanggulangan Bencana Provinsi		Peralatan perlengkapan	2 jam	Tempat, alat komunikasi dan sarana pendukung aktif di lokasi bencana	Mengaktifasi Posko Penanggulangan Bencana Provinsi dengan melakukan kegiatan antara lain: a. Penyiapan tempat, alat komunikasi dan sarana pendukung lainnya. b. Penataan peta bencana, deskripsi bencana, data-data korban, pengungsi, sumber daya (stock, telah disalurkan dan masih tersedia), jadwal piket Posko, upaya yang telah dilakukan dan kebutuhan yang mendesak. c. Memberikan asistensi teknis bidang Posko dan arus informasi penanganan bencana. d. Ketua Tim menyerahkan bantuan dukungan BPBD untuk penguatan Posko.
4.	Membantu untuk menyelenggarakan rapat guna memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana.		Laporan bencana terbaru	1 jam	Laporan bencana terbaru	
5.	Memberikan saran yang tepat untuk upaya penanganan darurat bencana		Laporan bencana terbaru	30 menit	Saran	
6.	Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait untuk melengkapi data / informasi bencana		Laporan bencana terbaru	40 menit	Data/Informasi Bencana	
7.	Menyempurnakan Rencana Aksi Tim		Data/Informasi Bencana	45 menit	Rencana Aksi Tim	
8.	Melaksanakan pembagian tugas dalam Sub Tim sesuai kebutuhan.		Rencana Aksi Tim	30 menit	Pembagian Tugas Sub Tim	
9.	Mengirimkan laporan awal kepada Kepala BPBD Provsu dengan tembusan atasan masing-masing anggota Tim, Posko PB melalui telepon/facsimile/HP/sms/email.		Laporan awal penanganan darurat	30 menit	Laporan awal penanganan darurat	
10.	Mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan.		Laporan bencana terbaru	40 menit	Infomasi jumlah korban, lokasi bencana, kerusakann gangguan pelayanan umum	

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Tim Reaksi Cepat (TRC)	Kelengkapan	Waktu	Output	
11.	Mengidentifikasi kebutuhan yang mendesak		Laporan bencana terbaru	45 menit	Kebutuhan mendesak	Identifikasi kebutuhan yang mendesak untuk : a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana dan evakuasi korban bencana b. Pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, air bersih/minum dan sanitasi, pelayanan kesehatan) c. Penampungan sementara (tenda, tikar, genset, MCK, dapur umum) d. Perlindungan terhadap kelompok rentan (balita, ibu hamil, lansia, cacat) e. Pemulihan darurat sarana dan prasarana, antara lain pembersihan puing/lumpur/tanah longsor, jalan/jembatan/tanggul, fasilitas pelayanan kesehatan, transportasi, telekomunikasi dan energi
12.	Membantu melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut yang diselenggarakan pada sore hari untuk membahas melalui pola pendampingan dengan sektor terkait		Laporan bencana terbaru	40 menit	Rencana Tindak Lanjut	Rapat evaluasi dan tindak lanjut membahas : a. Hasil peninjauan di lapangan. b. Pelaksanaan harian penanganan darurat bencana. c. Perkembangan dampak bencana. d. Sumber daya yang masih tersedia, dukungan yang masih dalam perjalanan dan kebutuhan yang mendesak. e. Kendala/hambatan yang dihadapi dan upaya mengatasi. f. Analisa kebutuhan sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana. g. Rencana kegiatan penanganan darurat bencana dan pengerahan sumber daya untuk hari berikutnya.
13.	Membantu untuk memberikan Press Release kepada mass media cetak/elektronika.		Laporan bencana terbaru	30 menit	Press Release	
14.	Mengirimkan laporan Tim tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala BPBD Provsu dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim		Laporan bencana terbaru	20 menit	Laporan bencana terbaru	
15.	Melanjutkan peninjauan lapangan pada daerah yang belum sempat ditinjau.		Laporan bencana terbaru	3 jam	Laporan bencana terbaru	
16.	Membantu sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut setiap sore hari		Laporan bencana terbaru	30 menit	Tindak lanjut	TRC PB Provsu setiap sore hari membantu sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut : a. Melanjutkan peninjauan lapangan. b. Pelaksanaan harian penanganan bencana. c. Perkembangan dampak bencana. d. Sumber daya yang masih tersedia, dukungan yang masih dalam perjalanan dan kebutuhan yang mendesak. e. Kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi. f. Analisa kebutuhan sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana. g. Rencana kegiatan penanganan bencana dan pengerahan sumber daya untuk hari berikutnya.
17.	Membantu untuk memberikan Press Release kepada mass media cetak/elektronika.		Laporan bencana terbaru	20 menit	Press Release	
18.	Mengirimkan laporan Tim tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala BPBD Provsu dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim		Laporan bencana terbaru	25 menit	Laporan bencana terbaru	

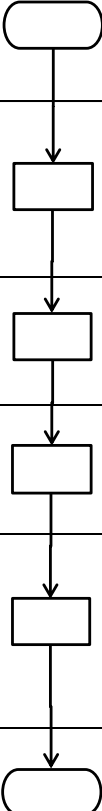
5. SOP Tahap Pengakhiran Tim Reaksi Cepat

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Tim Reaksi Cepat (TRC)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Surat Perintah Pengakhiran dari Kepala BPBD Provsu		Surat Perintah Pengakhiran	20 menit	Surat Perintah Pengakhiran	
2.	Melaksanakan pengecekan kelengkapan peralatan Tim dan perlengkapan perorangan.		Kelengkapan Peralatan	35 menit	Kelengkapan Peralatan	
3.	Menyusun laporan lengkap pelaksanaan tugas TRC PB Provsu		Informasi Penanganan Bencana	45 menit	Laporan TRC PB Provsu	
4.	Menyerahtherimakan tugas dan dokumen pendukung bencana kepada kepala daerah.		Dokumen Pendukung Bencana	20 menit	Dokumen Pendukung Bencana	
5.	Menghadap Gubernur untuk mohon pamit untuk meninggalkan daerah bencana karena pelaksanaan tugas Tim telah selesai dan menyerahkan laporan sementara hasil pelaksanaan tugas Tim		Laporan Sementara Pelaksanaan Tugas Tim	15 menit	Laporan Sementara Pelaksanaan Tugas Tim	
6.	Meninggalkan daerah bencana dengan sarana transportasi yang telah ditentukan		Sarana Transportasi	6 jam	TRC meninggalkan lokasi bencana	
7.	Mengembalikan peralatan inventaris kepada BPBD Provsu		Peralatan dan inventaris BPBD Provsu	40 menit	Peralatan dan inventaris BPBD Provsu	
8.	Menghadap Kepala BPBD Provsu Up. Deputi Bidang Penanganan Darurat untuk laporan selesai melaksanakan tugas dan menyerahkan laporan pelaksanaan tugas Tim		Laporan Pelaksanaan Tugas Tim	25 menit	Laporan Pelaksanaan Tugas Tim	
9.	Menyerahkan bukti-bukti pertanggungjawaban administrasi keuangan kepada pejabat yang berwenang.		Bukti administrasi keuangan	35 menit	Bukti administrasi keuangan	
10.	Masing-masing anggota Tim dari sektor terkait membawa laporan pelaksanaan tugas Tim untuk disampaikan kepada atasan langsungnya.		Laporan Pelaksanaan Tugas Tim	25 menit	Laporan Pelaksanaan Tugas Tim	

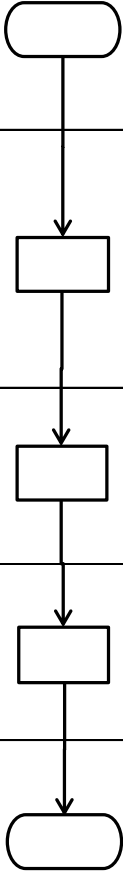
6. SOP Pencarian Korban Bencana

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Komandan Tanggap Darurat	Tim Komando Tanggap Darurat Bencana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mendapat informasi kejadian bencana karhutla yang bersumber dari BMKG dan informasi akurat lainnya			Laporan Kejadian Bencana	15 menit	Laporan Kejadian Bencana	
2.	Memerintahkan tim untuk melakukan pencarian ke lokasi bencana			Surat Penugasan (SPT)	10 menit	Surat Penugasan (SPT)	
3.	Menerima komando dari komandan tanggap darurat dan melakukan pencarian korban ke lokasi bencana			Surat Penugasan (SPT)	24 jam	Pencarian korban bencana	
4.	Memetakan kondisi cuaca, geografis, topografis, dan keadaan awal akibat bencana			Laporan Kejadian Bencana	45 menit	Peta kondisi cuaca, geografis dan topografis	
5.	Menentukan lokasi bencana dan luas dampak bencana serta mengadakan pembagian daerah pencarian dengan membuat batasan lokasi bencana berdasarkan klasifikasi tiga wilayah penanggulangan			Peta kondisi cuaca, geografis dan topografis	50 menit	Lokasi bencana dan luas dampak bencana dan pembagian daerah pencarian	Klasifikasi tiga wilayah penanggulangan sebagai berikut: a. Ring I yaitu daerah tempat terjadinya bencana, kemungkinan ditemukan korban paling banyak dan bahaya serta kemungkinan munculnya bencana susulan b. Ring II yaitu daerah sekitar terjadinya bencana yang masih dimungkinkan ditemukan korban c. Ring III yaitu daerah yang relatif aman untuk dijadikan tempat evakuasi sementara
6.	Memetakan kondisi serta jumlah korban : korban selamat, dan korban sakit.			Laporan Kejadian Bencana	1 jam	Jumlah korban selamat dan korban sakit	Pemetaan kondisi korban sakit menggunakan triase empat tingkat yaitu : a. Hijau : tidak gawat tidak darurat b. Kuning : gawat tidak darurat c. Merah : gawat darurat d. Hitam : meninggal dunia Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan perlu dilakukan identifikasi korban oleh pihak yang berwenang, terutama bagi korban bencana tertentu. (Misalnya: terorisme, kegagalan teknologi, dan lain-lain).
7.	Mengidentifikasi dan mengantisipasi kebutuhan yang diperlukan dalam pertolongan dan evakuasi korban bencana			Data korban bencana	45 menit	Kebutuhan yang diperlukan dalam pertolongan dan evakuasi korban bencana	
8.	Mengidentifikasi sumberdaya lokal dan potensi risiko sekunder bagi keselamatan korban dan penolong			Kebutuhan yang diperlukan dalam pertolongan dan evakuasi korban bencana	40 menit	Sumberdaya lokal dan potensi risiko sekunder bagi keselamatan korban dan penolong	
9.	Melaporkan kegiatan pencarian secara berkala per 3 jam atau per 6 jam atau sesuai kondisi			Laporan kegiatan berkala	15 menit	Laporan kegiatan berkala	

7. SOP Pertolongan Korban Bencana

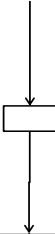
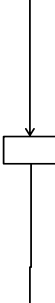
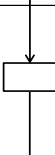
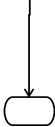
No	Kegiatan	Mutu Baku				Keterangan
		Tim Komando Tanggap Darurat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun rencana pertolongan korban bencana karhutla		Rencana pertolongan korban bencana	30 menit	Rencana pertolongan korban bencana	
2.	Mempelajari batasan klasifikasi tiga wilayah penanggulangan yang telah ditetapkan oleh Tim Pencarian		Infomasi batasan klasifikasi tiga wilayah penanggulangan	20 menit	Infomasi batasan klasifikasi tiga wilayah penanggulangan	
3.	Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana di tempat kejadian		Kotak K3	Kondisional	Pertolongan pertama korban bencana	
4.	Pengobatan sementara kepada korban bencana di tempat kejadian;		Peralatan pengobatan dan obat-obatan	Kondisional	Pengobatan sementara korban bencana	
5.	Melakukan rujukan bagi korban yang memerlukan tindakan lebih lanjut		Surat Rujukan	15 menit	Rujukan korban kritis	
6.	Melaporkan kegiatan pertolongan secara berkala per 3 jam atau per 6 jam atau sesuai kondisi.		Laporan kegiatan berkala	15 menit	Laporan kegiatan berkala	

8. SOP Evakuasi Korban Bencana

No	Kegiatan	Mutu Baku			
		Tim Komando Tanggap Darurat	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Tim evakuasi menuju lokasi bencana karhutla bersama tim pencarian dan tim penolong	 <pre> graph TD Start([Start]) --> Step1[] Step1 --> Step2[] Step2 --> Step3[] Step3 --> Step4[] Step4 --> End([End]) </pre>	Transportasi	6 jam	Tim evakuasi tiba di lokasi bencana
2.	Memindahkan korban bencana keluar dari sumber bencana ke tempat yang lebih aman untuk mendapat tindakan selanjutnya		Transportasi umum dan khusus	24 jam	Korban bencana berada di tempat yang lebih aman
3.	Memberikan pengobatan sementara kepada korban bencana selama dalam perjalanan		Peralatan pengobatan dan obat-obatan	Kondisional	Korban bencana diobati sementara
4.	Memberikan dukungan sosial dan psikologis kepada korban bencana		Ahli sosial dan psikologis	Kondisional	Korban bencana diberi dukungan sosial dan psikologis
5.	Melaporkan kegiatan evakuasi secara berkala per 3 jam atau per 6 jam atau sesuai kondisi		Laporan kegiatan berkala	15 menit	Laporan kegiatan berkala

9. SOP Manajemen Logistik Dan Perencana

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbid Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan proses inventarisasi kebutuhan		-Laporan-laporan - Media Massa	30 menit	Formulir Inventarisasi kebutuhan	1. Proses Inventarisasi ini membutuhkan ketelitian dan keterampilan serta kemampuan untuk mengetahui secara pasti kondisi korban bencana yang akan ditanggulangi 2. Perencanaan inventarisasi kebutuhan terdiri dari: a. Penyusunan standar kebutuhan minimal b. Penyusunan kebutuhan jangka pendek, menengah dan panjang
2.	Melakukan proses penerimaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dimulai dari : 1. Pencatatan atau inventarisasi termasuk kategori logistik atau peralatan 2. Darimana bantuan diterima 3. Kapan diterima 4. Apa jenis bantuannya 5. Seberapa banyak jumlahnya 6. Bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan logistik atau peralatan yang disampaikan 7. Apakah ada permintaan untuk siapa bantuan ini ditujukan		Formulir penerimaan	2 hari	Formulir penerimaan	1. Proses penerimaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dimulai dari pencatatan atau inventarisasi 2. Penerimaan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana dan harus dicatat sesuai formulir 3. Sumber penerimaan : a. Penerimaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari dalam negeri antara lain dari Pemerintah (APBN), masyarakat, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat b. Penerimaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari luar negeri antara lain dari pemerintah, masyarakat, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat 4. Proses penerimaan: a. Proses pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, yang dapat dilakukan melalui pelelangan, pemilihan dan penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Penerimaan logistik dan peralatan melalui hibah dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi pada keadaan darurat
3.	Melakukan proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan disertai dengan berita acara penerimaan logistik dan peralatan pada waktu itu.		Formulir penyimpanan dan pergudangan	5 jam	Formulir penyimpanan dan pergudangan	1. Pencatatan data penerimaan antara lain meliputi : a. Jenis barang logistik dan peralatan b. Berapa jumlahnya c. Bagaimana keadaannya d. Siapa yang menyerahkan dan menerima e. Cara penyimpanan (First-in First-out atau Last-in First-out) 2. Sistem penyimpanan dan pergudangan, antara lain: a. Pemilihan tempat b. Tipe gudang c. Kapasitas dan fasilitas penyimpanan d. Sistem pengamanan dan keselamatan
4.	Lakukan proses pendistribusian dengan membuat terlebih dahulu perencanaan pendistribusian terdiri dari data : siapa saja yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, kapan waktu penyampaian, lokasi cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggungjawab atas penyampaian tersebut.		Formulir Pendistribusian	Kondisional	Formulir Pendistribusian	

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbid Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
4.	Lakukan proses pendistribusian dengan membuat terlebih dahulu perencanaan pendistribusian terdiri dari data :siapa saja yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, kapan waktu penyampaian, lokasi cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggungjawab atas penyampaian tersebut.		Formulir Pendistribusian	Kondisional	Formulir Pendistribusian	
6.	Melakukan proses penerimaan di Tempat Tujuan dengan langkah-langkah: 1. Mencocokkan antara data di manifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima 2. Men-check kembali jenis, jumlah, berat, dan kondisi barang 3. Mencatat tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim dan penerima barang 4. Membuat berita acara serah terima dan bukti penerimaan		Formulir Penerimaan di Tempat Tujuan	2 jam	Formulir Penerimaan di Tempat Tujuan, Bukti Penerimaan	
7.	Lakukan Penghapusan apabila barang logistik dan peralatan yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah		Formulir Penghapusan Logistik dan Peralatan	1 jam	Berita acara penghapusan	1. Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan berita acara penghapusan
8.	Lakukan pertanggungjawaban penanggulangan bencana baik keuangan maupun kinerja, dilakukan pada setiap tahapan proses dan secara paripurna untuk seluruh proses, dalam bentuk laporan oleh setiap pemangku proses secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.		Laporan pertanggung jawaban logistik dan peralatan	1 jam	Laporan pertanggung jawaban logistik dan peralatan	

10. SOP Perencanaan Dan/Atau Inventarisasi Kebutuhan Logistik Dan Peralatan

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbid Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi tentang jumlah korban bencana, pengungsi dan kondisi kerusakan		-Laporan-laporan dari Tim Reaksi Cepat, Media Massa, Instansi Terkait, rapat koordinasi	5 menit	Formulir Inventarisasi kebutuhan	
2.	Menghitung jumlah bantuan logistik atau peralatan yang dibutuhkan		-Laporan-laporan dari Tim Reaksi Cepat, Media Massa, Instansi Terkait, rapat koordinasi	6 menit	Formulir Inventarisasi kebutuhan	
3.	Mengidentifikasi jenis kebutuhan (pangan, sandang, papan)		-Laporan-laporan dari Tim Reaksi Cepat, Media Massa, Instansi Terkait, rapat koordinasi	5 menit	Formulir Inventarisasi kebutuhan	
4.	Menetapkan cara menyampaikan bantuan		-Laporan-laporan dari Tim Reaksi Cepat, Media Massa, Instansi Terkait, rapat koordinasi	3 menit	Formulir Inventarisasi kebutuhan	
5.	Menetapkan penanggung jawab kelompok penerima bantuan		-Laporan-laporan dari Tim Reaksi Cepat, Media Massa, Instansi Terkait, rapat koordinasi	2 menit	Formulir Inventarisasi kebutuhan	
6.	Menentukan kapan bantuan harus disampaikan		-Laporan-laporan dari Tim Reaksi Cepat, Media Massa, Instansi Terkait, rapat koordinasi	3 menit	Formulir Inventarisasi kebutuhan	
7.	Menyusun standar kebutuhan minimal, jangka pendek, menengah, dan panjang		-Laporan-laporan dari Tim Reaksi Cepat, Media Massa, Instansi Terkait, rapat koordinasi	6 menit	Formulir Inventarisasi kebutuhan	

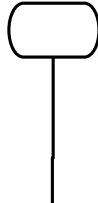
11. SOP Penerimaan Logistik Dan Peralatan

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbid Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mencatat atau inventarisasi yang termasuk kategori logistik dan peralatan yang diterima dari berbagai sumber		Formulir penerimaan logistik dan peralatan	12 jam	Formulir penerimaan logistik dan peralatan	Catatan inventarisasi berisi: dari mana bantuan diterima, kapan diterima, apa jenis bantuannya, berapa banyak jumlahnya, bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikannya, apakah ada permintaan untuk siapa bantuan ditujukan Penerimaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari dalam dan luar negeri antara lain dari Pemerintah (APBN), masyarakat, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat
2.	Menyesuaikan antara kebutuhan dengan logistik dan peralatan yang ada		Formulir penerimaan logistik dan peralatan	6 jam	Formulir penerimaan logistik dan peralatan	Proses pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan yang dilakukan melalui pelelangan, pemilihan, penunjukkan maupun hibah langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi pada keadaan darurat
3.	Menginformasikan logistik dan peralatan sesuai skala prioritas kebutuhan		Formulir penerimaan logistik dan peralatan	3 jam	Formulir penerimaan logistik dan peralatan	
4.	Mengendalikan dan mengawasi penggunaan logistik dan peralatan		Formulir penerimaan logistik dan peralatan	24 jam	Formulir penerimaan logistik dan peralatan	
5.	Menyesuaikan dalam hal penyimpanan		Formulir penerimaan logistik dan peralatan	3 jam	Formulir penerimaan logistik dan peralatan	

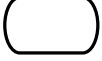
12. SOP Pergudangan dan Penyimpanan

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbid Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mendata penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan		Berita acara penerimaan & bukti penerimaan logistik dan peralatan	40 menit	Berita acara penerimaan & bukti penerimaan logistik dan peralatan	Catatan berisi: jenis barang logistik dan peralatan yang akan dimasukkan ke gudang, jumlahnya, keadaannya, siapa yang menyerahkannya, siapa yang menerima, cara penyimpanan, (First-in First-out) atau (Last-in First-out)
2.	Melakukan prosedur penyimpanan dan pergudangan		Berita acara penerimaan & bukti penerimaan logistik dan peralatan	2 jam	Berita acara penerimaan & bukti penerimaan logistik dan peralatan	Prosedur meliputi: pemilihan tempat, tipe gudang, kapasitas dan fasilitas penyimpanan, sistem pengamanan dan keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku
3.	Melindungi logistik dan peralatan dari kerusakan dan kehilangan atau berkurangnya standar mutu		Berita acara penerimaan & bukti penerimaan logistik dan peralatan	24 jam	Berita acara penerimaan & bukti penerimaan logistik dan peralatan	
4.	Mengetahui dan menjamin ketersediaan pada setiap waktu		Berita acara penerimaan & bukti penerimaan logistik dan peralatan	24 jam	Berita acara penerimaan & bukti penerimaan logistik dan peralatan	

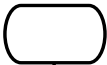
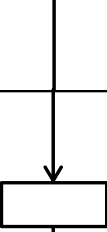
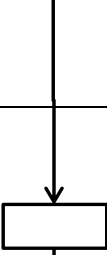
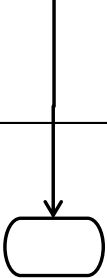
13. SOP Pendistribusian

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbid Logistik dan Peralatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan dengan disertai data pendukung yaitu didasarkan kepada permintaan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana		Data inventarisasi kebutuhan	Kondisional	Rencana pendistribusian	Rencana pendistribusian terdiri dari : siapa yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, kapan waktu penyampaian, lokasi, cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas penyampaian tersebut
2.	Mengetahui sasaran penerima bantuan		Data inventarisasi kebutuhan	Kondisional	Rencana pendistribusian	
3.	Mengetahui jenis dan jumlah bantuan logistik dan peralatan yang harus disampaikan		Data inventarisasi kebutuhan	Kondisional	Rencana pendistribusian	
4.	Merencanakan cara penyampaian atau pengangkutannya		Data inventarisasi kebutuhan	Kondisional	Rencana pendistribusian	

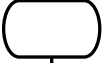
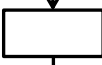
14. SOP Pengangkutan

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbid Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mendata jenis logistik dan peralatan yang diangkut, jumlah, tujuan, siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan termasuk keamanannya, siapa yang bertanggung jawab menyampaikan kepada penerima		Data rencana distribusi	Kondisional	Data Rencana pengangkutan	
2.	Mengangkut dan/atau memindahkan logistik dan peralatan dari gudang penyimpanan ke tujuan penerima		Data Rencana Pengangkutan, Berita acara, Bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut	Kondisional	Berita acara, Bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut	Jenis pengangkutan terdiri dari : angkutan darat, laut, sungai, danau, dan udara. Pemilihan moda angkutan berdasarkan: situasi dan kondisi keadaan darurat, kecepatan distribusi, ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada, kondisi wilayah asal dan tujuan, efektifitas dan efisiensi, keamanan dan kesehatan
3.	Menjamin keamanan, keselamatan, dan keutuhan logistik dan peralatan dari gudang ke tujuan		Berita acara, Bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut	Kondisional	Berita acara, Bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut	

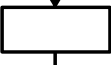
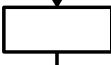
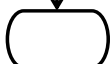
15. SOP Penerimaan di Tempat Tujuan

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbid Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mencocokkan antara data di manifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima		Berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan	40 menit	Berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan	
2.	Menge-check kembali jenis, jumlah, berat, dan kondisi barang		Berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan	30 menit	Berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan	
3.	Mencatat tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim dan penerima barang		Berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan	30 menit	Berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan	
4.	Membuat berita acara serah terima dan bukti penerimaan		Berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan	20 menit	Berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan	

16. SOP Penghapusan

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbid Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengidentifikasi barang logistik dan peralatan yang akan dihapuskan		Data kondisi inventaris logistik dan peralatan	30 menit	Data logistik dan peralatan yang akan dihapus	Barang logistik dan peralatan yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan
2.	Membuat permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan		Komputer, Printer	15 menit	Surat permohonan penghapusan	
3.	Membuat berita acara penghapusan		Komputer, Printer	15 menit	Berita acara penghapusan	

17. Pertanggungjawaban

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbid Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mempertanggung jawabkan seluruh pekerjaan logistik dan peralatan kepada para pemangku kepentingan		Laporan pertanggung jawaban logistik dan peralatan	2 jam	Laporan pertanggung jawaban logistik dan peralatan	
2.	Membuat laporan pertanggung jawaban seluruh pekerjaan logistik dan peralatan kepada para pemangku kepentingan		Komputer, Printer, Berita acara penerimaan dan pengangkutan logistik dan peralatan	1 jam	Laporan pertanggung jawaban logistik dan peralatan	
3.	Mempertanggung jawabkan kepada masyarakat		Laporan pertanggung jawaban logistik dan peralatan	2 jam	Laporan pertanggung jawaban logistik dan peralatan	
4.	Membuat tanda pelacakan apabila terjadi kesalahan		Laporan pertanggung jawaban logistik dan peralatan	40 menit	Laporan pertanggung jawaban logistik dan peralatan	

LAMPIRAN 10

LEMBAR KOMITMEN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

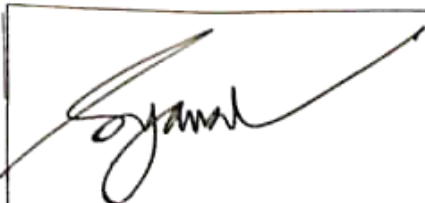
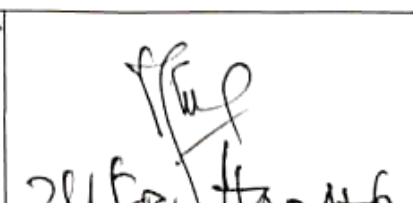
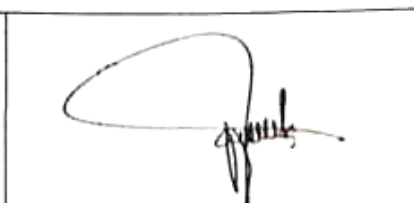
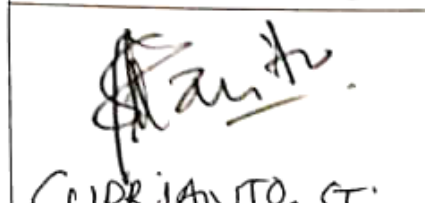
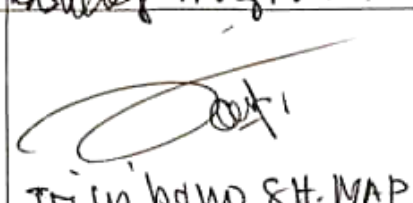
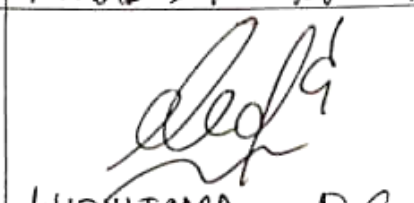
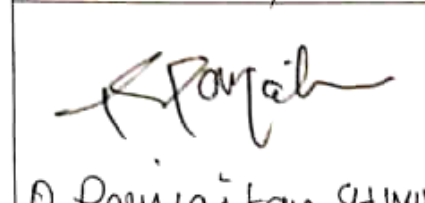
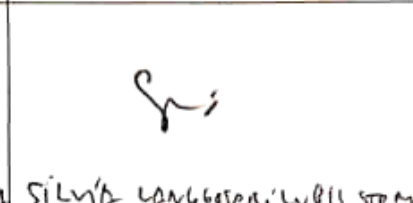
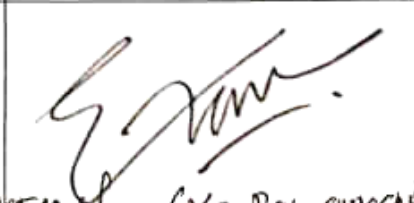
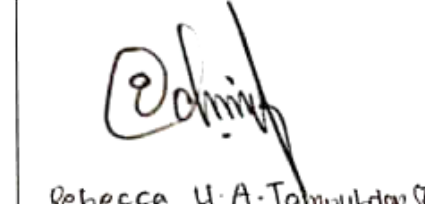
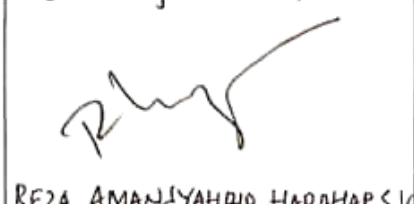
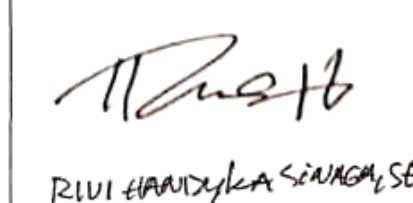
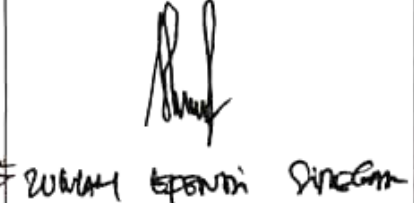
Jalan P. Diponegoro No. 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

LEMBAR KOMITMEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan Langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Hotel Grandhika Jl. Dr. Mansyur No. 169 Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 04 Desember 2023, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini :

NO.	KEGIATAN
1.	Diseminasi Rencana Kontingensi Ancaman Bencana Gempa Bumi
2.	Uji coba Rencana Kontingensi melalui simulasi dan gladi
3.	Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontingensi setidaknya-tidaknya sekali setiap tahun
4.	Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontingensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi
5.	Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana pada saat terjadi bencana
6.	De-Aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakan tidak berlaku jika sampai pada akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana
7.	Aktivasi Kembali rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu-waktu diperlukan

 GUNAWAN HARY MULYA KABW. SMR & KS TIRTAWADI	 IRWAN HASIBUAN KADISLOG LANUD SWO	 Dadang Aprianto Asman PDR
 AMRAN KASD PROPT. BPIP dan MKP	 MITAND A. ALHASYID STAF DINAS PENYADIRAN MAY	 Jones Hendra M Sirait JIT Ahli Muda SDA pada Dinas PUPR ProvSU

 CHAIRUL SYAM PADAN OPS LANTAMAL I	 Zulfari Harahap Kasubag Program	 MANURRAH PAMBATO KABID IPRK BPBD SU
 SUPRIANTO, ST RAPI Sumut/Ketua	 TRI WIBOWO SH. MAP Analis RP-6	 WIDHIATAMA D.C. MAYOR INF / KODAM I/BB
 P. Purnajitana SH. MH Polda Sumut	 SILVIA LANGGOSTARI LUBIS, ST, M ANALIS PEMERIKSAAN UPTANUTAMA	 EXAN Faa Celo-Rajngunegara, SKOM M. AIC Dikeminfo Provsu / Analis Informasi
 Rebecca U.A. Tampukdan, SE Staf Program PHD DUKCARL Provsu	 EDI SYAHJUTRA SUPERVISOR / BANK MANDIRI	 REZA AMANLYAHIDIO HARAHAP, S. KeP. Nf. ANALIS KESEHATAN / DINAS KESEHATAN PROVSU
 Bustami Rangkuti, ST. MT Kabid Perumahan Dinas Pektim Provsu	 RIVI HARADYKA SIVAGA, SE Penegras Lap Kedisiplinan	 WIDHIATAMA D.C. Kabid BPBD Provsu

LAMPIRAN 11

LEMBAR BERITA ACARA

PENYUSUNAN



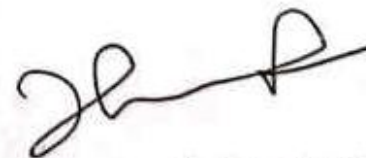
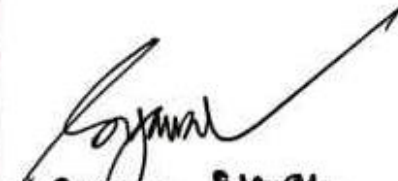


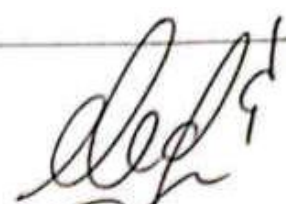
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI
MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI

Telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Menghadapi Bencana Gempa Bumi pada tanggal 07 November 2023 s.d 04 Desember 2023 di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. *Focus Group Discussion* (FGD) telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademisi. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi.

 GUNAWAN HARY MULYA KABID. SMP & K3 TIRTANADI	 IRFAN HASTIAWAN KADISLOG LANUD SMO	 Dadang Apriando Asman PODE
 ASRAN KASI PROPT, OPID dan HKP	 HETANO HAMDAN MASRYID SEKAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	 Jones Hendra M. Sirait JFT Ahli Muda SOA Pd Dumas PUPK Provinsi
 Othman Syawal PAGAN OPS LATAMAL I	 Zulf Husein Kasubbag Penerimaan	 MAWAR ANWAR KABID 2-PK BPD Samudra

 SUPRIANTO, ST RADI SUMUT - KETUS.	 Triumbono SH.MH Andu RPG	 WIDHITAMA D.C. MAYOR INF / KODAM I / RB
 P. Payaitar, SH, MH Polda Sumut	 SILYA LANGGOSARI, LIS, STP, MP ANALIS PEMERIKSAAN KEPRALITEL	 EXAM, COLO. Panggajuk S.KOM MAK DISKOMINFO-SIS/Analisa Data Informasi
 Rebecca Uli A. Tampubolon, SE Staff Program (PMDUKCA PIL PROKU)	 EDI SYAHPUTRA SUPERVISOR / BANK MANDIRI	 REZA AMANUSAHIRIO HARAHUS KEP. NG. ANALIS KESEHATAN / DINAS KESEHATAN PRORS
 Bustami Langkud, ST. MT Kend Perumahan dan Polik Perse	 RIVI HANINDKA SIAWASA, SE ZUMAM EFGNDI SIREGA Panyusun Laporan Kebijakan, BASTO RR BPBD PASRU	 RIVI HANINDKA SIAWASA, SE ZUMAM EFGNDI SIREGA Panyusun Laporan Kebijakan, BASTO RR BPBD PASRU

LAMPIRAN 12

PROFIL LEMBAGA /

ORGANISASI

1. Kodam I Bukit Barisan

A. Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	: Kodam I Bukit Barisan
	Unit/Divisi/Bagian	:
	Alamat	: Jl. Gatot Subroto No.Km. 7, RW.5, Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20122
	No. Telpon/Faksimili	:
	Email	:
2	Narahubung (Contact Person)	: Letkol Kav. Teuku Hamdani
	Jabatan	: Pabendya Wamil Sterdam
	No. Telpon	:
	No. HP	: 082370721974
	Email	:
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	: Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
	Cakupan wilayah kerja	: Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau
B. Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	: Membantu penanggulangan bencana alam baik pada tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	: Mendampingi Pemerintah Daerah dalam upaya kesiapsiagaan terhadap bencana
3	Kepentingan terkait kebencanaan	: Melakukan pengamanan dan penyelamatan serta pengawalan korban dampak bencana
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)	
	Sebelum status bencana ditetapkan	: Mencegah berkembangnya kerugian, baik jiwa maupun harta benda rakyat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat agar tidak menimbulkan akibat yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan bangsa yang dilaksanakan melalui kemampuan pembinaan teritorial dan dukungan
	Dalam status 'siaga darurat'	: 1. Membuat Pemetaan dan Sosialisasi kerawanan/risiko bencana Gempa bumi. 2. Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana Gempa bumi 3. Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah. 4. Penyiapan personil dan peralatan. 5. Peningkatan kapasitas personil. 6. Keterlibatan dalam penyusunan rencana kontingensi.
	Dalam status 'tanggap darurat'	: 1. Pengiriman armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan. 2. Pengamanan daerah bencana Gempa bumi; 3. Pengamanan aset, penghidupan korban bencana 4. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat

			5. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat 6. Pembuatan jalur evakuasi bencana Gempa bumi.
	Dalam status 'transisi darurat'	:	1. Membantu Pemulihan keamanan dan ketertiban 2. Dukungan pemulihan infrastruktur penting, contoh : jembatan <i>bailey</i> 3. Pembersihan puing-puing reruntuhan Gempa bumi.
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)	:	Melakukan pendampingan kepada korban bencana maupun petugas pelaksana pasca bencana.

C. Sumberdaya Organisasi						
1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
	Operasi Tanggap Darurat	8 SST + 1 SSK	1. Makorem Sibolga 2. Kodim Padang Sidempuan 3. Batalyon 123 Rajawali		SST = Satuan Setingkat Pleton (±240 Personil) SSK = Satuan Setingkat Kompi (±100 Personil)	
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Excavator	1 Unit	Baik	ZIDAM I/BB		
	Dozer	1 Unit	Baik	ZIDAM I/BB		
	Excavator	5 Unit	Baik	YONZIPUR 1/DD		
	Dozer	2 Unit	Baik	YONZIPUR 1/DD		
	Grader	2 Unit	Baik	YONZIPUR 1/DD		
	Dump Truck	14 Unit	Baik	YONZIPUR 1/DD		
	Ambulance	2 Unit		Denkeslap Kesdam I/BB		
	Ambulance	1 Unit		Denkesyah 01.04.01 P.S		
	Ambulance	1 Unit		01.04.02 SBG		
	Tenda Serbaguna	8 Set				
	Tenda Dapur	5 Set				
	Tenda Kesehatan	3 Set				
	Tenda Pleton	8 Set				
	Velbed	130 Unit				
	HT					

	Rumkit Tk II 01.05.01	1 Unit		Medan Kesdam I/BB		
	Rumkit Tk IV 01.07.01	1 Unit		P. Siantar		
	Rumkit Tk IV 01.07.02	1 Unit		Binjai		
	Rumkit Tk IV 01.07.03	1 Unit		P. Sidempuan		
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

2. Lanud Soewondo

A. Profil Organisasi			
1	Nama Organisasi	:	Lanud Soewondo
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Letkol Adm. A Rusli
	Jabatan	:	Kadispordirga SWO
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	081264750099
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
	Cakupan wilayah kerja	:	
B. Peran Kebencanaan			
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	membina dan mengoperasikan semua satuan dalam jajarannya, mendukung Operasi Udara satuan lainnya serta membina potensi kedingrintaraan di daerah
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	Mencegah berkembangnya kerugian, baik jiwa maupun harta benda rakyat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat agar tidak menimbulkan akibat yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan bangsa yang dilaksanakan melalui kemampuan pembinaan teritorial dan dukungan
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Membuat Pemetaan dan Sosialisasi kerawanan/risiko bencana Gempa bumi.

			2. Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana Gempa bumi 3. Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah. 4. Penyiapan personil dan peralatan. 5. Peningkatan kapasitas personil. Keterlibatan dalam penyusunan rencana kontingensi.
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Pengiriman armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan. 2. Pengamanan daerah bencana Gempa bumi; 3. Pengamanan aset, penghidupan korban bencana 4. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 5. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat Pembuatan jalur evakuasi bencana Gempa bumi.
	Dalam status 'transisi darurat'	:	1. Membantu Pemulihan keamanan dan ketertiban 2. Pembersihan puing-puing reruntuhan Gempa bumi.
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)		Melakukan pendampingan kepada korban bencana maupun petugas pelaksana pasca bencana.

C. Sumberdaya Organisasi

1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
	Operasi Tanggap Darurat	443 Personil	Lanud			
	Operasi Tanggap Darurat	243 Personil	Kosek			
	Operasi Tanggap Darurat	186 Personil	Pasgad			
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

3. Pangkalan Utama TNI AL I Belawan

A. Profil Organisasi			
1	Nama Organisasi	:	Pangkalan Utama TNI AL I Belawan
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Mayor Chairul Syawal
	Jabatan	:	Paban Ops Lant. I
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	081330785930
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan guna menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur TNI AL, menyelenggarakan patroli keamanan laut di wilayah kerja Lantamal I, dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut di wilayah kerjanya
	Cakupan wilayah kerja	:	
B. Peran Kebencanaan			
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra- Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	Mencegah berkembangnya kerugian, baik jiwa maupun harta benda rakyat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat agar tidak menimbulkan akibat yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan bangsa yang dilaksanakan melalui kemampuan pembinaan teritorial dan dukungan
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Membuat Pemetaan dan Sosialisasi kerawanan/risiko bencana Gempa bumi. 2. Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana Gempa bumi 3. Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah. 4. Penyiapan personil dan peralatan. 5. Peningkatan kapasitas personil. Keterlibatan dalam penyusunan rencana kontingensi.
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Pengiriman armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan. 2. Pengamanan daerah bencana Gempa bumi; 3. Pengamanan aset, penghidupan korban bencana

			4. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 5. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat Pembuatan jalur evakuasi bencana Gempa bumi.
	Dalam status 'transisi darurat'	:	Membantu Pemulihan keamanan dan ketertiban Pembersihan puing-puing reruntuhan Gempa bumi.
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)		Melakukan pendampingan kepada korban bencana maupun petugas pelaksana pasca bencana.

C. Sumberdaya Organisasi						
1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
	Operasi Tanggap Darurat	50 Personil	Lanal Tanjung Balai Asahan (Type C)			
	Operasi Tanggap Darurat	100 Personil	Yon Marhanlan I Belawan			
	Operasi Tanggap Darurat	100 Personil	Yonif 8 Marinir			
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

4. Polda Sumatera Utara

A. Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	: Polda Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:
	Alamat	:
	No. Telpon/Faksimili	:
	Email	:
2	Narahubung (Contact Person)	: AKBP Triyadi

	Jabatan	:	Kabag Bin Ops		
	No. Telpn	:	082167892001		
	No. HP	:			
	Email	:			
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	Melakukan pengamanan dan penyelamatan serta pengawalan korban dampak bencana.		
	Cakupan wilayah kerja	:	Provinsi Sumatera Utara		
B.	Peran Kebencanaan				
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	Memberikan pelayanan harkamtibmas dalam pengaturan, pengawalan serta patroli.		
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:	Melakukan koordinasi dan penyiapan personil serta peralatan satuan, dalam antisipasi dampak bencana.		
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	Pengamanan dalam evakuasi dan penyelamatan orang, barang dan dokumen.		
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)				
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	Menyiapkan perlengkapan dan personil satuan dalam antisipasi bencana.		
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Membuat Rencana Pengamanan Kontingensi (AMAN NUSA DUA) 2. Peningkatan kapasitas personil. 3. Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan TNI		
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan. 2. Penegakan hukum. 3. Pengamanan aset penghidupan korban bencana. 4. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat. 5. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat. 6. Pemulihan keamanan dan ketertiban. 7. Dukungan pemulihan infrastruktur penting.		
	Dalam status 'transisi darurat'	:	Pemulihan keamanan, ketertiban dan psikologis masyarakat		
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)				
C.	Sumberdaya Organisasi				
1	Sumberdaya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
	Administrasi dan Sekretariat	5 Personil	POLDA SUMUT	08126557712	
	Publikasi dan Informasi	42 Personil	POLDA SUMUT	0852 4454 7477	

	Perencanaan dan Pendataan	50 Personil	POLDA SUMUT			
	Operasi Tanggap Darurat	662 Personil	POLDA SUMUT	0813 1995	3732	DIT SAMAPTA
	Operasi Tanggap Darurat	200 Personil	POLDA SUMUT	0812 0001	6806	DITPOLAIRUD
	Operasi Tanggap Darurat	97 Personil	POLDA SUMUT	0853 1472	7020	BIDDOKES
	Operasi Tanggap Darurat	1.803 Personil	POLDA SUMUT	0852 1993	1523	SATBRIMOB
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Kendaraan Dinas Roda 4	9 Unit				
	Dump Truck	1 Unit	Baik	POLDA SUMUT		
	Kendaraan Khusus Water Treatment	1 Unit	Baik	POLDA SUMUT		
	Kendaraan Khusus Dapur Lapangan	1 Unit		SATBRIMOB		
	Perahu Karet LCR	2 Unit	Baik			
	Kayak	2 Unit	Baik			
	Life Jacket	29 Unit	Baik			
	Alat Deteksi Korban Vibroscope	2 Set	Baik			
	Alat eteksi Korban Vibraphone	2 Set	Baik			
	Gergaji Mesin Chain Saw	3 Unit	Baik			
	Ring Buoy	3 Buah	Baik			
	Senter Polarion	1 Unit	Baik			
	Rigid Inflatable Boat	1 Unit	Baik			
	Pelampung	18 Unit	Baik			
	Pelampung Otomatis	40 Unit	Baik			
	Lifebuoy	4 Unit	Baik			
	Peralatan Selam	8 Set	Baik			
	DVI	1 Unit	Baik			

	Pelampung Perorangan	86 Buah	Baik			
	Carbinder	36 Buah	Baik			
	Tai Karmantel Besar	1 Utas	Baik			
	Tali Karmantel Kecul	8 Utas	Baik			
	Figour X	25 Buah	Baik			
	Ransus SAR	1 Unit	Baik			
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	MTP (Makanan Siap Saji)	2 Kotak				DITSAMAPTA
	Tenda Serbaguna	107 Set				SATBRIMOB

5. BMKG Wilayah I - Medan

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	BMKG Wilayah I- Medan
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	Jl. Ngumban Surbakti No.15, Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara 20131
	No. Telpon/Faksimili	:	(061) 8222877
	Email	:	bbmkg1@bmkg.go.id.
2	Narahubung (Contact Person)	:	Utami Al Khaidiyais
	Jabatan	:	PMG Pertama
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	085361094490
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		

	Sebelum status bencana ditetapkan	:	
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Dukungan Prakiraan cuaca harian kajian Gempa bumi; 2. Peringatan Dini Cuaca yang bersifat anomali;
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Peringatan Dini Gempa bumi. 2. Diseminasi info Gempa bumi dan cuaca ekstrem 3. Pengukuran skala getaran tanah (intensitas) 4. Memberikan informasi waktu peluruhan Gempa bumi
	Dalam status 'transisi darurat'	:	Membantu rekomendasi wilayah berbahaya Gempa bumi
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)		

C. Sumberdaya Organisasi					
1 Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
	Administrasi dan Sekretariat	1 Personil			Edukasi mitigasi gempa bumi Dukungan data terhadap kegiatan kajian pengurangan risiko bencana gempa bumi. Pemantauan dan penyebarluasan peringatan bahaya yang terkait gempa bumi dan tsunami. Peringatan Dini Gempa bumi.
	Publikasi dan Informasi	8 Personil		0821 6804 3653	Peringatan Dini Gempa bumi. Desiminasi info gempa bumi dan cuaca ekstrim Pengukuran skala getaran tanah (intensitas) Memberikan informasi waktu peluruhan gempa bumi susulan (after shock)

2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

6. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

A. Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
	Unit/Divisi/Bagian	:
	Alamat	:
	No. Telpon/Faksimili	:
	Email	:
2	Narahubung (Contact Person)	: T. Rahmat Syahputra
	Jabatan	: Pranata Pend & Past
	No. Telpon	:
	No. HP	: 085270396005
	Email	:
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:
	Cakupan wilayah kerja	:
B. Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:
2	Peran dalam Pra- Bencana (normal)	:
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:
4 Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:

	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. <i>Stand by</i> 24 jam petugas <i>Rescuer On Calling</i> 2. Melakukan pengecekan alat utama <i>serviceable</i> dan <i>endurance</i> 75% s.d 100% 3. Menyiapkan peralatan SAR dan Posko SAR 4. Mengaktifkan fungsi intelijen, investigasi dan mengumpulkan semua informasi yang menjadi data pendukung; 5. Meningkatkan koordinasi tentang updating data Gempa bumi dari instansi pemerintah setempat			
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Membentuk organisasi SAR 2. Mendirikan tenda posko SAR 3. Menyusun perencanaan operasi SAR terkait apabila dalam gempa bumi dicurigai terdapat korban jiwa 4. Membuat jaring komunikasi SAR 5. Membriefing (menugaskan) Rescuer dan SRU (Search Rescue Unit) 6. Melaksanakan operasi SAR (Mencari, menolong, menyelamatkan dan evakuasi) 7. Melaksanakan <i>degriefing</i> (Pengakhiran tugas) dan evaluasi.			
	Dalam status 'transisi darurat'	:	1. Penghentian operasi SAR 2. Pemantauan <i>update</i> kondisi Gempa bumi secara berkala 3. Dokumentasi dan laporan untuk bahan evaluasi			
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)					
C.	Sumberdaya Organisasi					
1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
	Operasi Tanggap Darurat	53 Orang Personil	Tj Balai Asahan 10 personil D. Toba 8 Personil Unit POS SAR Madina 5 Personil		5 (Lima) Personil bersertifikat	
	Kesehatan	2 Personil			Perawat	
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Mobil Double Cabin	6 Unit	Baik	Sibolga/Madina		Sibolga 4 Unit Madina 2 Unit
	Truk Compartement	2 Unit	Baik	Medan		
	Truk Ampibi	1 Unit	Baik	Medan		

	Dapur Umum	1 Unit				Untuk TIM SAR
	Truk Dapur Umum	1 Unit				
	Medis Personal	1 Set				
	Kapal 40 m	1 Unit		Sibolga		
	Heli	2 Unit		Atang Sandjaja		
	Palsar Air	1 Set		Sibolga/Madina		
	Palsar Darat/Mountering	1 Set				
	Alat Ekstrikasi	1 Set		Sibolga		
	RIB	1 Unit		Sibolga		
	Perahu Karet	4 Unit		Sibolga/Madina		SIBOLGA 3 UNIT MADINA 1 UNIT
	Alkom	1 Set		Sibolga		
	Kantong Jenazah	100 Lembar				
	Chainsaw	4 Unit	Baik			2 Unit Chainsaw Uk.Besar dan 2 Unit Chainsaw uk. kecil
	Tenda Posko	1 Set	Baik dan Lengkap	Sibolga dan Madina		
	Humas/Center					
	HT	30 Unit				
	Drone	3 Unit				2 Unit Medan 1 Unit Madina
	Medis Person					
	Pos SAR	1 Unit		Sibolga		
	Pos Unit Siaga	1 Unit		Madina		
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Kawol Abdi
	Jabatan	:	F. Peneliti
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	08116550707
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra- Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Mengakordinir OPD dalam membuat suatu kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan untuk menangani mitigasi bencana 2. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan 3. Koordinasi antar OPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana 4. <i>Updating</i> data kependudukan, fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, serta infrastruktur 5. Perencanaan kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana 6. Akselerasi program dan kegiatan OPD

			7. Membuat inovasi daerah
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	3. Membantu BPBD dalam Penyusunan Rencana Operasi tanggap darurat 4. Mengkoordinir dalam menentukan kawasan rawan bencana
	Dalam status 'transisi darurat'	:	1. Membantu BPBD dalam Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2. Review perencanaan pembangunan 3. Pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Bappelitbang bersama tim TAPD melakukan koordinasi dengan bersinergi dalam menentukan tipe bencana seperti mendesak atau tidak sehingga pengguna anggaran lebih tepat,
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)		

C. Sumberdaya Organisasi

1 Sumberdaya Manusia

No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
	Jitupasna	5 Personil	Bappelitbang Provsu		

2 Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

3 Logistik (Bahan/Sediaan)

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Triwibowo
	Jabatan	:	Analisis

	No. Telpn	:	
	No. HP	:	082366636667
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Memberikan himbauan kepada Kabupaten/Kota dalam hal potensi bencana di daerah; 2. Memberikan Penyuluhan dan sosialisasi kepada Forum-forum dan Ormas di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota 3. Siaga tenaga pendukung dan SDM yang dapat membantu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat saat darurat; 4. Tersedianya fasilitas yang dapat untuk dimanfaatkan pada saat darurat
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Penanganan pencegahan konflik pada saat pemberian logistik di daerah yang mengalami bencana; 2. Meningkatkan kewaspadaan dini dalam menangani konflik sosial dimasyarakat; 3. Mengkoordinir forum-forum dan Ormas yang terdaftar dalam membantu penanganan saat darurat; 4. Memobilisasi tenaga dan SDM pada saat darurat 5. Mendukung dengan memberikan fasilitas dalam penanganan saat darurat
	Dalam status 'transisi darurat'	:	Memantau perkembangan agar tidak menjadi konflik sosial di masyarakat
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)		
C.	Sumberdaya Organisasi		
1	Sumberdaya Manusia		

No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
	Operasi Tanggap Darurat	10 personil	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu			
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Minibus	3 Unit		Medan		
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

9. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara

A. Profil Organisasi			
1	Nama Organisasi	:	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
		:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Regina Ria Yohana Siahaan
	Jabatan	:	Staff Program
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	081262966714
	Email	:	
		:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
		:	
B. Peran Kebencanaan			
1	Tugas-fungsi organisasi	:	

	(mandat)					
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:				
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:				
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)					
	Sebelum status bencana ditetapkan	:				
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Penyiapan personil 2. Penyiapan peralatan 3. Pengamanan logistik			
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Penyelenggaraan trantibum dan tranmas 2. Distribusi air bersih 3. Pendataan korban jiwa 4. Pengiriman logistik 5. Mengoptimalkan pengamanan aset -aset pemerintah 6. Pengamanan aset pemerintah 7. Penegakan Perda dan Perkada 8. Mendirikan Shelter/Huntara			
	Dalam status 'transisi darurat'	:	Pengamanan aset pemerintah dan masyarakat			
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)					
C.	Sumberdaya Organisasi					
1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
	Operasi Tanggap Darurat	200 Personil			Total seluruh Personil 325 Orang Dengan catatan : yang dapat diarahkan dalam penanganan bencana sebanyak 200 Personil	
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

	Truk Dalmas	6 Unit				
	Mobil Komando	1 Unit				
	Mobil Patroli	5 Unit				
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Gusar Tampubolon, ST
	Jabatan	:	Staff Bina Marga
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	081270379715
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra-Bencana	:	

	(normal)		
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Perencanaan Dan Pembangunan Instalasi Air Bersih (Persediaan Dan Distribusi) 2. Perencanaan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Yang Aman
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Mobilisasi alat berat untuk penanganan darurat Gempa bumi 2. Penyiapan tempat pengungsian 3. Pelaksanaan penyediaan aksesibilitas jalan menuju lokasi bencana Gempa bumi 4. Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah bencana Gempa bumi 5. Penyediaan tempat pengungsian 6. Membangun dan mengembalikan berfungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya 7. Pembangunan hunian sementara
	Dalam status 'transisi darurat'	:	14. Rehabilitasi jalan jembatan dan sumberdaya air 15. Membuat tabulasi penanganan terhadap bangunan yang terdampak Gempa bumi 16. Perbaikan lingkungan daerah bencana 17. Perbaikan sarana dan prasarana umum 18. Pembangunan hunian sementara 19. Perhitungan anggaran biaya rehab/rekonstruksi jalan dan jembatan 20. Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat, prasarana transportasi 21. Perbaikan hunian 22. Pembangunan hunian tetap 23. Pembangunan sarana pelayanan publik 24. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana 25. Relokasi rumah masyarakat terdampak bencana 26. Rehabilitasi rumah warga terdampak bencana
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)		
C.	Sumberdaya Organisasi		
1	Sumberdaya Manusia		
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil Kontak Keterangan

	Operasi Tanggap Darurat	20 Personil	Dinas PUPR			
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Mobil Double Cabin	1 Unit	Baik			
	Excavator Standart	3 Unit		Medan		
	Dump Truck	1 Unit				
	Perahu Karet	1 Unit				
	Goni/Sand Bag	5000 lembar				
	Speedboat	1 Unit				
	Drone	1 Unit				
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

11. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Henry N. Sitinjak
	Jabatan	:	Staff

	No. Telpn	:			
	No. HP	:	081263375925		
	Email	:			
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:			
	Cakupan wilayah kerja	:			
B.	Peran Kebencanaan				
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:			
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:			
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:			
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)				
	Sebelum status bencana ditetapkan	:			
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana dengan berkoordinasi dengan kabupaten/kota 2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan risiko bencana 3. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana 4. Merencanakan kebutuhan logistik dengan <i>buffer stock</i>		
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Memberikan bantuan logistik/membangun dapur umum; 2. Memfasilitasi <i>safe house</i> 3. Penyediaan air bersih 4. Membagi <i>kit wad</i> untuk bayi/anak/dewasa		
	Dalam status 'transisi darurat'	:	1. Mendata keluarga/korban yang masih tinggal di pengungsian 2. Menyiapkan logistik bagi yang masih tinggal 3. Memberikan terapi okupasi agar korban dapat hidup mandiri pasca bencana.		
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)				
C.	Sumberdaya Organisasi				
1	Sumberdaya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
	Operasi Tanggap Darurat	20 Personil	Dinas Sosial Provsu		20 Personil untuk Rescuer dan Dapur Umum

					200 Personil TAGANA	
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Duble Cabin	2 Unit				
	Minibus	1 Unit				
	Safe House	4 Unit				
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Rebecca Tampubolon
	Jabatan	:	Program
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	087769907520
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi	:	

	(mandat)		
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	
	Dalam status 'siaga darurat'	:	
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	
	Dalam status 'transisi darurat'	:	
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)		
C.	Sumberdaya Organisasi		
1	Sumberdaya Manusia		
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil
2	Peralatan		
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
3	Logistik (Bahan/Sediaan)		
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi

13. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
		:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Amran
	Jabatan	:	Kasi PPUPT BBI
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	081361567236
	Email	:	
		:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
		:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana 2. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana 3. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan 4. Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stakeholder yang bertanggungjawab atas penurunan ketersediaan pangan untuk mencegah kerawanan pangan 5. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan 6. Menyiapkan lumbung pangan
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	Pemenuhan kebutuhan pangan

	Dalam status 'transisi darurat'	:	Kajian daerah terpapar dalam aspek wilayah pertanian			
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)					
C.	Sumberdaya Organisasi					
1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
	Operasi Tanggap Darurat	10 Personil	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara			
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Mobil	3 Unit				
	Kendaraan Roda 2	14 Unit				
	Drone	1 Unit				
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

14. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

A. Profil Organisasi			
1	Nama Organisasi	:	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	M. Rivaldi
	Jabatan	:	Staff
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	081263100562
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
B. Peran Kebencanaan			
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra- Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Koordinasi ke dinas kesehatan kabupaten/kota; 2. Membuat RHA (Rapid Health Assessment) yang terdiri dari : - Ketersediaan tenaga medis; - Ketersediaan fasilitas kesehatan; - Jalur evakuasi medis/jalur rujukan. 3. Persiapan penyaluran logistik dibidang medis; 4. Persiapan mobilisasi <i>ambulance</i> 5. Persiapan SDM Medis 6. Persiapan aktivasi klaster kesehatan (Sub. klaster pelayanan kesehatan; Sub. klaster Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan; Sub. Klaster pelayanan gizi, sub klaster kesehatan jiwa, sub klaster kesehatan reproduksi dan sub klaster Disaster Victim Identification (DVI))
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Membuka posko kesehatan; 2. Mobilisasi petugas medis

			3. Penyaluran logistik kesehatan (alkes dan obat-obatan) 4. Aktivasi klaster kesehatan			
	Dalam status 'transisi darurat'	:	1. Pelayanan dan Pendampingan Psikososial 2. Sanitasi Lingkungan (Air bersih, jamban, dll) 3. Perbaikan pusat layanan kesehatan 4. Pembangunan pusat layanan Kesehatan 5. Peningkatan sarana dan prasaran kesehatan			
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)					
C.	Sumberdaya Organisasi					
1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
	Operasi Tanggap Darurat	16 Personil			1 (Satu) Tim terdiri dari 4 Orang; saat bencana diturunkan sebanyak 4 Tim	
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Double Cabin	2 Unit				
	Sepeda Motor (Lapangan)	2 Unit				
	Ambulance Jenazah	1 Unit				
	Ambulance Basic	4 Unit				
	Perahu Karet	2 Unit				
	Alkom	1 Set				
	Kantong Jenazah	50				
	Tenda Rumah Sakit Darurat Lapangan	19 Unit				Dengan berbagai ukuran
	Tenda RS Lapangan 4x6	2 Unit				
	Tenda RS Lapangan 4x12	6 Unit				

	Tenda RS Lapangan 6x12	11 Unit				
	Velbed	80 Set				
	HT	10 Unit				
	Oksigen Konsentrator	270 Unit				
	Masker Anak	24 koli				
	Masker Dewasa	3 koli				
	Masker KN95	990 Pcs				
	BPAP	10 Unit				
	Pulse Oxymetri	200 Buah				
	Emergency Kit	11 Set				
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

15. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

A. Profil Organisasi			
1	Nama Organisasi	:	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Jonathan Tobing
	Jabatan	:	JF TBP
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	082165636413
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
B. Peran Kebencanaan			
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:	

3	Kepentingan terkait kebencanaan	:				
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)					
	Sebelum status bencana ditetapkan	:				
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Pendataan bangunan 2. Persiapan kegiatan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah; 3. Persiapan pembuatan sumur bor untuk keperluan air bersih			
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	Fasilitasi Pendataan kerusakan bangunan;			
	Dalam status 'transisi darurat'	:	Rehabilitasi rumah			
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)					
C.	Sumberdaya Organisasi					
1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
1	Operasi Tanggap Darurat	5 Personil	Dinas PKP			
2	Teknisi	5 Personil	Dinas PKP			
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

16. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Utara

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Keke Ariantha Meliala
	Jabatan	:	
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	081294531649
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	
	Dalam status 'siaga darurat'	:	Penyusunan pedoman rencana keberlanjutan usaha (business continuity plan) pada industri dan UKM
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Berkoordinasi langsung dengan PLN berkaitan dengan energi Listrik 2. Penyediaan genset <i>mobile</i>
	Dalam status 'transisi darurat'	:	1. Pemulihan fungsi fasilitas ekonomi 2. Bantuan permodalan dan pendampingan terhadap UKM terdampak bencana 3. Bantuan Sarana Usaha
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)		

C.	Sumberdaya Organisasi					
1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
	Operasi Tanggap Darurat	20 Personil	Cabdis Padang Sidempuan, Dairi, Siantar, Labuhanbatu		Total Pegawai 204 Personil	
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Double Cabin	1 Unit	Baik	Medan		
	Minibus	1 Unit	Baik	Medan		
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

17. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

A.	Profil Organisasi	
1	Nama Organisasi	: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:
	Alamat	:
	No. Telpon/Faksimili	:
	Email	:
2	Narahubung (Contact Person)	: Dominikus Ein
	Jabatan	: Kasi Perkeretaapian
	No. Telpon	:
	No. HP	: 081265533660
	Email	:
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:
	Cakupan wilayah kerja	:
B.	Peran Kebencanaan	
1	Tugas-fungsi organisasi	:

	(mandat)					
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:				
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:				
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)					
	Sebelum status bencana ditetapkan	:				
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Penyiapan kendaraan / angkutan untuk evakuasi, distribusi logistik 2. Perbaikan rambu jalan dan rambu tempat tertentu' 3. Menyediakan sarana kendaraan			
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Pengerahan kendaraan / angkutan untuk evakuasi, distribusi logistik 2. Pembuatan rambu jalan dan rambu tempat tertentu 3. Melakukan Rekayasa Lalu Lintas 4. Koordinasi dengan dishub kab/ko di lokasi bencana untuk mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan: pelaksanaan rekayasa lalu lintas, peralatan rambu dan perlengkapan lainnya; 5. Penambahan personil sesuai kebutuhan			
	Dalam status 'transisi darurat'	:	1. Pemulihan pelayanan transportasi umum 2. Perbaikan pelayanan transportasi umum 3. Memberikan pengaturan trayek sementara 4. Penambahan bus pendukung			
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)					
C.	Sumberdaya Organisasi					
1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Mobile Traffic	2 Unit				
	Mobil Patroli/Double Cabin	2 Unit				
	Mobil Box	2 Unit				

	Speedboat	1 Unit				
	HT	10 unit				
	Drone	1 Unit				
	Rambu Portable	20 Pcs				
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

18. Dinas Pendidikan

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Aprianto
	Jabatan	:	Staf
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	081396428706
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra- Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Mengumpulkan Kepala sekolah dan cabang dinas sekabupaten/kota 2. Koordinasi dengan cabang dinas
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	3. Meliburkan aktivitas sekolah atau 4. Melaksanakan sekolah daring

	Dalam status 'transisi darurat'	:	Mendata gedung yang rusak (bangunan sekolah-sekolah)			
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)					
C.	Sumberdaya Organisasi					
1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
		150 Personil				
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Minibus	5 Unit				
	Pick Up	2 Unit				
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

19. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Ahmad Basri
	Jabatan	:	Ahli Kebijakan
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	082267185594
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi	:	

	(mandat)		
	Cakupan wilayah kerja	:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	
	Dalam status 'siaga darurat'	:	Mobilisasi Tim Peliput Data
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	4. Mengirim tenaga peliput untuk mendokumentasi kejadian yang sebenar-benarnya 5. Memberitakan dan menceritakan informasi yang didapat melalui televisi dan media sosial, media cetak 6. Melakukan dokumentasi berita bencana gempa bumi
	Dalam status 'transisi darurat'	:	Pengolahan data hasil dari liputan yang akan dipublikasikan melalui <i>press release</i> dan media massa
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)		
C.	Sumberdaya Organisasi		
1	Sumberdaya Manusia		
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil
1	Publikasi dan Informasi	8 Personil	
2	Peralatan		
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
	Kamera	2 Unit	
	Drone	2 Unit	
3	Logistik (Bahan/Sediaan)		
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi

20. Perum Bulog Divre Sumatera Utara

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Perum Bulog Divre Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Dadang Apriando
	Jabatan	:	Asman PODP
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	081377943677
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. <i>Suplly Chain stok</i> pangan pokok (beras) dan pangan pokok lain (non beras) 2. <i>Penyiagaan buffer stock</i>
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	Menyediakan beras dipintu gudang Perum Bulog yang ada diwilayah bencana
	Dalam status 'transisi darurat'	:	Penyaluran beras pasca bencana (sampai pintu gudang)
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)		
C.	Sumberdaya Organisasi		

1	Sumberdaya Manusia						
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan		
	Operasi Tanggap Darurat	20 Personil	Padang Sidimpuan				
	Operasi Tanggap Darurat	10 Personil	Sibolga				
	Operasi Tanggap Darurat	50 Personil	Prov Kanwil				
2	Peralatan						
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan	
3	Logistik (Bahan/Sediaan)						
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan	
	Stok Dinsos Reguler/ Pemerintah	14,5 Ton					
	Stok Beras	60 Ton					
	Cadangan beras/kabupaten						

21. PDAM Tirtanadi Sumut

A. Profil Organisasi					
1	Nama Organisasi	:	PDAM Tirtanadi Sumut		
	Unit/Divisi/Bagian	:			
	Alamat	:			
	No. Telpon/Faksimili	:			
	Email	:			
2	Narahubung (Contact Person)	:	Ade Juadi Hamzah		
	Jabatan	:	Kabid. P. Mutu		
	No. Telpon	:			
	No. HP	:	081262597323		
	Email	:			
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:			
	Cakupan wilayah kerja	:			
B. Peran Kebencanaan					
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:			
2	Peran dalam Pra- Bencana (normal)	:			
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:			
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)				
	Sebelum status bencana ditetapkan	:			
	Dalam status 'siaga darurat'	:			
	Dalam status 'tanggap darurat'	:			
	Dalam status 'transisi darurat'	:			
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)	:			
C. Sumberdaya Organisasi					
1	Sumberdaya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
	Teknisi	8 Personil	Cabang Tapsel		

2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

22. Bank Mandiri Regional I

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Bank Mandiri Regional I
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Endy. S
	Jabatan	:	NM-GA
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	081510332957
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra- Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana	:	

	ditetapkan		
	Dalam status 'siaga darurat'	:	1. Melakukan perencanaan dan monitoring pelaksanaan program krisis manajemen dan emergency respon. 2. Mengelola pelaporan aktivitas krisis manajemen dan emergency respon dan menyampaikan kepada ketua manajemen krisis; 3. Berkoordinasi dengan pihak stakeholder internal (cabang, area, region dan kantor pusat) terkait persiapan menghadapi bencana. 4. Berkoordinasi dengan pihak stakeholder eksternal (basarnas, KNKT, Polisi, Pemadam kebakaran dan pihak terkait lainnya) persiapan menghadapi bencana; 5. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas program awareness/training/testing/exercise
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	1. Berkoordinasi dengan pihak stakeholder internal (cabang, area, region dan kantor pusat) dalam penanggulangan krisis; 2. Melaksanakan koordinasi penanggulangan dan pengendalian yang terkait dengan keselamatan pegawai saat terjadi bencana. 3. Memberikan masukan kepada CMT (crisis managemet team) atas laporan hasil analisa, penilaian serta cakupan insiden yang terjadi di lokasi terdampak.
	Dalam status 'transisi darurat'	:	1. Menjaga keamanan aset Bank Mandiri; 2. Tindak lanjut pasca kritis dengan berkoordinasi dengan stakeholder internal (cabang, area, region dan kantor pusat) dan eksternal (basarnas, KNKT, Polisi, Pemadam kebakaran dan pihak terkait lainnya);
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)		

C.	Sumberdaya Organisasi					
1	Sumberdaya Manusia					
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan	
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Ambulance	1 Unit		Medan		
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

23. Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

A.	Profil Organisasi		
1	Nama Organisasi	:	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	
	No. Telpon/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (Contact Person)	:	Sri Aulia Sitepu
	Jabatan	:	JFT Analis PSP
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	081396494464
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
	Cakupan wilayah kerja	:	
B.	Peran Kebencanaan		
1	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	
2	Peran dalam Pra-Bencana (normal)	:	
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	
4	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	
	Dalam status 'siaga darurat'	:	
	Dalam status 'tanggap darurat'	:	
	Dalam status 'transisi darurat'	:	
5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)	:	
C.	Sumberdaya Organisasi		
1	Sumberdaya Manusia	:	

No.	Jenis Keahlian		Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
2	Peralatan					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
3	Logistik (Bahan/Sediaan)					
No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
APRILLA H. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MADYA
NIK. 19690421 199003 2 003